BANK BPD BALI

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

	Halaman/ ***Pages***	
Daftar Isi		***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Director's Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1- 2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4 - 5	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	6	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 97	*Notes to the Financial Statements*

***

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Yang bertanda tangan di bawah ini /*We, the undersigned :*

Nama/ *Name*	: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Alamat Kantor/ *Office address*	: Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
Jabatan/ *Position*	: Direktur Utama/*President Director*

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

State that :

1. *We are responsible for preparation and presentation of the Entity financial statements for the year ended December 31, 2024;*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in the financial statements is complete and correct;*
   b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

This statement letter is made truthfully.

Denpasar, 10 Januari/*January 10*, 2025

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*

METERAI TEMPEL
7213AMX088425676

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama/*President Director*

Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Operasional & TI/*Director Operational & IT*

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/*Ref.* : 00002/2.1127/AU.1/07/0060-4/1/I/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman yang diberikan mencerminkan 56% dari jumlah aset. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp139.150.563.768 (Catatan 10) dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai Sebesar Rp1.305.082.017.392 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 109").

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance *in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matter is provided in such context.*

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Description of the Key Audit Matter:

Allowance for impairment credit loss attributable to loans

As of December 31, 2024, the loans represent 56% of the total assets. The Bank provides an allowance for impairment losses on loans amounting to Rp139,150,563,768 (Note 10) with an accumulated allowance for impairment losses of Rp1,305,082,017,392 for the year ended December 31, 2024.

These allowance for impairment losses for loans measured at amortized cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under SFAS 109, "Financial Instruments" ("SFAS 109").

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan. Bank menghitung KKE dengan menggunakan beberapa parameter seperti *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto. Bank juga menggunakan asumsi dalam menentukan eksposure seperti arus kas masa depan yang diharapkan dan faktor makro ekonomi masa akan datang, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul di masa yang akan datang.

As disclosed in Note 3 to the financial statements, this assessment involves significant management judgment and estimation. The Bank calculates ECL using several parameters such as the probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate. The Bank also uses assumptions in determining exposures such as expected future cash flows and future macroeconomic factors, several weighted probability scenarios and ECL overlay adjustments made, given the economic uncertainties that arise in the future.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dijelaskan pada Catatan 2d dan 10 atas laporan keuangan.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses on loans are explained in Notes 2d and 10 to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

How our audit addressed this Key Audit Matter

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan, sebagai berikut:

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating allowance for impairment credit loss attributable to loans, include the following:

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Bank yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan rating internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pinjaman.

- *We have carried out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of Bank relevant internal controls for the identification of financial assets with significantly increased credit risk or objective evidence of impairment, through testing of internal rating determination controls and conducting sampling examinations of loan documents.*

- Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

- *We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

- Kami mengevaluasi keakuratan, kelengkapan data dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default, loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109. Kami juga mengevaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia.

- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan sampel.

- Kami juga menilai apakah pengungkapan laporan keuangan secara memadai dan Bank eksposur mencerminkan tepat terhadap risiko kredit.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain

Bank telah mengakui beban atas imbalan kerja sebesar Rp43.148.062.936 dan kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp14.981.663.737 pada tanggal 31 Desember 2024. Beban atas imbalan kerja dan asumsi yang mendasar penilaian kerugian aktuarial merupakan hal penting, dan juga subjektif, pertimbangan karena saldo tidak stabil dan mempengaruhi komponen ekuitas lainnya Bank. Manajemen telah memperoleh saran dari ahli aktuaria untuk menghitung aktuaria ini. Penilaian aktuaria ini sensitif terhadap asumsi utama seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kematian. Mengingat pertimbangan diperlukan oleh Bank dalam menetapkan asumsi ini, volatilitas dapat diakibatkan oleh perubahan asumsi dan signifikansi saldo terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi terperinci mengenai hal ini disajikan dalam Catatan 21 pada laporan keuangan.

- *We evaluate the accuracy, completeness of data and significant modeling assumptions used in the ECL model, including the determination of the probability of default, loss given default and exposure at default, which are applied to the requirements of SFAS 109. We also evaluate the reasonableness of Indonesia's macroeconomic forecasts.*

- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.*

- *We also assessed whether the financial statement disclosures adequately and appropriately reflect the Bank's exposures to credit risk.*

Description of the Key Audit Matter:

Valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss

Bank's has recognized the post employment benefit expense of Rp43,148,062,936 and other comprehensive loss amounting to Rp14,981,663,737 as of December 31, 2024. The employee benefit expense and assumptions that underpin the valuation of the actuarial loss are important, and also subjective, judgments as the balance is volatile and affects Bank's other equity component. Management has obtained advice from actuarial specialists in order to calculate this actuarial amount. These actuarial valuations are sensitive to key assumptions such as discount rates, inflation rates and mortality rates. Given the judgment required by Bank's in setting these assumptions, the volatility can result from changes in assumptions and the significance of the balances to the financial statements as a whole. Detailed information pertaining to this is presented in Note 21 to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

How our audit addressed this Key Audit Matter

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain, sebagai berikut:

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss, include the following:

Kami mengevaluasi penilalan Bank atas asumsi yang digunakan dalam penilaian kerugian aktuaria yang dilaporkan di penghasilan komprehensif lainnya termasuk informasi yang terkandung dalam laporan penilaian aktuaria untuk setiap program.

We evaluated Bank's assessment of the assumptions used in the valuation of actuarial loss reported in other comprehensive loss including the information contained within the actuarial valuation reports for each plan.

Kami mereviu ruang lingkup penilaian yang dilakukan dan kami mengevaluasi keahlian dan independensi aktuaris Bank. Ini termasuk penilaian dan penyelidikan untuk asumsi utama yang diterapkan, *benchmarking*, tingkat diskonto, inflasi, dan tingkat kematian, terhadap data eksternal jika tersedia dan membentuk ekspektasi independen kami sendiri berdasarkan pengetahuan kami tentang praktik pasar lokal.

We reviewed the scope of valuations performed and we evaluated the expertise and independence of Bank's actuary. This included assessment and inquiry for the key assumptions applied, benchmarking, discount rates, inflation, and mortality rates, against external data where available and forming our own independent expectations based on our knowledge of local market practices.

Kami juga menilai kecukupan dan kelengkapan pengungkapan imbalan kerja terkait dalam laporan keuangan.

We also assessed the adequacy and completeness of the related post employment benefit disclosures in the financial statements.

Informasi lain

Other information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statement and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsitensian material dengan laporan keuanganatau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern.*

Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

00002

Welly Adrianto, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / *Public Accountant License Number:* AP. 0060

Jakarta, 10 Januari 2025/*January 10, 2025*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
ASET				***ASSETS***
Kas	4	580.735.597.835	569.570.584.235	*Cash*
Giro Pada Bank Indonesia	5	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro Pada Bank Lain	6			*Current Accounts with Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		45.119.172.455	70.100.633.360	*Third Parties -*
Jumlah Giro Pada Bank Lain		45.119.172.455	70.100.633.360	*Total Current Accounts with Other Banks*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(32.035.380)	(19.246.250)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		45.087.137.075	70.081.387.110	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7			*Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	*Third Parties -*
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lainnya		3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	*Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.778.693.256)	(2.062.877.735)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	
Efek - Efek	8			*Securities*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	*Third Parties -*
Jumlah Efek - Efek		9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	*Total Securities*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		-	(28.500.000)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	
Efek - Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9			*Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		--	3.965.877.652.040	*Third Parties -*
Total Efek - Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		--	3.965.877.652.040	*Total Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		--	--	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		--	3.965.877.652.040	
Pinjaman yang Diberikan	10			*Loans*
- Pihak Berelasi		32.221.984.154	27.441.865.094	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		22.797.947.429.290	21.123.139.140.393	*Third Parties -*
Total Pinjaman yang Diberikan		22.830.169.413.444	21.150.581.005.487	*Total Loans*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)	*Less: Allowance for Impairment Loss*
		21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	
Aset Tetap	11	388.131.366.573	354.229.899.644	*Fixed Assets*
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(258.497.766.049)	(230.787.039.690)	*Less: Accumulated Depreciation*
		129.633.600.524	123.442.859.954	
Aset Takberwujud	12	51.760.428.880	47.769.374.582	*Intangible Assets*
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(44.300.181.485)	(39.561.514.110)	*Less: Accumulated Amortization*
		7.460.247.395	8.207.860.472	
Aset Hak Guna	13	82.819.125.696	75.524.319.101	*Right-of-Use Assets*
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(38.048.572.569)	(34.506.384.099)	*Less: Accumulated Depreciation*
		44.770.553.127	41.017.935.002	
Aset Lain - lain	14	229.637.221.111	213.233.323.524	*Other Assets*
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	19d	152.158.565.329	124.596.517.717	*Deferred Tax Assets - Net*
TOTAL ASET		**38.312.681.637.703**	**34.310.712.361.564**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Segera	15	74.679.631.081	103.394.989.302	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan dari Nasabah	16a			*Deposits from Customers*
- Pihak Berelasi		590.707.387.143	162.498.501.657	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		31.577.083.821.666	27.785.918.801.211	*Third Parties -*
		32.167.791.208.809	27.948.417.302.868	
Simpanan dari Bank Lain	17a			*Deposits from Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties -*
- Pihak Ketiga		661.691.987.042	1.550.582.212.168	*Third Parties -*
		661.691.987.042	1.550.582.212.168	
Pinjaman yang Diterima	18	24.433.647.846	66.730.442.083	*Borrowings*
Utang Pajak	19a	69.106.199.029	117.286.572.343	*Taxes Payable*
Beban yang Masih Harus Dibayar	20	22.595.470.132	20.024.705.770	*Accrued Expense*
Liabilitas Imbalan Kerja	21	265.776.646.490	232.261.218.444	*Post-Employment Benefit Obligation*
Liabilitas Sewa	22	15.056.560.942	13.576.233.846	*Lease Liabilities*
Liabilitas Lain - lain	23	351.353.237.757	268.269.989.232	*Other Liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**33.652.484.589.128**	**30.320.543.666.056**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham				*Share Capital*
nilai nominal Rp1.000.000				*Rp1,000,000 (full amount)*
(nilai penuh) per saham				*par value per share*
Modal Dasar :				*Authorized Capital :*
4.000.000 saham				*4,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:	24			*Issued and fully paid capital:*
- 2024 : 2.407.177 saham		2.407.177.000.000	--	*2024 : 2,407,177 shares -*
- 2023 : 2.050.257 saham		--	2.050.257.000.000	*2023 : 2,050,257 shares -*
Tambahan Modal Disetor	25	1.881.882	2.340.338	*Additional Paid-In Capital*
Pengukuran Kembali atas Imbalan Pasca Kerja		(70.904.900.061)	(59.219.202.346)	*Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligation*
Saldo laba				*Retained Earnings*
- Telah Ditentukan Penggunaannya		1.445.457.325.528	1.260.900.248.199	*Appropriated -*
- Belum Ditentukan Penggunaannya		878.465.741.226	738.228.309.317	*Unappropriated -*
TOTAL EKUITAS		**4.660.197.048.575**	**3.990.168.695.508**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**38.312.681.637.703**	**34.310.712.361.564**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
PENDAPATAN BUNGA				***INTEREST INCOME***
Pendapatan Bunga	27	3.347.855.439.821	3.100.965.514.184	*Interest Income*
Beban Bunga	28	(970.120.006.452)	(859.296.954.147)	*Interest Expense*
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih		**2.377.735.433.369**	**2.241.668.560.037**	***Net Interest Income***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan Operasional	29	215.885.835.798	171.571.821.970	*Operating Income*
Provisi dan Komisi	29	9.767.737.892	8.763.715.438	*Provision and Commission*
Lainnya	29	1.085.572.298	988.475.730	*Others*
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		**226.739.145.988**	**181.324.013.138**	***Total Other Operating Income***
PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				***RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES***
Aset Keuangan	30	(148.944.965.537)	(338.266.108.566)	*Financial Assets*
Transaksi Rekening Administratif	23	3.029.469.404	3.632.610.096	*Transactions of Administrative Accounts*
Jumlah Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		**(145.915.496.133)**	**(334.633.498.470)**	***Total Provision for Impairment Losses***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan Tunjangan Karyawan	31	(857.370.759.001)	(648.632.271.633)	*Salaries and Employee Benefits*
Umum dan Administrasi	32	(372.758.501.000)	(341.057.663.712)	*General and Administrative*
Beban Modifikasi		(44.540.916.125)	(25.032.450.991)	*Modification Expenses*
Jumlah Beban Operasional Lainnya		**(1.274.670.176.126)**	**(1.014.722.386.336)**	***Total Other Operating Expenses***
LABA OPERASIONAL		**1.183.888.907.098**	**1.073.636.688.369**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)***
Pendapatan Non Operasional	33	55.191.460.239	5.323.370.621	*Non-Operating Income*
Beban Non Operasional	33	(41.081.119.538)	(10.803.762.142)	*Non-Operating Expenses*
Jumlah Pendapatan Non Operasional		**14.110.340.701**	**(5.480.391.521)**	***Total Non Operating Income***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**1.197.999.247.799**	**1.068.156.296.848**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN (BEBAN)				***INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT***
Kini	19b	(343.799.588.163)	(346.242.424.844)	*Current Tax*
Tangguhan	19d	24.266.081.590	16.314.437.313	*Deferred Tax*
Jumlah Beban Pajak		**(319.533.506.573)**	**(329.927.987.531)**	***Total Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN		**878.465.741.226**	**738.228.309.317**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				***Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss***
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	21	(14.981.663.737)	1.725.689.570	*Remeasurement of Post - Employement Benefit Obligation*
- Pajak Penghasilan Terkait	19d	3.295.966.022	(379.651.705)	*Related Income Tax -*
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain		**(11.685.697.715)**	**1.346.037.865**	***Total Other Comprehensive Income***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**866.780.043.511**	**739.574.347.182**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM	45	411.318	366.234	*EARNINGS PER SHARE*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

					Saldo Laba / *Retained Earnings*			
					Telah Ditentukan penggunaaannya/ *Appropriated*			
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid-up Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit Obligation-After Tax*	Cadangan Umum/ *General Reserve*	Cadangan Tujuan/ *Specific Reserve*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*
Saldo 1 Januari 2024 / *Balance as of January 1, 2024*		**2.050.257.000.000**	**2.340.338**	**(59.219.202.346)**	**1.260.900.248.199**	**--**	**738.228.309.317**	**3.990.168.695.508**
Laba tahun berjalan/ *Profit for the year*		--	--	--	--	--	878.465.741.226	878.465.741.226
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit obligation*	21	--	--	(11.685.697.715)	--	--	--	(11.685.697.715)
Setoran modal/ *Issuance of share capital*	25	356.920.000.000	(458.456)	--	--	--	--	356.919.541.544
Pembagian laba/ *Distribution of net income :*								
Cadangan umum/ *General reserve*	26	--	--	--	184.557.077.329	--	(184.557.077.329)	--
Dividen / *Dividends*	26	--	--	--	--	--	(553.671.231.988)	(553.671.231.988)
Saldo 31 Desember 2024 / *Balance as of December 31, 2024*		**2.407.177.000.000**	**1.881.882**	**(70.904.900.061)**	**1.445.457.325.528**	**--**	**878.465.741.226**	**4.660.197.048.575**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

					Saldo Laba / *Retained Earnings*			
					Telah Ditentukan penggunaaannya/ *Appropriated*			
	Catatan/ *Notes*	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid-up Capital***	**Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital***	**Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit Obligation-After Tax***	**Cadangan Umum/ *General Reserve***	**Cadangan Tujuan/ *Specific Reserve***	**Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated***	**Jumlah Ekuitas/ *Total Equity***
Saldo 1 Januari 2023 / *Balance as of January 1, 2023*		**1.938.200.000.000**	**2.340.338**	**(60.565.240.211)**	**1.110.021.178.825**	**-**	**603.516.277.496**	**3.591.174.556.448**
Laba tahun berjalan/ *Profit for the year*		--	--	--	--	--	738.228.309.317	738.228.309.317
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit obligation*	21	--	--	1.346.037.865	--	--	--	1.346.037.865
Setoran modal/ *Issuance of share capital*	25	112.057.000.000	--	--	--	--	--	112.057.000.000
Pembagian laba/ *Distribution of net income :*								
Cadangan umum/ *General reserve*	26	--	--	--	150.879.069.374	--	(150.879.069.374)	--
Dividen / *Dividends*	26	--	--	--	--	--	(452.637.208.122)	(452.637.208.122)
Saldo 31 Desember 2023/ *Balance as of December 31, 2023*		**2.050.257.000.000**	**2.340.338**	**(59.219.202.346)**	**1.260.900.248.199**	**--**	**738.228.309.317**	**3.990.168.695.508**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi		3.325.426.375.190	3.100.642.282.763	*Receipts from Interest Income, Fee and Commissions*
Pembayaran Bunga		(967.549.242.090)	(861.473.298.751)	*Payments of Interest Expense*
Pembayaran Beban Tenaga Kerja		(735.821.419.561)	(785.985.321.725)	*Payments of Employee Expense*
Pembayaran Beban Umum dan Adminitrasi		(335.377.771.154)	(297.711.053.041)	*Payments of General and Administrative Expense*
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya		224.163.788.099	177.340.033.780	*Receipts from Other Operating Income and Other Non-Operating Income*
Pembayaran Beban Non Operasional		(41.081.119.538)	(10.803.762.141)	*Non Operating Expense Paid*
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada Aset dan Liabilitas Operasi		**1.469.760.610.946**	**1.322.008.880.885**	***Cash Flows Before Changes to Operating Assets and Liabilities***
(Kenaikan) / Penurunan dalam Aset Operasi				*(Increase) / Decrease In Operating Assets*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	28.800.004.297	(9.105.092.751)	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9	3.965.877.652.040	1.289.300.188.115	*Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement*
Pinjaman yang Diberikan	10	(1.797.174.407.778)	(1.309.647.005.243)	*Loans*
Aset Lain-lain	14	6.501.624.333	(19.686.608.175)	*Other Assets*
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Operasi				*(Increase) / Decrease In Operating Liabilities*
Liabilitas Segera	15	(28.715.358.221)	(93.463.577.986)	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan Nasabah	16	4.219.373.905.941	1.495.420.720.665	*Deposits from Customers*
Simpanan dari Bank Lain	17	(888.890.225.126)	436.684.639.956	*Deposits from Other Banks*
Liabilitas Lain-lain	23	(20.547.913.112)	169.042.729.268	*Other Liabilities*
Utang Pajak	19	(51.713.374.301)	65.698.690.769	*Taxes Payable*
Pembayaran Pajak Penghasilan	19	(340.266.587.176)	(345.636.302.720)	*Payment of Income Tax*
Penerimaan Pengembalian Pajak	19	57.677.097.293	-	*Tax Refund*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		6.620.683.029.136	3.000.617.262.783	*Net Cash Provided by Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian Efek-efek	8	(5.404.041.068.047)	(1.599.124.895.834)	*Acquisition from Marketable Securities*
Penyertaan Saham		-	799.291.000	*Proceeds from Investment in Shares*
Pembelian Aset Tetap	11	(35.677.351.024)	(49.430.211.986)	*Acquisitions of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	11	-	246.918.650	*Proceeds from Sale of Fixed Assests*
Pembelian Aset Takberwujud	12	(3.991.054.298)	(6.136.598.840)	*Acquisitions of Intangible Assests*
Pembayaran Aset Hak Guna		(5.814.479.499)	(17.721.922.512)	*Payment of Right-of-Use Assets*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(5.449.523.952.868)	(1.671.367.419.522)	*Net Cash Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan Setoran Modal	24,25	356.919.541.544	112.057.000.000	*Proceeds from Issuance of Share Capital*
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	18	-	10.000.000.000	*Receipt of Borrowings*
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	18	(42.296.794.237)	(485.998.049)	*Payments of Borrowings*
Pembayaran Dividen	26	(553.671.231.989)	(452.637.208.122)	*Dividend Paid*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(239.048.484.682)	(331.066.206.171)	*Net Cash Used in Financing Activities*
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		**932.110.591.586**	**998.183.637.090**	***Net Increase Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		**5.533.556.919.523**	**4.535.373.282.433**	***Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year***
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		**6.465.667.511.109**	**5.533.556.919.523**	***Cash and Cash Equivalents at End of the Year***
Komponen Kas dan Setara Kas:				***Components of Cash and Cash Equivalents:***
Kas	4	580.735.597.835	569.570.584.235	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	6	45.119.172.455	70.100.633.360	*Current Account with Other Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Jangka Waktu Jatuh Tempo Tiga Bulan atau Kurang Sejak Tanggal Perolehan	7	3.144.937.358.091	2.500.010.308.037	*Placement with Bank Indonesia and Other Banks - Maturing within Three Months Since Aquisition Date*
Jumlah Kas dan Setara Kas		**6.465.667.511.109**	**5.533.556.919.523**	***Total Cash and Cash Equivalents***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank") didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat No. 6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Setelah itu diterbitkan ijin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No.Kep.110/025/65 pada tanggal 2 November 1965.

Bank kembali mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 No. 6 Seri D No. 3).

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No. 6004.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.6/26/KEP.DGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, telah disetujui pengalihan izin usaha Bank dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tanggal 11 November 2004, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Umum Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan akta No. 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., mengenai penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 78 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0228472 tanggal 27 Desember 2024.

Pemegang saham pengendali dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa (Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Valuta Asing dan /atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri) yang kegiatan usaha utamanya adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (The "Bank") was established based on deed No.131 dated June 5, 1962 by Ida Bagus Ketut Rurus, as Secretary of the Government of Bali and Notary.

In relation to the amendment of Law No. 13 year 1962 regarding the Basic regulation of the Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No. 59, Supplement to State Gazette No. 2490), the Provincial Government of Bali set a change of legal status of the Bank of Limited Liability Company into Region through Letter No. 6/DPRDGR dated February 9, 1965 and approved by the Ministry of Internal Affairs in its decision No. Des.9/21/28-128 dated July 14, 1965. After that, a business license was issued for Bank BPD Bali through the Decree of the Minister of Central Bank Affairs/Governor of Bank Negara Indonesia No. Kep.110/025/65 on November 2, 1965.

The Bank has changed its legal form from Regional Companies into a Limited Liability Company (PT). Changes in legal entities established in the Provincial Government of Bali Regulation No.2 year 2002 regarding Changes Legal Entity BPD Bali from "PD" to Limited Liability Company (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") which was promulgated on March 5, 2002 (Bali Provincial Gazette 2002 No. 6 Series D No. 3).

Changes to the Bank's legal form into a Limited Liability Company as stated in notarial deed No. 7 dated May 12, 2004, made before Notary Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., which has been approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia by Decree No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 dated May 21, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 22, 2004, Supplement No. 6004.

Through Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No.6/26/KEP.DGS/2004 dated July 19, 2004 regarding Corporate Entity Change from "Perusahaan Daerah" Bank Pembangunan Daerah to "Perseroan Terbatas" Bank Pembangunan Daerah Bali, has approved the transfer of the business license of Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali to Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

On November 11, 2004, the Bank has obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank in accordance with the Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 on the appointment of the Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali as a Foreign Exchange Bank.

The Bank's Articles of Association have amended several times, among other, by deed No. 25 dated August 8, 2008, Notary I Made Widiada, S.H., regarding the adjustment and amendment Bank's Articles by Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies.

The latest amendment to the Articles of Association is in accordance with Deed Number 78 dated December 24, 2024 concerning Statement of Meeting Decisions of PT Bank Pembangunan Daerah Bali which was made by I Made Widiada, Bachelor of Laws, Notary in Denpasar, and has been recorded in the Legal Entity Administration System Number: AHU-AH. 01.03-0228472 dated December 27, 2024.

The controlling shareholder of the Bank is Provincial Government of Bali and Badung Regency Goverments.

b. Purpose and Objectives

Based on Article 3 of the Bank's Articles of Association, the purpose and objective of the Bank is to do business in the banking sector. In order to achieve the aforementioned aims and objectives, the Company may carry out the business activities of Regional Government Foreign Exchange Commercial Banks (This group includes the activities of banks whose capital is wholly or substantially owned by the Regional Government as stated in the applicable laws and regulations and obtain a letter of appointment of Bank Indonesia to be able to conducting banking business activities in foreign currencies and/or conducting banking transactions with foreign parties) whose main business activities are as follows:

a. To collect third-party funds in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings and/or other similar forms;

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Maksud dan Tujuan (Lanjutan)

b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu berupa surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana, meminjam dana dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan/atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
k. Membeli agunan, baik sebagian maupun seluruhnya melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
m. Melakukan kegiatan dalam perdagangan Valuta Asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya

Bank berkantor pusat di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. Bank mengklasifikasikan jaringan kantor menjadi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu Bank memiliki Terminal Perbankan Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ATM Setor Tarik Tunai (CRM) dan Sistem Pembayaran Elektronik (EDC) serta kegiatan/aktivitas lainnya. Jumlah jaringan kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan kegiatan/aktivitas lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023	
Kantor Pusat	1	1	*Main Office*
Kantor Cabang Utama	1	1	*Main Branch Office*
Kantor Cabang	13	13	*Branch Office*
Kantor Cabang Pembantu	88	88	*Sub Branch Office*
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	215	212	*Automated Teller Machines*
ATM Setor Tarik Tunai (CRM)	26	26	*Cash Recycling Machines*
Sistem Pembayaran Elektronik (EDC)	103	153	*Electronic Data Captures*
Kegiatan/Aktivitas Lainnya	57	59	*Other Events/ Activities*
	504	**553**	

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, jaringan kantor Bank terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, dan Kantor di Luar Negeri. Untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE).

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Purpose and Objectives (Continued)

b. To grant loans;
c. Issuing a letter of acknowledgment of debt;
d. Buying, selling or guaranteeing at risk or interest and at the behest of its customers, namely in the form of bills of exchange including those accepted by the bank whose validity period is no longer than the custom in trading of said letters, debt acknowledgments and other trade papers whose validity period is not longer than is customary in trading such documents, state treasury papers and government guarantee letters, Bank Indonesia Certificates (SBI), Bonds, trade papers with a maturity in accordance with applicable laws and regulations and other securities in accordance with laws and regulations applicable;
e. Transferring money both for its own interests and for the benefit of customers;
f. To put placement, obtain borrowings from/or provide financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, sight letter of credit (L/C), cheque or other facilities;
g. Receive payments from bills on securities and perform calculations with/or between third parties;
h. Provide a place for storage of goods and securities;
i. Carry out custodial activities for the benefit of other parties based on a contract;
j. Placing funds from customers to other customers in the form of securities listed on the stock exchange
k. Purchasing collateral, either in part or in whole through an auction or in other ways in the event that the debtor does not fulfill his obligations to the bank, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;
l. Performing factoring activities, credit card business and trustee activities;
m. Carrying out activities in Foreign Exchange trading and/or as a Foreign Exchange Bank by complying with the provisions of the applicable laws and regulations;
n. To conduct invesment activities through share participation in banks or other financial institution in accordance with the prevailing regulation;
o. Act as the founder and administrator of the Pension Fund in accordance with the applicable laws and regulations;
p. Carry out other activities commonly carried out by commercial banks as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations.

c. Office Network, Electronic Banking Terminal (TPE), and other events/activities.

The Bank's head office is located at Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. The Bank classifies the office network into Head Office, Main Branch Office, Branch Offices, and Sub-Branch Offices. In addition, the Bank has an Electronic Banking Terminal (TPE) in the form of Automated Teller Machines (ATM), ATM Cash Withdrawals (CRM) and Electronic Payment System (EDC) as well as other events/activities. The number of office networks, Electronic Banking Terminals (TPE) and other events/activities as of December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number POJK No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks, the Bank's office network consists of the Head Office, Regional Offices, Branch Offices, Sub-Branch Offices, Functional Offices, and Overseas Offices. To expand services to customers, the Bank can provide Electronic Banking Terminal (TPE).

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya (Lanjutan)

Sesuai pengumuman OJK tanggal 27 April 2022 melalui aplikasi APOLO-Jaringan Kantor, untuk *Payment Point* dan Kas Keliling tidak dilaporkan sebagai jaringan kantor Bank namun dicatatkan sebagai kegiatan/aktivitas lainnya karena merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Bank dan berada di bawah supervisi Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu.

d. Organisasi dan Struktur Manajemen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham No. 47 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Februari 2023 dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., tanggal 12 Mei 2023 dan Akta No. 38 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H. tanggal 22 November 2023 serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0607/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 26 November 2023 tentang Struktur Keanggotaan Komite, serta Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., tanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2022 tanggal 1 November 2022, Pada 31 Desember 2024 dan 2023 susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite adalah sebagai berikut :

1. GENERAL (CONTINUED)

c. Office Network, Electronic Banking Terminal (TPE), and other events/activities (Continued)

In accordance with the OJK announcement dated April 27, 2022 through the APOLO-Office Network application, Payment Points and Mobile Cash are not reported as the Bank's office network but are listed as other events/activities because they are part of an organizational unit within the Bank and are under the supervision of a Branch Office or Office, Sub Branch.

d. Organizational and Management Structure

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders No. 47 concerning Minutes of Shareholders' Meeting dated February 22, 2023 drawn up by Notary I Made Widiada, S.H., Deed of General Meeting of Shareholders No. 25 concerning Statement of Meeting Resolutions made by Notary I Made Widiada, S.H., dated May 12, 2023 and Deed No. 38 concerning Statement of Meeting Decisions made by Notary I Made Widiada, S.H. dated November 22, 2023 and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number: 0607/KEP/DIR/SDM/2023 dated November 26, 2023 concerning Committee Membership Structure, and the deed of extraordinary general meeting of shareholder No. 21, the minutes of which were also prepared by Notary I Made Widiada, S.H., dated May 13, 2019 and Decree of the Board of Commissioners No. 001/KEP/DK/BPD/2022 dated November 1, 2022, as of December 31, 2024 and 2023 the composition of the Board of Commissioners, Directors and Committee Members is as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Ir.Gede Arimbawa	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	I Nyoman Suparsa Widana	*Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	*Non Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	I Gede Darmawa	*Non Independent Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	*President Director*
Direktur Operasional & TI	Ida Bagus Gede Setia Yasa.	*Director of Operational & IT*
Direktur Bisnis	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	*Director of Business*
Direktur Kredit	Made Lestara Widiatmika.	*Director of Loan*
Direktur Kepatuhan	Drs. I Wayan Sutela Negara.	*Director of Compliance*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Chairman*
Anggota	Ir.Gede Arimbawa	*Member*
Anggota	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Member*
Anggota	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	*Member*
Anggota	Drs. Ec. I Wayan Sugiarta, MM	*Member*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Ir.Gede Arimbawa.	*Chairman*
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	*Member*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	*Member*
Anggota	I Nengah Dana Wirawan, S.E.	*Member*
Anggota	I Made Artawa, SE	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Chairman*
Anggota	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Member*
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, SH., MH	*Member*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	*Member*
Anggota	Ir Gede Arimbawa	*Member*
Anggota	Ida Ayu Putri Yuniawati, S.E	*Member*
Anggota	I Made Artawa, SE	*Member*

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Ir.Gede Arimbawa	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	I Nyoman Suparsa Widana	*Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	*Non Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	I Gede Darmawa	*Non Independent Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	*President Director*
Direktur Operasional & TI	Ida Bagus Gede Setia Yasa.	*Director of Operational & IT*
Direktur Bisnis	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	*Director of Business*
Direktur Kredit	Made Lestara Widiatmika.	*Director of Loan*
Direktur Kepatuhan	Drs. I Wayan Sutela Negara.	*Director of Compliance*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Chairman*
Anggota	Ir.Gede Arimbawa	*Member*
Anggota	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Member*
Anggota	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	*Member*
Anggota	Drs. Ec. I Wayan Sugiarta, MM	*Member*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Ir.Gede Arimbawa.	*Chairman*
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	*Member*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	*Member*
Anggota	I Nengah Dana Wirawan, S.E.	*Member*
Anggota	I Made Artawa, SE	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Chairman*
Anggota	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Member*
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, SH., MH	*Member*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	*Member*
Anggota	Ir Gede Arimbawa	*Member*
Anggota	A. A. Istri Eka Parwita Dewi, S.E., M.M.	*Member*
Anggota	GDE Winata, S.E., MM	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2024, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Anti *Fraud* Bank adalah I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Anti *Fraud* Bank adalah I.A.Sri Wahyuni Darmawati, S.E., M.M., QIA. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 0147/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 29 Maret 2023.

As of December 31, 2024, the Head of the Bank's Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit was I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. in accordance with Directors' Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 dated March 22, 2024 and on December 31, 2023, the Head of the Bank's Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit is I.A.Sri Wahyuni Darmawati, S.E., M.M., QIA. in accordance with Directors' Decree No. 0147/KEP/DIR/SDM/2023 dated March 29, 2023.

Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 0338/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 27 Juli 2018 adalah I.B.Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M.

The Corporate Secretary as of December 31 2024 based on the Decision Letter Board of Directors No.0267/KEP/DIR/SDM/2023 dated June 27, 2023 and on the Decision Letter Board of Directors No.0338/KEP/DIR/SDM/2018 dated July 27, 2018 is I.B.Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M.

Jumlah pegawai Bank adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The number of employees of the Bank are as follows (unaudited):

	Tetap/ ***Permanent***	**Tidak Tetap/** ***Non-Permanent***	**Jumlah/** ***Total***	
2024	1.264	34	1.298	*2024*
2023	1.210	117	1.327	*2023*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1), "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”).

Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS *Accounting Standards* (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS *Accounting Standards* (diawali dengan angka 3 dan 4). Perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Efektif tanggal 1 Januari 2024, Bank menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Penerapan standar baru dan amandemen yang relevan dengan operasi Bank adalah sebagai berikut:

- PSAK 116 : Sewa (sebelumnya PSAK 73) - Sewa jual dan sewa-balik;
- PSAK 201 : Penyajian Laporan Keuangan (sebelumnya PSAK 1) - Liabilitas Tidak Lancar dengan Persyaratan;
- PSAK 207 : Laporan arus kas (sebelumnya PSAK 2) dan PSAK 107, Instrumen keuangan: Pengungkapan (sebelumnya PSAK 60) - Pengaturan keuangan pemasok.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies that are consistently applied in the preparation of the financial statements are as follows:

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS") which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Instituteof Accountants (DSAK-IAI).

The Financial statements of the Bank have also been prepared and presented in accordance with the Banking Accounting Guidebook (BPAK) in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 34/SEOJK.03/2021 concerning the Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks.

b. Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statement". The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, as long as they are not pledged as a collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by the Financial Acconting Standards Board of The Indonesia Institute of Accountans (“DSAK-IAI”).

The change is to distinguish the numbering of SFAS and IFAS that refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 1 and 2) and do not refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 3 and 4). This change is effective on January 1, 2024.

Effective January 1, 2024, the Bank adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Bank’s accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Bank’s operations are follows:

- *SFAS 116 : Leases (previously SFAS 73) – Leases on sales and leaseback;*
- *SFAS 201 : Presentation of financial statements (previously SFAS 1) - Non current Liabilities with Covenants;*
- *SFAS 207 : Cash flow statements (previously SFAS 2) and SFAS 107, Financial instrument: Disclosure (previously SFAS 60) – Supplier finance arrangements.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

PSAK 116 : Sewa (sebelumnya PSAK 73) - Sewa jual dan sewa-balik;

DSAK IAI mengeluarkan keputusan agenda oleh Komite Interpretasi IFRS yang membahas bagaimana penjual-penyewa harus mengukur aset hak guna usaha yang timbul dari sewa-balik dan, sebagai akibatnya, bagaimana menentukan keuntungan atau kerugian dari transaksi jual dan sewa-balik di mana transaksi tersebut dikualifikasikan sebagai 'penjualan' menurut PSAK 115 dan pembayaran sewa termasuk pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tingkat suku bunga. Meskipun keputusan agenda tersebut memberikan pendekatan untuk pengukuran awal aset hak guna usaha dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa-balik, keputusan tersebut tidak membahas bagaimana liabilitas sewa akan diukur selanjutnya.

Amandemen PSAK 116 yang diterbitkan pada bulan November 2022, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. PSAK 116 sekarang menetapkan bahwa, dalam mengukur liabilitas sewa selanjutnya, lessee menentukan 'pembayaran sewa' dan pembayaran sewa yang direvisi' dengan cara yang tidak mengakibatkan lessee mengakui jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak pakai yang masih dimilikinya.

Dengan kata lain, tanpa amandemen ini, lessee penjual, yang menerapkan persyaratan pengukuran berikutnya untuk liabilitas sewa yang tidak terkait dengan transaksi jual dan sewa-balik, mungkin mengakui keuntungan atas hak pakai yang masih dimilikinya semata mata karena pengukuran kembali (misalnya, setelah modifikasi sewa atau perubahan masa sewa), meskipun tidak ada transaksi atau peristiwa yang terjadi yang menimbulkan keuntungan tersebut.

PSAK 201, Penyajian Laporan Keuangan (sebelumnya PSAK 1) - Liabilitas Tidak Lancar dengan Persyaratan;

PSAK 201 'Penyajian laporan keuangan' mensyaratkan bahwa, agar entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas sebagai tidak lancar, entitas harus memiliki hak pada tanggal pelaporan untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal tersebut.

Ketika entitas mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari perjanjian pinjaman sebagai tidak lancar dan liabilitas tersebut tunduk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh entitas dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, maka entitas harus mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami risiko bahwa liabilitas tersebut akan dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, yang meliputi:

(a) nilai tercatat liabilitas;
(b) informasi mengenai perikatan-perikatan;
(c) fakta dan situasi, jika ada, yang mengindikasikan entitas mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan berdasarkan keadaannya pada akhir periode pelaporan.

PSAK 207, Laporan arus kas (sebelumnya PSAK 2) dan PSAK 107, Instrumen keuangan: Pengungkapan (sebelumnya PSAK 60) - Pengaturan keuangan pemasok;

Pada tanggal 1 Desember 2023, DSAK IAI menerbitkan amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 yang mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai *Supllier Finance Arrangements* (SFAs). Amandemen tersebut menanggapi investor yang mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan informasi lebih lanjut tentang SFAs untuk dapat menilai bagaimana pengaturan ini memengaruhi liabilitas, arus kas, dan risiko likuiditas entitas.

Untuk memenuhi kebutuhan investor, pengungkapan baru ini akan memberikan informasi tentang:

1. Syarat dan ketentuan SFAs.
2. Nilai tercatat liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari SFAs dan pos-pos di mana liabilitas tersebut disajikan.
3. Nilai tercatat liabilitas keuangan dalam butir (2) yang telah diterima pembayarannya oleh pemasok dari penyedia keuangan.
4. Kisaran tanggal jatuh tempo pembayaran untuk liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari SFAs, dan utang usaha yang sebanding yang bukan merupakan bagian dari pengaturan tersebut.
5. Perubahan non-kas atas nilai tercatat liabilitas keuangan dalam butir (2).
6. Akses terhadap fasilitas SFAs dan konsentrasi risiko likuiditas pada penyedia pembiayaan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (continued)

Impact of adoption these new accounting standards are follows:

SFAS 116 : Leases (previously SFAS 73) – Leases on sales and leaseback;

DSAK IAI issued agenda decision by the IFRS Interpretations Committee addressing how a seller-lessee should measure the right of-use asset arising from the leaseback and, as a result, how it should determine the gain or loss on a sale and leaseback transaction where the transaction qualified as a 'sale' under SFAS 115 and lease payments include variable lease payments that do not depend on an index or rate. While the agenda decision provided an approach for the initial measurement of the right-of-use asset and the lease liability arising from the leaseback, it did not address how the lease liability would be subsequently measured.

The amendments to SFAS 116 issued in November 2022, aim to address that gap. SFAS 116 now specifies that, in subsequently measuring the lease liability, the seller-lessee determines 'lease payments' and revised lease payments' in a way that does not result in the seller-lessee recognising any amount of the gain or loss that is related to the right of use it retains.

In other words, without these amendments, a seller-lessee, applying the subsequent measurement requirements for lease liabilities unrelated to a sale and leaseback transaction, might have recognised a gain on the right of use it retains solely because of a remeasurement (for example, following a lease modification or change in the lease term), even though no transaction or event would have occurred to give rise to that gain.

SFAS 201, Presentation of financial statements (previously SFAS 1) - Non current Liabilities with Covenants;

SFAS 201 'Presentation of financial statements' requires that, for an entity to classify a liability as non-current, the entity must have the right at the reporting date to defer settlement of the liability for at least twelve months after that date.

An entity classifies a liability arising from a loan arrangement as non-current and that liability is subject to the covenants which an entity is required to comply with within twelve months of the reporting date, the entity shall disclose information in the notes that enables users of financial statements to understand the risk that the liability could become repayable within twelve months of the reporting period, including:

(a) the carrying amount of the liability;
(b) information about the covenants;
(c) facts and circumstances, if any, that indicate the entity may have difficulty complying with the covenants. Such facts and circumstances could also include the fact that the entity would not have complied with the covenants based on its circumstances at the end of the reporting period.

SFAS 207, Cash flow statements (previously PSAK 2) and SFAS 107, Financial instrument: Disclosure (previously SFAS 60) – Supplier finance arrangements;

On December 1, 2023, the DSAK IAI issued amendments to SFAS 207 and SFAS 107 to require specific disclosures about Supplier Finance Arrangements (SFAs). The amendments respond to investors that said they urgently need more information about SFAs to be able to assess how these arrangements affect an entity's liabilities, cash flows and liquidity risk.

To meet investor's needs, the new disclosures will provide information about:

1. The terms and conditions of SFAs.
2. The carrying amount of financial liabilities that are part of SFAs and the line items in which those liabilities are presented.
3. The carrying amount of the financial liabilities in (2) for which suppliers have already received payment from the finance providers.
4. The range of payment due dates for both the financial liabilities that are part of SFAs, and comparable trade payables that are not part of such arrangements.
5. Non-cash changes in the carrying amounts of financial liabilities in (2).
6. Access to SFAs facilities and concentration of liquidity risk with the finance providers.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan, di diskusikan di Catatan 49.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

i) Klasifikasi
Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*) ;
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Pada pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika penentuan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi pengukuran atau pengakuan inkonsistensi (kadang-kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (continued)

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2024 and have not been early adopted by the Company, are discussed in Note 49.

d. Financial Assets and Liabilities

i) Classification
The Bank classifies its financial assets in the following measurement categories:
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

A debt instruments measured at FVOCI, only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell);*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam klasifikasi ini kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 (previously SFAS 71)classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Bank can reclassify all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah *Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI), Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu subklasifikasi yang ditetapkan pada saat pengakuan awal dan subklasifikasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas keuangan lainnya berkaitan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan liabilitas.

ii) Pengakuan awal

Bank pada awalnya mengakui Pinjaman yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajarnya ditambahkan/dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Bank pada saat pengakuan awal, dapat menetapkan aset dan liabilitas keuangan tertentu, pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar hanya diterapkan jika kondisi berikut terpenuhi:

a. penerapan opsi nilai wajar mengurangi atau menghilangkan ketidaksesuaian akuntansi yang mungkin timbul; atau
b. aset dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan, yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen utama berdasarkan nilai wajar; atau
c. aset dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

In assessing whether the contractual cash flows are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI), the 'Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a 'contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extention terms;*
- *Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified asheld for trading;*
- *Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

ii) Initial recognition

The Bank initially recognises loans and deposits on the date of origination.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a. *Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.*
b. *Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.*

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

a. *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
b. *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
c. *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.*

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

iii) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur Pinjaman yang diberikan.

v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nilai tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan penurunan nilai. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto suatu aset (bila aset tersebut bukan merupakan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi suatu liabilitas.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (sebagai bagian dari ekuitas), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya, kecuali keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar untuk instrumen utang. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk mengelola aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar diakui dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dikeluarkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

iv) Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest rate method.
The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment. In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets fair value through other comprehensive income are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument. When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

vi) Reclassification of financial assets

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

viii) Pengukuran biaya perolehan amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan di terima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan *volume* yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau di terima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

viii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment losses on financial assets is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Portfolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam *portfolio*.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan dalam tingkat hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkat berikut:

- Level 1: Harga yang dikutip (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik.
- Level 2: Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Level 3: Input untuk aset atau liabilitas berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas *Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI). Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)*.

Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

- *Probability of Default (PD)*
  Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage 1*) atau sepanjang umur *(Stage* 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

- *Loss Given Default (LGD)*
  Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

- *Exposure at Default (EAD)*
  Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

ix) Fair value measurement (Continued)

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- *Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).*
- *Level 3: Input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.*

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

SFAS 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses (ECL) or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12- month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI). Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI).

The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate.

- *Probability of Default (PD)*
  The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

- *Loss Given Default (LGD)*
  The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

- *Exposure at Default (EAD)*
  The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage 2*)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam ECL. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan faktor kuantitatif. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage* 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk *portofolio revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif. Dasar *input*, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan dalam Catatan 3.

Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit *Stage* 3 akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai *Stage* 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana *workout* untuk masing-masing debitur individu.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a twelve month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in ECL. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using quantitative factors. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortised cost, the statement of financial position amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the statement of financial position amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the statement of financial position date using the effective interest rate as the discount rate.The basis of inputs, assumptions and estimation technique are disclosed in Note 3.

Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum 3 scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (*forward looking*). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen Pinjaman yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

Pemulihan aset keuangan yang dihapuskan
Ketika pinjaman tidak tertagih, pinjaman tersebut dihapuskan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terkait. Pinjaman tersebut dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Pemulihan aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dari tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran

Mata Uang Pelaporan

Bank menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah (Rp). Transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Reuters. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui didalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai invetasi bersih yang memenuhi syarat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "kerugian/(keuntungan) lain-lain-neto".

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasfikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-meneter yang dicatat pada nilai wajar diakui sebagai bagian keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-meneter seperti ekuitas yang dimiliki dan dicatat pada nilai wajar melaui laporan laba-rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar dan selisih penjabarannya pada aset non-moneter seperti tersedia ekuitas yang diklasifkasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

Recoveries of written-off financial assets
When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

e. Foreign Currency Transaction and Translations

Reporting Currency

The Bank maintains their accounting records in Indonesian Rupiah (Rp). Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made.

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated inforeign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Reuters. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within"finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented inthe profit or loss within "other (losses)/gains - net".

Changes in the fair value of monetary securities denominated in foreign currency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security.Translation differences related to changes inamortised cost are recognised inprofit or loss,and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

Translation differences on non-monetary financial assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain or loss. For example, translation differences on non-monetary financial assets and liabilities such as equities held at fair value through profit or loss are recognised in profit or loss as part of the fair value gainor loss and translation differences on non-monetary assets such as equities classified as available-for-sale financial assets are recognised in other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menggunakan kurs tengah Reuters pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut:

e. Foreign Currency Transaction and Translations (Continued)

As of December 31, 2024 and 2023 using the Reuters' middle rates at 16:00 Western Indonesian Time, the foreign currency rates used for translations of foreign currencies to Rupiah are as follows:

	2024	2023	
Dolar Amerika Serikat	16.095	15.397	*United States Dollar (USD)*

f. Giro Wajib Minimum

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

f. The Minimum Statutory Reserve

The Bank is required to maintain statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

g. Current accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current account with Bank Indonesia and Other Bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *interbank call money* , tabungan, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD),dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility, interbank call money, saving, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), and time deposit.

Placements with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Surat Utang Negara (SUN), obligasi bank, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, efek-efek untuk tujuan investasi diukur sesuai dengan klasifikasinya sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada efek-efek.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Securities

Securities owned consist of Government Debt Securities (SUN), bank bonds, Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) which are traded on the stock exchange.

Marketable securities are initially measured at fair value plus transaction costs and subsequently accounted for in accordance with their classification as held to maturity.

Subsequently accounted for, securities for investment purposes are measured according to their classification as measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali *(Repo)* dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali *(Reverse Repo)*

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)* disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (repo) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali *(Repo)* dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali *(Reverse Repo)* (Lanjutan)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)* disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

k. Instrumen Keuangan Derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, dan transaksi *spot* untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

l. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Setelah pengakuan awal, Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo) (Continued)

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

k. Derivative Financial Instruments

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risk, such as currency risk and interest rate risk.

Derivatives financial instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

l. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with its interest after a specified period of time, and receivables from trading of financial instruments that already at maturity which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Loans are classified as amortized cost

Loans given which are initially measured at fair value plus its transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain the financial assets, and after the initial measurement at cost to be amortized using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification. For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

l. Pinjaman yang Diberikan (Lanjutan)

Bank mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan ekuitas debitur), Bank mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat pinjaman yang diberikan diatas nilai wajar aset yang diterima setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian dalam laba rugi tahun berjalan.

Hanya dalam restrukturisasi kredit yang bermasalah melibatkan modifikasi persyaratan kredit, akun bank untuk efek restrukturisasi prospektif dan tidak mengubah nilai buku kredit pada saat restrukturisasi, kecuali jumlahnya melebihi nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam kebijakan baru.

Jika nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih rendah dari nilai tercatat pinjaman sebelum restrukturisasi, Bank mengurangi saldo pinjaman dengan jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai.

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi pada akun pendapatan bunga dan beban modifikasi yang disajikan secara terpisah. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

m. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 (sebelumnya PSAK 7) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, antara lain:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan. (Catatan 35).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Loans (Continued)

The Bank accounts for troubled debt restructuring in accordance with the type of restructuring.

In troubled debt restructuring which involves a repossesion of assets (including an equity interest of the debtor), the Bank records those assets (including an equity interest) at their fair values at the time of restructuring. The excess of the carrying amount of the loans over the fair value of assets received less estimated costs to sell, is recognised as a loss in the current year profit or loss.

In troubled debt restructuring which only involves modification of the credit terms, the Bank accounts for the restructuring effect prospectively and does not change the carrying amount of the loans at the time of restructuring, unless the amount exceeds the present value of the total future cash receipts specified in the new terms.

If the present value of the total future cash receipts specified in the new terms is lower than the carrying amount of the loans prior to restructuring, the Bank reduces the loans balance to the amount equal to the present value of the total future cash receipts. The amount of the reduction is recognised as allowance for impairment losses.

When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset, the Bank recalculates the gross carrying amount of financial assets and recognizes the gain or loss arising from the modification in the profit or loss account in the interest income and modification expense accounts which are presented separately. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

m. Transaction with Related Parties

In carrying out its business, the Bank conducts transactions with related parties as defined in SFAS 224 (previously SFAS 7) concerning "Related Party Disclosures", among others:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
   viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements. (Note 35).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

n. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan nilai wajar dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investasi saham ini diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain dengan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan jika tidak diperdagangkan di bursa efek.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas apabila Bank memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees* dan nilai wajar apabila Bank BPD Bali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees*. Kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat penurunan permanen atas penyertaan sementara dengan menggunakan metode *individual assessment*.

Penyertaan sementara dihapusbuku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Sebelumnya, Bank mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Investment In Shares

Investments in shares represent investments in non publicly listed companies engaged in the financial services industry held for long term purposes.

Investment with an ownership interest below 20% and have no significant influence are carried at fair value reduced by an allowance for impairment losses.

These investment in shares are classified as Fair Value through OCI by irrevocable election if they are not trade in the stock exchange.

Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/ equity. At initial recognition, shares received were recognized at fair value. Subsequently, the shares are recognized using equity method if Bank has significant influence over the investees or at fair value if Bank does not have significant influence over the investees. Loss from permanent decline in investment values of temporary investment are recognized using the individual assessment method.

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 years in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was effective on January 1, 2020. Previously, the Bank follows Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks" and Circular Letter of Bank Indonesia No.15/28/DPNP dated July 31, 2013 regarding Asset Quality Ratings for Commercial Banks.

o. Aset Tetap

1) Kepemilikan Langsung

Aset tetap disusutkan, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*). Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

o. Fixed Assets

1) *Direct Ownership*

Fixed assets depreciation, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation and impairment loss (if any).

Fixed assets, except land and building, is calculated using the double declining balance method. The building is calculated using the straight line method. Fixed assets, except land, depreciation over their estimated useful lives as follows:

	Metode / *Method*	**Tarif / *Rate***	**Tahun / *Years***	
Bangunan				*Buildings*
Permanen	Garis Lurus/	5%	20	*Permanent*
Bukan Permanen	*Straight Line*	10%	10	*Non Permanent*
Perlengkapan				*Fixtures*
Kelompok 1		50%	4	*Cluster 1*
Kelompok 2	Saldo Menurun Berganda /	25%	8	*Cluster 2*
Kelompok 3	*Double Declining*	12,5%	16	*Cluster 3*
Kelompok 4		10%	20	*Cluster 4*

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap, saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya perbaikan itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2) Aset dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Bank memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mengukur aset tetapnya.

Land is recorded at cost and not depreciated.

Acquisition cost includes the cost of replacing a part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss incurred.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

2) *Construction in Progress*

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

The Bank has chosen the cost model for the valuation of its fixed assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

o. Aset Tetap (Lanjutan)

PSAK No. 236 (sebelumnya PSAK 48) tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut.

Maka nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Klasifikasi Hak Guna Bangunan tergantung pada substansi transaksi, dan bukan pada bentuk hukumnya. Akibatnya, jika suatu kontrak memberikan sesuatu yang secara substansi merupakan pembelian aset tetap, maka hak tersebut memenuhi definisi aset tetap dan dicatat sesuai dengan PSAK 216 (sebelumnya PSAK 16) Aset Tetap.

Oleh karena itu, pengalihan pengendalian atas aset yang mendasarinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap berdasarkan PSAK 216, atau transaksi sewa sesuai PSAK 116 (sebelumnya PSAK 73).

Bank menyimpulkan bahwa hak guna bangunan yang dimilikinya diklasifikasikan sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 216 karena Bank memperoleh kendali atas hak guna tanah setelah memperoleh hak guna bangunan (HGB) sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

p. Aset Takberwujud

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Perangkat lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Perangkat lunak komputer diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) selama 4 (empat) tahun.

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Nilai tercatat aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat suatu aset tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah terpulihkan, aset atau unit penghasil kas diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan. Taksiran jumlah terpulihkan aset adalah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dan nilai pakai.

Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi yang wajar dikurangi biaya penjualan sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus menerus dan dari penjualannya pada akhir masa pakainya. Untuk aset yang tidak menghasilkan arus kas masuk independen yang besar, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas terkait aset tersebut. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam membuat taksiran nilai pakai, estimasi arus kas masa mendatang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk aset.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Fixed Assets (Continued)

SFAS No. 236 (previously SFAS 48), " Impairment of Assets" required the carrying amount of the fixed asset have to review at each statement of financial position date to assess whether the carrying amount is more than recoverable amount from the fixed assets. If the carrying amount is more than recoverable amount.

The carrying amount had to decrease into recoverable amount from its, determined using more than amount between the net sold pricing and used value.

Classifying land use rights depends on the substance of the transaction, and not on its legal form. Consequently, if a contract provides something that in substance represents the purchase of fixed assets, then the rights meet the definition of fixed assets and are recorded in accordance with SFAS 216 (previously SFAS 16) Property, Plant and Equipment.

Accordingly, the transfer of control over underlying assets becomes the main consideration in determining whether the transaction is a purchase of fixed assets under SFAS 216, or a lease transaction under SFAS 116 (previously SFAS 73).

The Bank has concluded that the land use rights it holds are classified as fixed assets under SFAS 216 as it obtains control of the land use rights (HGB) as defined under SFAS 115 (previously SFAS 72) Revenue from contracts with customers.

p. Intangible Assets

Software acquired by Bank is stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses (if any).

Acquisition of the software in capitalized as at cost incurred to acquired and make the software ready for use. The software is amortized using the double declining balance method over 4 (four) years.

Cost of development and maintenance program software is recognized as at the transaction date.

q. Impairment of Non - Financial Assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The carrying values of non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. If such indication exists and where the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount, the assets or cash-generating units are written down to their recoverable amount. The estimated recoverable amount of an asset is the higher of an asset's fair value and value-in-use.

The fair value is the amount obtainable from the sale of an asset in an arm's length transaction less costs of disposal while value-in-use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. For an asset that does not generate largely independent cash inflows, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Impairment losses are recognised in profit or loss.

In assessing value-in-use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset non-keuangan tidak termasuk aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan, apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah peningkatan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, sehingga seolah-olah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada nilai revaluasi, yang mana pembalikan diperlakukan sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan itu, beban penyusutan atau amortisasi disesuaikan dalam tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisa, secara sistematis atas sisa manfaatnya.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun baik secara individu maupun di tingkat unit penghasil kas mana yang sesuai dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

r. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari pendapatan bunga yang masih akan diterima, tagihan, pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan beban yang ditangguhkan.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan Pinjaman yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian Pinjaman yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".

AYDA disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut.

Kelebihan saldo Pinjaman yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai Pinjaman yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan pada saat dijual.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

s. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada Bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

q. Impairment of Non - Financial Assets (Continued)

For non-financial assets excluding intangible assets with indefinite useful life, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortisation expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level as appropriate and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

r. Other Assets

Other assets include interests receivable, receivables, prepaid tax, prepaid expenses, foreclosed asset, abandoned properties, and deferred expense.

Prepaid expenses are amortized during the useful life of each cost using the straight line method.

Foreclosed assets is the Bank's assets acquired, either through auction or outside the auction based on voluntary submission by the owner or on the power scheme to sell outside the auction of the scheme owner in the event the debtor does not fulfill its obligations to the Bank. Foreclosed assets is given credit guarantees have been taken over as part of the solution given and presented in "Other Assets".

Foreclosed assets are stated at net realizable value. Net realizable value is the fair value of foreclosed asset reduced by the estimated costs to sell these foreclosed asset.

Excess balances of loans that have not been repaid by the borrower on the value of foreclosed asset, charged against loss reserves decline in the value of loans. The difference between the net realizable value with foreclosed asset proceeds is recognized as a gain or loss on current year at the time of sale.

Expenses related to foreclosed asset maintenance are charged to current year income statement as incurred.

In the event of permanent impairment, the carrying value is reduced to recognize the decline and losses charged to current year income statement.

s. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are recorded at the time liabilities to public customers or other Banks arise.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

t. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank lain terdiri dari liabilitas terhadap Bank lain, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan dari Bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang jumlahnya signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari Bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

v. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

t. Deposits from Customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits, and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through cheque, Automatic Teller Machine card (ATM) or transfers between accounts using bill and other orders of payment or transfer.

Savings account represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors under certain conditions.

Time deposits represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors at specific maturities, based on the agreement between the depositor and Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Deposits from Other Banks

Deposits from other Banks represent liabilities to other Banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other Banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other Banks are deducted is from the total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

v. Borrowings

Borrowings are funds received from another party liability repayment in accordance with the requirements of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate method.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

w. Perpajakan (Lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

x. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (*Stage* 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan *Stage* 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

y. Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan serta berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan dan beban provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan atau beban provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

z. Transaksi Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Taxation (Continued)

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation liabilities are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

x. Interest Income and Expense

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost and interest expense on all financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortised cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (Stage 3) is recognised using the credit adjusted effective interest rate. This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognised on the amortised cost of the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a Stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated the carrying value of the financial asset gross.

y. Fees and Commission

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income.

z. Lease Transactions

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Short term lease; and*
- *Low value asset*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset;*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

z. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga awal. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan - harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

aa. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK 219 (sebelumnya PSAK 24), "Imbalan Kerja"

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, insentif, dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020, mana yang lebih tinggi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

z. Lease Transactions (Continued)

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the leases, less any leases incentives received and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application. The right-of-use asset is amortized over the straight line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each lease's payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease's period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

Lease modification

The Bank accounts for a leases modification as a separate leases if both:
- *the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

aa. Employee Benefits

Bank apply SFAS 219 (previously SFAS 24), "Employee Benefits".

Short-term Employee Benefit

Short term employee benefits are recognized when payable to the employee based on accrual basis.

Short term employee benefits such as wages, benefit, incentive, and other non monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short term employee benefits are measured using undiscounted amount.

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

The post-employment benefits are accured and recognized as expense when service have been rendered by qualified Bank's employees. The benefits are determined based on the Bank regulations and the minimum requirements of Omnibus Law No. 11/2020 whichever is higher.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

aa. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee* ("IFRIC") Agenda *Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit.*

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai komprehensif lain, terdiri atas :
- Keuntungan dan kerugian aktuaris.
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Di luar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, yaitu meliputi uang penggantian hak, uang pisah, sumbangan kematian, penghargaan masa bakti proporsional, dan penghargaan dalam rangka pensiun.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa bakti, penghargaan masa bakti proporsional, cuti besar, dan uang duka dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.*

Bonus dan Tantiem

Bank juga memberikan bonus kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah bonus dan tantiem yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Uang Penghargaan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memberikan uang penghargaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya uang penghargaan Direksi secara bersama-sama ditetapkan sebesar 3,5% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan. Besarnya uang penghargaan bagi Dewan Komisaris secara bersama-sama ditetapkan sebesar 1,25% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan. Uang penghargaan tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

ab. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

aa. Employee Benefit (Continued)

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with SFAS 219: Employment Benefits which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19).

The post-employments benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using Projected Unit Credit Method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:
- *Actuarial gains and losses.*
- *Return on plan assets, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).*
- *The changes in the impact of the asset ceiling, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).*

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

For other long-term employee benefits over the current service cost, net interest on net defined benefit liabilities (assets), and the remeasurement of net defined benefit liability (asset) obligations are recognized immediately in the current statement of profit or loss and other comprehensive income.

All past service costs are recognised at the earlier of when the amendement or curtailment occurs, and when the related restructuring or termination costs are recognized, as a result, unvested past service cost can no longer be deffered and recognised over the future verting period.

Other Long-term Post-Employment Benefit

Other than pension benefits, the Bank also provides other long-term post-employment benefits, such as compensation pay, separation pay, death allowance, proportional service award for pension, and award for pension.

Similar to pension benefits, service reward benefits, service reward benefits proportional, long service leave, and death allowance liabilities and expenses are calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit Method.

Bonus and Tantiem

Banks also provide bonus to the employees and tantiem to the Board of Commissioners and Directors. Estimated the amount of the reserve is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial ability of the Bank, and then requested approval of the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount of bonus and tantiem that are reserved to the realization, then the excess is charged to the profit and loss for the year.

Service Awards Benefit for the Board of Directors and Commissioners

The Bank provides services awards benefit to the Bank's Board of Directors and Commissioners at each end of his tenure. The amount of services awards benefit of the Board of Directors simultaneously set 3.5% of profit after tax before the end of the fiscal year tenure. The amount of services awards benefit for the Board of Commissioners simultaneously set 1.25% of profit after tax before the end of the fiscal year tenure. Services awards benefit was reserved proportionally during the term of office, which is recognized as an expense in the current year.

ab. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

ab. Modal Saham (lanjutan)

Ketika entitas membeli modal saham ekuitas Bank (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

ac. Laba Bersih per Saham

Sesuai dengan PSAK 233 (sebelumnya PSAK 56), laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Liabilitas dan Aset Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

af. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Bank untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar. Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan serta aset tetap.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

ag. Provisi

Provisi diakui ketika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Bank diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

ah. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Bank pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

ab. Share Capital (Continued)

Where any company purchases the Bank's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary sharesare subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ac. Earnings per Share

In accordance with SFAS 233 (previosuly SFAS 56), basic earnings per share is computed by dividing net income for the current year attributable to equity holders of the parent entity with the weighted average number of outstanding issued and fully paid-up ordinary shares during the year.

ad. Dividend

Dividends distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividend is approved by the shareholders.

ae. Contingent Liabilities and Assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

af. Operating Segments

An operating segment is a component of the Bank that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that related to transactions with any of the Banks other components, whose operating results are reviewed regulary by the Bank Board of Directors to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Bank's Board Director include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes and fixed assets.

The Bank has identified and disclosed financial information by major business activities (business segment) based on geographical segments.

A geographical segment includes the provision of services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from other operating segments that are in other economic environments.

ag. Provision

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

ah. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank positions at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan 21 - pengukuran liabilitas imbalan pascakerja: asumsi-asumsi aktuarial.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik. Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Aset keuangan tanpa harga kuotasi dalam pasar aktif

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset memiliki harga kuotasi atau tidak dalam pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi apakah aset keuangan memiliki kuotasi pasar dalam pasar aktif adalah penentuan apakah harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dan apakah harga tersebut merepresentasikan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regards to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following Note 21 - measurement of obligation for postemployment benefits: actuarial assumptions.

Significant accounting judgments and estimates that affect the reported amounts of financial statement, are as follows:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Fair value of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial statements of financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model. The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model, the level of early payment and the level of default assumption.

Financial assets not quoted in an active market

Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available and whether those prices represent actual and regularly occurring market transaction in arm's length basis.

Allowance for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well are the estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Bank mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

Pengakuan pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan.

Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian, dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat atas aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Recognition of deferred taxes

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Present value of post-employment benefit obligation

The cost of defined benefit retirement plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates, and future pension increases. Due to the long term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

Assumptions used in determining the cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash flows that will be used to pay employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates on Government Bonds that have a maturity that resembles the period of employee employee benefits.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank evaluates the decline in asset value if there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value of an asset cannot be recovered. Important factors that can cause a review of impairment are as follows:

- *Performance that is not achieved significantly against historical expectations or projections of future operating results;*
- *Significant changes in the way the asset is used or the overall business strategy; and*
- *Industry or economic trends that are significantly negative.*

The Bank recognizes an impairment loss if the carrying amount of the asset exceeds the recoverable value. The recoverable amount is a higher value between fair value less costs to sell and the value of use of the asset (or cash-generating unit). The recoverable amount is estimated for individual assets or, if not possible, for the cash generating unit for which the asset is part of the unit.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

Estimasi Masa Sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Bank mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Bank, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Bank dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

Provisi dan Kontinjensi

Bank dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Estimation of Lease Term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Functional Currency

The functional currency of the Bank is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Bank considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Bank, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Bank's operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

Provisions and Contingencies

The Bank in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations,if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties in to account.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember 2024 *December 31, 2024*	31 Desember 2023 *December 31, 2023*	
Rupiah			***Rupiah***
Kas	463.250.063.085	464.709.326.200	*Cash*
Kas ATM	117.133.199.105	103.865.226.105	*Cash In ATM*
Sub Jumlah	**580.383.262.190**	**568.574.552.305**	***Sub Total***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Kas	352.335.645	996.031.930	*Cash*
Sub Jumlah	**352.335.645**	**996.031.930**	***Sub Total***
Jumlah	**580.735.597.835**	**569.570.584.235**	***Total***

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dimiliki oleh Bank.

The Cash as of December 31, 2024 and 2023 is owned by the Bank.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember 2024 *December 31, 2024*	31 Desember 2023 *December 31, 2023*	
Rupiah	2.694.046.490.228	2.393.082.448.391	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	828.892.500	792.945.500	*United States Dollar*
Jumlah	**2.694.875.382.728**	**2.393.875.393.891**	***Total***

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk Giro pada Bank Indonesia.

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, telah diubah beberapa kali dengan PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 serta PADG Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 2 Desember 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 1 Mei 2020, PBI No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebagaimana diubah tujuh kali dengan PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 Nopember 2023 Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.26/ /DKMP/Srt/B pada Bulan Desember 2024 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Likuiditas Makroprudensial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, Bank BPD Bali telah memperoleh insentif atas KLM periode tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 3,80%.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) is in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018, has been amended several times with PBI No.22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 dated July 28, 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021 and PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/3/PBI/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. And explained in the Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning Implementing Regulations for Fulfillment of Mandatory Minimum Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units has been amended several times with PADG No. 2 of 2023 dated March 24, 2023 and PADG Number 12 of 2023 dated September 27, 2023 concerning the second amendment to the Regulation of Members of the Board of Governors Number 24/8/PADG/2022 concerning Implementation Regulations for Fulfilling the Minimum Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Units.

The Bank's Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated April 3, 2018, as amended several times by PBI No. 21/12/PBI/2019 dated December 2, 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 dated May 1, 2020, PBI No. 23/17/PBI/2021 dated December 17, 2021 and PBI No. 24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. And explained by Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No.21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 as amended seven times by PADG No. 18 of 2023 dated November 29, 2023 Seventh Amendment to Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/22/PADG/2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No. 26/ /DKMP/Srt/B in December 2024 and referring to Bank Indonesia Regulation Number 11 of 2023 concerning Macroprudential Liquidity Policy and Regulation of Members of the Board of Governors Number 4 of 2024 concerning Amendments to Regulations of Members of the Board of Governors Number 11 of 2023 concerning Implementation Regulations for Macroprudential Liquidity Incentive Policies, Bank BPD Bali has received incentives for KLM for the period December 1, 2024 to December 31, 2024 is 3.80%.

The Minimum Statutory Reserve (GWM) ratio required by Bank Indonesia on December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Giro Wajib Minimum:			*Minimum Required Account*
GWM Rupiah	9,00%	9,00%	*GWM Rupiah*
Harian	0,00%	0,00%	*Daily*
Rata-rata	9,00%	9,00%	*Average*
PLM	5,00%	5,00%	*PLM*
GWM Valas	4,00%	4,00%	*GWM Foreign Exchange*
Harian	2,00%	2,00%	*Daily*
Rata-rata	2,00%	2,00%	*Average*

Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam Rupiah.

Minimum Statutory Reserves, hereinafter abbreviated as GWM, is the minimum amount of funds that must be maintained by Conventional Commercial Banks or Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, the amount of which is determined by Bank Indonesia in the amount of a certain percentage of DPK BUK or DPK BUS and UUS.

Macroprudential Liquidity Buffer, hereinafter abbreviated as PLM is a minimum liquidity reserve in rupiahs that must be maintained by BUK in the form of securities that meet certain requirements, the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of BUK Deposits in Rupiah.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

Rasio GWM Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Statutory Reserves Ratios as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Giro Wajib Minimum:			*Minimum Required Account:*
GWM Rupiah	5,29%	6,20%	*GWM Rupiah*
Harian	0,00%	0,00%	*Daily*
Rata-rata	5,29%	6,20%	*Average*
PLM	27,96%	27,23%	*PLM*
GWM Valas	21,22%	28,08%	*GWM Foreign Exchange*
Harian	2,00%	2,00%	*Daily*
Rata-rata	19,22%	26,08%	*Average*

Bank telah memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Bank has met the Statutory Reserve Requirement required by Bank of Indonesia as of December 31, 2024 and 2023.

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan Mata Uang

a. By Currency

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah	14.552.351.435	49.858.800.714	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	30.566.821.020	20.241.832.646	*United States Dollar*
Jumlah	45.119.172.455	70.100.633.360	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)	(19.246.250)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**45.087.137.075**	**70.081.387.110**	***Net***

b. Berdasarkan Hubungan

b. By Relationship

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
Rupiah	14.552.351.435	49.858.800.714	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	30.566.821.020	20.241.832.646	*United States Dollar*
Jumlah	45.119.172.455	70.100.633.360	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)	(19.246.250)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**45.087.137.075**	**70.081.387.110**	***Net***

c. Berdasarkan Bank

c. By Bank

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah			***Rupiah***
Bank Pemerintah Daerah			***Local Government Bank***
PT Bank DKI	8.973.507	11.015.097	*PT Bank DKI*
Bank Umum			***Commercial Bank***
PT Bank Central Asia Tbk	7.519.318.751	46.706.536.915	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.100.828.988	2.168.641.164	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	4.805.467.717	851.523.288	*PT Bank Mandiri* (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	117.762.471	121.084.250	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	14.552.351.434	49.858.800.714	*Sub - Total*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	18.764.278.977	11.604.716.283	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	11.802.542.044	8.637.116.363	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	30.566.821.021	20.241.832.646	*Sub - Total*
Jumlah	45.119.172.455	70.100.633.360	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)	(19.246.250)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**45.087.137.075**	**70.081.387.110**	***Net***

6. GIRO PADA BANK LAIN (LANJUTAN) / ***6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (CONTINUED)***

d. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun / ***d. Average Interest Rate per Annum***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah	0,00% - 2,00%	0,00% - 1,25%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,00%	0,00%	*United States Dollar*

e. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / ***e. Movements in the Allowance for Impairment Losses***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	19.246	--	--	19.246	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	12.789	--	--	12.789	*Movement during current period*
Saldo akhir periode	32.035	--	--	32.035	*Balance, end of period*

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	17.233	--	--	17.233	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	2.013	--	--	2.013	*Movement during current period*
Saldo akhir periode	19.246	--	--	19.246	*Balance, end of period*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

f. Berdasarkan Kualitas Aset / ***f. By Asset Quality***

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada giro pada bank lain secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed impairment in current accounts with other bank individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks as of December 31, 2024 and 2023 were classified as current.

Kualitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

The quality of current account with other banks are as follows :

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Lancar	45.119.172.455	70.100.633.360	*Current*
Jumlah	45.119.172.455	70.100.633.360	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)	(19.246.250)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**45.087.137.075**	**70.081.387.110**	***Net***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no current account with other banks which are used as collateral.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan / *a. By Type and Relationship*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Fasilitas Penyimpanan			***Saving Facility***
Bank Indonesia	600.000.000.000	100.000.000.000	*Bank Indonesia*
Diskonto yang Belum di Amortisasi	(87.474.487)	(14.574.831)	*Unamortized Discount*
Sub - Jumlah	599.912.525.513	99.985.425.169	*Sub - Total*
Interbank Call Money			***Interbank Call Money***
Bank Umum			***Commercial Bank***
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	300.000.000.000	-	*PT Bank CIMB Niaga, Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	350.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia	-	300.000.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia*
Bank Pemerintah Daerah			***Local Goverment Bank***
PT BPD BJB	400.000.000.000	-	*PT BPD BJB*
PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	310.000.000.000	275.000.000.000	*PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat*
PT BPD DKI	300.000.000.000	300.000.000.000	*PT BPD DKI*
PT BPD Sumsel Babel	150.000.000.000	150.000.000.000	*PT BPD Sumsel Babel*
PT BPD Sulawesi Tenggara	100.000.000.000	100.000.000.000	*PT BPD Sulawesi Tenggara*
PT BPD Papua	100.000.000.000	-	*PT BPD Papua*
PT BPD Kalimantan Selatan	100.000.000.000	-	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT BPD Lampung	100.000.000.000	50.000.000.000	*PT BPD Lampung*
PT BPD Maluku Malut	75.000.000.000	100.000.000.000	*PT BPD Maluku Malut*
PT BPD Jambi	60.000.000.000	-	*PT BPD Jambi*
PT BPD NTT	50.000.000.000	-	*PT BPD NTT*
PT BPD Kalimantan Tengah	50.000.000.000	25.000.000.000	*PT BPD Kalimantan Tengah*
PT BPD DIY	50.000.000.000	100.000.000.000	*PT BPD DIY*
PT BPD Jawa Timur, Tbk	-	300.000.000.000	*PT BPD Jawa Timur, Tbk*
PT BPD Kalimantan Barat	-	150.000.000.000	*PT BPD Kalimantan Barat*
PT BPD Sumatera Utara	-	200.000.000.000	*PT BPD Sumatera Utara*
Sub - Jumlah	2.145.000.000.000	2.400.000.000.000	*Sub - Total*
Tabungan			***Saving***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	24.832.578	24.882.868	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	24.832.578	24.882.868	*Sub - Total*
Deposit On Call			***Deposit On Call***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	400.000.000.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	400.000.000.000	-	
Deposito			***Deposit***
Negotiable Certificate of Deposit	-	28.500.004.297	*Negotiable Certificate of Deposit*
Deposit Berjangka	-	300.000.000	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	-	28.800.004.297	*Sub - Total*
Jumlah	**3.144.937.358.091**	**2.528.810.312.334**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.778.693.256)	(2.062.877.735)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**3.143.158.664.835**	**2.526.747.434.599**	***Net***

b. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun / *b. Average Interest Rate per Annum*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah	0,00% - 6,57%	0,00% - 6,60%	*Rupiah*

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *c. Movements in the Allowance for Impairment Losses*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	2.062.878	--	--	2.062.878	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	(284.184)	--	--	(284.184)	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	1.778.694	--	--	1.778.694	*Balance, end of period*

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (CONTINUED)

c. Movements in the Allowance for Impairment Losses (Continued)

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	378.944	--	--	378.944	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	1.683.934	--	--	1.683.934	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	2.062.878	--	--	2.062.878	*Balance, end of period*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

d. Berdasarkan Kualitas Aset

d. By Asset Quality

Kualitas Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The quality of Placement with Bank indonesia and other banks are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Lancar	3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	*Current*
Jumlah	3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.778.693.256)	(2.062.877.735)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**3.143.158.664.835**	**2.526.747.434.599**	***Net***

e. Berdasarkan Sisa Umur sampai dengan saat Jatuh Tempo

Nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

e. By Remaining Period to Maturity Date

The carrying value for placement on the Bank Indonesia and other banks that are held to maturity by remaining period to maturity date are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		31 Desember 2023 / *December 31, 2023*		
	Jangka Waktu / *Period*	Jumlah / *Total*	Jangka Waktu / *Period*	Jumlah / *Total*	
Deposito	< 1 tahun/*year*	-	< 1 tahun/*year*	28.800.004.297	*Deposits*
Interbank Call Money	< 1 bulan/*month*	2.145.000.000.000	< 1 bulan/*month*	2.400.000.000.000	*Interbank Call Money*
Fasilitas Penyimpanan	< 1 bulan/*month*	599.912.525.513	< 1 bulan/*month*	99.985.425.169	*Savings Facility*
Tabungan	> 1 bulan/*month*	24.832.578	> 1 bulan/*month*	24.882.868	*Savings*
Deposito On Call	< 1 bulan/*month*	400.000.000.000	< 1 bulan/*month*	-	*Deposit On Call*
		3.144.937.358.091		**2.528.810.312.334**	

f. Informasi Lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan. Manajemen yakin bahwa seluruh dana yang ditempatkan akan diterima kembali.

f. Other Information

As of December 31, 2024 and 2023, there were no placements with Bank Indonesia and other banks pledged as cash collateral. Management believes that all funds are placed to be reaccepted.

8. EFEK - EFEK

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

8. SECURITIES

a. By Type and Relationship

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Biaya Perolehan diamortisasi			***Amortized Cost***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Surat Utang Negara (SUN) (setelah dikurangi/ditambah diskonto/premi yang diamortisasi pada Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp15.017.757.895 dan Rp18.386.502.601	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399	*Government Bonds (net of unamortized discount or premium of the year 2024 and 2023 of Rp15,017,757,895 and Rp18,386,502,601*
Sub - Jumlah	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399	*Sub - Total*
Obligasi Bank	366.000.000.000	376.000.000.000	*Bank Bonds*
Sub - Jumlah	366.000.000.000	376.000.000.000	*Sub - Total*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246	*Securities Bank Indonesia Rupiah (SRBI)*
Sub - Jumlah	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246	*Sub - Total*
Jumlah	**9.760.077.271.692**	**4.356.036.203.645**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(28.500.000)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih	**9.760.077.271.692**	**4.356.007.703.645**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN) / ***8. SECURITIES (CONTINUED)***

b. Berdasarkan Penerbit / ***b. By Issuer***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pemerintah			***Government***
SUN Seri FR 0090	800.334.000.000	800.334.000.000	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0081	800.000.000.000	800.000.000.000	*SUN Seri FR 0081*
SUN Seri FR 0086	500.000.000.000	500.000.000.000	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0101	300.000.000.000	-	*SUN Seri FR 0101*
SUN Seri FR 0095	230.000.000.000	230.000.000.000	*SUN Seri FR 0095*
SUN Seri VR 0033	214.698.000.000	214.698.000.000	*SUN Seri VR 0033*
SUN Seri FR 0084	212.810.000.000	212.810.000.000	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0104	185.000.000.000	-	*SUN Seri FR 0104*
SUN Seri FR 0045	30.000.000.000	30.000.000.000	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0042	20.000.000.000	20.000.000.000	*SUN Seri FR 0042*
Diskonto yang belum Diamortisasi	(15.017.757.895)	(18.386.502.601)	*Unamortized discount*
Sub - Jumlah	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399	*Sub - Total*
Bank			***Bank***
PT Bank Mandiri, Tbk	115.000.000.000	115.000.000.000	*PT Bank Mandiri, Tbk*
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	75.000.000.000	75.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia, Tbk*
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	70.000.000.000	70.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk*
PT Bank BTPN, Tbk	33.000.000.000	-	*PT Bank BTPN, Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	23.000.000.000	23.000.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia, Tbk*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	30.000.000.000	*PT BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat*
PT Bank Mantap	-	13.000.000.000	*PT Bank Mantap*
Sub - Jumlah	366.000.000.000	376.000.000.000	*Sub - Total*
SRBI			***SRBI***
SRBI Seri IDSR010825364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR010825364S*
SRBI Seri IDSR020525364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR020525364S*
SRBI Seri IDSR040425364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR040425364S*
SRBI Seri IDSR040725364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR040725364S*
SRBI Seri IDSR051225364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR051225364S*
SRBI Seri IDSR071125364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR071125364S*
SRBI Seri IDSR080925367S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR080925367S*
SRBI Seri IDSR101025364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR101025364S*
SRBI Seri IDSR110625364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR110625364S*
SRBI Seri IDSR141125364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR141125364S*
SRBI Seri IDSR310125364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR310125364S*
SRBI Seri IDSR280225364S	400.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR280225364S*
SRBI Seri IDSR170125364S	200.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR170125364S*
SRBI Seri IDSR240125364S	100.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR240125364S*
SRBI Seri IDSR100125364S	73.578.000.000	-	*SRBI Seri IDSR100125364S*
SRBI Seri IDSR030125364S	60.526.000.000	-	*SRBI Seri IDSR030125364S*
SRBI Seri IDSR041224364S	-	200.000.000.000	*SRBI Seri IDSR041224364S*
SRBI Seri IDSR011124364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR011124364S*
SRBI Seri IDSR151124364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR151124364S*
SRBI Seri IDSR221124364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR221124364S*
SRBI Seri IDSR271124364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR271124364S*
SRBI Seri IDSR131224364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR131224364S*
SRBI Seri IDSR181224364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR181224364S*
SRBI Seri IDSR201224364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR201224364S*
SRBI Seri IDSR271224364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR271224364S*
SRBI Seri IDSR081124364S	-	63.397.000.000	*SRBI Seri IDSR081124364S*
SRBI Seri IDSR190424182S	-	50.000.000.000	*SRBI Seri IDSR190424182S*
SRBI Seri IDSR181024364S	-	50.000.000.000	*SRBI Seri IDSR181024364S*
SRBI Seri IDSR231024364S	-	50.000.000.000	*SRBI Seri IDSR231024364S*
SRBI Seri IDSR251024364S	-	50.000.000.000	*SRBI Seri IDSR251024364S*
Diskonto yang belum Diamortisasi	(217.850.970.413)	(72.816.293.754)	*Unamortized discount*
Sub - Jumlah	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246	*Sub - Total*
Jumlah	**9.760.077.271.692**	**4.356.036.203.645**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(28.500.000)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih	**9.760.077.271.692**	**4.356.007.703.645**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

8. SECURITIES (CONTINUED)

c. Berdasarkan Peringkat

Peringkat obligasi berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

c. By Rating

Bond ratings classified by the rating institution assessment as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Pemeringkat / *Agencies*	**Peringkat / *Rating***	**Nilai Wajar / *Fair Value***	
Perbankan				***Banking***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	115.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk	Fitch	AA+	75.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Fitch	AA+	70.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank BTPN, Tbk	Pefindo	AAA	33.000.000.000	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Pefindo	AAA	23.000.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Pemerintah				***Government***
SUN Seri FR 0090	-	-	800.334.000.000	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0081	-	-	800.000.000.000	*SUN Seri FR 0081*
SUN Seri FR 0086	-	-	500.000.000.000	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0101	-	-	300.000.000.000	*SUN Seri FR 0101*
SUN Seri FR 0095			230.000.000.000	
SUN Seri VR 0033	-	-	214.698.000.000	*SUN Seri VR 0033*
SUN Seri FR 0084	-	-	212.810.000.000	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0104	-	-	185.000.000.000	*SUN Seri FR 0104*
SUN Seri FR 0045	-	-	30.000.000.000	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0042	-	-	20.000.000.000	*SUN Seri FR 0042*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(15.017.757.895)	*Unamortized discount*
Bank Indonesia				***Bank Indonesia***
SRBI Seri				*SRBI Seri*
IDSR010825364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR010825364S*
IDSR020525364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR020525364S*
IDSR040425364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR040425364S*
IDSR040725364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR040725364S*
IDSR051225364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR051225364S*
IDSR071125364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR071125364S*
IDSR080925367S	-	-	500.000.000.000	*IDSR080925367S*
IDSR101025364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR101025364S*
IDSR110625364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR110625364S*
IDSR141125364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR141125364S*
IDSR310125364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR310125364S*
IDSR280225364S	-	-	400.000.000.000	*IDSR280225364S*
IDSR170125364S	-	-	200.000.000.000	*IDSR170125364S*
IDSR240125364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR240125364S*
IDSR100125364S	-	-	73.578.000.000	*IDSR100125364S*
IDSR030125364S	-	-	60.526.000.000	*IDSR030125364S*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(217.850.970.413)	*Unamortized discount*
Jumlah			9.760.077.271.692	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			-	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih			**9.760.077.271.692**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN) / ***8. SECURITIES (CONTINUED)***

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
	Pemeringkat / ***Agencies***	**Peringkat /** ***Rating***	**Nilai Wajar /** ***Fair Value***	
Perbankan				***Banking***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	115.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	75.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Fitch	AA	70.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Pefindo	A+	30.000.000.000	*PT BPD Sulawesi Selatan and Barat*
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Pefindo	AAA	23.000.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia, Tbk*
PT Bank Mantap	Fitch	AA	13.000.000.000	*PT Bank Mantap*
Sub-Jumlah			376.000.000.000	*Sub-Total*
Pemerintah				***Government***
SUN Seri FR 0090	-	-	800.334.000.000	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0081	-	-	800.000.000.000	*SUN Seri FR 0081*
SUN Seri FR 0086	-	-	500.000.000.000	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0095	-	-	230.000.000.000	*SUN Seri FR 0095*
SUN Seri VR 0033	-	-	214.698.000.000	*SUN Seri VR 0033*
SUN Seri FR 0084	-	-	212.810.000.000	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0045	-	-	30.000.000.000	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0042	-	-	20.000.000.000	*SUN Seri FR 0042*
SUN Seri FR 0046	-	-	-	*SUN Seri FR 0046*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(18.386.502.601)	*Unamortized discount*
Bank Indonesia				***Bank Indonesia***
SRBI Seri				*SRBI Seri*
IDSR041224364S	-	-	200.000.000.000	*IDSR041224364S*
IDSR151124364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR151124364S*
IDSR221124364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR221124364S*
IDSR271124364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR271124364S*
IDSR131224364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR131224364S*
IDSR181224364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR181224364S*
IDSR201224364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR201224364S*
IDSR271224364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR271224364S*
IDSR011124364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR011124364S*
IDSR081124364S	-	-	63.397.000.000	*IDSR081124364S*
IDSR190424182S	-	-	50.000.000.000	*IDSR190424182S*
IDSR181024364S	-	-	50.000.000.000	*IDSR181024364S*
IDSR231024364S	-	-	50.000.000.000	*IDSR231024364S*
IDSR251024364S	-	-	50.000.000.000	*IDSR251024364S*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(72.816.293.754)	*Unamortized discount*
Jumlah			4.356.036.203.645	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			(28.500.000)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih			**4.356.007.703.645**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN) / ***8. SECURITIES (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Jangka Waktu / ***d. By Period***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Kurang dari 1 tahun	-	--	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 5 tahun	6.696.951.029.587	4.094.057.571.679	*1 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	3.063.126.242.105	261.950.131.966	*More than 5 years*
Jumlah	**9.760.077.271.692**	**4.356.007.703.645**	***Total***

e. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo / ***e. By Maturity***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Kurang dari 1 tahun	7.365.110.829.414	1.233.552.206.246	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 5 tahun	2.179.860.628.175	3.092.801.430.220	*1 to 5 year*
Lebih dari 5 tahun	215.105.814.103	29.654.067.179	*More than 5 year*
Jumlah	**9.760.077.271.692**	**4.356.007.703.645**	***Total***

f. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun / ***f. Average Interest Rate per Annum***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Efek - efek	5,125% - 10,25%	5,125% - 10,25%	*Marketable Securities*

g. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / ***g. Movements in the Allowance for Impairment Losses***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	28.500	--	--	28.500	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	(28.500)	--	--	(28.500)	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	-	--	--	-	*Balance, end of period*

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	235.314	--	--	235.314	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	(206.814)	--	--	(206.814)	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	28.500	--	--	28.500	*Balance, end of period*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

h. Berdasarkan Kualitas Aset / ***h. By Asset Quality***

Kualitas efek-efek adalah sebagai berikut :

The quality of Marketable Securities are as follows :

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Lancar	9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	*Current*
Jumlah	9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(28.500.000)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**9.760.077.271.692**	**4.356.007.703.645**	***Net***

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Marketable securities purchased under resale agreements as of December 31, 2024 and 2023 are as follows :

a. Berdasarkan Penerbit

a. By Issuer

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Pihak Penerbit / *Counterparties*	Jangka Waktu Hari / *Tenor Days*	Tanggal Jual Kembali / *Resale Date*	Nilai Nominal / *Nominal Amount*	Nilai Jual Kembali / *Resale Amount*	Pendapatan yang Belum Realisasi / *Unrealized Interest*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*
Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Jumlah / *Total*			**-**	**-**	**-**	**-**

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*

Pihak Penerbit / *Counterparties*	Jangka Waktu Hari / *Tenor Days*	Tanggal Jual Kembali / *Resale Date*	Nilai Nominal / *Nominal Amount*	Nilai Jual Kembali / *Resale Amount*	Pendapatan yang Belum Realisasi / *Unrealized Interest*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*
Bank Indonesia						
VR0034	7	3-Jan-24	750.000.000.000	719.061.627.650	239.507.603	718.822.120.047
VR0054	7	4-Jan-24	300.000.000.000	287.335.837.810	123.558.300	287.212.279.510
FR0080	364	5-Jan-24	200.000.000.000	205.433.704.884	117.588.423	205.316.116.461
VR0063	364	16-Aug-24	200.000.000.000	204.610.185.151	7.892.165.717	196.718.019.434
VR0071	364	2-Aug-24	200.000.000.000	203.392.849.226	7.372.328.908	196.020.520.318
VR0080	364	12-Apr-24	200.000.000.000	198.833.288.738	3.493.827.226	195.339.461.512
VR0070	364	26-Jan-24	100.000.000.000	101.867.838.399	457.573.406	101.410.264.993
VR0048	364	9-Feb-24	100.000.000.000	101.892.780.909	713.090.705	101.179.690.204
VR0046	364	22-Mar-24	100.000.000.000	102.555.930.798	1.442.411.522	101.113.519.276
VR0046	364	22-Mar-24	100.000.000.000	102.507.280.485	1.431.055.477	101.076.225.008
VR0043	364	21-Jun-24	100.000.000.000	102.724.617.943	3.003.467.539	99.721.150.404
VR0080	364	16-Feb-24	100.000.000.000	100.229.907.744	826.834.406	99.403.073.338
VR0083	364	2-Feb-24	100.000.000.000	99.951.840.017	573.488.701	99.378.351.316
VR0068	364	19-Jan-24	100.000.000.000	99.584.224.343	321.340.559	99.262.883.784
VR0094	364	23-Feb-24	100.000.000.000	99.802.062.545	947.993.688	98.854.068.857
VR0094	364	12-Jan-24	100.000.000.000	98.945.546.470	194.955.294	98.750.591.176
VR0064	364	19-Jul-24	100.000.000.000	101.735.851.033	3.445.360.515	98.290.490.518
VR0071	364	5-Jul-24	100.000.000.000	101.129.945.234	3.188.923.910	97.941.021.324
VR0084	364	8-Mar-24	100.000.000.000	98.905.178.566	1.186.144.041	97.719.034.525
VR0085	364	1-Mar-24	100.000.000.000	98.764.759.494	1.061.377.949	97.703.381.545
VR0085	364	1-Apr-24	100.000.000.000	99.194.929.013	1.563.299.906	97.631.629.107
VR0093	364	24-May-24	100.000.000.000	99.595.986.065	2.472.996.844	97.122.989.221
VR0094	364	17-May-24	100.000.000.000	99.462.693.363	2.354.531.246	97.108.162.117
VR0073	364	3-May-24	100.000.000.000	99.162.596.642	2.110.115.750	97.052.480.892
VR0077	367	10-May-24	100.000.000.000	99.253.656.829	2.224.314.910	97.029.341.919
VR0077	364	26-Apr-24	100.000.000.000	98.978.234.850	1.984.607.180	96.993.627.670
VR0037	364	14-Jun-24	100.000.000.000	99.101.498.524	2.781.282.461	96.320.216.063
VR0072	364	12-Jul-24	100.000.000.000	98.616.508.501	3.229.567.000	95.386.941.501
Jumlah / *Total*			**4.050.000.000.000**	**4.022.631.361.226**	**56.753.709.186**	**3.965.877.652.040**

Tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) dengan pihak berelasi.

There were no marketable securities purchased under resale agreement with related parties.

Seluruh efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dalam mata uang Rupiah.

All marketable securities purchased under resale agreement are stated in Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 lokasi penyimpanan efek-efek jaminan tanpa warkat (*scriptless*) dicatat pada sistem BI - SSSS Bank Indonesia.

As of December 31, 2024 and 2023, the scriptless collateral securites were custodied in BI- SSSS system of Bank Indonesia.

b. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

b. Average Interest Rate per Annum

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Efek - efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	6,00% - 6,70%	*Marketable Securities Purchased under Resale Agreements*

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (LANJUTAN)

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS (CONTINUED)

c. Berdasarkan Kualitas Aset

c. By Asset Quality

Kualitas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali adalah sebagai berikut:

The quality of Marketable Securities Purchased under Resale Agreements are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Lancar	-	3.965.877.652.040	*Current*
Jumlah	**-**	**3.965.877.652.040**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa tidak perlu cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that there were no allowance for impairment losses on securities purchased under resale agreements to be recognized as of December 31, 2024 and 2023.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

10. LOANS

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

a. By Type and Relationship

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Konsumsi	25.594.538.599	22.217.699.744	*Consumer*
Investasi	3.072.625.561	3.685.406.048	*Investment*
Modal kerja	3.554.819.994	1.538.759.302	*Working Capital*
Sub - Jumlah	32.221.984.154	27.441.865.094	*Sub - Total*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Konsumsi	9.845.952.811.271	9.635.059.636.867	*Consumer*
Investasi	10.148.113.997.612	8.575.658.340.281	*Investment*
Modal kerja	2.396.466.231.441	2.477.263.420.809	*Working Capital*
Sindikasi	407.414.388.966	435.157.742.436	*Syndication*
Sub - Jumlah	22.797.947.429.290	21.123.139.140.393	*Sub - Total*
Total	**22.830.169.413.444**	**21.150.581.005.487**	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**21.525.087.396.052**	**19.918.053.709.375**	***Net***

Rincian Pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

Loans based on quality are as follows :

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
		Portofolio Pinjaman yang diberikan/ *Loans Portfolio*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for Impairment*	
	%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / *Total Loans*	Jumlah / *Total*	
Kualitas				***Quality***
Lancar	98,10%	22.395.257.413.275	940.706.643.862	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	0,99%	224.851.683.887	159.330.794.433	*Special Mention*
Kurang Lancar	0,06%	14.637.833.507	9.622.096.322	*Substandard*
Diragukan	0,10%	21.976.355.246	21.976.355.246	*Doubtful*
Macet	0,76%	173.446.127.529	173.446.127.529	*Loss*
Jumlah	**100,00%**	**22.830.169.413.444**	**1.305.082.017.392**	***Total***

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
		Portofolio Pinjaman yang diberikan/ *Loans Portfolio*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for Impairment*	
	%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / *Total Loans*	Jumlah / *Total*	
Kualitas				***Quality***
Lancar	98,26%	20.782.707.325.503	936.923.855.371	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	0,46%	96.062.513.003	28.709.969.683	*Special Mention*
Kurang Lancar	0,06%	13.076.642.629	8.158.946.716	*Substandard*
Diragukan	0,08%	17.077.928.202	17.077.928.202	*Doubtful*
Macet	1,14%	241.656.596.150	241.656.596.140	*Loss*
Jumlah	**100,00%**	**21.150.581.005.487**	**1.232.527.296.112**	***Total***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***10. LOANS (CONTINUED)***

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi / ***b. By Economic Sector***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rumah Tangga	9.871.547.349.870	9.657.277.336.611	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	6.048.280.146.621	5.556.217.159.030	*Wholesale and Retail Trade*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.716.940.863.965	1.549.325.580.520	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.866.187.420.441	1.393.961.438.603	*Accomodation and culinary supplying*
Konstruksi	765.664.443.315	770.169.343.970	*Construction*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	294.141.437.592	244.126.384.601	*Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	550.346.330.047	463.955.670.331	*Human Health Activities And Social activity*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.732.497.986	15.275.532.311	*Arts, Entertainment and Recreation*
Industri Pengolahan	502.656.383.479	393.938.227.613	*Processing Industry*
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	-	240.048.753	*Government administration defense and social wefare*
Real Estate	14.999.773.035	19.241.195.939	*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	13.156.692.643	23.817.247.162	*Information and Communication*
Pengangkutan dan Pergudangan	143.605.037.883	138.321.804.815	*Transportation and Warehousing*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	55.378.760.635	62.259.131.314	*Financial and Insurance Activities*
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	8.035.714.286	18.750.000.000	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	109.221.071.358	113.593.609.205	*Water Management, Wastewater Management Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Pendidikan	67.617.717.247	49.497.037.853	*Education*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	9.214.338.501	12.182.520.773	*Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used to Fulfill Own Needs*
Pertambangan dan Penggalian	76.889.421	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	85.142.737.675	77.773.911.488	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Aktivitas Jasa Lainnya	692.223.807.444	590.580.935.174	*Other Service Activities*
Jumlah	**22.830.169.413.444**	**21.150.581.005.487**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**21.525.087.396.052**	**19.918.053.709.375**	***Total - net***

c. Berdasarkan Periode Sisa Jatuh Tempo / ***c. By Remaining Period to Maturity***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.491.057.519.439	1.570.042.647.178	*Less or equal to 1 year*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	795.348.645.455	800.227.217.913	*More than 1 year to 2 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	6.038.368.724.587	5.095.662.194.842	*More than 2 year to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	14.505.394.523.963	13.684.648.945.554	*More than 5 years*
Jumlah	22.830.169.413.444	21.150.581.005.487	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**21.525.087.396.052**	**19.918.053.709.375**	***Net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***10. LOANS (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit / ***d. By Loan Period based on Credit Agreements***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Lebih dari 5 tahun	15.696.379.339.786	15.181.785.360.225	*More than 5 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	5.737.465.031.701	4.665.052.662.913	*More than 2 years to 5 years*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	900.440.979.155	133.044.716.126	*More than 1 year to 2 years*
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	495.884.062.802	1.170.698.266.223	*Less than or equal to 1 year*
Jumlah	**22.830.169.413.444**	**21.150.581.005.487**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**21.525.087.396.052**	**19.918.053.709.375**	***Net***

e. Berdasarkan Pihak Berelasi / ***e. By Related Parties***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Keluarga Direksi dan Karyawan kunci	26.419.046.747	25.561.390.510	*Director's family and Key Employees*
Komisaris	3.214.217.807	151.067.630	*Commissioners*
Lainnya	2.588.719.600	1.729.406.954	*Others*
Jumlah	**32.221.984.154**	**27.441.865.094**	***Total***

f. Berdasarkan *Stage* / ***f. By Stage***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024* (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Jumlah/Total**	
Saldo awal	20.724.188.158	87.243.126	339.149.721	21.150.581.005	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(65.543.364)	69.396.084	(3.852.720)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(213.042.911)	(24.945.697)	237.988.608	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	40.104.144	(28.595.767)	(11.508.377)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.883.898.368	(27.983.110)	(176.326.850)	1.679.588.408	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	22.369.604.395	75.114.636	385.450.382	22.830.169.413	***Ending balance***

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023* (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Jumlah/Total**	
Saldo awal	18.632.215.938	341.390.257	1.094.722.725	20.068.328.920	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(46.990.333)	64.084.680	(17.094.347)	--	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(57.039.598)	(53.543.972)	110.583.570	--	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	654.980.741	(200.184.240)	(454.796.501)	--	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.541.021.410	(64.503.599)	(394.265.726)	1.082.252.085	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	20.724.188.158	87.243.126	339.149.721	21.150.581.005	***Ending balance***

g. Tingkat Suku Bunga per Tahun / ***g. Annual Interest Rates***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pinjaman yang diberikan	2,00% - 16,00%	2,00% - 16,00%	*Loans*

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***10. LOANS (CONTINUED)***

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi / ***h. Non-Performing Loans by Economic Sector***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		
	Kredit bermasalah/ *Non Performing Loan*	**Cadangan Kerugian/ *Allowance for Impairment Losses***	
Rumah Tangga	42.717.013.859	39.813.809.031	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	111.605.129.728	111.006.072.842	*Wholesale and Retail Trade*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.016.465.069	18.559.785.813	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.469.393.901	10.909.251.701	*Accomodation and culinary supplying*
Konstruksi	8.241.780.167	8.241.780.167	*Construction*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	867.869.508	812.498.227	*Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.489.505.436	2.489.505.436	*Human Health Activities and Social activity*
Industri Pengolahan	3.035.956.300	2.634.242.542	*Processing Industry*
Informasi dan Komunikasi	390.082.990	390.082.990	*Information and Communication*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.569.787.975	2.569.787.975	*Financial and Insurance Activities*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remedia	98.500.000	98.500.000	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	850.993	850.993	*Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used to Fulfill Own Needs*
Pertambangan dan Penggalian	76.889.421	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	497.084.585	475.217.126	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Aktivitas Jasa Lainnya	6.984.006.350	6.966.304.833	*Other Service Activities*
Jumlah	**210.060.316.282**	**205.044.579.097**	***Total***

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*		
	Kredit bermasalah/ *Non Performing Loan*	**Cadangan Kerugian/ *Allowance for Impairment Losses***	
Rumah Tangga	50.626.126.602	48.318.086.591	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	158.187.131.343	156.138.281.018	*Wholesale and Retail Trade*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32.240.512.114	32.113.867.427	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9.251.338.921	9.024.659.164	*Accomodation and culinary supplying*
Konstruksi	6.412.804.913	6.412.804.913	*Construction*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	959.293.342	959.293.342	*Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.386.117.320	1.386.117.319	*Human Health Activities And Social activity*
Industri Pengolahan	2.997.871.816	2.925.276.414	*Processing Industry*
Real Estate	412.638.895	412.638.895	*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	71.588.942	71.588.942	*Information and Communication*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.276.184.042	2.276.184.041	*Financial and Insurance Activities*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remedia	98.500.000	98.500.000	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenu Kebutuhan Sendiri	89.002.901	80.217.526	*Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used To Fulfill Own Needs*
Pertambangan dan Penggalian	76.889.421	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.950.636.058	1.950.636.058	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Pengangkutan dan Perdagangan	9.583.333	42.385	*Transport and trade*
Aktivitas Jasa Lainnya	4.764.947.018	4.648.387.602	*Other Service Activities*
Jumlah	**271.811.166.981**	**266.893.471.058**	***Total***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi (Lanjutan)

Rasio kredit bermasalah - kotor terhadap jumlah kredit adalah 0,92% dan 1,29% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Rasio kredit bermasalah - bersih terhadap jumlah kredit adalah 0,02% dan 0,02% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

i. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan Pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi sebesar Rp407.414.388.966 dan Rp435.157.742.436 masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Keikutsertaan Bank dalam kredit sindikasi sebagai anggota sebesar 0,69% - 5,75% pada 31 Desember 2024 dan 0,69% - 5,75% pada 31 Desember 2023 dari masing - masing fasilitas pinjaman.

j. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Perubahan dalam penyisihan kerugian Pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

10. LOANS (CONTINUED)

h. Non-Performing Loans by Economic Sector (Continued)

Non performing loan ratio - gross to total loan was 0.92% and 1.29% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Non performing loan ratio - net to total loan was 0.02% and 0.02% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

i. Syndicated Loans

Syndicated loans represent loans provided to debtors under syndication agreements with other banks. Total syndicated loans amounted to Rp407,414,388,966 and Rp435,157,742,436 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

The participation of the Bank as a member of syndications is between 0.69% - 5.75% as at December 31, 2024 and 0.69% - 5.75%% as at December 31, 2023 of each syndicated loan facility.

j. Movements in the Allowance for Impairment Losses

The movement of Allowance for impairment losses is as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024* (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Jumlah/Total**	
Saldo, awal tahun	846.818.858	53.581.614	332.126.824	1.232.527.296	*Balance, beginning of year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(21.198.002)	24.386.597	(3.188.595)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(98.672.351)	(17.228.563)	115.900.914	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	27.616.163	(17.314.060)	(10.302.103)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	131.770.115	(5.082.249)	12.462.698	139.150.564	*Net change in exposure and remeasurement*
Penghapusan	-	-	(66.595.843)	(66.595.843)	*Written-off*
Saldo, akhir tahun	**886.334.783**	**38.343.339**	**380.403.895**	**1.305.082.017**	***Balance, end of year***

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023* (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Jumlah/Total**	
Saldo, awal tahun	126.797.582	179.387.498	799.120.375	1.105.305.455	*Balance, beginning of year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(850.804)	12.485.540	(11.634.736)	--	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(2.639.985)	(35.174.145)	37.814.130	--	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	336.824.899	(103.865.622)	(232.959.277)	--	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	387.122.457	1.673.382	(51.933.863)	336.861.976	*Net change in exposure and remeasurement*
Penghapusan	(435.291)	(925.039)	(208.279.805)	(209.640.135)	*Written-off*
Saldo, akhir tahun	**846.818.858**	**53.581.614**	**332.126.824**	**1.232.527.296**	***Balance, end of year***

Sebelum tanggal 24 Maret 2024, *rating* tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas kredit karena manajemen melakukan penyesuaian *rating* dalam rangka mitigasi risiko kredit sebagaimana surat OJK S-7/D.03/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penerapan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) dan PSAK 113 (sebelumnya PSAK 68) dalam Kondisi Pandemi Covid-19 serta sesuai POJK No. 19 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana, dimana berakhir pada 24 Maret 2024. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Before March 24, 2024, rating does not fully reflect credit quality because management has made rating adjustments in order to mitigate credit risk as stated in OJK Letter S-7/D.03/2020 dated April 14, 2020 concerning Application of SFAS 109 (previously SFAS 71) and SFAS 113 (previously SFAS 68) in the Covid-19 Pandemic Conditions and in accordance with POJK No. 19 dated 28 October 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Certain Regions and Sectors in Indonesia Affected by Disasters, which end on March 24, 2024. Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

k. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan

1) Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, fidusia, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh bank.
2) Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna lainnya, kredit multiguna perorangan dan kredit konsumtif perorangan lainnya.
3) Kredit Program Pemerintah terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit modal kerja lainnya dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya.
4) Kredit karyawan adalah Pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sesuai tujuan kreditnya.
5) 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
6) Saldo kredit yang dihapus buku selama periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp66.595.842.488 dan Rp209.640.134.712. Penghapusbukuan kredit ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.
7) Simpanan dari nasabah yang diblokir dan dijadikan jaminan atas Pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing sebesar Rp310.567.943.916 dan Rp99.486.855.342 adalah sebagai berikut:

10. LOANS (CONTINUED)

k. Other Significant Information Related to Loans

1) Loans are generally secured by pledged collateral, fiduciary rights, time deposits or other collateral accepted by Bank.
2) Consumption loans consist of home ownership loans, motor vehicle loans, other multipurpose loans, individual multipurpose loans and other individual consumer loans.
3) Government Loan Program consists of investment loans, working capital loan and other working capital loans which the Government provide partial and/or all of their funds.
4) Loans to Employee are loans given to employees to buy vehicles, houses, or other purposes with an interest rate according to the purpose of the credit
5) December 31, 2024 and 2023, there were no violations or exceeding the Legal Lending Limit (LLL) for third parties and related parties and in accordance with regulations established by Bank Indonesia.
6) Credit balances written off during the period December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp66,595,842,488 and Rp209,640,134,712. Write-off credit is not a write-off, so that the billing attempt is still being done.
7) Deposits from customer which are blocked and pleged as loan collateral as of December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp310,567,943,916 and Rp99,486,855,342 respectively, are follows:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Deposito berjangka	297.184.669.764	96.507.192.307	*Time Deposit*
Tabungan	13.383.274.152	2.979.663.035	*Savings*
Jumlah	**310.567.943.916**	**99.486.855.342**	***Total***

8) Tagihan/piutang yang ada saat ini dan/atau akan melekat dikemudian hari, termasuk hak agunan yang melekat padanya dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

8) Mortgage bills/debts that are present and/or will be attached later, including the right collateral attached to it are pledged as loan collateral from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

l. Kredit yang Direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2024 dan 2023:

Below is the type and amount of restructured loans as of December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Perpanjangan Jangka waktu Kredit dan Skema Lain	829.510.069.105	1.397.367.237.502	*Extension of Loan Period and Other Schemes*
Perpanjangan Jangka waktu Kredit	135.571.462.723	196.966.794.188	*Extension of Loan Period*
Perpanjangan Waktu dengan Penyesuaian Suku Bunga	622.232.802	7.323.401.712	*Extension of Loan Period and Interest Rate Adjusment*
Jumlah	**965.703.764.630**	**1.601.657.433.402**	***Total***

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

Restructured loans by quality are as follows:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Lancar	685.917.877.420	1.411.578.890.793	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	146.584.482.438	20.488.034.484	*Special Mention*
Kurang Lancar	8.533.158.716	4.466.195.928	*Substandard*
Diragukan	8.947.689.713	6.491.527.037	*Doubtful*
Macet	115.720.556.343	158.632.785.160	*Loss*
Jumlah	**965.703.764.630**	**1.601.657.433.402**	***Total***

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

Berikut ini adalah aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank: / *The following is the direct ownership of fixed assets by the Bank:*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga Perolehan/ *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	16.224.955.805	-	-	-	16.224.955.805
Bangunan/*Buildings*	110.772.189.606	-	866.787.950	13.529.446.782,00	123.434.848.438
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	163.307.763.912	16.138.655.507	762.905.651	17.289.478.680	195.972.992.448
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	46.193.793.226	2.243.596.891	146.190.495	-	48.291.199.622
	336.498.702.549	18.382.252.398	1.775.884.096	30.818.925.462	383.923.996.313
Aset dalam Penyelesaian/ *Construction in Progress*	17.731.197.095	17.295.098.626	-	(30.818.925.462)	4.207.370.259
Jumlah/*Total*	354.229.899.644	35.677.351.024	1.775.884.096	-	388.131.366.573
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Buildings*	55.612.666.014	4.833.044.458	522.256.195	-	59.923.454.277
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	140.216.307.648	21.032.568.126	746.177.664	-	160.502.698.110
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	34.958.066.028	3.234.261.417	120.713.783	-	38.071.613.662
	230.787.039.690	29.099.874.001	1.389.147.642	-	258.497.766.049
Nilai Buku Bersih/ *Net Book Value*	**123.442.859.954**				**129.633.600.524**

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga Perolehan/ *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	13.042.730.805	3.182.225.000	--	--	16.224.955.805
Bangunan/*Buildings*	97.791.816.613	117.974.000	133.249.745	12.995.648.738	110.772.189.606
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	163.441.105.713	14.275.111.354	15.453.596.485	1.045.143.330	163.307.763.912
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	41.917.895.108	4.565.893.915	1.147.999.208	858.003.411	46.193.793.226
	316.193.548.239	22.141.204.269	16.734.845.438	14.898.795.479	336.498.702.549
Aset dalam Penyelesaian/ *Construction in Progress*	5.340.984.857	27.289.007.717	--	(14.898.795.479)	17.731.197.095
Jumlah/*Total*	321.534.533.096	49.430.211.986	16.734.845.438	--	354.229.899.644
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Buildings*	51.308.210.984	4.437.704.765	133.249.735	--	55.612.666.014
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	140.960.145.385	14.711.704.775	15.455.542.512	--	140.216.307.648
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	33.082.066.154	3.019.477.956	1.143.478.082	--	34.958.066.028
	225.350.422.523	22.168.887.496	16.732.270.329	--	230.787.039.690
Nilai Buku Bersih/ *Net Book Value*	**96.184.110.573**				**123.442.859.954**

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp29.099.874.001 dan Rp22.168.887.496 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023 (catatan 32).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp29,099,874,001 and Rp22,168,887,496 in December 31, 2024 and 2023, respectively (note 32).

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 berkisar antara 4% sampai dengan 95%. Estimasi penyelesaian yaitu pada tahun 2025.

The percentage level of completion of assets in progress on December 31 2024 ranges from 4% to 95%. Estimated completion is in 2025.

Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp349.721.418.610 dan Rp339.195.735.383 pada PT Asuransi Bangun Askrida.

The Bank has insured fixed assets to cover possible losses against the risk of fire, theft and natural disasters with insurance coverage values as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp349,721,418,610 and Rp339,195,735,383 respectively at PT Asuransi Bangun Askrida .

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Harga Jual	-	246.918.650	*Selling Price*
Nilai Buku	386.736.454	2.575.109	*Book Value*
Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan (Catatan 33)	**(386.736.454)**	**244.343.541**	***Gain (Loss) on Sale/Disposal (Note 33)***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Bank memiliki 52 dan 52 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik sejumlah 1 unit dan 1 unit, Sertifikat Hak Pakai (SHP) sejumlah 2 unit dan 2 unit, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sejumlah 49 unit dan 49 unit yang mempunyai masa manfaat 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir antara tahun 2037 sampai dengan 2042. Seluruh sertifikat tanah adalah atas nama Bank. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai permanen atas aset tetap yang dimiliki Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 harga perolehan dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp156.773.671.263 dan Rp133.096.419.575.

11. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Management is of the opinion that the amount of insurance coverage is sufficient to cover possible losses occurring on the insured fixed assets on December 31, 2024 and 2023.

Details of sale and disposal of property and equipment are as follows :

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank owns 52 and 52 plots of land with Certificates of Ownership Rights of 1 unit and 1 unit, Certificates of Right to Use (SHP) of 2 units and 2 units, and Certificates of Building Use Rights (HGB) of 49 units and 49 units which have a useful life of 30 (thirty) years. The validity period of the Building Use Rights Certificate (HGB) ends between 2037 and 2042. All land certificates are in the name of the Bank. Management is of the opinion that there is no problem with the extension of land rights because all land was obtained legally and supported by adequate proof of ownership.

There are no fixed assets pledged by the Bank as of December 31, 2024 and 2023.

Management believes that there is no indication of permanent impairment losses on fixed assets.

As of December 31, 2024 and 2023 the cost of fully depreciated fixed asset that are still in use amounted to Rp156,773,671,263 and Rp133,096,419,575.

12. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai Perolehan					***Acquisition Cost***
Perangkat lunak komputer	47.769.374.582	3.991.054.298	--	51.760.428.880	*Computer Software*
Jumlah	**47.769.374.582**	**3.991.054.298**	**--**	**51.760.428.880**	***Total***
Akumulasi amortisasi					***Accumulated Amortization***
Perangkat lunak komputer	39.561.514.110	4.738.667.375	--	44.300.181.485	*Computer Software*
Jumlah	**39.561.514.110**	**4.738.667.375**	**--**	**44.300.181.485**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**8.207.860.472**			**7.460.247.395**	***Net Intangible Assets***

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai Perolehan					***Acquisition Cost***
Perangkat lunak komputer	41.632.775.742	6.136.598.840	--	47.769.374.582	*Computer Software*
Jumlah	**41.632.775.742**	**6.136.598.840**	**--**	**47.769.374.582**	***Total***
Akumulasi amortisasi					***Accumulated Amortization***
Perangkat lunak komputer	35.819.694.171	3.741.819.939	--	39.561.514.110	*Computer Software*
Jumlah	**35.819.694.171**	**3.741.819.939**	**--**	**39.561.514.110**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**5.813.081.571**			**8.207.860.472**	***Net book value***

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp4.738.667.375 dan Rp3.741.819.939 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023 (catatan 32).

12. INTANGIBLE ASSETS

The details of intangible assets are as follows:

Total amortization expense charged to other operating expenses amounted to Rp4,738,667,375 and Rp3,741,819,939 in December 31, 2024 and 2023, respectively (note 32).

13. ASET HAK GUNA / *13. RIGHT-OF-USE ASSET*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Gedung	45.504.975.154	10.952.916.833	7.906.465.922	48.551.426.065	*Building*
Tanah	3.311.826.599	111.000.000	--	3.422.826.599	*Land*
ATM	19.951.635.192	8.746.308.217	3.885.932.386	24.812.011.023	*ATM*
Kendaraan	4.716.881.605	347.912.433	1.285.330.385	3.779.463.653	*Vehicle*
Gedung Bukan Kantor	2.039.000.551	933.587.805	719.190.000	2.253.398.356	*Non-Office Building*
Total	**75.524.319.101**	**21.091.725.288**	**13.796.918.693**	**82.819.125.696**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Gedung	20.643.471.120	8.503.546.519	7.906.465.922	21.240.551.717	*Building*
Tanah	338.021.690	187.816.444	--	525.838.134	*Land*
ATM	10.754.614.557	6.497.357.633	3.885.932.386	13.366.039.804	*ATM*
Kendaraan	1.418.980.372	1.253.472.999	1.285.330.385	1.387.122.986	*Vehicle*
Gedung Bukan Kantor	1.351.296.360	896.913.568	719.190.000	1.529.019.928	*Non-Office Building*
Total	**34.506.384.099**	**17.339.107.163**	**13.796.918.693**	**38.048.572.569**	***Total***
Nilai buku bersih	**41.017.935.002**			**44.770.553.127**	***Net book value***

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Gedung	42.223.320.959	6.914.271.289	3.632.617.094	45.504.975.154	*Building*
Tanah	785.718.980	2.526.107.619	--	3.311.826.599	*Land*
ATM	21.669.395.823	1.227.936.394	2.945.697.025	19.951.635.192	*ATM*
Kendaraan	10.378.877.686	3.257.276.402	8.919.272.483	4.716.881.605	*Vehicle*
Hardware	1.859.192.045	--	1.859.192.045	-	*Hardware*
Gedung Bukan Kantor	1.048.440.000	1.158.760.551	168.200.000	2.039.000.551	*Non-Office Building*
Total	**77.964.945.493**	**15.084.352.255**	**17.524.978.647**	**75.524.319.101**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Gedung	16.117.703.518	8.158.384.696	3.632.617.094	20.643.471.120	*Building*
Tanah	211.890.980	126.130.710	--	338.021.690	*Land*
ATM	8.831.566.225	4.868.745.357	2.945.697.025	10.754.614.557	*ATM*
Kendaraan	7.391.790.175	2.946.462.680	8.919.272.483	1.418.980.372	*Vehicle*
Hardware	1.394.394.029	464.798.016	1.859.192.045	-	*Hardware*
Gedung Bukan Kantor	648.114.583	871.381.777	168.200.000	1.351.296.360	*Non-Office Building*
Total	**34.595.459.510**	**17.435.903.236**	**17.524.978.647**	**34.506.384.099**	***Total***
Nilai buku bersih	**43.369.485.983**			**41.017.935.002**	***Net book value***

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp17.339.107.163 dan Rp17.435.903.236 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023 (catatan 32).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp17,339,107,163 and Rp17,435,903,237 in December 31, 2024 and 2023, respectively (note 32).

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

Seluruh aset lain-lain dalam mata uang Rupiah.

All other assets are stated in Rupiah.

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Bunga yang Akan Diterima	138.390.842.458	124.776.601.141	*Accrued Interest receivable*
Tagihan *Switching* Antar Bank & GPN	50.147.958.932	24.900.073.043	*Interbank Switching Bills & GPN*
Rupa-rupa Dalam Penyelesaian	17.066.850.692	16.302.732.582	*Other Advances*
Beban yang Ditangguhkan	11.691.500.199	15.741.254.220	*Deferred Costs*
Biaya Dibayar Dimuka	4.745.379.742	4.719.116.980	*Prepaid Expense*
Setoran Jaminan	2.548.430.545	2.109.686.109	*Security Deposit*
Tagihan lainnya	2.523.574.279	13.182.871.397	*Other Bills*
Persediaan Barang Cetakan	1.423.900.863	1.450.567.749	*Printing Supplies*
Tagihan Kiriman Uang			*Money bills transfer*
Western Union	592.531.600	295.487.900	*Western Union*
Properti Terbengkalai	436.651.800	436.651.800	*Abandoned Property*
Lainnya	69.600.000	27.000.000	*Others*
Uang Muka Pajak	-	9.291.280.603	*Tax Advance*
Jumlah	**229.637.221.111**	**213.233.323.524**	***Total***

14. ASET LAIN-LAIN (LANJUTAN) / *14. OTHER ASSETS (CONTINUED)*

a. Bunga yang akan diterima terdiri dari: / ***a. Accrued interests receivables are as follows:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pinjaman yang diberikan	90.229.057.889	85.380.049.578	*Loans*
Efek-efek dan Penempatan Pada Bank Lain	48.161.784.569	39.396.551.563	*Securities and Placement with Other Banks*
Jumlah	**138.390.842.458**	**124.776.601.141**	***Total***

b. Biaya dibayar dimuka terdiri dari: / ***b. Prepaid expenses:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Sewa	2.153.088.414	2.163.848.570	*Rental*
Asuransi	2.589.540.145	2.553.717.793	*Insurance*
Lain-Lain	2.751.183	1.550.617	*Others*
Jumlah	**4.745.379.742**	**4.719.116.980**	***Total***

c. Uang muka pajak / ***c. Tax advance***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pajak Badan (Catatan 19)	-	57.558.102.170	*Corporate income tax (Note 19)*
PPN (Catatan 19)	-	158.133.156	*VAT (Note 19)*
	-	57.716.235.326	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan cadangan kerugian	-	(48.424.954.723)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**-**	**9.291.280.603**	***Total***

Cadangan kerugian ekspektasian atas uang muka pajak adalah sebagai berikut:

Expected credit losses on transactions of tax advance are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Saldo awal tahun	48.424.954.723	48.424.954.723	*Balance, beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(48.424.954.723)	-	*Recovery during the year*
Jumlah	**-**	**48.424.954.723**	***Total***

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak, pada tanggal 7 Desember 2020, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2016 No. 00096/206/16/904/20 sebesar Rp59.074.459.024 dimana yang disetujui oleh Bank hanya sebesar Rp1.516.356.854 dan dicatat sebagai beban pajak kini - tahun sebelumnya di laporan laba rugi tahun 2020. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB PPh Badan dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan yang tidak disetujui sebesar Rp57.558.102.170 ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

Based on the results of the tax audit by the Tax Office, on December 7, 2020, the Bank has received an Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) on Corporate Income Tax for the 2016 fiscal year No. 00096/206/16/904/20 amounting to Rp59,074,459,024 of which the Bank approved only Rp1,516,356,854 and was recorded as current tax expense - the previous year in the 2020 income statement. On January 4, 2021, the Bank has made payments for all SKPKB of Corporate Income Tax and has submitted an objection letter for the SKPKB of Corporate Income Tax which was not approved in the amount of Rp57,558,102,170 to the Tax Office on February 26, 2021.

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank juga menerima SKPKB atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp242.949.390 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp158.133.156 untuk tahun fiskal 2016. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB tersebut dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

On December 14, 2020, the Bank also received SKPKB for Income Tax Article 4 (2) amounting to Rp242,949,390 and Value Added Tax (VAT) and Tax Collection Letter (STP) amounting to Rp158,133,156 for the 2016 fiscal year. On January 4, 2021 , the Bank has made payments for all of the said SKPKB and has submitted an objection letter to the SKPKB Tax Article 4 (2) and Value Added Tax (PPN) to the Tax Office on February 26, 2021.

Jumlah pembayaran atas SKPKB yang tidak disetujui diatas sebesar Rp57.959.184.716 dimana Bank telah mengajukan keberatan dan dicatat sebagai uang muka pajak pada tanggal 31 Desember 2021.

The total payment for the SKPKB that was not approved above amounted to Rp57,959,184,716 where the Bank has filed an objection, which was recorded as a tax advance as of December 31, 2021.

Pada tanggal 13 Januari 2022 Bank menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, dan KEP-00003/KEB/PJ/WPJ.17/2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimana Direktorat Jenderal Pajak menetapkan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

On January 13, 2022, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes Number: KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, and KEP-00003/KEB/PJ /WPJ.17/2022 concerning Taxpayer's Objection to the Underpaid Tax Assessment Letter where the Directorate General of Taxes determines to reject the Taxpayer's objection and maintains the amount of tax still to be paid by the Taxpayer.

Selanjutnya, Bank memutuskan untuk mengajukan permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta sesuai Surat Nomor : R-1692/DIR/OKA/2022 dan R-1693/DIR/OKA/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan penolakan keberatan dimaksud.

Subsequently, the Bank decided to submit an appeal application addressed to the Head of the Tax Court domiciled in Jakarta in accordance with Letters Number: R-1692/DIR/OKA/2022 and R-1693/DIR/OKA/2022 dated April 1, 2022 regarding the Application for Appeal against the Decision of the Directorate General of Taxes on the decision to reject the objection.

14. ASET LAIN-LAIN (LANJUTAN)

c. Uang muka pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Desember 2023, Bank menjalani persidangan ke-8 dengan agenda Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan terkait permohonan Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan penolakan keberatan dimaksud. Adapun hasil persidangan ke-8 adalah :

a. No. Putusan : PUT-003579.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Jenis Putusan : Mengabulkan Seluruhnya

b. No. Putusan : PUT-003580.16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Jenis Putusan : Mengabulkan Sebagian

Pada tanggal 2 April 2024, Bank mengakui pendapatan atas penyelesaian sengketa pajak tahun buku 2016 sebesar Rp48.385.816.690.

d. Tagihan *Switching* Antar Bank & GPN

Tagihan ATM merupakan tagihan yang terkait dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

e. Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya merupakan tagihan kepada PT Arindo Pratama atas dana talangan pembayaran ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

14. OTHER ASSETS (CONTINUED)

c. Tax advance (Continued)

On December 8, 2023, the Bank underwent its 8th trial with the agenda of Notification of Decision Pronunciation Hearing regarding the appeal against the Directorate General of Taxes' decision regarding the decision to reject the objection in question. The results of the 8th trial are :

a. No. Decision : PUT-003579.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Type of Decision : Grant it all

b. No. Decision : PUT-003580.16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Type of Decision : Partially Grant it

On April 2, 2024, the Bank recognized income from the resolution of tax disputes for the 2016 financial year amounting to Rp48,385,816,690.

d. Interbank Switching Bills & GPN

ATM receivables is customers' transactions conducted through ATM Bersama and ATM Prima network.

e. Other Bills

The other bill is a bill to PT Arindo Pratama for the bailout funds paid to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
PT Arindo Pratama	12.617.871.397	13.182.871.397	*PT Arindo Pratama*
	12.617.871.397	13.182.871.397	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan cadangan kerugian	(10.094.297.118)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**2.523.574.279**	**13.182.871.397**	***Total***

Cadangan kerugian ekspektasian atas tagihan lainnya adalah sebagai berikut:

Expected credit losses on transactions of other bills are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Saldo awal tahun	-	-	*Balance, beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	10.094.297.118	-	*Provision during the year*
Jumlah	**10.094.297.118**	**-**	***Total***

15. LIABILITAS SEGERA

15. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Titipan Kewajiban			*Interbank Switching & GPN*
Switching Antar Bank & GPN	36.320.864.633	60.762.574.411	*Obligation*
Beban yang Masih Harus Dibayar	29.346.716.695	31.134.273.345	*Accrued payable*
Titipan Pembayaran Kredit	2.564.310.481	5.684.116.214	*Deposit of credit payment*
Titipan Gaji Tabungan	1.734.534.418	993.364.792	*Temporary salary savings account*
Rekening Titipan	13.555.343	269.827.055	*Temporary account*
Bunga Deposito Jatuh Tempo	33.238.125	7.056.667	*Interest of time deposit fall due*
Lain-lain	4.666.411.386	4.543.776.818	*Others*
Jumlah	**74.679.631.081**	**103.394.989.302**	***Total***

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.
Seluruh transaksi liabilitas segera dalam bentuk Rupiah.

Temporary account were payment transactions received from customer by the Bank as collecting agent before deposit to destination account.
All liability transactions are immediately in Rupiah.

16. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Hubungan

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. By Type, Currency, and Relationship

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Pihak Berelasi / *Related Parties*	Pihak Ketiga / *Third Parties*	Jumlah / *Total*	
Rupiah				***Rupiah***
Giro	540.226.399.665	4.422.522.692.658	4.962.749.092.323	*Current Account*
Tabungan	25.296.065.082	17.785.814.256.618	17.811.110.321.700	*Savings*
Deposito Berjangka	25.126.901.368	9.364.956.646.192	9.390.083.547.560	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	590.649.366.115	31.573.293.595.468	32.163.942.961.583	*Sub - Total*
Dollar Amerika Serikat				***United States Dollar***
Giro	--	76.629.583	76.629.583	*Current Account*
Tabungan	58.021.028	1.270.375.615	1.328.396.643	*Savings*
Deposito Berjangka	--	2.443.221.000	2.443.221.000	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	58.021.028	3.790.226.198	3.848.247.226	*Sub - Total*
Jumlah	**590.707.387.143**	**31.577.083.821.666**	**32.167.791.208.809**	***Total***

16. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN) / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)*

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Hubungan (Lanjutan) / *a. By Type, Currency, and Relationship (Continued)*

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
	Pihak Berelasi / *Related Parties*	Pihak Ketiga / *Third Parties*	Jumlah / *Total*	
Rupiah				***Rupiah***
Giro	126.572.763.689	4.374.119.370.599	4.500.692.134.288	*Current Account*
Tabungan	16.377.822.782	15.458.494.649.570	15.474.872.472.352	*Savings*
Deposito Berjangka	19.436.223.037	7.950.715.894.666	7.970.152.117.703	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	162.386.809.508	27.783.329.914.835	27.945.716.724.343	*Sub - Total*
Dollar Amerika Serikat				***United States Dollar***
Giro	--	75.329.053	75.329.053	*Current Account*
Tabungan	111.692.149	812.188.823	923.880.972	*Savings*
Deposito Berjangka	--	1.701.368.500	1.701.368.500	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	111.692.149	2.588.886.376	2.700.578.525	*Sub - Total*
Jumlah	**162.498.501.657**	**27.785.918.801.211**	**27.948.417.302.868**	***Total***

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu / *b. Time Deposits Based on Contractual Period*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	2.076.722.845.920	2.093.234.497.988	*1 Month*
3 bulan	2.711.192.774.899	2.071.826.697.962	*3 Months*
6 bulan	1.682.379.230.831	1.532.219.426.764	*6 Months*
12 bulan	2.872.085.822.201	2.254.377.491.390	*12 Months*
24 bulan	47.702.873.708	18.494.003.599	*24 Months*
Sub - Jumlah	9.390.083.547.560	7.970.152.117.703	*Sub - Total*
Dollar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	1.665.832.500	1.593.589.500	*1 Month*
3 bulan	112.665.000	107.779.000	*3 Months*
6 bulan	257.520.000	--	*6 Months*
12 bulan	407.203.500	--	*12 Months*
Sub - Jumlah	2.443.221.000	1.701.368.500	*Sub - Total*
Jumlah	**9.392.526.768.560**	**7.971.853.486.203**	***Total***

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo / *c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah			***Rupiah***
Kurang atau sama dengan 1 bulan	3.632.783.007.524	3.204.857.257.396	*Less or equal to 1 month* *1 month*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	2.742.694.647.670	2.321.999.970.970	*More than 1 month to* *3 months*
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	1.440.106.331.270	1.223.792.287.017	*More than 3 months to* *6 months*
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	1.541.258.687.389	1.203.410.602.320	*More than 6 months to* *12 months*
Lebih dari 12 bulan	33.240.873.707	16.092.000.000	*More than 12 months*
Sub - Jumlah	9.390.083.547.560	7.970.152.117.703	*Sub - Total*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Kurang atau sama dengan 1 bulan	1.923.352.500	1.593.589.500	*Less or equal to 1 month* *1 month*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	112.665.000	107.779.000	*More than 1 month to* 3 months
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	-	--	*More than 3 month to* *6 months*
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	407.203.500	--	*More than 6 month to* 12 months
Sub - Jumlah	2.443.221.000	1.701.368.500	*Sub - Total*
Jumlah	**9.392.526.768.560**	**7.971.853.486.203**	***Total***

d. Kisaran Suku Bunga per Tahun / *d. Interest Range per Annum*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah			***Rupiah***
Giro	0,00% - 1,90%	0,00% - 1,90%	*Current Account*
Tabungan	0,00% - 3,50%	0,00% - 3,50%	*Savings*
Deposito berjangka	2,90% - 4,00%	2,90% - 4,00%	*Time Deposit*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Giro	0,00% - 0,15%	0,00% - 0,15%	*Current Account*
Tabungan	0,00% - 0,20%	0,00% - 0,20%	*Savings*
Deposito berjangka	0,20%	0,20%	*Time Deposit*

16. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN) / ***16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)***

e. Simpanan Diblokir dan Dijadikan Jaminan atas Pinjaman yang Diberikan: / ***e. Blocked Savings Account and Pledged as Collateral for Loans:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Deposito berjangka	297.184.669.764	96.507.192.307	*Time deposit*
Tabungan	13.383.274.152	2.979.663.035	*Savings*
Jumlah	**310.567.943.916**	**99.486.855.342**	***Total***

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN / ***17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS***

Seluruh simpanan dari bank lain dalam mata uang Rupiah.

All deposit with other banks are stated in Rupiah.

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan / ***a. By Type and Relationship***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pihak Ketiga			***Third parties***
Deposito berjangka	258.016.962.310	285.721.962.310	*Time deposits*
Giro	182.539.682.452	188.759.149.804	*Current account*
Tabungan	221.135.342.280	238.101.100.054	*Savings*
Interbank Call Money	-	838.000.000.000	*Interbank Call Money*
Jumlah	**661.691.987.042**	**1.550.582.212.168**	***Total***

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu / ***b. Time Deposits Based on Contractual Period***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
1 bulan	88.255.000.000	113.460.000.000	*1 Month*
3 bulan	149.111.962.310	146.611.962.310	*3 Months*
6 bulan	7.550.000.000	10.550.000.000	*6 Months*
12 bulan	13.100.000.000	15.100.000.000	*12 Months*
Jumlah	**258.016.962.310**	**285.721.962.310**	***Total***

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo / ***c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Kurang atau sama dengan 1 bulan	113.555.000.000	152.060.000.000	*Less or equal to 1 month*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	128.811.962.310	111.511.962.310	*More than 1 to 3 month*
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	4.550.000.000	10.050.000.000	*More than 3 to 6 month*
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	11.100.000.000	12.100.000.000	*More than 6 to 12 month*
Jumlah	**258.016.962.310**	**285.721.962.310**	***Total***

d. Tingkat Suku Bunga per Tahun / ***d. Interest Rate per Annum***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Giro	0,00% - 1,90%	0,00% - 1,90%	*Current account*
Tabungan	0,00% - 3,50%	0,00% - 3,50%	*Savings*
Deposito berjangka	2,90% - 4,00%	2,90% - 4,00%	*Time deposits*
Interbank Call Money	-	6,15% - 6,45%	*Interbank Call Money*

e. Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

e. *There are no deposits from other banks that are blocked or used as collateral for loans granted on December 31, 2024 and 2023.*

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

18. BORROWINGS

Tidak terdapat pinjaman yang diterima dari pihak berelasi.

There were no borrowings from related parties.

Seluruh pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are stated in Rupiah.

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	20.000.000.000	62.000.000.000	*Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Pinjaman KPR Sejahtera tapak	3.583.537.129	3.863.302.860	Borrowings from KPR Sejahtera tapak
KLBI KUT MT Tahun 1998/1999	466.213.822	466.213.822	*KLBI KUT MT Year 1998/1999*
Pinjaman KPR Sejahtera tapak Porsi 75	223.427.566	240.456.072	*Borrowings from KPR Sejahtera tapak Portion 75*
KLBI KUT MT Tahun 1999	160.469.329	160.469.329	*KLBI KUT MT Year 1999*
Jumlah	**24.433.647.846**	**66.730.442.083**	***Total***

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit *Homestay* (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp10.000.000.000 jangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 6,50% sesuai dengan PKS No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/V/2023 tanggal 8 Mei 2023. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 8 Mei 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas KPR yang telah disalurkan sebesar Rp32.000.000.000 jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 5,80% sesuai dengan PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 20 Desember 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit Multiguna Perumahan (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp20.000.000.000 jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 6,75% sesuai dengan PKS No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain:

a memberikan data laporan keuangan audited yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik paling lambat 120 hari sejak ditutupnya tahun buku;

b memberikan data laporan keuangan interim yang ditandatangani pejabat berwenang paling lambat 15 hari sesudah berakhirnya setiap triwulan;

c memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha dan tidak terbatas pada isi laporan keuangan;

d memberikan dokumen dokumen lainnya;

e memberikan laporan secara periodik;

f mematuhi semua tuntutan hukum;

g menyediakan akses data/informasi atas Jaminan;

h memperkenankan SMF untuk melakukan verifikasi atas agunan, dan dokumen jaminan;

i memberitahukan secara tertulis setiap perkara/tuntutan/gugatan material yang dihadapi Bank;

j memberitahukan apabila terjadi Tindakan:
1) Adanya suatu pemberitahuan perkara
2) Perkara/tuntutan/gugatan dengan nilai 30% atau kolektif 50% dari ekuitas
3) Jika kalah perkara dan mempengaruhi kelangsungan usaha

k bertanggung jawab dalam menyimpan dokumen jaminan;

l mengasuransikan aset asetnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan;

m memperoleh persetujuan SMF dalam tindakan:
1) Menjual atau melepaskan harta kekayaan diluar kegiatan usaha sehari-hari
2) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi
3) Menjaminkan tagihan kredit KMG kepada pihak lain
4) Mengubah anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal disetor, maksud dan tujuan Bank serta kegiatan usaha.

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Homestay Loan (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp10,000,000,000 for a period of 1 years with an interest rate of 6.50% according to PKS No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/V/2023 dated May 8, 2023. This loan has been paid on May 8, 2024.

The Bank obtained loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for the KPR that had been disbursed in the amount of Rp32,000,000,000 for a period of 3 years with an interest rate of 5.80% in accordance with PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 dated December 17, 2021. This loan has been paid on December 20, 2024.

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Multipurpose Housing Loans (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp20,000,000,000 for a period of 5 years with an interest rate of 6.75% according to PKS No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 dated August 3, 2022.

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements:

a provide audited financial report data that has been checked by a Public Accountant no later than 120 days since the closing of the financial year;

b provide interim financial report data signed by the authorized official no later than 15 days after the end of each quarter;

c provide information regarding financial condition and business activities and is not limited to the contents of financial statements;

d provide other documents;

e provide periodic reports;

f comply with all legal demands;

g provide access to data/information on the Guarantee;

h allowing SMF to verify the collateral and guarantee documents;

i notify of any material case/claim/lawsuit faced by the Bank;

j notify if there is an Action:
1) There is a notification of the case
2) Cases or demands or lawsuits with a value of 30% or collectively 50% of
3) If lose the case and it affects business continuity

k responsible for storing guarantee documents;

l insure assets related to business activities and assets;

m obtain SMF approval in action:
1) Selling or disposing of assets outside of daily business activities
2) Carrying out consolidation, merger, takeover, liquidation
3) Guarantee KMG credit bills to other parties
4) Changing the articles of association related to the decrease in paid-up capital, the Bank's intent and purpose and business activities.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Lanjutan)

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain: (lanjutan)

n. melakukan segala upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha;
o. melaporkan perubahan dokumen berikut ini:
   1) Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta susunan pengurus
   2) Hasil Pemeringkatan Perusahaan
   3) NPWP terbaru
   4) Dokumen pembaharuan seluruh izin usaha
p. melaporkan realisasi setiap 1 tahun sekali untuk posisi berakhir 31 Desember.

Tidak terdapat ketentuan rasio keuangan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman.

Terdapat aset Bank yang dijadikan agunan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berupa Fidusia atas Aset Keuangan KPR yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR termasuk hak agunan yang melekat padanya sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari:

a. KPR Sejahtera Tapak adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu:

1) Dana FLPP sebesar 90% dari plafond kredit.
2) Dana Bank sebesar 10% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Tapak BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga anuitas bulanan.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak Porsi 75

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari :

a. KPR Sejahtera Tapak Porsi 75 adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu :

1) Dana FLPP sebesar 75% dari plafond kredit.
2) Dana Bank sebesar 25% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Bank BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga anuitas bulanan.

18. BORROWINGS (CONTINUED)

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Continued)

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements: (continued)

n. make every effort to maintain business continuity
o. report document changes no later than 7 days after the reporting period
   1) Deed of Establishment, Deed of Amendment to the Articles of Association, Deed of management composition
   2) Company Ranking Results
   3) New NPWP
   4) Renewal documents for all business permits
p. reporting realization once a year for positions ending December 31.

There are no financial ratio requirements required by lenders.

There are Bank assets which are used as collateral for PT Sarana Multigriya Financial (Persero) in the form of Fiduciary on KPR Financial Assets, i.e. bills / receivables which currently exists and/or will be obtained later from the issuance of KPR including collateral rights attached to it in accordance with agreed criteria.

KPR Sejahtera Tapak Loan

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan for Low-Income Communities (MBR) with the support of a housing finance liquidity facility consisting of:

a. KPR Sejahtera Tapak is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from development actors.
b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities ("MBR") who earn permanent income or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

1) FLPP funds amounting to 90% of the credit ceiling.
2) Bank funds amounting to 10% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Tapak Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

KPR Sejahtera Tapak Loan Portions 75

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan with the support of housing finance liquidity facilities which consists of :

a. KPR Sejahtera Tapak Portion 75 is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from developer.
b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities (MBR) who are permanent incomes or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

1) FLPP funds amounting to 75% of the credit ceiling.
2) Bank funds amounting to 25% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

KLBI KUT MT Tahun 1998/1999

Kredit modal kerja yang diberikan melalui Bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau LSM sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan holtikultura.

Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun atau menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan komoditas sejak ditandatanganinya perjanjian penerusan KUT. Jangka waktu KLBI KUT ditetapkan maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan KLBI (SPK KLBI) kepada Bank.

Debitur merupakan Koperasi atau LSM, dengan Bunga Kredit Likuiditas 10,5%. Apabila Bank terlambat menyampaikan laporan pelunasan lebih cepat kepada BI maka kepada Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar (mengacu pada SE Pengalihan Pengelolaan KLBI No. 5/56/INTERN tanggal 18 Nopember 2003 dan SE 6/37/INTERN tanggal 9 Juli 2004. *Risk Sharing* :

- Pemerintah : 52,25%
- Bank Indonesia : 42,75%
- Jamkrindo : 5%

18. BORROWINGS (CONTINUED)

KLBI KUT MT Year 1998/1999

Working capital loans provided through lending banks to Primary Cooperatives or Non-governmental organizationas (NGO) executor of granting credit for the needs of farmers who are members of farmer groups to finance their farming business in the context of intensification of rice, secondary crops and horticulture.

The KUT period is set at a maximum of 1 (one) year or adjusted to the commodity financing term from the signing of the KUT forwarding agreement. The KL KUT period is set at a maximum of 2 (two) years from the date of the KLBI Approval Letter (SPK KLBI) to the Bank.

The debtor is a Cooperative or an NGO, with a Liquidity Loan Interest of 10.5%. If a bank is late in submitting a report on early repayment to BI, the Bank will be subject to a financial penalty (referring to SE Transfer of Management of KLBI No. 5/56/INTERN dated 18 November 2003 and SE 6/37/INTERN dated 9 July 2004. Risk Sharing:

- *Government : 52.25%*
- *Bank of Indonesia : 42.75%*
- *Jamkrindo : 5%*

19. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pasal 25	9.350.028.412	67.312.807.395	*Article 25*
Pasal 29	29.731.033.407	26.198.032.420	*Article 29*
Pasal 21	17.014.599.990	12.994.368.022	*Article 21*
Pasal 4 (2)	12.483.340.165	10.404.342.028	*Article 4 (2)*
Pasal 23	480.741.069	360.481.582	*Article 23*
PPN	46.455.986	16.540.896	*PPN*
Jumlah	**69.106.199.029**	**117.286.572.343**	***Total***

19. TAXATION

a. Taxes Payable

b. Manfaat (Beban) Pajak

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pajak Kini			*Current Tax*
Tahun berjalan	(312.248.233.220)	(329.176.730.080)	*Current year*
Penyesuaian tahun sebelumnya	(31.551.354.943)	(17.065.694.764)	*Prior year adjustment*
Sub Jumlah	(343.799.588.163)	(346.242.424.844)	*Sub Total*
Pajak Tangguhan	24.266.081.590	16.314.437.313	*Deferred Tax*
Jumlah	**(319.533.506.573)**	**(329.927.987.531)**	***Total***

b. Tax Benefit (Expense)

19. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

19. TAXATION (CONTINUED)

c. Rekonsiliasi Pajak

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

c. Tax Reconciliation

The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in statement of profit or loss the are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Laba Sebelum Beban Pajak	1.197.999.247.799	1.068.156.296.848	*Income Before Tax Expense*
Beda Waktu:			***Temporary Difference:***
Koreksi Positif :			*Positive Correction:*
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	-	316.895.152.962	*Allowance for Impairment Loss for loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya	10.094.297.118	-	*Allowance for Impairment Loss for other bills*
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem	187.552.435.752	157.611.744.039	*Provision for Bonus and Tatiem*
Penyisihan Cadangan dana pensiun	47.789.063.478	-	*Provision for Pension Fund*
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja	43.148.062.936	25.059.590.501	*Post-Employment Benefits Expense*
Pembentukan Penghargaan Direksi	5.584.393.867	4.817.774.980	*Director Service gratuity Expense*
Pembentukan Penghargaan Dewan Komisaris	1.076.884.148	1.581.046.531	*Board of Commisioners Services Gratuity Expense*
Sub - Jumlah	**295.245.137.299**	**505.965.309.013**	***Sub - Total***
Koreksi Negatif :			*Negative Correction:*
Pembayaran Bonus dan Tantiem	157.611.744.040	128.856.557.432	*Payment of Bonus and Tatiem*
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	2.718.723.769	-	*Allowance for Impairment Loss for loans*
Pembayaran Manfaat Imbalan Kerja	24.614.298.628	17.746.580.674	*Post-Employment Benefits Paid*
Sub - Jumlah	**184.944.766.437**	**146.603.138.106**	***Sub - Total***
Jumlah Beda Waktu	**110.300.370.862**	**359.362.170.907**	***Total Temporary difference:***
Beda Tetap :			***Permanent Difference:***
Koreksi Positif :			*Positive Correction:*
Biaya Promosi dan Pengembangan Bisnis	40.469.277.746	29.510.743.639	*Bussiness Development Expense*
Biaya Humas dan CSR	16.658.948.088	15.889.421.145	*Cost of Public Relation and CSR*
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	3.813.609.889	4.045.501.676	*Strengthening Implementation of Worship*
Biaya Pajak	31.975.660.033	2.428.186.771	*Tax Expense*
Tamu dan Souvenir	1.790.633.530	2.391.183.925	*Entertaiment and Souvenirs*
Biaya Sumbangan	1.422.996.520	1.974.984.820	*Donation*
Biaya HUT Bank	2.252.138.142	1.279.995.071	*Bank Anniversary Cost*
Biaya Telepon,Telegram	480.381.709	68.751.944	*Cost of Telephone, Telegram*
Biaya Lain-lain	12.329.025.394	11.345.841.880	*Other Expense*
Sub - Jumlah	**111.192.671.051**	**68.934.610.871**	***Sub - Total***
Koreksi Negatif :			*Negative Correction:*
Pendapatan Sewa Gedung	182.138.134	195.213.900	*Rental Income Buliding*
Sub - Jumlah	**182.138.134**	**195.213.900**	***Sub - Total***
Jumlah Beda Tetap	**111.010.532.917**	**68.739.396.971**	***Total Permanent Difference:***
Jumlah Koreksi Fiskal	**221.310.903.779**	**428.101.567.878**	***Total Fiscal Correction***
Laba Kena Pajak	**1.419.310.151.578**	**1.496.257.864.726**	***Estimated of Income Tax***
Pembulatan	1.419.310.151.000	1.496.257.864.000	*Rounded*
Beban Pajak Penghasilan:			*Income Tax Expense*
22% x 1.419.310.151.000	312.248.233.220	--	22% x 1.419.310.151.000
22% x 1.496.257.864.000	--	329.176.730.080	22% x 1.496.257.864.000
Jumlah Pajak Kini	**312.248.233.220**	**329.176.730.080**	***Total current taxes***
Dikurangi:			*Less:*
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pasal 25	282.517.199.813	302.978.697.660	*Prepaid Taxes Article 25*
Kurang Pajak Penghasilan Badan	**29.731.033.407**	**26.198.032.420**	***Income Tax Payable***

Total laba kena pajak Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2024 dan 2023.

The Bank's taxable income for the year ended December 31, 2024 and 2023 is the basis for preparing annual tax return for 2024 and 2023.

19. PERPAJAKAN (LANJUTAN) / ***19. TAXATION (CONTINUED)***

d. Aset Pajak Tangguhan / ***d. Deferred Tax Assets***

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Charged to Profit or Loss*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	Penyesuaian / *Adjustment*	Saldo Akhir / *Ending Balance*
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ *Provision for Impairment Losses on Loans*	31.267.022.756	(598.119.229)	--	--	30.668.903.527
Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Lainnya/ *Provision for Impairment Losses on Other Bill*	-	2.220.745.366	--	--	2.220.745.366
Penyisihan Cadangan Dana Pensiun/ *Provision for Pension Fund*	-	10.513.593.965	--	--	10.513.593.965
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ *Provision for Bonus and Tantiem*	34.517.541.069	6.586.952.177	--	--	41.104.493.246
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ *Post-Employee Benefit Expense*	31.175.697.437	597.477.348	3.295.966.022	--	35.069.140.807
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ *Long Term Post Employee Benefit Expense*	19.921.770.622	3.479.950.800	--	--	23.401.721.422
Pembentukan Pengabdian Direksi/ *Director Service Gratuity Expense*	5.719.072.634	1.228.566.651	--	(183.453.077)	6.764.186.208
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ *Commissioner Service Gratuity Expense*	1.995.413.199	236.914.513	--	183.453.077	2.415.780.789
Aset Pajak Tangguhan/ *Deffered Tax Asset*	**124.596.517.717**	**24.266.081.590**	**3.295.966.022**	**--**	**152.158.565.329**

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Charged to Profit or Loss*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	Penyesuaian / *Adjustment*	Saldo Akhir / *Ending Balance*
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ *Provision for Impairment Losses on Loans*	24.295.329.391	6.971.693.365	-	-	31.267.022.756
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ *Provision for Bonus and Tantiem*	28.191.400.016	6.326.141.053	-	-	34.517.541.069
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ *Post-Employee Benefit Expense*	30.154.181.602	1.401.167.540	(379.651.705)	-	31.175.697.437
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ *Long term post Employee Benefit Expense*	19.714.076.000	207.694.622	-	-	19.921.770.622
Pembentukan Pengabdian Direksi/ *Director Service Gratuity Expense*	4.659.162.138	1.059.910.496	-	-	5.719.072.634
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ *Commissioner Service Gratuity Expense*	1.647.582.962	347.830.237	-	-	1.995.413.199
Aset Pajak Tangguhan/ *Deffered Tax Asset*	**108.661.732.109**	**16.314.437.313**	**(379.651.705)**	**--**	**124.596.517.717**

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang.

Management believes that deferred tax assets can be utilized and can be compensated againts future taxable income.

19. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 30 Juli 2024, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2019 sebagaimana berikut :

a. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2019 Nomor : 00047/240/19/904/24 sebesar Rp3.244.667.670.

b. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember 2019 Nomor : 00067/201/19/904/24 sebesar Rp275.332.173.

c. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2019 Nomor : 00129/203/19/904/24 sebesar Rp10.232.394.

d. SKPKB Pajak Penghasilan Tahun 2019 Nomor : 00052/206/19/904/24 sebesar Rp21.115.701.671 dibebankan pada beban pajak kini.

e. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00116/207/19/904/24 sebesar Rp809.341.896.

f. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00046/277/19/904/24 sebesar Rp425.113.

g. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00047/277/19/904/24 sebesar Rp417.575.

h. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa September 2019 Nomor : 00048/277/19/904/24 sebesar Rp416.222.

i. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00049/277/19/904/24 sebesar Rp408.412.

j. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Nopember 2019 Nomor : 00050/277/19/904/24 sebesar Rp411.982.

k. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00051/277/19/904/24 sebesar Rp410.111.

l. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00009/177/19/904/24 sebesar Rp29.687.

l. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.

m. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.

n. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa September 2019 Nomor : 00011/177/19/904/24 sebesar Rp29.066.

o. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00012/177/19/904/24 sebesar Rp28.520.

p. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa November 2019 Nomor : 00013/177/19/904/24 sebesar Rp28.770.

q. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00014/177/19/904/24 sebesar Rp28.639.

r. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00082/107/19/904/24 sebesar Rp56.329.475.

Pada tanggal 7 Agustus 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp17.774.886.922 dan tanggal 9 Agustus 2024 diajukan permohonan keringanan sanksi sebesar 100% yang masih menunggu keputusan dari Kantor Pajak.

Pada tanggal 4 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2021 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 sebesar Rp10.647.597.708. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp10.293.153.642, sisanya dibebankan di beban pajak.

Pada tanggal 6 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2020 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 sebesar Rp219.281.153. Dibebankan ke pajak kini sebesar Rp142.499.630, sisanya dibebankan di beban pajak.

19. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assesment

On July 30, 2024, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2019 tax year as follows:

a. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2019 Period Number: 00047/240/19/904/24 amounting to Rp3,244,667,670.

b. Income Tax SKPKB Article 21 December 2019 Period Number: 00067/201/19/904/24 amounting to Rp275,332,173.

c. Income Tax SKPKB Article 23 December 2019 Period Number: 00129/203/19/904/24 amounting to Rp10,232,394.

d. Income Tax SKPKB 2019 Number: 00052/206/19/904/24 amounting to Rp21,115,701,671 charged to current tax expense.

e. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2019 Number: 00116/207/19/904/24 amounting to Rp809,341,896.

f. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of July 2019 Number: 00046/277/19/904/24 amounting to Rp425,113.

g. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00047/277/19/904/24 amounting to Rp417,575.

h. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of September 2019 Number: 00048/277/19/904/24 amounting to Rp416,222.

i. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00049/277/19/904/24 amounting to Rp408,412.

j. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00050/277/19/904/24 amounting to Rp411,982.

k. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00051/277/19/904/24 amounting to Rp410,111.

l. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the July 2019 Period Number: 00009/177/19/904/24 amounting to Rp29,687.

l. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.

m. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.

n. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area Period of September 2019 Number: 00011/177/19/904/24 amounting to Rp29,066.

o. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00012/177/19/904/24 amounting to Rp28,520.

p. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00013/177/19/904/24 amounting to Rp28,770.

q. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00014/177/19/904/24 amounting to Rp28,639.

r. STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period of December 2019 Number: 00082/107/19/904/24 amounting to Rp56,329,475.

On August 7, 2024, the Bank made payment of the SKPKB and STP principal as referred to above amounting to Rp17,774,886,922 and on August 9, 2024 a request for 100% sanction relief was submitted which is still awaiting a decision from the Tax Office.

On December 4, 2024, the Bank made a payment for the 2021 tax shortfall based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 amounting to Rp10,647,597,708. Charged to current tax expense of Rp10,293,153,642, the remainder is charged to tax expenses.

On December 6, 2024, the Bank made a payment for the 2020 tax shortfall based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 amounting to Rp219,281,153. Charged to current tax expense of Rp142,499,630, the remainder is charged to tax expenses.

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *20. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Rupiah			*Rupiah*
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	17.081.274.947	14.202.797.814	*Accrued Deposit Interest*
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	5.513.924.628	4.789.881.083	*Accrued Saving Interest*
Biaya bunga lainnya yang masih harus dibayar	-	1.031.833.333	*Accrued Other Interest*
Sub - Jumlah	**22.595.199.575**	**20.024.512.230**	***Sub Total***
Mata uang asing			*Foreign Currency*
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	231.124	167.057	*Accrued Deposit Interest*
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	39.433	26.483	*Accrued Saving Interest*
Sub - Jumlah	**270.557**	**193.540**	***Sub- Total***
Jumlah	**22.595.470.132**	**20.024.705.770**	***Total***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION*

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bakti dan penghargaan masa bakti proporsional, imbalan masa bebas tugas yang dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020.

The Bank provides long-term employee benefits and post-employee benefit to the eligible employees of the pension plan, long service leave, service reward benefit and service reward benefit proportional, severance compensation are calculated based on the Company Regulation, which comply with Omnibus Law No.11/2020.

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja pada 31 Desember 2024 dihitung oleh aktuaria independen Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dari laporan aktuaria pada tanggal 7 Januari 2025.

Actuarial assessment of long-term employee benefits and post- employee benefit as of December 31, 2024 is calculated by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan, using the projected unit credit method from the actuarial reports on January 7, 2025.

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

The Bank's pension plan managed by Bali Regional Development Bank Pension Fund. Employee contribution is 5% (five percent) of basic salary of those employees and the Bank bear the difference.

Program penghargaan masa bakti dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 (tiga) kali, 5 (lima) kali, 6 (enam) kali dan 7 (tujuh) kali dari penghasilan bulan terakhir kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun dengan syarat-syarat tertentu.

Service reward benefit managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service reward benefit amount for 3 (three) times, 5 (five) times, 6 (six) and 7 (seven) times that of last month's employee's salary with tenure of 15 years, 25 years, 30 years and 35 years and certain conditions.

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

Imbalan masa bebas tugas dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Severance compensation managed by the Bank and is an employee benefits program for employees who will retire.

Program cuti berimbalan jangka panjang dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Long service leave benefit managed by the Bank and is an employee benefits program for employees for reimbursement of leave entitlements.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: / ***The liability for employee benefits consists of:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Program Imbalan Kerja	147.916.251.836	141.707.715.620	*Employee Benefits Program*
Program Dana Pensiun	11.488.933.649	-	*Pension Fund Program*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	106.371.461.005	90.553.502.824	*Other Long term benefit*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**265.776.646.490**	**232.261.218.444**	***Ending Balance of Defined benefit***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

Expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows :

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	**31 Desember 2023 / *December 31, 2023***	
Biaya Karyawan (Catatan 31)	43.148.062.936	25.059.590.501	*Employee Costs (Note 31)*
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian (Keuntungan) Aktuaria	14.981.663.737	(1.725.689.570)	*Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial (Gain) Loss*
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	**58.129.726.673**	**23.333.900.931**	***Expense Recognized in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***

Dana Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

Pension Funds

Defined Benefit Pension Programme

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	**31 Desember 2023 / *December 31, 2023***	
Tingkat Diskonto	7,00%	7,00%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%	2,50%	*Salary Increase Rate Basic Pension Per Year*
Tingkat Mortalita	1=TMI'2019	1=TMI'2019	*Mortality Rate*
Tingkat Pengunduran Diri per Tahun			*Resignation Rate*
< 30 tahun	6,00%	6,00%	*Age <30*
54 - 56 tahun	0,00%	0,00%	*Age 54 - 56*
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	*Disability Rate*

a. Aset program neto

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

a. Program Net Asset

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024.. compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	**31 Desember 2023 / *December 31, 2023***	
Nilai Wajar Aset Program	472.419.692.559	456.682.153.707	*Fair Value of Asset Program*
Nilai Kini Kewajiban	(483.908.626.208)	(448.939.989.741)	*Present Value of Benefit Obligation*
Status Pendanaan	**(11.488.933.649)**	**7.742.163.966**	***Funded Status***

Rekonsiliasi yang menunjukkan pergerakan selama periode dalam kewajiban bersih (atau aset) yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

Reconciliation showing the movements during the period in the net liability (or asset) recognized in the balance sheet:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	**31 Desember 2023 / *December 31, 2023***	
Saldo Awal Tahun	-	-	*Beginning Balance*
Beban	11.623.967.498	11.966.745.653	*Interest on defined benefit*
Iuran	(8.110.515.310)	(8.146.604.292)	*Contribution*
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian (Keuntungan) Aktuaria	7.975.481.461	(3.820.141.361)	*Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial (Gain) Loss*
Saldo Akhir Kewajiban Bersih	**11.488.933.649**	**-**	***Ending Balance for Net Liability***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN) / ***21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)***

b. Rekonsiliasi nilai wajar aset program bank adalah sebagai berikut: / ***b. The reconciliation of the fair value of the bank's plan assets is as follows:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Saldo Awal Tahun	456.682.153.707	438.552.496.851	*Beginning Balance*
Bunga atas Imbalan Pasti	32.400.307.518	32.095.878.395	*Interest on defined benefit*
Iuran	11.227.735.178	11.258.920.476	*Contribution*
Pembayaran Manfaat	(27.890.503.844)	(25.225.142.015)	*Benefits paid*
Saldo Akhir Nilai Wajar Aset Program	**472.419.692.559**	**456.682.153.707**	***Ending Balance for Value of Asset Program***

c. Beban imbalan kerja adalah sebagai berikut: / ***c. Employee benefit expense are as follows :***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Biaya Jasa Kini	13.088.587.236	13.155.051.264	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	-	-	*Past Service Cost*
Biaya Bunga	30.393.736.302	28.889.299.499	*Interest Cost*
Hasil yang Diharapkan Dari Aset Program	(32.400.307.518)	(32.095.878.395)	*Expected return on Plan assets*
Bunga atas Dampak Batas atas Dari Aset	541.951.478	2.018.273.285	*Interest on asset ceiling Impact of asset*
Beban Imbalan Kerja	**11.623.967.498**	**11.966.745.653**	***Employee Benefit Expense***

d. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut: / ***d. The change in the present value of defined benefit liability are as follows:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Saldo Awal Tahun	448.939.989.741	410.714.244.639	*Beginning Balance*
Biaya Jasa Kini	13.088.587.236	13.155.051.264	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	-	-	*Past Service Cost*
Biaya Bunga	30.393.736.302	28.889.299.499	*Interest Cost*
Pembayaran Manfaat	(24.773.283.976)	(22.112.825.831)	*Benefits Paid*
Kerugian aktuaria	16.259.596.905	18.294.220.170	*Actuarial Loss*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**483.908.626.208**	**448.939.989.741**	***Ending Balance Present Value Benefit Liability***

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Tabel berikut menunjukan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

e. Sensitivity level analysis for discount rate risk

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation*	
	Jumlah/ *Amount*	Perubahan / *Changes*
7,00%	483.908.626.208	0%
-1%	544.246.254.914	12,47%
+1%	434.496.132.769	-10,21%

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*

Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation*	
	Jumlah/ *Amount*	Perubahan / *Changes*
7,00%	448.939.989.741	0%
-1%	504.055.565.997	12,28%
+1%	403.678.772.840	-10,08%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of financial position.

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Program Imbalan Kerja

Program imbalan dihitung sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020. Termasuk dalam program ini adalah THT.

Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan kerja pada laporan aktuaris tertanggal 3 Januari 2025 dan 3 Januari 2024 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Employee Benefits Program

The rewards program is calculated in accordance with Omnibus Law No. 11/2020. Included in the program is THT.

The following are assumptions used in the calculation of the employee benefit pension plan as of January 3, 2025 and January 3, 2024 respectively for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Tingkat Diskonto	6,75% - 7,00%	6,75% - 7,00%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%	2,50%	*Annual pension Based salary increase rates per year*
Tingkat Mortalita	1=TMI'2019	1=TMI'2019	*Mortality Rate*
Usia Pensiun	56 tahun / *56 years*	56 tahun / *56 years*	*Retirement Age*
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	*Disability Rate*

a. Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

a. The liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	265.776.646.490	232.261.218.444	*Present Value of Benefit Obligation*
Nilai Wajar Aset Program	--	--	*Fair Value of Asset Program*
Liabilitas Yang Diakui Dalam Laporan Posisi Keuangan	**265.776.646.490**	**232.261.218.444**	***Liability Recognized in the Statement of Financial Position***

b. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk program imbalan kerja adalah sebagai berikut:

b. Expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income for employee benefits program are as follows:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Biaya Jasa Kini	7.901.681.438	7.962.978.966	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	-	-	*Past Service Cost*
Biaya Bunga	9.015.884.729	9.375.094.197	*Interest Cost*
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	**16.917.566.167**	**17.338.073.163**	***Expenses Recognized in the Profit or Loss Statements***
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja-Neto			*Remeasurement of the net Liability for employee benefits - Net*
Dampak karena perubahan asumsi finansial	(2.384.613.854)	(1.372.966.583)	*Effect to changes in financial assumptions*
Dampak karena penyesuaian pengalaman	9.390.796.130	(352.722.987)	*Effect to experience adjusments*
Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	**7.006.182.276**	**(1.725.689.570)**	***Recognized in other Comprehensive Income***

c. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut:

c. The allowance changes are as follows:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Saldo Awal Tahun	141.707.715.620	137.064.461.828	*Beginning Balance*
Penambahan Tahun Berjalan	16.917.566.167	17.338.073.163	*Addition during the year*
Nilai Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lain	7.006.182.276	(1.725.689.570)	*Amount recognized in other Comprehensive Income*
Pembayaran Manfaat	(17.715.212.227)	(10.969.129.801)	*Benefit Paid*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**147.916.251.836**	**141.707.715.620**	***Ending Balance of Current cost Defined Benefits***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN) / *21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)*

Imbalan jangka panjang lainnya / ***Other long-term benefit***

d. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk imbalan jangka panjang adalah sebagai berikut: / ***d. Expenses recognized in the statements of income and other comprehensive income for long-term benefits are as follows:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Biaya Jasa Kini	7.128.617.584	7.654.375.881	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	5.757.999.729	5.874.921.679	*Interest Cost*
Keuntungan Aktuaria atas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	9.830.427.268	(5.807.780.222)	*Actuarial Gain of Other Long Term Employee Benefit*
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	**22.717.044.581**	**7.721.517.338**	***Expenses Recognized in the Income Statements***
(Keuntungan) Kerugian Aktuaria	-	--	*Actuarial Gain/ Loss*
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	**22.717.044.581**	**7.721.517.338**	***Expenses Recognized in the Income Statements and Other Comprehensive Income***

e. Perubahan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / ***e. Changes in the liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Saldo Awal Tahun	90.553.502.824	89.609.436.359	*Beginning Balance*
Penambahan Tahun Berjalan	12.886.617.313	13.529.297.560	*Additions during the year*
Keuntungan Aktuaria yang diakui Tahun Berjalan	9.830.427.268	(5.807.780.222)	*Net Actuarial Gain Recognized during the Year*
Pembayaran Manfaat	(6.899.086.400)	(6.777.450.873)	*Benefits Paid*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**106.371.461.005**	**90.553.502.824**	***Ending Balance of Present Value of Defined Benefit***

22. LIABILITAS SEWA / *22. LEASE LIABILITIES*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Mesin ATM	10.685.885.947	8.333.477.034	*ATM Machine*
Kendaraan	2.544.985.357	3.536.153.131	*Vehicles*
Tanah	1.825.689.638	1.697.200.545	*Land*
Bangunan	-	9.403.136	*Buildings*
Jumlah	**15.056.560.942**	**13.576.233.846**	***Total***

23. LIABILITAS LAIN-LAIN / *23. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Jasa Produksi dan Tantiem	186.838.605.662	156.897.913.950	*Production Service Bonus and Tantiem*
Rupa-rupa Kewajiban	61.016.719.743	56.212.643.655	*Other Liabilities*
Cadangan Iuran Pensiun	47.789.063.478	-	*Allowance Pension Contribution*
Penghargaan Direksi	30.746.300.943	25.837.990.826	*Service Gratuity for the Directors*
Penghargaan Dewan Komisaris	10.980.821.765	9.227.853.866	*Service gratuity for Board of Commissioners*
Penangguhan Remunerasi Pengurus dan karyawan	10.211.596.802	7.663.020.256	*Deferral of Management Remuneration and employee*
Estimasi Kerugian atas Transaksi Rekening Administratif	615.586.506	3.645.055.910	*Estimated Losses on Transactions of Administration Account*
Titipan Pajak Dan Retribusi Daerah	470.824.670	865.830.545	*Deposit of Local Taxes and Retribution*
Titipan Pembayaran Lainnya	405.880.412	5.044.246.518	*Other Payment Deposit*
Provisi Bank Garansi Diterima Di Muka	398.284.556	499.135.368	*Advance Bank Guarantee Fees*
Pendapatan Bunga Kredit Yang Ditangguhkan	145.291.127	179.603.445	*Deferred Interest Income for Loans*
Lainnya	1.734.262.093	2.196.694.893	*Others*
Jumlah	**351.353.237.757**	**268.269.989.232**	***Total***

23. LIABILITAS LAIN-LAIN (LANJUTAN)

Rupa-rupa kewajiban terdiri dari imbal jasa penjamin dan lainnya terdiri dari dana titipan, setoran jaminan *safe deposit box* , dan setoran jaminan bank garansi lainnya.

Cadangan kerugian ekspektasian atas transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut:

23. OTHER LIABILITIES (CONTINUED)

Other liabilities consist of guarantor fees and others consist of safe deposit funds, safe deposit box guarantee deposits, and other bank guarantee deposits.

Expected credit losses on transactions of administration account are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	**31 Desember 2023 / *December 31, 2023***	
Saldo awal tahun	3.645.055.910	7.277.666.006	*Balance, beginning of year*
Penyisihan (pemulihan)			*Provision (reversal)*
Tahun Berjalan	(3.029.469.404)	(3.632.610.096)	*during the year*
Jumlah	**615.586.506**	**3.645.055.910**	***Balance, end of period***

24. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

24. SHARE CAPITAL

As of December 31, 2024 and 2023, the shareholders composition are as follows:

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Pemegang Saham/ *Shareholder*	**Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Jumlah dalam Rupiah/ *Amount in Rupiah***	**Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage***
Pemerintah Provinsi Bali / *Province of Bali*	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	300.000	300.000.000.000	12,46%
Pemerintah Kabupaten / *Regencies Government*			
- Badung	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
- Gianyar	100.000	100.000.000.000	4,15%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,32%
- Karangasem	43.550	43.550.000.000	1,81%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,54%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,31%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,29%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,56%
Jumlah / *Total*	**2.407.177**	**2.407.177.000.000**	**100,00%**

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*

Pemegang Saham/ *Shareholder*	**Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Jumlah dalam Rupiah/ *Amount in Rupiah***	**Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage***
Pemerintah Provinsi Bali / *Province of Bali*	719.912	719.912.000.000	35,11%
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	214.476	214.476.000.000	10,46%
Pemerintah Kabupaten / *Regencies Government*			
- Badung	850.617	850.617.000.000	41,49%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,90%
- Karangasem	42.550	42.550.000.000	2,08%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,81%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,53%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,51%
- Gianyar	29.604	29.604.000.000	1,45%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,66%
Jumlah / *Total*	**2.050.257**	**2.050.257.000.000**	**100,00%**

Selama periode 31 Desember 2024, pemegang saham Bank telah memberikan kontribusi tambahan.

During the period December 31, 2024, the Bank's shareholders have made additional contributions.

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 13 Mei 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 70.396 (tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp70.396.000.000 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0109170 tanggal 14 Mei 2024.

Based on Deed no. 15 dated May 13, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, the Gianyar Regency Government approved an increase in paid-in capital of 70,396 (seventy thousand three hundred and ninety six) shares or a nominal value of Rp70,396,000,000 (seventy billion three hundred and ninety six million rupiah) so that now there are 100,000 (one hundred thousand) shares or a total nominal value of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0109170 dated May 14, 2024.

24. MODAL SAHAM (LANJUTAN)

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 23 Juli 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 43.550 (empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp43.550.000.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-074845 tanggal 23 Juli 2024.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Oktober 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 85.524 (delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp85.524.000.000 (delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0203654 tanggal 23 Oktober 2024.

Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 24 Desember 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 1.050.617 (satu juta lima puluh ribu enam ratus tujuh belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.050.617.000.000 (satu triliun lima puluh miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0228472 tanggal 27 Desember 2024.

Tambahan setoran modal tersebut telah dilaporkan dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

24. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

Based on Deed no. 36 dated July 23, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, the Karangasem Regency Government approved an increase in paid-in capital of 1,000 (one thousand) shares or a nominal value of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) so that now there are 43,550 (forty three thousand five hundred and fifty) shares or a total nominal value of Rp43,550,000,000 (fourty three billion five hundred and fifty million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-074845 dated July 23, 2024.

Based on Deed No. 31 dated October 23, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, it was approved that the Denpasar City Government increase its paid-up capital by 85,524 (eighty five thousand five hundred twenty four) shares or with a nominal value of Rp85,524,000,000 (eighty five billion five hundred twenty four million rupiah) so that now it is 300,000 (three hundred thousand) shares or with a total nominal value of Rp300,000,000,000 (three hundred billion rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0203654 dated October 23, 2024.

Based on Deed No. 78 dated December 24, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, it was approved that the Badung Regency Government increase its paid-up capital by 200,000 (two hundred thousand) shares or with a nominal value of Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) so that now it is 1,050,617 (one million fifty thousand six hundred and seventeen) shares or with a total nominal value of Rp1,050,617,000,000 (one trillion fifty billion six hundred and seventeen million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0228472 dated December 27, 2024.

Those additional paid-in capital have been reported for registration to and recorded by Financial Services Authority.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selama 31 Desember 2024 dan 2023, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

During December 31, 2024 and 2023, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Pemegang saham/ *Shareholders*	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Penambahan Modal Disetor/ *Additional Paid In Capital*	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ *Reclassification to Share Capital*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*
Pemerintah Provinsi Bali / *Province of Bali*	-	-	-	-
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	-	85.524.000.000	(85.524.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ *Regencies Government*				
- Badung	-	200.000.000.000	(200.000.000.000)	-
- Buleleng	312.707	-	-	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	458.456	70.395.541.544	(70.396.000.000)	-
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	2.340.338	**356.919.541.544**	**(356.920.000.000)**	**1.881.882**

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR (LANJUTAN)

Selama 31 Desember 2024 dan 2023, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (CONTINUED)

During December 31, 2024 and 2023, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*

Pemegang saham/ *Shareholders*	1 Januari 2023 / *January 1, 2023*	Penambahan Modal Disetor/ *Additional Paid In Capital*	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ *Reclassification to Share Capital*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*
Pemerintah Provinsi Bali / *Province of Bali*	-	75.000.000.000	(75.000.000.000)	
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	-	30.000.000.000	(30.000.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ *Regencies Government*				
- Buleleng	312.707	5.557.000.000	(5.557.000.000)	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	1.500.000.000	(1.500.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	458.456	-	-	458.456
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	2.340.338	**112.057.000.000**	**(112.057.000.000)**	**2.340.338**

Seluruh jumlah setoran di atas sementara dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor dan baru akan dipindahkan sebagai Modal Saham setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di catat di Otoritas Jasa Keuangan.

The entire amount of the contribution above is temporarily recorded as Additional Paid-in Capital and the shares will be transferred as capital share after obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights and recorded at the Financial Services Authority.

26. PENGGUNAAN SALDO LABA

Penggunaan laba bersih tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 41 tanggal 23 Februari 2024, Notaris I Made Widiada, S.H.

Penggunaan laba bersih tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 47 tanggal 22 Februari 2023, Notaris I Made Widiada, S.H.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba tahun 2023 dan 2022 ditetapkan sebagai berikut:

26. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Distribution of net income on 2023 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 41 dated February 23, 2024, Notary I Made Widiada, S.H.

Distribution of net income on 2022 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 47 dated February 22, 2023, Notary I Made Widiada, S.H.

Based on the above Shareholder Annual General Minutes of Meeting, the distribution of income in 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Dividen	553.671.231.988	452.637.208.122	*Dividends*
Cadangan Umum	184.557.077.329	150.879.069.374	*General reserve*
Jumlah	**738.228.309.317**	**603.516.277.496**	***Total***

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

The amount of dividends declared for each period are as follows:

Periode	Jumlah / *Total*	Per Saham / *Per Share*	*Period*
Distribusi pada tahun 2024 untuk laba tahun 2023	553.671.231.988	230.009	*Distribution in 2024 for 2023 profit*
Distribusi pada tahun 2023 untuk laba tahun 2022	452.637.208.122	220.771	*Distribution in 2023 for 2022 profit*

Jasa produksi dan beban C*orporate Social Responsibility* dibukukan sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Employee bonus and Corporate Social Responsibility expenses are recorded as expense in the current year statement of profit and loss and other comprehensive income.

27. PENDAPATAN BUNGA / *27. INTEREST INCOME*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pinjaman yang diberikan	2.487.122.926.271	2.467.518.399.507	*Loans*
Efek - efek	680.646.557.515	559.874.059.736	*Marketable Securities*
Penempatan pada Bank Lain	164.315.110.379	55.007.669.522	*Placements with Other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia	15.770.845.656	18.565.385.419	*Placements with Bank Indonesia*
Jumlah	**3.347.855.439.821**	**3.100.965.514.184**	***Total***

28. BEBAN BUNGA / *28. INTEREST EXPENSE*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Simpanan dari Nasabah			*Deposits from Customers*
Deposito Berjangka	380.619.852.053	373.359.912.172	*Time Deposits*
Tabungan	316.146.838.574	258.018.359.336	*Savings Account*
Giro	88.668.684.765	76.050.287.284	*Current Accounts*
Penjaminan	82.863.726.126	66.974.110.847	*Guarantee*
Premi Asuransi Untuk Program Penjaminan Dana Nasabah	67.269.494.280	54.274.346.129	*Insurance Premium for Premium on Deposit Insurance The Customer*
Simpanan dari Bank Lain	17.286.668.096	17.989.824.483	*Deposits from Another Bank*
Call Money dan Repo	8.856.564.263	7.047.384.724	*Call Money and Repo*
Pinjaman yang Diterima	3.403.699.034	3.645.413.972	*Borrowings*
Beban Bunga SGU	1.948.858.914	1.523.359.567	*Interest Expense SGU*
Pinjaman yang diberikan	1.775.460.347	403.289.970	*Loans*
Subsidi Kredit	1.280.160.000	10.665.663	*Subsidized Credit*
Jumlah	**970.120.006.452**	**859.296.954.147**	***Total***

29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *29. OTHER OPERATING INCOME*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Administrasi	74.812.490.187	65.680.060.457	*Administration*
Penerimaan Kembali Kredit Hapus Buku	82.060.634.698	52.972.639.564	*Recovery of Account Written-off*
Fee	38.882.314.900	33.566.290.439	*Fees*
Denda Kredit	11.862.632.872	12.180.818.784	*Loan Penalties*
Tata Usaha Kredit	5.970.151.840	5.586.457.204	*Loan Administration*
Valuta Asing	1.049.398.683	611.302.424	*Foreign Exchange Gain*
Tabungan Pasif dan Tutup	1.160.092.618	587.682.098	*Savings Passive and Closed*
Keuntungan penjualan penyertaan saham	-	299.291.000	*Gain from sale of share investments*
Safe Deposit Box	88.120.000	87.280.000	*Safe Deposit Box*
Sub - Jumlah	215.885.835.798	171.571.821.970	*Sub - Total*
Pendapatan Provisi dan Komisi			*Provision Income and Commissions*
Jasa Bank	9.767.737.892	8.763.715.438	*Bank Services*
Sub - Jumlah	9.767.737.892	8.763.715.438	*Sub - Total*
Lain-lain	1.085.572.298	988.475.730	*Others*
Jumlah	**226.739.145.988**	**181.324.013.138**	***Total***

30. PEMBENTUKAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *30. PROVISION (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pinjaman yang Diberikan	139.150.563.768	336.861.975.904	*Loans*
Tagihan lainnya	10.094.297.118	-	*Other Bills*
Giro pada Bank Lain	12.789.130	2.013.027	*Current Accounts with Other Banks*
Penempatan pada Bank-bank Lain	(284.184.479)	1.683.933.735	*Placements with Other Banks*
Efek-efek	(28.500.000)	(206.814.100)	*Securities*
Penyertaan	-	(75.000.000)	*Investment In Shares*
Jumlah	**148.944.965.537**	**338.266.108.566**	***Total***

31. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

31. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Tunjangan dan Insentif	302.649.446.855	180.121.901.643	*Benefits and Incentives*
Gaji, Upah dan Honorarium	244.931.232.370	213.234.852.179	*Salaries, Wages and Honorarium*
Jasa Produksi dan Tantiem	187.552.435.752	157.611.744.039	*Production Services and Tantiem*
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 21)	43.148.062.936	25.059.590.501	*Post-Employment Benefits (Note 21)*
Makan dan Lembur	32.195.136.464	33.295.212.636	*Meal and Overtime*
Representasi dan Penghargaan	22.388.750.692	22.208.323.998	*Representation and Service Awards*
Pendidikan dan Latihan	21.869.430.485	14.766.371.849	*Education and Training*
Lain-lain	2.636.263.447	2.334.274.788	*Others*
Jumlah	**857.370.759.001**	**648.632.271.633**	***Total***

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Pejabat Eksekutif masing-masing adalah sebesar Rp113.650.175.097 dan Rp67.978.620.391 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the amount of gross salaries, benefits and bonuses of the Board of Commissioners, Directors, Committee and Executive Officers, amounted to Rp113,650,175,097 and Rp67,978,620,391 a respectively, with details as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Jumlah Anggota/ *Total Members*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefit*	Bonus dan Penghargaan/ *Bonusses and Service Guarantee*	Jumlah/ *Total*
Direksi/ *Directors*	5	5.982.000.000	22.344.170.622	37.856.355.031	66.182.525.653
Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*	5	3.229.200.000	5.429.176.200	8.198.017.697	16.856.393.897
Pejabat Eksekutif / *Executive Officers*	28	2.343.390.000	14.898.874.132	12.050.928.401	29.293.192.533
Komite Audit/ *Audit Committe*	2	360.000.000	41.731.507	257.300.000	659.031.507
Komite Pemantau Risiko/ *Risk Monitoring Committee*	1	180.000.000	23.066.759	184.800.000	387.866.759
Komitee Remunerasi dan Nominasi/ *Remuneration and Nomination Committee*	1	180.000.000	18.664.748	72.500.000	271.164.748
Jumlah	**42**	**12.274.590.000**	**42.755.683.968**	**58.619.901.129**	**113.650.175.097**

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*				
	Jumlah Anggota/ *Total Members*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefit*	Bonus dan Penghargaan/ *Bonusses and Service Guarantee*	Jumlah/ *Total*
Direksi/ *Directors*	5	5.292.000.000	11.296.385.006	19.017.605.344	35.605.990.350
Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*	5	1.665.320.000	2.374.405.319	3.723.863.396	7.763.588.715
Pejabat Eksekutif / *Executive Officers*	27	1.991.724.664	11.603.638.540	9.652.334.723	23.247.697.927
Komite Audit/ *Audit Committe*	2	210.000.000	38.568.804	234.675.000	483.243.804
Komite Pemantau Risiko/ *Risk Monitoring Committee*	2	210.000.000	37.352.587	219.675.000	467.027.587
Komitee Remunerasi dan Nominasi/ *Remuneration and Nomination Committee*	1	180.000.000	26.397.008	204.675.000	411.072.008
Jumlah	**42**	**9.549.044.664**	**25.376.747.264**	**33.052.828.463**	**67.978.620.391**

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Outsourcing	61.277.633.936	50.858.455.706	*Outsourcing*
Otomasi	60.657.001.114	50.192.262.984	*Automation*
Tamu, *Souvenir*, Sumbangan	40.533.434.629	31.280.940.811	*Guest, Souvenirs, Donation*
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 11)	29.099.874.001	22.168.887.496	*Depreciation of Fixed Assets (Note 11)*
Pemeliharaan dan Perbaikan	18.283.045.302	15.634.425.507	*Maintenance and Repairs*
Rumah Tangga Kantor dan Lainnya	18.010.303.727	18.761.284.275	*Office Expenses and Others*
Amortisasi Aset Hak Guna (Catatan 13)	17.339.107.163	17.435.903.236	*Amortization of Right-of-Use Assets (Note 13)*
Biaya Iuran OJK	16.407.334.023	15.934.676.237	*OJK Contribution Expenses*
Biaya CSR	15.227.359.885	14.727.808.442	*CSR Expenses*
Iklan dan Promosi	14.408.543.686	14.408.477.479	*Advertising and Promotion*
Ongkos Bank	12.450.190.055	23.973.415.912	*Bank Charges*
Listrik, Air dan Telepon	11.677.731.559	10.319.724.517	*Electrical, Water and Telephone*
Perjalanan Dinas	10.276.536.420	9.898.002.625	*Travel Expenses*
Sewa	8.968.681.600	7.693.471.939	*Rent Expenses*
Premi Asuransi	6.700.036.803	6.194.948.651	*Insurance Premium*
Jasa Profesional	6.391.030.731	8.290.029.258	*Profesional Fee*
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 12)	4.738.667.375	3.741.819.939	*Amortization of Intagible Assets (Note 12)*
Rapat	4.269.528.291	4.162.161.066	*Meeting*
Keamanan	1.802.928.200	1.778.701.000	*Security*
Pajak	634.612.906	525.731.318	*Taxes*
Denda dan Sanksi	359.469.657	42.040.000	*Penalty*
Lain-lain	13.245.449.937	13.034.495.314	*Others*
Jumlah	**372.758.501.000**	**341.057.663.712**	***Total***

33. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL / *33. NON - OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pendapatan Non - Operasional			***Non Operating Income***
Selisih Kurs	1.544.065.747	452.142.697	*Foreign Exchange Difference*
Laba Penjualan Inventaris Kantor (Catatan 11)	-	244.343.541	*Gain from Sale of Office Equipment (Note 11)*
Sewa	182.138.134	195.213.900	*Rent*
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai uang muka pajak	48.424.954.723	-	*Recovery from impairment Impairment loss of tax advance*
Lain-lain	5.040.301.635	4.431.670.483	*Others*
Sub - Jumlah	**55.191.460.239**	**5.323.370.621**	*Sub - Total*
Beban Non - Operasional			***Non - operating expense***
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	(3.813.609.889)	(4.045.501.676)	*Strengthening Implementation of Worship*
Beban Pajak	(30.512.362.123)	(1.267.032.520)	*Tax Expense*
Duka	(563.016.196)	(519.035.952)	*Grief*
Kerugian Penghapusan Inventaris Kantor (Catatan 11)	(386.736.454)	-	*Loss from Disposal of Office Equipment (Note 11)*
Lain-lain	(5.805.394.876)	(4.972.191.994)	*Others*
Sub - Jumlah	(41.081.119.538)	(10.803.762.142)	*Sub - Total*
Jumlah	**14.110.340.701**	**(5.480.391.521)**	***Total***

34. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *34. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Komitmen			***Commitment Liabiities***
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	386.981.506.950	537.270.109.026	*Unused Credit Facilities to Debtors*
Jumlah Liabilitas Komitmen - Bersih	**386.981.506.950**	**537.270.109.026**	***Total Commitments Liability - Net***
Kontinjensi			***Contingencies***
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	80.268.037.878	115.121.429.956	*Interest Income in Settlement*
Sub - Jumlah	**80.268.037.878**	**115.121.429.956**	***Sub - Total***
Liabilitas Kontinjensi			*Contingent Liabilities*
Bank Garansi yang Diterbitkan	(104.919.480.197)	(177.581.312.056)	*Bank Guarantee Issued*
Sub - Jumlah	**(104.919.480.197)**	**(177.581.312.056)**	***Sub - Total***
Jumlah Liabilitas Kontinjensi - Bersih	**(24.651.442.318)**	**(62.459.882.101)**	***Total Contigent Liability - Net***

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak - pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat telah disepakati bersama.

35. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, Bank enter into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat dari Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature of Transactions*
Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se Wilayah Bali / *Provincial, City, and Regency Governments of Bali Region*	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan / *Deposits*
Manajemen Kunci / *Key Management*	Komisaris, Direktur dan Pejabat Eksekutif / *Commissioners, Directors and Executive Officers*	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / *Loans and Deposits*
Perusahaan yang Dimiliki oleh Pemegang Saham / *Ownership of Shareholders*	Pengendalian Bersama oleh Pemegang Saham / *Joint Control by the Shareholders*	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / *Loans and Deposits*

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. The transactions in the balance consist of:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pinjaman yang diberikan			***Loans***
Keluarga Direksi dan Karyawan Kunci	26.419.046.747	25.561.390.510	*Family Directors and Key Employees*
Komisaris	3.214.217.807	151.067.630	*Commissioner*
Lainnya	2.588.719.600	1.729.406.954	*Other*
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	32.221.984.154	27.441.865.094	*Total Loans*
Persentase terhadap Jumlah Aset	0,08%	0,08%	*Percentage to Total Asset*
Simpanan dari Nasabah			***Deposits from Customers***
Giro	540.226.399.665	126.572.763.689	*Current accounts*
Tabungan	25.296.065.082	16.377.822.782	*Savings*
Deposito	25.126.901.368	19.436.223.037	*Time deposits*
Jumlah Simpanan dari Nasabah	590.649.366.115	162.386.809.508	*Total Deposits from Customers*
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	1,76%	0,54%	*Percentage to Total Liabilities*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci			***Compensation of Key Management Personel***
Bonus dan Penghargaan	58.619.901.129	33.052.828.463	*Bonuses and Service Gratuity*
Tunjangan	42.755.683.968	25.376.747.264	*Benefits*
Gaji	12.274.590.000	9.549.044.664	*Salaries*
Jumlah Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	113.650.175.097	67.978.620.391	*Total Compensation of Key Management Personel*
Persentase Terhadap Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	0,13%	0,10%	*Percentage of Compensation of Key Management Personnel*

Tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas saldo transaksi selama tahun berjalan dengan personil manajemen kunci, dan tidak ada penyisihan khusus yang dibuat untuk kerugian penurunan nilai atas transaksi dengan personil manajemen kunci dan kerabat dekat mereka pada akhir tahun.

There were no impairment losses on the transaction balance during the year with key management personel, and no special allowance for impairment losses on transactions with key management personnel and their close relatives at the end of the year.

36. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

36. MONETARY ASSET AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		31 Desember 2023 / *December 31, 2023*		
	Valuta Asing / *Foreign Exchange*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Valuta Asing / *Foreign Exchange*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Aset Moneter					***Monetary Assets***
Kas					*Cash*
Kas Harian Teller	21.891	352.335.645	64.690	996.031.930	*Teller daily cash*
Giro pada Bank Indonesia	51.500	828.892.500	51.500	792.945.500	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	1.899.150	30.566.821.020	1.314.661	20.241.832.646	*Current Accounts with Other Bank*
Liabilitas Moneter					***Monetary Liabilities***
Giro	4.761	76.629.583	4.892	75.329.053	*Current Account*
Tabungan	82.535	1.328.396.640	60.004	923.880.972	*Savings*
Simpanan Berjangka	151.800	2.443.221.000	110.500	1.701.368.500	*Term Deposits*
Rupa-rupa Liabilitas	8.029	129.223.053	8.021	123.499.953	*Other Liabilities*
Rekening Perantara Valuta	1.723.613	27.741.543.509	1.246.183	19.187.485.348	*Currency intermediary Account*

37. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

37. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES

Tabel di bawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below sets out the carrying values and fair values of financial assets and liabilities in statements of financial position as December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		31 Desember 2023 / *December 31, 2023*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Biaya perolehan diamortisasi					***Measured at amortised cost***
Kas	580.735.597.835	580.735.597.835	569.570.584.235	569.570.584.235	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.694.875.382.728	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	2.393.875.393.891	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain bersih	45.087.137.075	45.087.137.075	70.081.387.110	70.081.387.110	*Current Account with Other Bank Net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Bersih	3.143.158.664.835	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	2.526.747.434.599	*Placement with Bank Indonesia and Other Bank net*
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	21.525.087.396.052	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	19.918.053.709.375	*Loans - Net*
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-	3.965.877.652.040	3.965.877.652.040	*Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement*
Aset Lain-lain	229.637.221.111	229.637.221.111	213.233.323.524	213.233.323.524	*Other Assets*
Efek-efek	9.760.077.271.692	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	4.356.007.703.645	*Securities*
Jumlah Aset Keuangan	**37.978.658.671.328**	**37.978.658.671.328**	**34.013.447.188.419**	**34.013.447.188.419**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas Segera	74.679.631.081	74.679.631.081	103.394.989.302	103.394.989.302	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan dari Nasabah	32.167.791.208.809	32.167.791.208.809	27.948.417.302.868	27.948.417.302.868	*Deposit from Customers*
Simpanan dari Bank Lain	661.691.987.042	661.691.987.042	1.550.582.212.168	1.550.582.212.168	*Deposit from Other Bank*
Pinjaman yang Diterima	24.433.647.846	24.433.647.846	66.730.442.083	66.730.442.083	*Borrowings*
Beban yang Masih Harus Dibayar	22.595.470.132	22.595.470.132	20.024.705.770	20.024.705.770	*Accrued Expense*
Liabilitas Sewa	15.056.560.942	15.056.560.942	13.576.233.846	13.576.233.846	*Lease Liabilities*
Liabilitas lain-lain	351.353.237.757	351.353.237.757	268.269.989.232	268.269.989.232	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**33.317.601.743.609**	**33.317.601.743.609**	**29.970.995.875.269**	**29.970.995.875.269**	***Total Financial Liabilities***

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair value of financial assets and financial liabilities is measured on the following basis:

Aset Keuangan

Financial Assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan aset lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair value of short-term financial assets (generally less than one year), such as current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and other assets are carried at carrying amount due to their approximate fair value.

Nilai wajar atas efek-efek ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The fair value of securities is determined by reference to the latest market quotes published as of December 31, 2024 and 2023.

Estimasi nilai wajar pinjaman yang diberikan (umumnya kredit dengan bunga mengambang) merupakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Pinjaman yang diberikan disajikan bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The estimated fair value of loans (generally floating rate loans) represents the present value of estimated future expected future cash flows discounted at market rates. Loans are presented net of allowance for impairment losses.

37. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (LANJUTAN)

Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut harus segera dibayar pada saat ditagih.

Pengukuran nilai wajar yang diakui pada laporan posisi keuangan:

- Tingkat pertama pengukuran nilai wajar berasal dari kuotasi harga (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik.
- Tingkat kedua pengukuran nilai wajar berasal dari masukan lain selain dari kuotasi harga pasar yang sudah termasuk dalam tingkat pertama yang dapat diamati untuk aset maupun liabiltas, baik secara langsung (contohnya harga) atau tidak langsung (contohnya yang berasal dari harga).
- Tingkat ketiga pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang meliputi input untuk aset atau liabilitas jika tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati (masukan yang tidak dapat diamati).

37. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES (CONTINUED)

Financial Liabilities

The fair value of short-term financial liabilities (generally less than one year) such as deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities are at carrying amount due to their approximate fair value.

The estimated fair value of unsecured deposits amounts to the amount owed when the debts are due immediately to be paid at the time of collection.

Fair value measurement recognized in the statement of financial position:

- *The first level of measurement of fair value derives from price quotes (not adjusted) in the active market for identical assets and liabilities.*
- *The second level of fair value measurement comes from other inputs other than quoted market prices that are included in the first observable level for assets or liabilities, either directly (e.g. price) or indirectly (e.g., price-derived).*
- *The third level of fair value measurement derived from valuation techniques that includes inputs for assets or liabilities if not based on observable market data (inputs that can not be observed).*

38. INFORMASI SEGMEN

Bank melaporkan segmen wilayah geografis sebagai informasi segmen utama.

38. SEGMENT INFORMATION

The Bank reported geographical segment as its primary segment information.

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*
Dalam Jutaan Rupiah/ *In Million Rupiah*

	Bali/ *Bali*	Mataram/ *Mataram*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan Bunga	3.260.460	87.395	3.347.855	*Interest Income*
Beban Bunga	(919.030)	(51.090)	(970.120)	*Interest Expenses*
Pendapatan Bunga - Bersih	2.341.430	36.305	2.377.735	*Interest Income - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya	222.357	4.382	226.739	*Other Operating Income*
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(842.551)	(14.820)	(857.371)	*Salaries and Employee Benefits*
Umum dan Administrasi	(368.454)	(4.305)	(372.759)	*General and Administrative*
Beban Modifikasi	(44.021)	(520)	(44.541)	*Modification Expense*
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(146.242)	327	(145.915)	*Allowance for Impairment Losses*
Laba Operasional	1.162.519	21.369	1.183.888	*Operating Income*
Laba Bersih	857.198	21.267	878.465	*Net Profit*
Jumlah Aset	37.561.666	751.016	38.312.682	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	33.449.364	203.121	33.652.485	*Total Liabilities*

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*
Dalam Jutaan Rupiah/ *In Million Rupiah*

	Bali/ *Bali*	Mataram/ *Mataram*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan Bunga	3.021.586	79.380	3.100.966	*Interest Income*
Beban Bunga	(811.998)	(47.299)	(859.297)	*Interest Expenses*
Pendapatan Bunga - Bersih	2.209.588	32.081	2.241.669	*Interest Income - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya	174.963	6.361	181.324	*Other Operating Income*
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(636.501)	(12.131)	(648.632)	*Salaries and Employee Benefits*
Umum dan Administrasi	(337.222)	(3.836)	(341.058)	*General and Administrative*
Beban Modifikasi	(24.945)	(87)	(25.032)	*Modification Expense*
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(330.336)	(4.297)	(334.633)	*Allowance for Impairment Losses*
Laba Operasional	1.055.547	18.091	1.073.638	*Operating Income*
Laba Bersih	720.237	17.991	738.228	*Net Profit*
Jumlah Aset	33.552.162	758.550	34.310.712	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	30.111.445	209.099	30.320.544	*Total Liabilities*

39. RISIKO KREDIT

Dalam mengelola risiko kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kerangka kerja yang lengkap, yang memuat panduan-panduan mengenai proses perencanaan dan implementasi serta melakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terus dilakukan sejalan dengan pedoman Bank Indonesia, fokus penyempurnaan adalah melakukan pemisahan proses keputusan kredit per masing-masing segmen debitur. Hal ini didukung pula oleh kajian berkala dari panduan-panduan tersebut, guna mencapai perbaikan yang berkesinambungan. Beberapa faktor kunci dalam kerangka kerja manajemen risiko kredit adalah:

- Penentuan cakupan dan parameter-parameter yang digunakan dalam menyusun profil risiko kredit;
- Perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menjaga risiko kredit sesuai dengan *Risk Appetite* Bank, antara lain pemberian wewenang kepada pejabat kredit, dan
- Membangun sistem *database* yang kuat.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara objektif dan memberikan *rating* kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif dan produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit kepada konsumer.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap Kantor Cabang dengan penggunaan *Credit Scoring* dan *Credit Reviewer*.

Risiko kredit, yaitu:

a. Bidang perkreditan, meliputi *Non Performing Loan* (NPL), kecukupan agunan dan pertumbuhan pinjaman yang diberikan.
b. Bidang *treasury* dan investasi, meliputi *Non Performing Portfolio treasury* dan investasi, konsentrasi portofolio *treasury* dan investasi serta kecukupan pembentukan cadangan.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

39. CREDIT RISK

To manage credit risk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali has had a complete framework, which includes guidelines on planning and implementation process and continously improve the Standard Operating Procedures (SOP) to be in line with the guidelines of Bank Indonesia, improvement focus is to conduct the separation process of decision loan for each segment. And Bank periodically review the guidelines, in order to achieve continuous improvement. Some of the key factors in credit risk management framework are:

- *Determination of the scope and parameters used in preparing the credit risk profile;*
- *The planning and setting of the policies required to safeguard credit risk in accordance with Risk Appetite Bank, among others, authorization to credit officials, and*
- *Establish strong database system.*

In accordance with the loan characterstics, the Bank's loan are classified into productive loans and consumer loans. In order to manage the risk, the Bank measure credit risk arising from the existing portofolios quantitatively and qualitatively to ensure that the potential losses from default loans are minimized, both for individual borrowers and the overall portofolio.

The Bank's credit system and procedures have been formalized to ensure consistent implementation and policy in credit approval. For productive loans, the Bank uses the Internal Credit Risk Rating model to analyze the business and financial risk of debtors objectively and to give ratings to debtors. In addition, the Bank aslo use Credit Risk Capital Allocation and Pricing in quantifying credit risk and determining the appropriate pricing.

For both consumer and productive loans, the Bank use the Internal Credit Scoring model to analyze and calculate the credit risk for consumer.

To implement a healthy credit granting process, the Bank apply the Four Eyes Principle (credit decision-making by two person or more) at each brach office by using Credit Scoring and Credit Reviewer.

Credit risk are:

a. Lending, including Non-Performing Loans (NPL), collateral adequacy and credit growth.
b. Treasury and investment, including Non-Performing Portfolio of treasury and investment, treasury and investment portfolio concentration and the adequacy of reserves.

The following are the Non-Performing Loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank as of December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***	**31 Desember 2023 /** ***December 31, 2023***	
Ratio NPL - Bruto	0,92%	1,29%	*NPL Ratio - Gross*
Ratio NPL - Bersih	0,02%	0,02%	*NPL Ratio - Net*
Ratio Kualitas Aset Produktif	0,58%	0,83%	*Asset Quality Earning Ratio*

Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai *non performing* dibandingkan dengan jumlah aset produktif.

Earnings asset quality ratio is the ratio of assets classified as earning assets which classified - non performing to total earning assets.

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dikaji secara periodik.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

The Bank credit risk management system has been standarized in the Bank's Guidlines (BPP) and Standard Operating Procedures (SOP) and reviewed periodically.

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit.

As of December 31, 2024 and 2023, credit risk exposure to assets in the statement of financial position, are as follows:

Keterangan	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	*Description*
	Eksposur maksimum / *Maximum exposure*		
Pinjaman yang Diberikan	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	*Loans*
Efek-efek	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	*Securities*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	*Placement with Bank Indonesia and Other Bank*
Giro pada Bank Indonesia	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	45.087.137.075	70.081.387.110	*Current Account with Other Bank*
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	3.965.877.652.040	*Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement*
Jumlah	**37.168.285.852.382**	**33.230.643.280.660**	***Total***

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, credit risk exposure on the administrative accounts is as follows:

Keterangan	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	*Description*
	Eksposur maksimum / *Maximum exposure*		
Garansi yang Diterbitkan	104.919.480.197	177.581.312.056	*Guarantee Issued*
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	(386.981.506.950)	(537.270.109.026)	*Credit Facilities to Debtors that Have not Been Used*
Jumlah - Bersih	**(282.062.026.753)**	**(359.688.796.970)**	***Total - Net***

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

a. *Physical Collateral,* berupa tanah dan bangunan.
b. *Financial Collateral,* berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
c. Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial, sesuai dengan ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral, financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan *(coverage ratio).*

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out)* dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

Saat ini Bank sedang mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut *intemal rating* dan *internal scoring* yang ada agar sejalan dengan *Advanced Internal Rating Based Approach* (A-IRB *Approach*), yaitu dengan mengembangkan *Basel II Risk Paramater Model Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure At Default* (EAD) untuk segmen *Wholesale* , *Retail* dan *Consumer* . Hal ini juga dalam rangka mempersiapkan komponen-komponen model untuk perhitungan *Expected Credit Loss* yang dibutuhkan untuk penerapan perhitungan CKPN berdasarkan IFRS 9 (PSAK 109).

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a second way out.The types of collateral are as follows:

a. Physical Collateral, such as land and buildings.
b. Financial Collateral, such as third party funds (savings, current accounts and time deposits), securities, etc.
c. Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particulary for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

In addition collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (first way out) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

The Bank is currently developing and further complementing internal rating and internal scoring to align with the Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach), namely by developing the Basel II Risk Parameters Probability of Default (PD) Model, Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) Exposure for Wholesale, Retail and Consumer segments. This is also in order to prepare the components of the model for the calculation of Expected Credit Loss needed for the application of CKPN calculations based on IFRS 9 (SFAS 109).

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit oleh rekanan

Sektor Industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure by counter parties

Industry Sector

The following table describes the detail of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculation the collateral or other credit support), which are categorized by industry sector.

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Including Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Financial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Giro pada Bank Indonesia/ *Current Account with Bank Indonesia*	2.694.875.382.728	--	--	--	--	2.694.875.382.728
Giro pada Bank Lain/ *Current Accounts with Other Banks*	--	--	--	45.119.172.455	--	45.119.172.455
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*	599.912.525.513	--	--	2.545.024.832.578	--	3.144.937.358.091
Efek-efek/*Marketable Securities*	9.394.077.271.692	--	--	366.000.000.000	--	9.760.077.271.692
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali/ *Marketable Securities Purchased Under Agreement to Resell*	-	--	--	-	--	-
Pinjaman yang Diberikan/ *Loans*	-	20.897.886.901.390	41.536.081.374	7.806.085.208	1.882.940.345.472	22.830.169.413.444
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	-	(812.624.274.589)	(5.523.983.068)	(1.821.216.655)	(486.923.271.716)	(1.306.892.746.028)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**12.688.865.179.933**	**20.085.262.626.801**	**36.012.098.306**	**2.962.128.873.586**	**1.396.017.073.756**	**37.168.285.852.382**

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Including Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Financial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Giro pada Bank Indonesia/ *Current Account with Bank Indonesia*	2.393.875.393.891	-	-	-	-	2.393.875.393.891
Giro pada Bank Lain/ *Current Account with Other Bank*	-	-	-	70.100.633.360	-	70.100.633.360
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*	99.985.425.169	-	-	2.428.824.887.165	-	2.528.810.312.334
Efek-efek/*Marketable Securities*	3.980.036.203.645	-	-	376.000.000.000	-	4.356.036.203.645
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali/ *Marketable Securities Purchased Under Agreement to Resell*	3.965.877.652.040	-	-	-	-	3.965.877.652.040
Pinjaman yang diberikan/ *Loans*	822.519.643	19.321.184.836.503	46.160.326.028	8.499.666.667	1.773.913.656.646	21.150.581.005.487
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(2.117.999.978)	(957.375.448.541)	(6.313.613.819)	(178.786.087)	(268.652.071.672)	(1.234.637.920.097)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**10.438.479.194.410**	**18.363.809.387.962**	**39.846.712.209**	**2.883.246.401.105**	**1.505.261.584.974**	**33.230.643.280.660**

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Include Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Finacial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Garansi yang Diterbitkan/ *Guarantee Issued*	-	-	-	-	104.919.480.197	104.919.480.197
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan/ *Credit Facilities to Borrowers which Have not Used*	-	76.266.729.556	731.319.688	1.157.420.000	308.826.037.706	386.981.506.950
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**-**	**76.266.729.556**	**731.319.688**	**1.157.420.000**	**413.745.517.903**	**491.900.987.147**

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Include Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Finacial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Garansi yang Diterbitkan/ *Guarantee Issued*	-	-	-	-	179.713.105.094	179.713.105.094
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang belum Digunakan/ *Credit Facilities to Borrowers which Have not Used*	1.954.231.920	112.266.569.986	592.938.017	470.000.000	421.986.369.096	537.270.109.019
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**1.954.231.920**	**112.266.569.986**	**592.938.017**	**470.000.000**	**601.699.474.190**	**716.983.214.113**

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank as of December 31, 2024 and 2023 without calculating the collateral or other credit support. For the statement of financial position of assets, the exposure is determined based on net carrying amount as disclosed in the financial statements.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pinjaman yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.

Management believes on the Bank's ability to control and maintain the its credit risk exposure arising form loans based on the following:

- *The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to such policy.*
- *The Bank has an "early warning system" and disciplined monitoring.*

(iii) Efek Covid-19 pada risiko kredit

Dampak langsung dan tidak langsung atas pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian global, pasar, dan pihak lawan maupun debitur dari Bank. Manajemen telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Bank sebagai berikut:

a. Mempersiapkan skema restrukturisasi/relaksasi kredit sementara untuk debitur yang terdampak Covid-19.
b. Melakukan penyaluran kredit yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
c. Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.
d. Melakukan efisiensi biaya operasional.
e. Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Bank.

Manajemen juga telah melakukan analisa berdasarkan risiko atas sektor-sektor yang paling terkena dampak penurunan akibat Covid-19, dan melakukan *review* kualitatif atas perhitungan ECL terhadap sektor-sektor tersebut untuk meyakinkan bahwa ECL mencukupi.

Debitur yang masih memiliki prospek usaha serta kemampuan membayar diberikan relaksasi kredit antara lain dalam bentuk perpanjangan tenor disesuaikan dengan siklus usaha debitur (pada umumnya untuk masa hingga 1 tahun). Sementara untuk debitur yang membutuhkan waktu pemulihan relatif lebih lama, diberikan restrukturisasi kredit, antara lain dalam bentuk pemberian masa tenggang/penundaan pembayaran dan/atau penurunan suku bunga.

(iii) Effect of Covid-19 in credit risk

Direct and indirect effects of the Covid-19 outbreak affects the global economy, markets, and the counterparties and debtor of the Bank. Management has taking actions to mitigate the impacts on the Bank's business as follow:

a. Establish various temporary credit restructuring/relaxation scheme for customers affected by Covid-19.
b. Provide loans to customers selectively with prudent principles.
c. Increase efforts on collections and settlements of non-performing loans.
d. Manage operational expenses efficiently.
e. Implement optimum liquidity risk management to maintain the Bank's liquidity position.

Management also performs a risk-based assessment of those sectors most impacted by the Covid-19 downturn, and performs a qualitative review of the ECL calculation associated with those sectors to ensure that overall ECL is sufficient.

Debtors who still have good business prospects and the ability to pay, the Bank provide loan relaxation, among others through tenor extension in accordance with the debtor's current business cycle (generally for period up to 1 year). Meanwhile, for debtors who need relatively longer recovery time, it can be given loan restructuring, among others in the form of grace period/payment holiday and/or a reduction in interest rates.

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

(iii) Efek Covid-19 pada risiko kredit (Lanjutan)

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak regulator juga telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu, antara lain:

1. POJK No. 19 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.
2. POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
3. POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
4. POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Surat OJK No. S-12/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan.
6. Siaran pers OJK No. SP28/DHMSOJK/IV/2020 tentang Panduan Penerapan PSAK 109 dan PSAK 113 untuk Perbankan di Masa Pandemi COVID-19 tanggal 16 April 2020.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perhitungan kerugian kredit ekspektasian, antara lain penyesuaian terhadap variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1) dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*Stage* 2 dan *Stage* 3). Mengingat model perhitungan kerugian kredit ekspektasian tidak sepenuhnya dapat menghasilkan estimasi kerugian yang akurat dalam kondisi ekonomi yang abnormal, maka manajemen juga sudah memperhitungkan beberapa faktor penyesuaian untuk memastikan nilai kerugian kredit ekspektasian yang diakui dalam laporan keuangan dinyatakan secara wajar.

Dengan membaiknya kondisi perekonomian dari dampak pandemi Covid-19, selanjutnya regulator menerbitkan POJK 19 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana yang berakhir pada 24 Maret 2024 yang ditegaskan juga melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank. Bank telah mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia, termasuk kebijakan pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Sesuai kondisi normal, penjadwalan ulang atau restrukturisasi pinjaman akan menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan pindah ke *Stage* 3.

Bank telah menerapkan pembentukan pencadangan dengan prinsip yang konservatif dengan membentuk ECL atas kredit-kredit bermasalah dengan kategori putus hubungan.

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

(iii) Effect of Covid-19 in credit risk (Continued)

In relation to these, the regulators has also issued several regulations as follows:

1. *POJK No. 19 dated October 28, 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Certain Regions and Sectors in Indonesia Affected by Disasters.*
2. *POJK No. 17/POJK.03/2021 dated September 10, 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 11/POJK.03/2020 regarding National Economy Stimulus as the Coronavirus Disease 2019 Outbreak Impact Countercyclical Policy.*
3. *POJK No. 48/POJK.03/2020 dated December 1, 2020 concerning the Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 11/POJK.03/2020 regarding National Economy Stimulus as the Coronavirus Disease 2019 Outbreak Impact Countercyclical Policy.*
4. *POJK No. 11/POJK.03/2020 dated 16 March 2020 regarding National Economy Stimulus as the COVID-19 Outbreak Impact Countercyclical Policy with the objective to push the optimisation of Bank's performance specifically for the intermediation function, manage the stability of the financial system, and support the economic growth.*
5. *OJK Letter No. S-12/D.03/2020 dated 27 May 2020 regarding Additional Relaxation Policy to Support the National Economic Recovery Program in the Banking Sector.*
6. *OJK press release No. SP28/DHMSOJK/IV/2020 concerning Guidelines for the Implementation of SFAS 109 and SFAS 113 for Banking during the COVID-19 Pandemic dated 16 April 2020.*

Management has evaluated the impact of the Covid-19 pandemic on calculating expected credit loss, including adjustments to macroeconomic variables that affect 12- month expected credit losses (Stage 1) and expected credit losses over the life of the financial assets (Stage 2 and Stage 3). Considering that the expected credit loss calculation model cannot produce an accurate estimation of losses in abnormal economic conditions, Management has also taken into account several adjustment factors to ensure the expected value of the expected credit loss recognised in the financial statements is stated fairly.

With the improving economic conditions from the impact of the Covid-19 pandemic, the regulator then issued POJK 19 dated October 28, 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Certain Regions and Sectors in Indonesia Affected by Disasters which ended on March 24, 2024 which was also confirmed through the Decree of the OJK Board of Commissioners No. 34/KDK.03/2022 dated November 25, 2022 concerning the Determination of the Accommodation and Food and Beverage Provision Sector, the Textile and Textile Products and Footwear Sector, the Micro, Small, and Medium Enterprises Segment, and the Province of Bali as Sectors and Regions Requiring Special Treatment for Bank Credit or Financing. The Bank has considered various relevant information available, including the policy of providing restructuring to debtors who have not fully recovered from the impact of the Covid-19 pandemic. Under normal conditions, rescheduling or restructuring of loans will indicate a significant increase in credit risk and move to Stage 3.

The Bank has implemented the establishment of reserves with a conservative principle by forming ECL for problematic loans in the disconnected category.

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

(iv) Pinjaman yang diberikan

(iv) Loans

Ikhtisar pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

Summary of loans are as follows:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami Penurunan Nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Rumah Tangga	9.797.623.881.458	73.923.468.412	9.871.547.349.870	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	5.873.478.193.965	174.801.952.656	6.048.280.146.621	*Wholesale and Retail Trade*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.689.795.040.102	27.145.823.863	1.716.940.863.965	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.842.963.215.716	23.224.204.725	1.866.187.420.441	*Accomodation and culinary supplying*
Konstruksi	665.719.705.509	99.944.737.806	765.664.443.315	*Construction Leasing*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	291.299.104.878	2.842.332.714	294.141.437.592	*and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	546.652.545.383	3.693.784.664	550.346.330.047	*Human Health Activities And Social activity*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.540.940.934	191.557.052	15.732.497.986	*Arts, Entertainment and Recreation*
Industri Pengolahan	492.263.094.522	10.393.288.957	502.656.383.479	*Processing Industry*
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	-	-	-	*Government administration defense and social welfare*
Real Estate	14.999.773.035	-	14.999.773.035	*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	12.766.609.653	390.082.990	13.156.692.643	*Information and Communication*
Pengangkutan dan Pergudangan	143.131.170.505	473.867.378	143.605.037.883	*Transportation and Warehousing*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	52.174.461.991	3.204.298.644	55.378.760.635	*Financial and Insurance Activities*
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8.035.714.286	-	8.035.714.286	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	109.122.571.358	98.500.000	109.221.071.358	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Pendidikan	67.617.717.247	-	67.617.717.247	*Education*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	9.213.487.508	850.993	9.214.338.501	*Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs*
Pertambangan dan Penggalian	-	76.889.421	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	83.542.049.759	1.600.687.916	85.142.737.675	*Professional, Scientific And Technical Activities*
Aktivitas Jasa Lainnya	679.318.135.466	12.905.671.978	692.223.807.444	*Other Service Activities*
Jumlah	22.395.257.413.275	434.912.000.169	22.830.169.413.444	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(940.706.643.862)	(364.375.373.530)	(1.305.082.017.392)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**21.454.550.769.413**	**70.536.626.639**	**21.525.087.396.052**	***Total - Net***

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN) / ***39. CREDIT RISK (CONTINUED)***

(iv) Pinjaman yang diberikan (Lanjutan) / *(iv) Loans (Continued)*

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami Penurunan Nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Rumah Tangga	9.576.688.478.621	80.588.857.990	9.657.277.336.611	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	5.360.256.942.663	195.960.216.367	5.556.217.159.030	*Wholesale and Retail Trade*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.511.227.447.742	38.098.132.778	1.549.325.580.520	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.375.221.243.068	18.740.195.535	1.393.961.438.603	*Accomodation and culinary supplying*
Konstruksi	763.369.883.139	6.799.460.831	770.169.343.970	*Construction Leasing*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	241.345.773.105	2.780.611.496	244.126.384.601	*and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	461.967.531.579	1.988.138.752	463.955.670.331	*Human Health Activities And Social activity*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.275.532.311	-	15.275.532.311	*Arts, Entertainment and Recreation*
Industri Pengolahan	388.202.373.258	5.735.854.355	393.938.227.613	*Processing Industry*
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	240.048.753	-	240.048.753	*Government administration defense and social welfare*
Real Estate	18.828.557.044	412.638.895	19.241.195.939	*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	22.741.815.273	1.075.431.889	23.817.247.162	*Information and Communication*
Pengangkutan dan Pergudangan	137.810.108.750	511.696.065	138.321.804.815	*Transportation and Warehousing*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	59.313.054.007	2.946.077.307	62.259.131.314	*Financial and Insurance Activities*
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	18.750.000.000	-	18.750.000.000	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	113.436.712.371	156.896.834	113.593.609.205	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Pendidikan	49.497.037.853	-	49.497.037.853	*Education*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	12.093.517.872	89.002.901	12.182.520.773	*Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs*
Pertambangan dan Penggalian	-	76.889.421	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	74.455.730.525	3.318.180.963	77.773.911.488	*Professional, Scientific And Technical Activities*
Aktivitas Jasa Lainnya	581.985.537.548	8.595.397.626	590.580.935.174	*Other Service Activities*
Jumlah	20.782.707.325.482	367.873.680.005	21.150.581.005.487	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(936.923.855.340)	(295.603.440.772)	(1.232.527.296.112)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**19.845.783.470.142**	**72.270.239.233**	**19.918.053.709.375**	***Total - Net***

40. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas terutama terjadi karena potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, serta terjadinya konsentrasi dana.

Risiko likuiditas mencakup:

a. Bidang perkreditan meliputi kemampuan likuiditas, tenor atau jangka waktu kredit.
b. Bidang *treasury* dan investasi meliputi *net cash outflow*.
c. Bidang pendanaan meliputi konsentrasi jangka waktu sumber dana, konsentrasi sumber dana dan ketergantungan pada dana antar bank.

Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecil risiko likuiditas ditentukan antara lain:

a. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit, teroptimalisasi melalui pengelolaan *treasury*.

Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas Bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana teroptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang *idle* dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2024:

40. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk mainly occurs because of the potential maturity mismatch between assets and liabilities, and the concentration of funds.

Liquidity risk consist of:

a. Lending includes the ability of liquidity, tenure or loan period.
b. Treasury and investment consist of net cash outflow.
c. Funding covers a period of funding concentration sources, the concentration of financial resources and dependence on interbank funds.

The risk loss resulting from the gap between short-term funding and long-term assets. The size of the liquidity risk is determined, i.e:

a. Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;
b. The precision in managing the fund structure, including the adequacy of
c. The availability of asset that is ready to be converted into cash;
d. Ability to create access to the interbank market or other funding sources, including the lender of last resort facilities.

If the gap is large enough it will reduce the Bank's ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank's policy is aimed to ensure that fund requirement can be fulfilled, either to pay time deposits at maturity or to fulfill unused loan facility.

Managing the excess of liquidity fund, which are not absorbed by loans, disbursement will be optimized through managing treasury.

Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general, the Bank's liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and time deposits maturing managed to avoid any idle funds and determine the amount of liquid assets and appropriate instrument to ensure the level of liquidity in continuously controlled.

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (maturity buckets) based on the remaining term until maturity (remaining maturity) on December 31, 2024:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*					
	Total	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan**	**Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Kas / *Cash*	580.735.597.835	580.735.597.835	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia/ *Current Account with Bank Indonesia*	2.694.875.382.728	2.694.875.382.728	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain/ *Current Accounts with Other Banks*	45.087.137.075	45.087.137.075	--	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*	3.143.158.664.835	3.143.158.664.835	--	--	--	--
Efek-efek/*Marketable Securities*	9.760.077.271.692	432.986.196.836	3.533.886.735.189	3.398.237.897.390	2.394.966.442.277	--
Pinjaman yang Diberikan/ *Loans*	21.525.087.396.052	287.366.608.882	511.492.916.542	454.666.868.215	20.271.561.002.413	--
Aset lain-lain/ *Other Asset*	229.637.221.111	--	--	--	--	229.637.221.110
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**37.978.658.671.328**	**7.184.209.588.191**	**4.045.379.651.731**	**26.519.432.210.295**	**22.666.527.444.690**	**229.637.221.110**

40. RISIKO LIKUIDITAS (LANJUTAN)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2024: (lanjutan)

40. LIQUIDITY RISK (CONTINUED)

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (maturity buckets) based on the remaining term until maturity (remaining maturity) on December 31, 2024: (continued)

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*					
	Total	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan**	**Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Liablitas Segera/ *Liabilities due Immediately*	74.679.631.081	--	--	--	--	74.679.631.081
Simpanan dari Nasabah/ *Deposits from Customers*	32.167.791.208.809	24.853.653.118.669	2.711.305.439.899	1.682.636.750.831	2.920.195.899.410	--
Simpanan dari Bank Lain/ *Deposits from Other Bank*	661.691.987.042	491.930.024.732	156.661.962.310	--	13.100.000.000	--
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	24.433.647.846	626.683.151	--	--	23.806.964.695	--
Beban yang Masih Harus Dibayar / *Accrued Expense*	22.595.470.132	--	--	--	--	22.595.470.132
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	15.056.560.942	--	468.094.236	1.787.490.368	12.800.976.338	--
Liabilitas Lain-lain/ *Others Liabilities*	351.353.237.757	--	--	--	--	351.353.237.756
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**33.317.601.743.609**	**25.346.209.826.552**	**2.868.435.496.445**	**1.684.424.241.199**	**2.969.903.840.443**	**448.628.338.969**

41. RISIKO PASAR

Dalam rangka pengelolaan secara hati-hati atas layanan dan produk finansial yang semakin beragam sehingga profil risiko juga semakin tinggi Bank terus mengembangkan dan menyempurnakan infrastruktur sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan perubahan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko pasar yang jelas, pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen yang handal serta meningkatkan fungsi kontrol dan pemantauan.

Risiko pasar mencakup:

a. Eksposur kredit, *treasury* maupun investasi terhadap volatilitas suku bunga.
b. Volatilitas nilai tukar *treasury* dan investasi.
c. Posisi Devisa Neto (PDN).

41. MARKET RISK

In order to manage financial services and products which are increasingly diverse, its became the higher risk profile of the Bank continues to develop and improve infrastructure in accordance with a predetermined framework. These activities include preparation and changes in policies and procedures, establishing limit of market risk, human resource development and information management systems that are reliable and to improve control and monitoring functions.

Market risk consist of:

a. Credit exposure, treasury and investment to interest rate volatility.
b. Exchange rate volatility on treasury and investment.
c. Net Open Position (NOP).

41. RISIKO PASAR (LANJUTAN)

41. MARKET RISK (CONTINUED)

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		31 Desember 2023 / *December 31, 2023*		
	Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange*	Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange*	
Aset					***Assets***
Giro pada Bank Lain	0,00% - 1,25%	0,00%	0,00% - 1,25%	0,00%	*Current Account with Other Bank*
Penempatan pada Bank					*Placements with Bank*
Indonesia dan Bank Lain :					*Indonesia and*
Pada Bank Lain					*Other Banks*
Deposit Facilities	5,25%	0,00%	5,25%	0,00%	*Deposit Facilities*
Interbank Call Money	6,38% - 6,53%	0,00%	6,25% - 6,60%	0,00%	*Interbank Call Money*
Deposito Berjangka	0,00%	0,00%	5,75%	0,00%	*Time Deposits*
Tabungan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*Savings*
Efek - efek					*Marketable Securities*
SUN Seri FR 0042	10,25%	0,00%	10,25%	0,00%	*SUN Seri FR 0042*
SUN Seri FR 0043	-	0,00%	-	0,00%	*SUN Seri FR 0043*
SUN Seri FR 0045	9,75%	0,00%	9,75%	0,00%	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0081	6,50%	0,00%	6,50%	0,00%	*SUN Seri FR 0081*
SUN Seri VR 0033	6,04%	0,00%	6,04%	0,00%	*SUN Seri VR 0033*
SUN Seri FR 0084	7,25%	0,00%	7,25%	0,00%	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0086	5,50%	0,00%	5,50%	0,00%	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0090	5,125%	0,00%	5,125%	0,00%	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0095	6,375%	0,00%	6,375%	0,00%	*SUN Seri FR 0095*
SUN Seri FR 0101	6,875%	0,00%	0,000%	0,00%	*SUN Seri FR 0101*
SUN Seri FR 0104	6,50%	0,00%	0,000%	0,00%	*SUN Seri FR 0104*
SUN Seri FR 0033	6,04%	0,00%	0,000%	0,00%	*SUN Seri FR 0033*
PT BPD Sulawesi Selatan					*PT BPD Sulawesi Selatan*
dan Sulawesi Barat	0,00%	0,00%	6,45%	0,00%	*dan Sulawesi Barat*
PT Bank Mantap	0,00%	0,00%	6,50%	0,00%	*PT Bank Mantap*
PT Bank BTPN Tbk	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6,25%	0,00%	6,25%	0,00%	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri, Tbk	5,80% - 7,75%	0,00%	5,80% - 7,75%	0,00%	*PT Bank Mandiri, Tbk*
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	5,50%	0,00%	5,50%	0,00%	*PT Bank Tabungan Negara, Tbk*
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%	6,35%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%	6,35%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia					*Securities Rupiah Bank Indonesia*
SRBI	6,81% - 7,53%	0,00%	6,50% - 7,05%	0,00%	*(SRBI)*
Efek-efek yang Dibeli dengan					*Marketable Securities Purchased*
Janji Dijual Kembali	0,00%	0,00%	6,00% - 6,70%	0,00%	*Under Resale Agreement*
Pinjaman yang diberikan	2% - 16,00%	0,00%	2,00% - 16,00%	0,00%	*Loans*
Liabilitas					***Liability***
Simpanan dari Nasabah					*Deposits from Customers*
Giro	0% - 1,90%	0% - 0,15%	0% - 1,90%	0% - 0.15%	*Current Account*
Tabungan	0% - 3,45%	0% - 0,20%	0% - 3.5%	0% - 0.20%	*Savings*
Deposito Berjangka	2,90% - 4,00%	0,20%	2,90% - 4,00%	0.20%	*Time Deposit*
Simpanan dari Bank Lain:					*Deposits from Other Bank*
Giro	0% - 1,90%	0,00%	0% - 1,90%	0,00%	*Current Account*
Tabungan	0% - 3,45%	0,00%	0% - 3,50%	0,00%	*Savings*
Deposito Berjangka	2,90% - 4,00%	0,00%	2,65% - 4,00%	0,00%	*Time Deposit*
Interbank Call Money	0,00%	0,00%	6,15% - 6,45%	0,00%	*Interbank Call Money*
Pinjaman yang Diterima	0,50% - 6,75%	0,00%	0,00%	0,00%	*Borrowings*

Risiko nilai tukar timbul sebagai akibat adanya Posisi Devisa Neto (PDN) pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif baik pada sisi aset maupun liabilitas yang berasal dari transaksi produk-produk individual dan perusahaan dan dari perdagangan mata uang asing di pasar uang antar bank.

Exchange rate risk arising as a result of the Net Open Position (NOP) on the statement of financial position and administrative account on either the assets or liabilities resulting from transactions between individual and companies products and from money market foreign currency trading among the banks.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank diwajibkan memelihara PDN setinggi-tingginya 20% atas modal *tier* I dan *tie*r II. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

In accordance to Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010, the Bank is required to maintain NOP maximum of 20% on capital tier I and tier II. NOP as a whole is a number that is the sum of the absolute value of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency plus the net difference between bills and liabilities which are either commitments or contingencies in the administrative account for each foreign currency.

41. RISIKO PASAR (LANJUTAN)

41. MARKET RISK (CONTINUED)

Berikut adalah PDN pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 per mata uang (dalam ekuivalen rupiah) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia:

On December 31, 2024 and 2023 the Bank's NOP (the rupiah equivalent) in accordance with Bank Indonesia Regulation:

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Asset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liability*	Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*	
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				*Currencies Aggregate (Statement of Financial Position and Off Balance Sheet)*
Dolar Amerika Serikat	31.719	3.849	27.870	*United States Dollar*
Jumlah Modal			4.541.874	*Total Capital*
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,61%	*Net Open Position (NOP)*

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liability*	Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*	
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				*Currencies Aggregate (Statement of Financial Position and Off Balance Sheet)*
Dolar Amerika Serikat	22.012	2.701	19.311	*United States Dollar*
Jumlah Modal			4.051.427	*Total Capital*
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,48%	*Net Open Position (NOP)*

42. RISIKO OPERASIONAL

42. OPERATIONAL RISK

Bank menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan di bidang manajemen risiko operasional selama tahun 2024. Keberhasilan manajemen risiko ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas operasional guna mendorong pertumbuhan bisnis.

The Bank consider with operational risk management during 2024. The success of this risk management is a very important role in supporting efforts to improve the quantity and quality of operations to encourage business growth.

Manajemen risiko operasional mencakup bidang yang luas, yakni meliputi proses rekonsiliasi, proses pencegahan dan penanganan kejahatan Bank, penanganan keluhan nasabah, perencanaan kesinambungan bisnis, pengembangan pengetahuan karyawan dalam bidang risiko operasional serta proses evaluasi bagi produk, jenis transaksi, pengembangan produk, pola transaksi maupun sistem teknologi.

Operational risk management covering the reconciliation process, the Bank prevention process and handling the crime, handling customer complaints, business continuity planning, developing employee knowledge in operational risk and evaluation process for the product, transaction type, product development, the transactions pattern or technology systems.

Risiko operasional mencakup:
- Sistem administrasi kredit, *treasury* maupun investasi,
- Kesalahan akuntansi,
- Kecurangan,
- *Force majeur,*
- Hubungan dengan debitur,
- Kegagalan sistem.

Operational risk consist of:
- *Loan administrative, treasury and investment administration system*
- *Accounting Error,*
- *Fraud,*
- *Force majeur,*
- *Relationship with debtor,*
- *System failure.*

43. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

43. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managin its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Bank BPD Bali mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

Bank BPD Bali's manages its capital structure and makes adjustments to it in the light changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. No changes were made in the objectives, policiesm and processes from the previous period.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has complied with all capital requirements.

43. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (LANJUTAN)

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum *(Capital Adequacy Ratio (CAR))* adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko *(Risk - Weighted Assets (RWA))*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak 1 Juli 2020, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

43. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CONTINUED)

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Financial Services Authority Regulation, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of July 1, 2020, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The capital adequacy ratio as of December 31, 2024 and 2023 are as follows (in million of rupiah):

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			***Risk Weight Asset***
Risiko Kredit	15.945.083	14.873.124	*Credit Risk*
Risiko Pasar	36.951	19.311	*Market Risk*
Risiko Operasional	1.238.086	1.114.397	*Operational Risk*
Modal			***Capital***
Modal Inti	4.526.744	3.867.582	*Core Capital*
Modal Pelengkap	199.618	186.628	*Supplementary Capital*
Jumlah Modal	4.726.362	4.054.210	*Total Capital*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Dengan memperhitungkan risiko kredit tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional	29,64%	27,32%	*Calculating the credit risk but without market risk and operational risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tetapi tanpa memperhitungkan risiko operasional	29,57%	27,28%	*Calculating the credit risk and and market risk but without operational risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar	27,51%	25,41%	*Calculating the credit risk and operational risk but without market risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	27,45%	25,38%	*Calculating the credit risk, market risk, and operational risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan			*The minimum capital requirement ratio required by Financial Service Authority*
Pilar 1	8,00%	8,00%	*Tier 1*
Pilar 2	9,21%	9,21%	*Tier 2*

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 4,25% dan 3,75% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perpu No. 3/2008 menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

44. GOVERNMENT GUARANTEE FOR PAYMENT LIABILITY OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, which was effective on September 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation No. 3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008.

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, the amount of such guarantee being subject to change if the situation complies with certain valid criteria.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Guarantee Institution, then on December 31, 2024 and 2023, total deposits guaranteed by LPS are deposits of up to Rp2,000,000,000 for each customer per bank. Customer deposits are guaranteed only if the interest rates are equal to or below 4.25% and 3.75% as of December 31, 2024 and 2023.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia stipulated Perpu No. 3/2008 to become a law.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank is a member of government guarantee programs.

45. LABA PER SAHAM

Laba tahun berjalan per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

45. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares of outstanding common stock during the related year.

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Laba untuk perhitungan laba per saham	878.465.741.226	738.228.309.317	*Income for computation of earnings per share*
Rata-rata tertimbang total saham	2.135.735	2.015.729	*Weighted average number of shares*
Laba per saham (dalam rupiah penuh)	411.318	366.234	*Earnings per share*

46. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

46. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari 2024 / *January 1, 2024*	Arus Kas / *Cash Flow*	Lain-lain / *Others*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pinjaman yang diterima	66.730.442.083	(42.296.794.237)	-	24.433.647.846	*Borrowings*
Liabilitas sewa	13.576.233.846	(9.624.383.458)	11.104.710.554	15.056.560.942	*Lease liabilities*
Jumlah	80.306.675.929	(51.921.177.695)	11.104.710.554	39.490.208.788	*Total*

	1 Januari 2023 / *January 1, 2023*	Arus Kas / *Cash Flow*	Lain-lain / *Others*	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	
Pinjaman yang diterima	57.216.440.132	9.514.001.951	-	66.730.442.083	*Borrowings*
Liabilitas sewa	16.213.804.103	(10.518.129.535)	7.880.559.278	13.576.233.846	*Lease liabilities*
Jumlah	73.430.244.235	(1.004.127.584)	7.880.559.278	80.306.675.929	*Total*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

Bank memiliki perikatan-perikatan yang signifikan dan penting pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

a. Pada tanggal 3 Januari 2023 Bank menandatangani addendum perjanjian kerjasama dengan PT Bima Sakti Alterra terkait penyediaan S*mart Integrated System* Tagihan Pelanggan dengan perjanjian No. 002/SPK/DIR/DJA/2023 - 001.b/ADD-BSA/PPOB&SIBS/I/2023.

b. Pada tanggal 3 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Mangutama terkait layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum dan tagihan lainnya secara elektronik dengan perjanjian No. PERUMDA TM.01,3/PRJ/I/2023 dan 0004/SPK/DIR/DJA/2023.

c. Pada tanggal 13 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Bali Dwipa Sejahtera terkait sinergitas sistem pembayaran menggunakan layanan *E-Link* dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0039/SPK/DIR/DJA/2023 - 003/PKS/KBDS/I/2023.

d. Pada tanggal 17 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Guna Prima Dana terkait layanan *merchant* QRIS dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0058/SPK/DIR/DJA/2023 - 0010/KSP-GPD/PKS/I/2023.

e. Pada tanggal 20 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Latihan dan Pelayanan Kesehatan Bali terkait Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank BPD Bali dengan perjanjian No. 0069/SPK/DIR/DJA/2023 - 0147/YPPLPK/KS/IX/2023.

f. Pada tanggal 31 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan terkait layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum dan tagihan lainnya secara elektronik dengan perjanjian No. TAB.16/SPP.REK.AIR/2023 - 0096/SPK/DIR/DJA/2023.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS

Bank has significant engagements as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

a. On January 3, 2023, the Bank signed an addendum to the cooperation agreement with PT Bima Sakti Alterra regarding the provision of a smart Integrated Customer Billing System with agreement No. 002/SPK/DIR/DJA/2023 - 001.b/ADD-BSA/PPOB&SIBS/I/2023.

b. On January 3, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Regional Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Mangutama, regarding the service of accepting payments for drinking water bills and other bills electronically with agreement No. PERUMDA TM.01.3/PRJ/I/2023 and 0004/SPK/DIR/DJA/2023.

c. On January 13, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Bali Dwipa Sejahtera regarding the synergy of payment systems using E-Link services and merchant acquisition with agreement No. 0039/SPK/DIR/DJA/2023 - 003/PKS/KBDS/I/2023.

d. On January 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Simpan Pinjam Guna Prima Dana regarding QRIS merchant services and merchant acquisition with agreement No. 0058/SPK/DIR/DJA/2023 - 0010/KSP-GPD/PKS/I/2023.

d. On January 20, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Bali Education, Training and Health Services Organizing Foundation regarding the Services and Utilization of Bali BPD Bank Services with agreement No. 0069/SPK/DIR/DJA/2023 - 0147/YPPLPK/KS/IX/2023.

f. On January 31, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with Perusda Air Minum Tirta Amertha Buana, Tabanan Regency regarding services for accepting payments for drinking water bills and other bills electronically with agreement No. TAB.16/SPP.REK.AIR/2023 - 0096/SPK/DIR/DJA/2023.

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

g. Pada tanggal 1 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Maju Bersama terkait sinergitas sistem pembayaran menggunakan layanan *E-Link* dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0106/SPK/DIR/DJA/2023 - 09/KMB/II/2023.

h. Pada tanggal 2 Februari 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Universitas Warmadewa terkait kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan perjanjian No. 286/UNWAR/PD-15/2023 - 0111/SPK/DIR/DJA/2023.

i. Pada tanggal 6 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Tridarma Putri terkait layanan *technical assitance* BPD Bali melalui *E-Link* BPR dengan perjanjian No. 0012/SPK/DIR/DJA/2023 - 12/TDP/II/2023.

j. Pada tanggal 10 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali terkait investasi jangka pendek (deposito) PNB tahun 2023 dengan perjanjian No. 352/PL8/KS,00,01/2023 - 0126/SPK/DIR/DJA/2023.

k. Pada tanggal 17 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Bhuwana Sardula terkait sinergitas sistem pembayaran menggunakan layanan *E-Link* dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0167/SPK/DIR/DJA/2023 - 027/KBS/II/2023.

l. Pada tanggal 20 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan VIDA terkait layanan E-KYC untuk *online onboarding* dengan perjanjian No. 35/LGC/IDI-CA/BPDB/II/2023 dan 0176/SPK/DIR/DJA/2023.

m. Pada tanggal 21 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan CV Kamini Daksayini Harsa terkait kerjasama promosi bersama Univlox dengan perjanjian No. 072/UNV-LV/BDG/II/2023 - 0182/SPK/DIR/DJA/2023.

n. Pada tanggal 28 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka terkait layanan *merchant* QRIS dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0216/SPK/DIR/DJA/2023 - 0048/BPR.BP/III/Dpr/2023.

o. Pada tanggal 28 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka terkait layanan *technical assitance* BPD Bali melalui *E-Link* BPR dengan perjanjian No. 0215/SPK/DIR/DJA/2023 - 0047/BPR.BP/III/Dpr/2023.

p. Pada tanggal 2 Maret 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali terkait integrasi sistem aplikasi pembayaran dengan perjanjian No. 0221/SPK/DIR/DJA/2023 - PKS/27/III/KA/HK.02,/2023/BNNP.

q. Pada tanggal 7 Maret 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pelayanan jasa perbankan dan sistem elektronik terhadap retribusi (E-Retribusi) pada Dinas Koprasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Klungkung dengan perjanjian No. 075/14/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0251/SPK/DIR/DJA/2023.

r. Pada tanggal 14 Maret 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Surya Husadha terkait pemberian layanan transaksi perbankan dengan perjanjian No. 0473/SPK/DIR/DJA/2023 - 009/PTSH/KS/IV/2023.

s. Pada tanggal 17 Mei 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pelayanan jasa perbankan dan sistem elektronik terhadap retribusi (E-Retribusi) pada UPTD pengelolaan pasar dengan perjanjian No. 075/24/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0568/SPK/DIR/DJA/2023.

t. Pada tanggal 17 Mei 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pelayanan jasa perbankan dan sistem elektronik terhadap retribusi (E-Retribusi) pada UPTD pengelolaan pasar dengan perjanjian No. 075/25/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0569/SPK/DIR/DJA/2023.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

g. On February 1, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Maju Bersama regarding the synergy of payment systems using E-Link services and merchant acquisition with agreement No. 0106/SPK/DIR/DJA/2023 - 09/KMB/II/2023.

h. On February 2, 2023, the Bank signed a joint agreement with Warmadewa University regarding cooperation in the fields of education, research and community service with agreement No. 286/UNWAR/PD-15/2023 - 0111/SPK/DIR/DJA/2023.

i. On February 6, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Tridarma Putri regarding technical assistance services for BPD Bali via E-Link BPR with agreement No. 0012/SPK/DIR/DJA/2023 - 12/TDP/II/2023.

j. On February 10, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Bali State Polytechnic regarding short-term investments (deposits) for PNB in 2023 with agreement No. 352/PL8/KS,00,01/2023 - 0126/SPK/DIR/DJA/2023.

k. On February 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Simpan Pinjam Bhuwana Sardula regarding the synergy of payment systems using E-Link services and merchant acquisition with agreement No. 0167/SPK/DIR/DJA/2023 - 027/KBS/II/2023.

l. On February 20, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with VIDA regarding E-KYC services for online onboarding with agreement No. 35/LGC/IDI-CA/BPDB/II/2023 and 0176/SPK/DIR/DJA/2023.

m. On February 21, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with CV Kamini Daksayini Harsa regarding promotional cooperation with Univlox with agreement No. 072/UNV-LV/BDG/II/2023 - 0182/SPK/DIR/DJA/2023.

n. On February 28, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka regarding QRIS merchant services and merchant acquisition with agreement No. 0216/SPK/DIR/DJA/2023 - 0048/BPR.BP/III/Dpr/2023.

o. On February 28, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka regarding technical assistance services for BPD Bali via E-Link BPR with agreement No. 0215/SPK/DIR/DJA/2023 - 0047/BPR.BP/III/Dpr/2023.

p. On March 2, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the National Narcotics Agency of Bali Province regarding the integration of payment application systems with agreement No. 0221/SPK/DIR/DJA/2023 - PKS/27/III/KA/HK.02,/2023/BNNP.

q. On March 7, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Klungkung Regency Government regarding banking services and electronic systems for levies (E-Retribution) at the Department of Cooperatives, small and medium enterprises, industry and trade in Klungkung Regency with agreement No. 075/14/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0251/SPK/DIR/DJA/2023.

r. On March 14, 2023, the Bank signed a collaboration agreement with Surya Husadha Hospital regarding the provision of banking transaction services with agreement No. 0473/SPK/DIR/DJA/2023 - 009/PTSH/KS/IV/2023.

s. On May 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Klungkung Regency Government regarding banking services and electronic systems for levies (E-Retribution) on UPTD market management with agreement No. 075/24/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0568/SPK/DIR/DJA/2023.

t. On May 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Klungkung Regency Government regarding banking services and electronic systems for levies (E-Retribution) on UPTD market management with agreement No. 075/25/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0569/SPK/DIR/DJA/2023.

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

u. Pada tanggal 31 Mei 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan RSUP Prof. DR. IGNG Ngoerah terkait penempatan deposito dengan perjanjian No. 0617/SPK/DIR/DJA/2023 - HK.03,01/D.XVII.4,3,1/25527/2023.

v. Pada tanggal 16 Juni 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Taspen (Persero) terkait pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening Bank dengan perjanjian No. 0686/SPK/DIR/DJA/2023 - JAN-02/C.5.4/2023.

w. Pada tanggal 21 Juni 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan perjanjian No. 100,3,7,1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0830/SPK/DIR/DJA/2023.

x. Pada tanggal 21 Juni 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan perjanjian No. 100,3,7,1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0831/SPK/DIR/DJA/2023.

y. Pada tanggal 11 Juli 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyimpanan Uang Daerah dengan perjanjian No. B.00.415.4/45900/Setda - 1199/SPK/DIR/DJA/2023.

z. Pada tanggal 13 September 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar terkait penyimpanan dan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pemerintah Daerah Lainnya dengan perjanjian No. 018/13/KSB/B.Tapem/IX/2023 - 0986/SPK/DIR/DJA/2023.

aa. Pada tanggal 6 Agustus 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan perjanjian No. 134.4/9632/PKS/TKKSD-Bdg/2023 - 0644/SPK/DIR/DJA/2023.

ab. PT Bank Pembangunan Daerah Bali menandatangani perjanjian sewa menyewa atas tanah dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan perjanjian Akta Notaris Luh Made Yogi Mawarwati, SH No. 14 tanggal 4 September 2023 dengan jangka waktu 30 tahun.

ac. Pada tanggal 10 Oktober 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Universitas Mahasaraswati terkait Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan perjanjian No. K-2620/C,06,01/Unmas/X/2023 - 1064SPK/DIR/DJA/2023.

ad. Pada tanggal 17 Oktober 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung dengan perjanjian No. 100.3.7.1/67/NOTA KESEPAKATAN/B.PEM.KES/2023 - 1086/SPK/DIR/DJA/2023.

ae. Pada tanggal 6 Desember 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No. B.00.415.4/50139/Setda dan 1271/SPK/DIR/DJA/2023.

af. Pada tanggal 7 Desember 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No. 415.4/70/PKS/B.Pem.Kesra/XII/2023 dan 1276/SPK/DIR/DJA/2023.

ag. Pada tanggal 1 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LPD Desa Adat Beng terkait Sinergitas Sistem Pembayaran Menggunakan Layanan *E-Link* dan Akuisisi *Merchant* dengan perjanjian Nomor : 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/I/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

u. *On May 31, 2023, the Bank signed a collaboration agreement with RSUP Prof. DR. IGNG Ngoerah regarding deposit placement with agreement No. 0617/SPK/DIR/DJA/2023 - HK.03,01/D.XVII.4,3,1/25527/2023.*

v. *On June 16, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Taspen (Persero) regarding the payment of old age savings, pensions, work accident insurance and death insurance through a bank account with agreement No. 0686/SPK/DIR/DJA/2023 - JAN-02/C.5.4/2023.*

w. *On June 21, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Klungkung Regency Government regarding the use of banking services to receive payment of fees for acquiring land and building rights under (BPHTB) agreement No. 100,3,7,1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 -0830/SPK/DIR/DJA/2023.*

x. *On June 21, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Klungkung Regency Government regarding the use of banking services to receive payment of fees for acquiring land and building rights under (BPHTB) agreement No. 100,3,7,1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0831/SPK/DIR/DJA/2023.*

y. *On July 11, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Bali Provincial Government regarding regional money storage with agreement No. B.00.415.4/45900/Setda - 1199/SPK/DIR/DJA/2023.*

z. *On September 13, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Gianyar Regency Government regarding the storage and management of Regional General Cash Accounts and Other Regional Government Accounts with agreement No. 018/13/KSB/B.Tapem/IX/2023 - 0986/SPK/DIR/DJA/2023.*

aa. *On August 6, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Badung Regency Government regarding the Implementation of the Badung Regency Public Service Mall with agreement No. 134.4/9632/PKS/TKKSD-Bdg/2023 - 0644/SPK/DIR/DJA/2023.*

ab. *PT Bank Pembangunan Daerah Bali signed cooperation agreement for lease of land with Bali Provincial Government Province with a Notarial deed agreement Luh Made Yogi Mawarwati, SH No. 14 dated September 4, 2023 with a term of 30 years.*

ac. *On October 10, 2023, the Bank signed a joint agreement with Mahasaraswati University regarding the Implementation of the Tridharma of Higher Education with agreement No. K-2620/C,06,01/Unmas/X/2023 - 1064SPK/DIR/DJA/2023.*

ad. *On October 17, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Implementation of the Klungkung Regency Public Service Mall with agreement No. 100.3.7.1/67/NOTA KESEPAKATAN/B.PEM.KES/2023 - 1086/SPK/DIR/DJA/2023.*

ae. *On December 6, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Construction and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No. B.00.415.4/50139/Setda and 1271/SPK/DIR/DJA/2023.*

af. *On December 7, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Construction and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No. 415.4/70/PKS/B.Pem.Kesra/XII/2023 and 1276/SPK/DIR/DJA/2023.*

ag. *On January 1, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD Desa Adat Beng regarding the Synergy of Payment Systems Using E-Link Services and Merchant Acquisition with agreement Number: 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/I/2024.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

ah. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan PT Bank Central Asia, Tbk terkait Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 dan 015/PKS-BPG-ECM/DST/2022 tentang Pemberian Fasilitas BCA *E-Commerce Payment Gateway* untuk Mendukung Pelaksanaan Penerimaan Kontribusi Wisatawan dengan perjanjian No : B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS-ECM/DST/2024.

ai. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia dan Pendistribusian Kartu Cobranding BPD Bali-Flazz dengan perjanjian No : 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.

aj. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia Pemrosesan Transaksi dan Kanal Pembayaran Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan perjanjian No : 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/PKS-ECM/DST/2024.

ak. Pada tanggal 2 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma terkait Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Dengan Sistem Komputer Secara *Online* dengan perjanjian No : Perumda.10/PRJ/II/2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.

al. Pada tanggal 5 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya dengan perjanjian No : 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.

am Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No : B.00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.

an. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No : B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.

ao. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No : 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154/SPK/DIR/DJA/2024.

ap. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Bali terkait Investasi Jangka Pendek (Deposito) Politeknik Negeri Bali dengan perjanjian No : 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.

aq. Pada tanggal 22 April 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini , Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Pemanfaatan Data dan Informasi pada aplikasi BOS SALUR dengan perjanjian No : 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/SPK/DIR/DJA/2024

ar. Pada tanggal 13 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perbankan lingkup PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan perjanjian No : 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

ah. *On January 26, 2024 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government and PT Bank Central Asia, Tbk regarding the Transfer of Rights and Obligations in Cooperation Agreement Number: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 and 015/PKS -BPG-ECM/DST/2022 concerning Providing BCA E-Commerce Payment Gateway Facilities to Support the Implementation of Accepting Tourist Contributions with agreement No: B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS - ECM/DST/2024.*

ai. *On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding the Provision and Distribution of BPD Bali-Flazz Cobranding Cards with agreement No: 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.*

aj. *On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding Providers of Transaction Processing and Non-Cash Payment Channels in the Context of Local Government Transaction Electronification (ETPD) with agreement No: 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/ PKS-ECM/DST/2024.*

ak. *On February 2, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sewakadarma Regional Public Water Company regarding the Utilization of Banking Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Using an Online Computer System with agreement No: Perumda.10/PRJ/II/ 2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.*

al. *On February 5, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Regional Public Drinking Water Company Tirta Amertha Jati, Jembrana Regency regarding the Service for Receiving Payments for Drinking Water Bills and Other Bills with agreement No: 19/Perumda/PKS/II/2024- 0147/SPK/DIR/DJA/2024.*

am *On February 7, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Information System for Management of Regional Original Income in the Province of Bali and Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data Electronically in the Province of Bali with agreement No: B .00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.*

an. *On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No: B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.*

ao. *On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sanjiwani Regional Public Company for Drinking Water, Gianyar Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154 /SPK/DIR/DJA/2024.*

ap. *On February 7, 2024, the Bank signed an Addendum to the Cooperation Agreement with the Politeknik Negeri Bali regarding Short Term Investments (Deposits) of the Politeknik Negeri Bali with agreement No: 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.*

aq. *On April 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Early Childhood Education, Elementary Education and Secondary Education of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology regarding the Utilization of Data and Information on the BOS SALUR application with agreement No: 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/SPK/DIR/DJA/2024.*

ar. *On May 13, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding the granting of access rights and utilization of population data in banking services within the scope of PT Bank Pembangunan Daerah Bali with agreement No: 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

as. Pada tanggal 21 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan perjanjian No : 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.

at. Pada tanggal 22 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero) terkait Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank dengan perjanjian No : Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.

au. Pada tanggal 31 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No : 690/127/KEU,PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR/DJA/2024.

av. Pada tanggal 27 Juni 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyediaan, Penggunaan Produk dan Jasa Serta Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perbankan yang Terintegrasi dengan perjanjian No : 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/DIR/DJA/2024.

aw. Pada tanggal 11 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.

ax. Pada tanggal 12 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Payangan terkait Pengelolaan, Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.

ay. Pada tanggal 19 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait Penggunaan Produk dan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.

az. Pada tanggal 22 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat dengan perjanjian No : 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.

ba. Pada tanggal 9 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jasa Raharja terkait Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank dengan perjanjian No : P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.

bb. Pada tanggal 14 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Angkasa Pura terkait Sewa Ruang dan Pembagian Pendapatan (*Revenue Sharing*) Kepada AP1 Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali dengan perjanjian No : 0003020007968/HK.06,02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.

bc. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Equity Life Indonesia terkait Pemasaran Produk Asuransi Bali Dwipa *Multi Protection* dengan Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank dengan perjanjian No : 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/DIR/DJA/2024.

bd. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pengelolaan Dana Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 dan 1129/SPK/DIR/DJA/2024.

be. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Indonesia Comnets Plus terkait Pelindungan, Pemrosesan dan Penyediaan Akses Data Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non-Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

as. *On May 21, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Badung Regency Government regarding the Implementation of the Badung Regency Public Service Mall with agreement No: 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.*

at. *On May 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Insurance and Death Insurance Through Bank Accounts with agreement No: Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.*

au. *On May 31, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Perumda Tirta Tohlangkir, Karangasem Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Account Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 690/127/KEU, PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR /DJA/2024.*

av. *On June 27, 2024 the Bank signed a Joint Agreement with the Karangasem Regency Government regarding Regional Financial Management, Provision, Use of Products and Services and Development of an Integrated Banking Service Information System with agreement No: 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/ DIR/DJA/2024.*

aw *On July 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Buleleng Regency Government regarding the Provision of Banking Service Systems, Development and Development of Information Systems and Integration of Regional Revenue Management Systems with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.*

ax. *On July 12, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Payangan General Hospital regarding the Management, Provision and Use of Banking Services with agreement No: 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.*

ay. *On July 19, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Use of Banking Products and Services with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.*

az. *On July 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Centralized Acceptance of Electricity Bill Payments and Other Bills with agreement No: 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.*

ba. *On August 9, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Jasa Raharja regarding Services and Utilization of Bank Services with agreement No: P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.*

bb. *On August 14, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Angkasa Pura regarding Space Rental and Revenue Sharing to AP1 for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Activities at I Gusti Ngurah Rai International Airport - Bali with agreement No: 0003020007968/HK.06,02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.*

bc. *On August 20, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Equity Life Indonesia regarding the Marketing of Bali Dwipa Multi Protection Insurance Products with a Reference Business Model Not Within the Context of Bank Products with agreement No: 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/ DIR/DJA/2024.*

bd. *On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Management of Funds for the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No: 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 and 1129/SPK/DIR/DJA/2024.*

be. *On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Indonesia Comnets Plus regarding the Protection, Processing and Provision of Data Access to the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

bf. Pada tanggal 2 Oktober 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) terkait Kerjasama Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Bali Melalui Kerja Sama Perluasan Perluasan Kanal Bayar Retribusi Pariwisata Bali dengan kesepakatan bersama No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024

bg. Pada tanggal 11 Oktober 2024 Bank menadatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bima Sakti Alterra terkait Penyediaan *Smart Integrated Billing System* Tagihan Pelanggan dengan perjanjian No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.

bh. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Bank menandatangani perjanjian Kerja Sama dengan Primakara University terkait Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan perjanjian No : 006/KB/ RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

bf. *On October 2, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) regarding the Cooperation in Optimizing Regional Revenue of Bali Province Through Cooperation in Expanding the Bali Tourism Retribution Payment Channel with a joint agreement No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024.*

bg. *On October 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bima Sakti Alterra regarding the Provision of Smart Integrated Billing System for Customer Bills with agreement No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.*

bh. *On October 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Primakara University regarding the Implementation of the Tri Dharma of Higher Education with Agreement No : 006/KB/RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.*

48. KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

Perkara perdata Nomor 138/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel., terhadap Bank BPD Bali tidak ada tuntutan pada gugatan, hanya sebagai pihak Turut Tergugat yang saat itu menempatkan dana sebesar Rp195.000.000.000 dalam bentuk *Deposit on Call*. Dalam artian permasalahan terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat. Telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2685 K/PDT/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan putusan MENOLAK permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (*Inkcraht*).

Perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN. Amp., tentang Gugatan I Gede Munggah Dkk., selaku Para Penggugat kepada Kantor Cabang Karangasem, bahwa Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang terhadap jaminan/objek sengketa tanpa adanya Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dari orang yang berhak. Sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 4622 K/PDT/2023 Jo 89/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 26 April 2024 disampaikan "Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Gede Munggah, Dkk. (*Inkcraht*).

Perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2022/PN. Gin., tentang gugatan I Wayan Sedantha, Dkk., selaku Para Penggugat kepada Kantor Cabang Pembantu Sukawati bahwa Bank BPD Bali Capem Sukawati diminta menyerahkan sisa hasil lelang jaminan. Sesuai Berdasarkan informasi dari SIPP PN Gianyar tanggal 1 Agustus 2024, Perkara telah diputus Mahkamah Agung RI No. 4774 K/Pdt/2023 dengan putusan MENOLAK permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (*Inkcraht*).

Perkara perdata Nomor 275/Pdt.G/2022/PN. Gin., tentang gugatan I Wayan Artawan, Dkk, selaku penggugat kepada Cabang Ubud terkait Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Penggugat menyatakan Kasasi atas Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak. Sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 4115 K/PDT/2024 Jo 263/Pdt/2023/PT.Dps. Jo 275/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 20 Desember 2024 disampaikan "Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Wayan Artawan dkk. (*Inkracht*).

Perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN. Dps., tentang gugatan I Nyoman Suweca kepada Capem Mengwi terkait Bank BPD Bali Capem Mengwi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang eksekusi terhadap agunan penggugat karena Penggugat masih membayar angsuran kredit. Sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 2943 K/PDT/2023 Jo No.145/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 16 Oktober 2024 disampaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Nyoman Suweca. (*Inkracht*).

48. CONTINGENCIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

Civil case Number 138/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel., against Bank BPD Bali. There are no claims in the lawsuit, only as a Co-Defendant who at that time placed funds amounting to Rp195,000,000,000 in the form of Deposit on Call. In the sense that the problem occurred between the Plaintiff and the Defendants. It has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2685 K/PDT/2024 dated 25 July 2024 with the decision to REJECT the cassation request from the cassation applicant/plaintiff (Inkcraht).

Civil case Number 89/Pdt.G/2022/PN. Amp., concerning the Lawsuit of I Gede Munggah et al., as Plaintiffs against the Karangasem Branch Office, that the Bank was declared to have committed an unlawful act because it conducted an auction of collateral/disputed objects without the Power of Encumbrance of Encumbrance. from the right person. In accordance with the Minutes of Notification of Cassation Decision Case No. 4622 K/PDT/2023 Jo 89/Pdt.G/2022/PN Amp dated 26 April 2024 submitted "The Supreme Court of the Republic of Indonesia REJECTS the Cassation Petition of I Gede Munggah, et al. (Inkcraht).

Civil case Number 169/Pdt.G/2022/PN. Gin., regarding the lawsuit of I Wayan Sedantha, et al., as Plaintiffs to the Sukawati Sub-Branch Office that Bank BPD Bali Sukawati Sub-Branch was asked to hand over the remaining proceeds from the collateral auction. According to information from the SIPP Gianyar District Court dated August 1 2024, the case has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4774 K/Pdt/2023 with the decision to REJECT the cassation petition from the cassation applicant/plaintiff (Inkcraht).

Civil case Number 275/Pdt.G/2022/PN. Gin., regarding the lawsuit of I Wayan Artawan, et al., as the plaintiff against the Ubud Branch regarding the Bank being declared to have committed an unlawful act because it carried out an auction of the Execution of Mortgage Rights. The plaintiff filed a cassation against the Appeal Decision at the Denpasar High Court which stated that it confirmed the Gianyar District Court Decision which stated that the Plaintiff's Lawsuit was Rejected. In accordance with the Minutes of Notification of the Cassation Decision for Case No. 4115 K/PDT/2024 Jo 263/Pdt/2023/PT.Dps. Jo 275/Pdt.G/2022/PN Gin dated December 20, 2024, it was stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia REJECTS the Cassation Application of I Wayan Artawan et al. (Inkracht).

Civil case Number 145/Pdt.G/2023/PN. Dps., concerning the lawsuit of I Nyoman Suweca against Mengwi Sub-Branch regarding Bank BPD Bali Mengwi Sub-Branch was declared to have committed an unlawful act because it conducted an execution auction against the plaintiff's collateral because the Plaintiff was still paying credit installments. In accordance with the Release of Notification of the Cassation Decision for Case No. 2943 K/PDT/2023 Jo No.145/Pdt.G/2023/PN.Dps dated October 16, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia REJECTED I Nyoman Suweca's Cassation Application. (Inkracht).

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara perdata Nomor 431/Pdt.G/2023/PN. Sgr., tentang gugatan Ni Luh Senti dan Made Selamat kepada Cabang Pembantu Pupuan yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan harga lelang tidak sesuai dengan nilai pasar. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Februari 2024 menyatakan "Gugatan Penggugat Tidak diterima". (*Inkracht*).

Perkara perdata Nomor 264/Pdt.G/2023/PN. Amp., tentang gugatan Nengah Gitar kepada Cabang Karangasem yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan/klausula pada Pasal 18 Perjanjian Kredit. Pada saat ini Penggugat menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya".

Perkara perdata Nomor 251/Pdt.G/2023/PN. Amp., tentang gugatan Ni Kadek Arie Sulestarini kepada Cabang Karangasem yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pasal 1320 KUHPdt. Perkara telah dinyatakan selesai karena mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian dari para pihak berperkara.

Perkara perdata Nomor 162/Pdt.G/2023/PN. Bli., tentang gugatan I Nengah Artha kepada Cabang Bangli yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan nilai limit jaminan tidak sesuai dengan nilai pasar. Perkara telah dinyatakan selesai karena mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian dari para pihak berperkara.

Perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN. Dps., tentang gugatan Ni Ketut Suartini kepada Cabang Renon yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa melakukan restrukturisasi terlebih dahulu dan melakukan lelang tidak sesuai dengan harga pasar. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2024 telah membacakan Putusan yang Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. (*Inkracht*).

Perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Amp., tentang gugatan I Gede Rai R. kepada Cabang Karangasem yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena karena melelang semua jaminan Tergugat I/Debitur termasuk jaminan milik penggugat. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Banding) tanggal 12 November 2024 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.".

Perkara perdata Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN. Sgr., tentang gugatan Wajan Budiarsa kepada Cabang Singaraja yang dinyatakan Bank tidak beritikad baik karena menetapkan harga lelang tidak sesuai pasar dan memohon pembatalan harga lelang. Pembantah/Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 November 2024 yang menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Perkara perdata Nomor 885/Pdt.G/2024/PN.Dps., tentang gugatan Ahmad Ase kepada Cabang Pembantu Gatsu Barat yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena karena melelang jaminan milik Penggugat. Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 November 2024 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Perkara perdata Nomor 978/Pdt.G/2024/PN.Dps., tentang gugatan Mohammad Ridwan, Dkk kepada Cabang Renon yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena - melakukan lelang tanpa melakukan restrukturisasi terlebih dahulu dan melakukan lelang tidak sesuai dengan harga pasar. Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya.

Perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2024/PN. Nga., tentang gugatan H.Saleh, Dkk kepada Cabang Pembantu Pekutatan yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa pemberitahuan kepada Debitur. Saat ini masih dalam tahap persidangan.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

Civil case Number 431/Pdt.G/2023/PN. Sgr., concerning the lawsuit by Ni Luh Senti and Made Selamat to the Pupuan Sub-Branch who were declared to have committed an unlawful act because they set the auction price not in accordance with market value. The decision of the Singaraja District Court dated February 15 2024 stated "The plaintiff's lawsuit is not accepted". (Inkracht).

Civil case Number 264/Pdt.G/2023/PN. Amp., regarding Nengah Gitar's lawsuit against the Karangasem Branch which was declared to have committed an unlawful act because it did not fulfill the provisions/clauses in Article 18 of the Credit Agreement. At this time the Plaintiff is submitting an appeal against the Denpasar High Court Decision which upholds the Amlapura District Court Decision which states "Rejects the Plaintiff's Claim in Entirety".

Civil case Number 251/Pdt.G/2023/PN. Amp., regarding Ni Kadek Arie Sulestarini's lawsuit against the Karangasem Branch who was declared to have committed an unlawful act because the Credit Agreement signed by the Plaintiff did not meet the formal requirements as stated in Article 1320 of the Criminal Code. The case has been declared closed because mediation has reached a peace agreement between the parties involved.

Civil case Number 162/Pdt.G/2023/PN. Bli., regarding I Nengah Artha's lawsuit against the Bangli Branch who was declared to have committed an unlawful act because the collateral limit value was not in accordance with market value. The case has been declared closed because mediation has reached a peace agreement between the parties involved.

Civil case Number 63/Pdt.G/2024/PN. Dps., regarding Ni Ketut Suartini's lawsuit against the Renon Branch who was declared to have committed an unlawful act because he held an auction without restructuring first and held the auction not in accordance with market prices. The Denpasar District Court Judge on August 19 2024 read out the Decision rejecting the Plaintiff's lawsuit in its entirety. (Inkracht).

Civil case Number 41/Pdt.G/2023/PN.Amp., regarding I Gede Rai R.'s lawsuit against the Karangasem Branch who was declared to have committed an unlawful act because he auctioned off all of Defendant I/Debtor's guarantees including the plaintiff's guarantees. The Plaintiff declared an Appeal against the Decision of the Panel of Judges at the Denpasar District Court on November 12, 2024 which stated "Rejects the Plaintiff's Lawsuit in its entirety."

Civil case Number 211/Pdt.Bth/2024/PN. Sgr., regarding Wajan Budiarsa's lawsuit against the Singaraja Branch which was declared by the Bank to be in bad faith because it set an auction price that was not in accordance with the market and requested the cancellation of the auction price. The Objector/Plaintiff stated an Appeal against the Decision of the Singaraja District Court dated November 12, 2024 which stated that the Objector's Lawsuit was inadmissible (niet ontvankelijke verklaard).

Civil case Number 885/Pdt.G/2024/PN.Dps., concerning Ahmad Ase's lawsuit against the Gatsu Barat Sub-Branch which was declared to have committed an unlawful act because it auctioned off the Plaintiff's collateral. The Plaintiff filed an Appeal against the Denpasar District Court Decision dated November 25, 2024 which stated that the Plaintiff's Lawsuit was unacceptable (niet ontvankelijke verklaard).

Civil case Number 978/Pdt.G/2024/PN.Dps., regarding the lawsuit of Mohammad Ridwan, et al. against the Renon Branch which was declared to have committed an unlawful act because - conducting an auction without first restructuring and conducting an auction not in accordance with market prices. The plaintiff stated that he withdrew his lawsuit.

Civil case Number 209/Pdt.G/2024/PN. Nga., concerning the lawsuit of H.Saleh, et al against the Pekutatan Sub-Branch which was declared to have committed an unlawful act because it held an auction without notifying the Debtor. Currently still in the trial stage.

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara perdata Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PN. Nga., tentang Bank BPD Bali mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan milik Debitur, karena sebelumnya terdapat perkara gugatan dari Pihak Ketiga yang mana putusan Pengadilan Negeri Negara menyatakan Objek Perkara (dalam hal ini adalah menjadi jaminan di Bank BPD Bali) dilakukan Sita Persamaan. Setelah Aanmaning II, yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Pihak Termohon Eksekusi yang mana Termohon Eksekusi tidak keberatan untuk dilakukan eksekusi atas jaminan miliknya maka selanjutnya akan dilakukan proses lelang melalui KPKNL. Saat ini masih pada tahap penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Perkara Pidana No. 199/Pid.Sus/2024/PN. Dps., dengan terdakwa Giri Hendrayana. Bank BPD Bali selaku pelapor atas terjadinya tindak pidana illegal akses. Putusan Kasasi tanggal 15 November 2024 menyatakan "Menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan".

Perkara Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sby., oleh PT Mastrada Surya, PT Waskita Prima Guna dan PT Anis Jaya Raya sebagai Pemohon lalu PT Karya Cipta Putra Pratama sebagai Termohon dengan PT Bank BPD Bali selaku pihak yang berkepentingan atas Perkara ini. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan : "Termohon PT Karya Cipta Putera Pratama berkedudukan di Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya." Bank BPD Bali selaku Kreditor Separatis telah melaksanakan haknya untuk melakukan lelang sendiri seperti tidak dalam kepailitan dengan waktu selama 60 hari sebelum aset dalam pailit diserahkan kepada Kurator, sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 55 ayat (1). Pelelangan aset telah menjadi kewenangan Kurator. Saat ini Kurator sedang pada tahap pemberesan harta pailit.

Perkara Kepailitan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Pemohon kepada PT Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta sebagai Termohon dengan PT Bank BPD Bali selaku pihak yang berkepentingan atas Perkara ini. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tertanggal 5 Mei 2023 yang menyatakan :
"Termohon PT. Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya."
Saat ini Kurator sedang melakukan pencatatan daftar piutang para Debitur.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

Civil case Number 4/Pdt.Eks/2024/PN. Nga., regarding Bank BPD Bali filed a request for execution of Mortgage Rights on Collateral owned by the Debtor, because previously there was a lawsuit case from a Third Party where the decision of the Negara District Court stated that the Object of the Case (in this case being collateral at Bank BPD Bali) was subject to Equity Seizure. After Aanmaning II, which was attended by the Applicant and the Execution Respondent, where the Execution Respondent did not object to the execution of his collateral, the auction process will then be carried out through the KPKNL. Currently still at the stage of collateral assessment from the Public Appraisal Services Office (KJPP).

Criminal Case No. 199/Pid.Sus/2024/PN. Dps., with defendant Giri Hendrayana. Bank BPD Bali as the reporter for the occurrence of illegal access. The Cassation Decision dated November 15, 2024 stated "Sentencing the defendant to 1 (one) year and 6 (six) months in prison and a fine of Rp50,000,000 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months".

Bankruptcy Case Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sby., by PT Mastrada Surya, PT Waskita Prima Guna and PT Anis Jaya Raya as Petitioners then PT Karya Cipta Putra Pratama as Respondent with PT Bank BPD Bali as the party involved interested in this case. Commercial Court Decision at Surabaya District Court No. 10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY dated 15 August 2016 which stated: "Respondent PT Karya Cipta Putera Pratama domiciled at Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya is in bankruptcy with all the legal consequences." Bank BPD Bali as the Separatist Creditor has exercised its right to conduct its own auction as if it were not in bankruptcy with a period of 60 days before the assets in bankruptcy are handed over to the Curator, in accordance with the Bankruptcy Law and PKPU Article 55 paragraph (1). Auction of assets has become the authority of the Curator. Currently the Curator is at the stage of settling the bankruptcy estate.

Bankruptcy Case Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., by PT Bank Danamon Indonesia Tbk as Petitioner to PT Hakadikon Beton Pratama and Herman Sudarta as Respondent with PT Bank BPD Bali as the interested party in this Case. Commercial Court Decision at the Surabaya District Court 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., dated May 5, 2023 which stated:
"Respondent PT. Hakadikon Beton Pratama and Herman Sudarta are in bankruptcy with all the legal consequences."
Currently the Curator is recording the list of Debtors' receivables.

49. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan Bank yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amandemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran".

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan ini, manajemen Bank masih mengevaluasi dampak potensial dari perubahan standar akuntansi tersebut terhadap laporan keuangannya.

49. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) has issued new or amendment to the following Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") and Its Interpretation to Financial Accounting Standards ("IFAS"). The accounting standards will be effective or applicable on the Bank's financial statements for the period beginning on or after January 1, 2025:

- *SFAS 117: Insurance Contract;*
- *Amendments to SFAS 117: Insurance Contract Regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information; and*
- *Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability".*

As of authorization date of these financial statements, the Bank's management is still evaluating the potential impact on these amended accounting standards on its financial statements.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah periode pelaporan keuangan posisi 31 Desember 2024 yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

50. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There are no significant events that occurred after the date of reporting period of financial statements as of December 31, 2024 which affects the decision of the users of the financial statements PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana diuraikan di muka yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2025.

51. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali is responsible for the presentation and completion of the financial statements as of December 31, 2024 and the year then ended which was completed on January 10, 2025.

BANK BPD BALI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2024

PERUMDA Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
Jl Raya Kapal No. 14 Mangupura, Mengwi
Telp. (0361) 421845/ 423964

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421848
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG

DAFTAR ISI

PER 31 DESEMBER 2023

KETERANGAN	HAL
SURAT PERNYATAAN PENGURUS	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG	
1. Neraca	1
2. Laporan Laba (Rugi)	3
3. Laporan Perubahan Ekuitas	4
4. Laporan Arus Kas	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:info@tirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I Wayan Suyasa, S.Sos. MM
Alamat kantor	: Jl. Raya Kapal No. 14, Mangupura, Mengwi, Badung
Nomor Telepon	: (0361) 412949
Jabatan	: Direktur Utama

Untuk dan atas nama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Badung, 6 Maret 2025
Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung

METERAI TEMPEL
60F0EAMX210477499

(I Wayan Suyasa, S.Sos. MM)
Direktur Utama

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00016/2.1266/AU.2/04/1612-1/1/III/2025

Direksi dan Dewan Pengawas
Perumda Air Minum Tirta Mangutama

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perumda Air Minum Tirta Mangutama**, yang terdiri atas neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca **Perumda Air Minum Tirta Mangutama** tanggal 31 Desember 2024, kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perumda berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lainnya

Laporan Keuangan **Perumda Air Minum Tirta Mangutama** tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dalam laporan Nomor : 00036/2.0295/AU.2/04/1881-1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang menyatakan opini wajar atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perumda dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perumda atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perumda.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perumda.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perumda untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22,
Padangsambian, Denpasar,
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774,
E. info@kapbud.com
www.kapbud.com

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perumda tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.a/ML/KAP-BUD/III/2025 dan Nomor 15.b/ML/KAP-BUD/III/2025 tertanggal 06 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik
Ketut Budiartha dan Anggiriawan

00016

Putu Budi Anggiriawan, SE., M.Si., CPA., ASEAN CPA.
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1612

Denpasar, 06 Maret 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

	Catatan	31- Des- 2024 Rp	31- Des- 2023 Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas & Setara Kas	*3.c;4.1*	156.756.474.756	127.641.281.046
Piutang Langganan Air	*3.d;4.2*	27.398.553.225	26.018.323.485
Piutang Dana Meter	*3.d;4.2*	38.479.000	127.164.000
Piutang Beban Tetap Berlangganan	*3.d;4.2*	1.329.016.000	1.208.883.000
Penyisihan Piutang	*3.d;4.2*	(2.378.961.055)	(2.525.355.030)
Piutang Langganan Non Air	*4.3*	150.000.000	-
Tagihan Non Usaha	*4.4*	1.135.736.719	647.787.938
Persediaan	*3.e;4.5*	2.196.167.504	2.083.195.148
Pembayaran Dimuka	*3.9;4.6*	714.839.764	744.066.953
Uang Muka Kerja	*4.7*	64.177.580	17.047.580
Uang Muka Pajak	*4.8*	562.239.279	-
Jumlah Aset Lancar		**187.966.722.773**	**155.962.394.120**
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan Pada Entitas Anak	*3.h;4.9*	4.618.069.604	968.747.416
Aktiva Tetap:	*3.f;4.10*		
Harga Perolehan		819.537.660.170	731.459.092.948
Akumulasi Penyusutan		(480.751.609.299)	(439.689.314.743)
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	*4.11*	64.313.643.307	6.875.251.827
Bahan Instalasi	*4.11*	10.847.127.260	9.686.090.478
Persediaan Dalam Proses	*4.11*	-	71.730.198
Uang Jaminan	*4.11*	1.219.748.600	1.219.748.600
Aset Yang Akan Dipergunakan	*4.11*	1.077.015.220	980.101.120
Aset Tak Berwujud:	*4.11*		
Harga Perolehan		15.990.419.326	12.625.333.557
Akumulasi Penyusutan		(8.817.382.499)	(7.983.201.144)
Jumlah Aset Tidak Lancar		**428.034.691.689**	**316.213.580.257**
JUMLAH ASET		**616.001.414.461**	**472.175.974.377**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:info@tirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

	Catatan	31- Des- 2024 Rp	31- Des- 2023 Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha Yang Masih Harus Dibayar	*3.i;4.12*	25.228.371.961	5.438.226.775
Utang Pajak	*4.13*	7.148.476.951	13.217.660.650
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangka Pendek	*3.n;4.14*	3.805.793.472	4.053.620.088
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	*4.15*	92.675.361.747	34.270.087.677
Kewajiban Lain-Lain	*4.16*	70.432.964	121.564.542
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**128.928.437.096**	**57.101.159.732**
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangka Panjang	*3.n;4.14*	27.096.033.985	23.467.335.762
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**27.096.033.985**	**23.467.335.762**
JUMLAH KEWAJIBAN		**156.024.471.081**	**80.568.495.494**
EKUITAS			
Penyertaan Pemerintah Pusat	*4.17*	-	387.452.000
Penyertaan Pemerintah Badung	*4.18*	334.125.619.485	283.738.167.485
Cadangan Dana	*4.19*	101.158.129.683	82.860.483.576
Laba Ditahan	*4.20*	6.398.216.404	6.398.216.405
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Dapenma Pamsi	*4.21*	(30.901.827.457)	(27.520.955.850)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	*4.22*	49.196.805.265	45.744.115.267
Jumlah Ekuitas		**459.976.943.380**	**391.607.478.883**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**616.001.414.461**	**472.175.974.377**

Badung, 06 Maret 2025
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
Direksi,

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA

I Wayan Suyasa, S.Sos., MM	I Made Sugita, SH., M.M	Ir. I Made Suarsa, ST., M.M
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Teknik

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421848
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:info@tirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024

	Catatan	31- Des- 2024 Rp	31- Des- 2023 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Penjualan Air	*3.m;4.23*	282.624.389.697	253.125.530.066
Pendapatan Penjualan Non Air	*3.m;4.24*	29.687.074.855	16.233.781.444
Pendapatan Pendapatan Lain-Lain	*3.m;4.25*	3.955.197.227	4.231.944.456
JUMLHA PENDAPATAN		**316.266.661.779**	**273.591.255.966**
BEBAN-BEBAN	*3.m;26*		
Beban Pegawai		80.543.642.525	73.002.658.468
Beban Pemakaian Bahan Bakar		386.826.669	171.734.464
Beban Listrik		40.316.440.912	38.752.212.641
Beban Pemakaian Bahan Pembantu		396.596.245	592.790.800
Beban Operasi Lainnya		322.636.400	234.677.649
Beban Pemeliharaan		29.012.807.726	18.272.675.173
Beban Air Baku / Curah		18.762.614.649	8.800.927.018
Beban Pemakaian Bahan Kimia		15.860.567.007	14.761.906.687
Beban Atk & Barang Cetakan		876.871.306	793.152.385
Beban Kantor		4.353.655.660	3.828.212.720
Beban Operasional Lainnya		11.070.995.401	9.999.325.913
Beban Promosi		77.800.000	150.675.289
Beban Pajak/Retribusi		1.706.303.786	2.373.058.989
Beban Penelitian Dan		336.540.939	154.975.980
Beban Sewa		211.777.189	97.599.411
Beban Penyisihan / Penghapusan		1.001.095.314	1.182.897.640
Beban Penyusutan		41.898.140.911	37.719.490.278
Beban Bank		60.577.799	37.512.444
Beban Penurunan Nilai		13.677.812	21.252.584
JUMLAH BEBAN-BEBAN		**247.209.568.248**	**210.947.736.533**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**69.057.093.530**	**62.643.519.433**
Taksiran Pajak Penghasilan	*3.o;4.27*	19.860.288.265	16.899.404.166
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**49.196.805.265**	**45.744.115.267**

Badung, 06 Maret 2025
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
Direksi,

I Wayan Suyasa, S.Sos., MM	I Made Sugita, SH., M.M	Ir. I Made Suarsa, ST., M.M
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Teknik

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412969, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Modal Pemerintah Kabupaten Badung	Kewajiban Imbalan	Cadangan	Saldo Laba	Total Ekuitas (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	**284.125.619.486**	**(8.730.042.058)**	**76.301.011.749**	**22.796.895.973**	**374.493.485.150**
Mutasi Cadangan Dana	-	-	6.559.471.827	-	**6.559.471.827**
Kewajiban Imbalan	-	(18.790.913.792)	-	-	**(18.790.913.792)**
Laba (Rugi) Tahun 2023	-	-	-	45.744.115.267	**45.744.115.267**
Pembagian Laba	-	-	-	(16.398.679.569)	**(16.398.679.569)**
Saldo per 31 Desember 2023	**284.125.619.486**	**(27.520.955.850)**	**82.860.483.576**	**52.142.331.671**	**391.607.478.883**
Penambahan Kekayaan Pusat Tahun 2024	(387.452.001)	-	-	-	**(387.452.001)**
Penambahan Kekayaan Pemda Tahun 2024	50.387.452.000	-	-	-	**50.387.452.000**
Penambahan Cadangan	-	-	18.297.646.108	-	**18.297.646.108**
Kewajiban Imbalan	-	(3.380.871.607)	-	-	**(3.380.871.607)**
Laba (Rugi) Tahun 2024	-	-	-	49.196.805.264	**49.196.805.264**
Pembagian Laba	-	-	-	(45.744.115.268)	**(45.744.115.268)**
Saldo per 31 Desember 2024	**334.125.619.485**	**(30.901.827.457)**	**101.158.129.683**	**55.595.021.668**	**459.976.943.380**

Badung, 06 Maret 2025
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
Direksi,

I Wayan Suyasa, S.Sos., MM	I Made Sunita, SH., M.M	Ir. I Made Suarsa, ST., M.M
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Teknik

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024

	31- Des- 2024 Rp	31- Des- 2023 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Bersih	49.196.805.265	45.744.115.267
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**49.196.805.265**	**45.744.115.267**
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi		
Piutang Usaha	(1.558.071.715)	(2.267.518.831)
Piutang Langganan Non Air	(150.000.000)	69.845.996
Tagihan Non Usaha	(487.948.781)	(475.354.878)
Persediaan	(112.972.356)	1.049.793.442
Pembayaran Dimuka	29.227.189	81.099.411
Uang Muka Kerja	(47.130.000)	11.233.600
Uang Muka Pajak	(562.239.279)	-
Utang Usaha Yang Masih Harus Dibayar	19.790.145.186	1.348.532.222
Utang Pajak	(6.069.183.699)	6.478.115.670
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	58.405.274.070	14.550.354.697
Kewajiban Lain-Lain	(51.131.578)	-
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Dapenma	3.380.871.607	18.790.913.792
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	**121.763.645.909**	**85.381.130.388**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penyertaan Pada Entitas Anak	(3.649.322.188)	(968.747.416)
Aset Tetap	(47.016.272.666)	(17.076.711.756)
Aset Tidak Lancar Lainnya	(61.155.516.578)	(1.260.295.726)
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	**(111.821.111.432)**	**(19.305.754.898)**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Perubahan Ekuitas	19.172.659.233	(28.630.121.535)
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	**19.172.659.233**	**(28.630.121.535)**
Kenaikan (Penurunan) Kas & Setara Kas	**29.115.193.710**	**37.445.253.956**
Kas & Setara Kas Awal Periode	127.641.281.046	90.196.027.090
Kas & Setara Kas Akhir Periode	**156.756.474.756**	**127.641.281.046**
Kas dan Setara Kas terdiri atas:		
Kas	47.500.000	47.500.000
Bank	156.708.974.756	127.593.781.046
Jumlah	**156.756.474.756**	**127.641.281.046**

Badung, 06 Maret 2025
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
Direksi,

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA

I Wayan Suyasa, S.Sos., MM	I Made Sugita, SH., M.M	Ir. I Made Suarsa, ST., M.M
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Teknik

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

1. Gambaran Umum

a. Dasar Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor: 5/Perda/1976 tertanggal 27 Januari 1976, yang telah diperbaharui dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor : 4 Tahun 1994, yang telah diperbaharui dengan Perda Nomor : 6 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 dan terakhir diperbaharui dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama yang beralamat di Jl. Raya Kapal No. 14, Mangupura, Mengwi Telepon: (0361) 421845.

b. Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda

Maksud pendirian Perumda berupa penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memperoleh laba atau keuntungan.

Jangkauan pelayanan meliputi: Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Petang, Abiansemal, Mengwi

c. Struktur Organisasi, Dewan Pengawas, Direksi dan Personalia

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan uraian tugas Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung ditetapkan berdasarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Penrsahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung tanggal 15 Oktober 2021.

Rincian Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- SPI
- Bagian Umum
- Bagian Keuangan
- Bagian tangganan
- Bagian Produksi
- Bagian Distribusi
- Bagian Perencanaan Umum
- Unit TSI
- Unit PBJ
- Unit laboratorium
- Unit PKA

2. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mangutama pelode 2023 - 2027 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 549/01/HK/2023 tanggal 10 April 2023 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST, MT.
Anggota	:	I Made Agus Arsana, SH.
Anggota	:	I Ketut Gede Sunarta, ST

Sesuai dengan Keputusan KPM Nomor: 02/ KPM / PDAM / 2021 tanggal: 15 Februari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2021 - 2026, susunan direksi sebagai berikut:

Direktur Utama	:	I Wayan Suyasa, S.Sos.,MM
Direktur Umum	:	I Made Sugita, SH., MM
Direktur Teknik	:	Ir. I Made Suarsa, ST., MM

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

1. Gambaran Umum (Lanjutan)

2. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 293 orang terdiri dari pegawai tetap berjumlah 257 orang, calon pegawai berjumlah 24 orang tenaga kontrak berjumlah 12 orang.
Rincian Struktur Organisasi di Perumda Air Minum Tirta Mangutama adalah sebagai berikut:

SPI	:	5 orang
Bagian Umum	:	25 orang
Bagian Keuangan	:	25 orang
Bagian Langganan	:	55 orang
Bagian Produksi	:	63 orang
Bagian Distribusi	:	72 orang
Bagian Perencanaan Umum	:	21 orang
Unit TSI	:	6 orang
Unit PBJ	:	10 orang
Unit Laboratorium	:	5 orang
Unit PKA	:	6 orang
Jumlah	:	**293 orang**

d. Modal PERUMDA Air Minum Tirta Mangutama

Modal Perusahaan yang berasal dari penyertaan sejak terjadi pemisahan dengan PDAM Kota Denpasar tanggal 1 Juli 1997 adalah sebesar Rp 14.191.922.744,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung pasal 5 disebutkan bahwa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 193.207.813.274,00.

Pada tahun 2021 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp 81.573.737.881,00 berupa penyediaan sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 812/01/HK/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Pada tahun 2022 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp8.956.586.330,00 berupa penyediaan sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 835/01/HK/2021 tanggal 30 November 2021.

Pada tahun 2024 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah total sebesar Rp 50.387.452.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya berupa Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Abiansemal dan Kuta Utara dengan jumlah sebesar Rp 387.452.000,00 (sesuai dengan Berita Acara No: 1579b/BASTB-PDAM/III/2014, 1585b/BASTB-PDAM/III/2014, 1579C/MOU PKPAM-PDAM/III/2014) yang telah ditetapkan statusnya sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

- Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Badung berupa uang sebesar Rp 50.000.000.000.00 sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama unruk pengembangan SPAM.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412959, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

1. Gambaran Umum (Lanjutan)

d. Modal PERUMDA Air Minum Tirta Mangutama

a. Penyertaan Pemda Badung Tahun s/d 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

s.d 2021	:	Rp	193.207.843.274,00
Tahun 2021	:	Rp	81.573.737.881,00
Tahun 2022	:	Rp	8.956.586.330,00
Tahun 2024	:	Rp	50.387.452.000,00
Jumlah		**Rp**	**334.125.619.485,00**

b. Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya dapat disajikan sebagai berikut:

BAST No: I579b/BASTB-PDAIWIIV20I4 Tanggal 24 Maret 2014	Rp	193.726.000
MOU No: 1579c/MOU PKPAM-PDAM/III/U2014 Tanggal 24 Maret 2014	Rp	193.726.000
Jumlah	**Rp**	**387.452.000**

Neraca Awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama diperoleh dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Air Minum yang telah ada di Kabupaten Badung dan Hibah dari Pemerintah Pusat yang kemudian dilebur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Pada Tahun 1989 terjadi penghibahan kekayaan proyek air minum / bersih dari Departemen Keuangan kepada Pemerintah Badung yang kemudian ditetapkan sebagai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Badung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-2/ MK/1989 tanggal 17 Maret 1989 dan Nomor : KU.09.04/W.14/637 Tanggal 2 Juni 1997 sebesar Rp 12.036.225.076,88.

e. Jumlah Pelanggan

Jumlah pelanggan per. 31 Desember 2024 sebanyak 80.792 SL atau meningkat sebesar 3,53% dari tahun 2023 sebanyak 78.041 SL. Sebagian besar pelanggan merupakan golongan pelanggan rumah tangga.

		2024	2023
- Sosial	:	1.317	1.276
- Rumah Tangga	:	62.312	61.409
- Usaha	:	17.162	15.355
- Non Komersial	:	1	1
- Komersial	:	-	-
Jumlah		**80.792**	**78.041**

2. Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan pengelola telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI).

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Pembukuan

Pelaksanaan pembukuan di Perumda Air Minum Tina Mangutama mengacu pada:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1991 tanggal 6 Februari 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.
b. Mulai Tahun Buku 2002 Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Asisten Deputi urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 Tanggal 10 Agustus 2000.
c. Mulai tahun Buku 2011 sampai sekarang, penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diputuskan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Nomor: 28.1/PDAM/KPTS/2012 Tentang: Penerapan Standar Akununsi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tanggal 30 Maret 2012.

b. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku adalah :

a. Kelangsungan Usaha
   Suatu Entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan.
b. Akrual
   Entitas harus menyusun laporan keuangan kecuali laporan Arus Kas dengan Menggunakan dasar akruat, dalam dasar akrual pos pos diakui sebagai asset kewajiban, ekuitas penghasilan dan beban (unsur - unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos - pos tersebut.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

d. Piutang

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Piutang diklasifikasikan menjadi piutang usaha yaitu timbul dari transaksi penjualan air dan non air, piutang non usaha yaitu piutang yang timbul dari transaksi lainnya misal piutang pegawai.

Pengakuan awal piutang

- Piutang usaha diakui saat diterbitkannya Daftar Rekening Ditagih (DRD) air dan Daftar Piutang/Tagihan Non Air.
- Piutang non usaha Diakui pada saat adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dapat diukur dengan handal.

Pengukuran Awal

- Piutang usaha penjualan air dicatat sebesar tagihan pemakaian air kepada pelanggan yang tertera dalam DRD air.
- Piutang non Usaha dicatat sebesar nilai wajar yang dapat direalisasikan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421647, (0361) 421645
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

d. Piutang

Piutang usaha yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dihitung penisihannya dengan pengelompokkan dan ketentuan (masih menggunakan Kepmen Otda No. 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus).

- 3 Bulan s/d 6 Bulan : 30%
- 6 Bulan s/d 12 Bulan : 50%
- 1 Tahun s/d 2 Tahun : 75%
- Diatas 2 Tahun : 100%

e. Persediaan

Persediaan Barang dinilai berdasarkan harga perolehan dengan metode *"First in First Out"* (FIFO) dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Persediaan Bahan Instalasi
b. Persediaan Bahan Operasi yang terdiri dari : Persediaan Bahan Kimia (*Perpectual Inventory Methode*) dan Persediaan Bahan Operasi Lainnya *(Physical Inventori Methode)*.

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Persediaan Bahan Kimia dan Persediaan Bahan Instalasi dicatat dengan metode perpectual dimana mutasi penambahan dan pemakaian dicata setiap saat sehingga saldo kuantitas barang dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat.

Pembebanan pemakaian persediaan ini dilakukan berdasarkan metode FIFO sedangkan Persediaan Bahan Operasi lainnya dicatat dan dibukukan dengan metode fisik, dimana pada saat perolehan diakui seluruhnya sebagai beban dan pada akhir periode berdasarkan opname pisiknya ditetapkan sebagai persediaan dengan melakukan penyesuaian terhadap pengakuan pembebanannya.

Jika persediaan dijual maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode pendapatan yang terkait diakui. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain, misalnya persediaan yang digunakan sebagai komponen asset tetap yang dubangun sendiri. Alokasi persediaan ke aset lain diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut.

f. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki atau dikuasai untuk digunakan dalam proses produksi dan distribusi atau tujuan administratif, diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode / tahun buku.

Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan / harga beli sampai aktiva tersebut siap digunakan dan disusutkan dengan methode yang dianut dalam undang-undang perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 1983) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 257/PMK 03/2008 Tanggal 31 Desember 2008.

Penggolongan dan besarnya tarif penyusutan atas aktiva tetap adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif
I	**Bukan Bangunan**		
	Kelompok 1	4 tahun	50%
	Kelompok 2	8 tahun	25%
	Kelompok 3	16 tahun	12,50%
	Kelompok 4	20 tahun	10%
II	**Bangunan**		
	Permanen	20 Tahun	5% dari nilai perolehan
	Tidak Permanen	10 Tahun	10% dari nilai perolehan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

g. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

h. Penyertaan Pada Entitas Anak

Pencatatan investasi pada entitas anak menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ini, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagaian Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung atas laba atau rugi dari entitas anak. Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

i. Utang/Kewajiban

Semua utang / kewajiban yang telah diketahui dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tetap atau tidak.

Jika kewajiban yang telah terjadi belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya, maka dapat dilakukan dengan taksiran yang wajar misalnya : Rekening Listrik. Air Baku dan Sewa.

j. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo

Bagian dari Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang setelah Neraca disajikan sebagai kewajiban lancar.

k. Bunga Pinjaman Yang Akan Dibayar

Pos ini menampung bunga pinjaman jangka panjang yang akan dibayar dalam wakhr 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca akhir tahun yang terdiri dari bunga masa tenggang dan beban administrasi berjalan.

m. Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha dan non usaha diakui pada saat timbul tansaksi dan/ atau pada masa prestasi dinikmati.

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut:

a. Pendapatan Air
   Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan bulan bersangkutan. atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai.
b. Pendapatan Beban Tetap Berlangganan
   Pendapatan Beban Tetap Berlangganan diakui, dicatat dan dilaporkan tiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan bulan bersangkutan, atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan
c. Pendapatan non Air
   Pendapatan Non Air diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan baik pelanggan/ calon pelanggan diisyaratkan membayar kewajiban secara tunai maupun secara angsuran/ mencicil dibukukan pada saat terjadi transksi dengan mengakui sebagai piutang Non Air Sambungan Baru.
d. Pendapatan Denda
   Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran air oleh pelanggan diakui dan dicatat diterimanya pembayaran (*Cash Basis*).

Entitas menyajikan suatu beban dalam klarifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

m. Pendapatan dan Beban

a. Berdasarkan Sifat Beban

Beban dikumpulkan dalam laporan Laba/Rugi berdasarkan sifatnya contoh : penyusutan, pembelian, bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan, dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

b. Berdasarkan Fungsi Beban

Beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau sebagai contoh biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi sekurang-kurangnya entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Pada dasarnya beban harus diakui,dicatat dan dilaporkan dalam lani periode terjadinya (Accrual Basis) pembebanan yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, asuransi dan sebaginya harus dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban walaupun pembayrannya belum dilakukan ataupun telah dibayarkan dimuka.

Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, beban yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya harus dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

n. Imbalan Pasca Kerja

Perumda mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perumda diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

o. Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan Perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 " Pajak Penghasilan", Perusahaan tidak mengakui penangguhan pajak *(deferred tax)* atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak. Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar *(tax payable concept)*. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

4. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Kas dan Setara Kas

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Kas Kecil		
Kas Kecil	35.000.000	35.000.000
Jumlah Kas Kecil	**35.000.000**	**35.000.000**
Dana Kerja		
Dana kerja di Seksi Penagihan Badung Utara	5.000.000	5.000.000
Dana kerja di Seksi Penagihan Badung Selatan	7.500.000	7.500.000
Jumlah Dana Kerja	**12.500.000**	**12.500.000**
Bank		
Giro BTN No. 0000701300007269	11.591.777.068	18.340.863.492
Giro BNI 46 No. 49387694	4.710.972.672	2.938.740.246
Giro Mandiri No. 1450000010575	14.696.225.631	16.590.439.812
Giro BRI No. 001701000155307	3.397.184.202	3.356.438.447
Giro BPD No. 0110100010451	2.889.465.019	3.176.619.486
Giro BPD No. 130111001278	15.857.164.372	16.840.679.563
Giro BPD No. 0130111001828	50.216.185.792	-
Jumlah Bank	**103.358.974.756**	**61.243.781.046**
Deposito		
Deposito di BPD Cab Utama (03.01017-1)	1.000.000.000	1.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.02460-8)	3.000.000.000	3.000.000.000
Deposito di Kopkar Tirta Mertha (20-100014-4)	350.000.000	350.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.02592-5)	4.000.000.000	4.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.02591-3)	4.000.000.000	4.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.00576-7)	3.000.000.000	3.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.00577-9)	3.000.000.000	3.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.00578-0)	3.000.000.000	3.000.000.000
Deposito di Bank Mandiri (AF 435595)	6.000.000.000	6.000.000.000
Deposito di Bank Mandiri (AF 594391)	5.000.000.000	5.000.000.000
Deposito di Bank Mandiri (AF 594448)	5.000.000.000	5.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2173095)	-	3.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2173096)	3.000.000.000	3.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2173097)	3.000.000.000	3.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2180029)	5.000.000.000	5.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2180030)	5.000.000.000	5.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2224849)	-	5.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2263102)	-	5.000.000.000
Jumlah Deposito	**53.350.000.000**	**66.350.000.000**
Jumlah Kas Dan Setara Kas	**156.756.474.756**	**127.641.281.046**

Kas kecil merupakan saldo kas perusahaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran harian yang jumlahnya maksimal sebesar Rp 500.000,00 setiap transaksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Nomor: 36/PERUMDA/KPTS/2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Kas Kecil Perumda Air Minum Tirta Mangutama.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

1. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama No. 51/PERUMDA/KPTS/2022 Tentang Pengelolaan Dana Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangutama, Dana Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangutama yang digunakan untuk pengembalian uang transaksi ditetapkan sebesar:

Nama Seksi	Dana Kerja	
Seksi Penagihan Badung Utara	Rp	5.000.000
Seksi Penagihan Badung Selatan	Rp	7.500.000
Jumlah	**Rp**	**12.500.000**

Giro BPD No. 0130111001828 merupakaan rekening yang dibentuk khusus untuk menampung penyeruan modal pemerintah Kabupaten Badung berupa uang sebesar Rp 50.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 724/01/HK/J2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama. Rincian saldo sebagai berikut:

Pembukaan Rekening	Rp	1.500.000,00
Penyertaan Modal	Rp	50.000.000.000,00
Pendapatan Jasa Giro	Rp	268.507.240,00
Beban Bank	Rp	53.821.448,00
Saldo Akhir	**Rp**	**50.216.185.792,00**

Saldo deposito sebesar Rp 53.350.000.000 merupakan saldo penempatan dana perusahaan dalam bentuk deposito dalam rupiah di Bank BPD Bali, Bank Mandiri, Bank BTN dan Koperasi Karyawan Tirta Mertha PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

2. Piutang Usaha

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Piutang Langganan Air		
Tarif Lama		
Piutang Rek. Air Pelanggan Sosial	2.589.105	4.061.724
Piutang Rek. Air Pelanggan Non Niaga	399.448.450	1.039.281.021
Piutang Rek. Air Pelanggan Niaga	335.289.830	590.603.955
Piutang Rek. Air Pelanggan Industri	133.434.100	268.584.428
Piutang Rek. Air Pelanggan Sosirigasiial	27.000	54.000
Struktur Tarif Baru		
Piutang Rek. Air Pelanggan Sosial	160.376.643	169.892.099
Piutang Rek. Air Pelanggan Rumah Tangga	9.596.481.154	9.302.843.781
Piutang Rek. Air Pelanggan Usaha	16.769.570.558	14.639.384.842
Piutang Rek. Air Pelanggan Irigasi	1.336.385	3.617.635
Jumlah Piutang Langganan Air	**27.398.553.225**	**26.018.323.485**
Piutang Dana Meter		
Piutang Dana Meter	38.479.000	127.164.000
Jumlah Piutang Dana Meter	**38.479.000**	**127.164.000**
Piutang Beban Tetap Berlangganan		
Piutang Beban Tetap Berlangganan	1.329.016.000	1.208.883.000
Jumlah Piutang Beban Tetap Berlangganan	**1.329.016.000**	**1.208.883.000**
Penyisihan Piutang		
Penyisihan Piutang	(2.378.961.055)	(2.525.355.030)
Jumlah Penyisihan Piutang	**(2.378.961.055)**	**(2.525.355.030)**
Jumlah Piutang usaha	**26.387.087.170**	**24.829.015.455**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

2. Piutang Usaha (Lanjutan)

Piutang Langganan Air merupakan jumlah seluruh tagihan kepada pelanggan air untuk penjualan Per 31 Desember 2024 dan 2023 serta sisa tagihan bulan sebelumnya. Terdapat 2 struktur jenis tarif yang disajikan, struktur jenis tarif lama atas piutang rekening sampai dengan bulan September 2022, dan struktur jenis tarif baru atas piutang rekening air yang dibentuk mulai bulan Oktober 2022.

Piutang Dana Meter merupakan saldo piutang berdasarkan rekening yang diterbitkan sampai dengan bulan September tahun 2022. Semenjak penerapan struktur tarif baru, Pendapatan Administrasi dan Dana meter diganti menjadi Pendapatan Beban Tetap Berlangganan mulai rekening bulan Oktober 2022.

Piutang Beban Tetap Berlangganan merupakan saldo piutang Beban Tetap Berlangganan berdasarkan rekening yang diterbitkan dari bulan Oktober 2022 dampak dari penerapan struktur tarif baru.

Penyisihan Piutang merupakan saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dibentuk berdasarkan presentase dari umur piutang air, dana meter, dan beban tetap berlangganan. Besarnya penyisihan piutang disebabkan oleh adanya tabel penyisihan piutang rekening adalah sebagai berikut:

Umur Piutang	Rp	%	Penyisihan
0 s/d 3 Bulan	25.306.847.859	0	-
3 Bulan s/d 6 Bulan	661.181.839	30	198.354.552
6 Bulan s/d 1 Tahun	752.426.699	50	376.213.350
1 Tahun s/d 2 Tahun	964.794.699	75	723.596.024
Diatas 2 Tahun	1.080.797.129	100	1.080.797.129
Jumlah	**28.766.048.225**		**2.378.961.055**

3. Piutang Langganan Non Air

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Piutang Rek. Non Air Sambungan Baru	150.000.000	-
Jumlah Piutang Langganan Non Air	**150.000.000**	**-**

Piutang Langganan Non Air merupakan seluruh tagihan kepada pelanggan air atas biaya penyambungan baru yang timbul per 31 Desember 2024 dan 2023.

4. Tagihan Non Usaha

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Tagihan Pada Kopkar Tirta	-	521.598.093
Tagihan Pada Pegawai	43.894.969	8.263.135
Tagihan Pada Dharma Wanita	35.000.000	52.500.000
Tagihan Pada ITS Badung Hebat	1.056.841.750	-
Rupa - Rupa Piutang Lainnya	-	65.426.710
Jumlah Tagihan Non Usaha	**1.135.736.719**	**647.787.938**

Saldo Tagihan Non Usaha merupakan tagihan kepada Pegawai, dan Rupa - Rupa Piutang lainnya.

Saldo Tagihan Pada PT ITS Badung Hebat merupakan dana yang telah dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp1.056.841.750 (satu milyar lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rujuh ratus lima puluh rupiah) untuk persiapan lahan pembangunan Air Minum Dalam Kemasan termasuk Hak Sewa Menyewa yang akan dibayarkan secara bertahap oleh PT. ITS Badung Hebat sesuai dengan pasal 2 Akta Notaris: Putu Deviyanti Sugitha, SH., M.Kn Nomor 24 Tanggal 18 Septemher 2024 Perihal Pengoperan Hak Sewa Menyewa.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

5. Persediaan

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Persediaan Bahan Operasi Kimia	1.655.409.940	1.364.913.068
Persediaan BBM dan Pelumas	195.391.932	231.308.950
Persediaan Alat Tulis dan Cetakan	232.234.518	291.843.593
Persediaan Barang Cetakan	113.131.115	195.129.538
Jumlah Persediaan	**2.196.167.504**	**2.083.195.148**

6. Pembayaran Dimuka

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Sewa tanah dibayar dimuka	714.839.764	744.066.953
Jumlah Pembayaran Dimuka	**714.839.764**	**744.066.953**

Jumlah tersebut merupakan saldo pembayaran dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tanah Wuk Sangeh (PDAM.04/PRJ/VI/99 tgl 1 Juni 1999)	31.075.000	1.388.888
Tanah Wuk Sangeh (PDAM.04/PRJ/VI/99 tgl 1 Juni 1999)	31.075.000	1.388.888
Br. Kukuh Perean (Md. Yuda / PDAM .4/PRJ/I/2009)	17.013.889	21.180.556
Ur. Pnndung 1 I Kl- Suanha (PDAM 29/PRJ/IV/06 tgl I Mci 2006)	10.366.400	12.003.200
Subak Grana Ds Sangeh (PDAM 08/PRJ/III /07, 1 Maret 2007)	10.037.500	10.862.500
Br. Pundung / 1 Kt. Suartha (PDAM 20/PRJJ/X/08 , tgl 9 Okt 2008)	8.910.000	10.230.000
Br. Kerhta Petang/ I Putu Suweta (PDAM 05/PRJ/I/2010)	88.366.666	92.766.666
Br. Kerta Petang / I Gst Ketut Chandri (PDAM.22/PRJ/VII/2010)	18.450.000	19.350.000
Bronzekaptering di M.A Kerta/I Kt Budiasa	18.916.666	19.824.666
Bronzekaptering di M.A Kerta/I Kt Budiasa	3.026.666	3.171.946
Sewa tanah 6,5 Are di Sekarmukti Petang	247.180.556	260.541.667
Sewa tanah 1 Are di Kelurahan Benoa (Wy. Roteg)	18.888.889	32.222.222
Sewa tanah Br Pundung Ds Pangsan (I Ketut Liang)	28.472.239	32.638.903
Sewa tanah terletak di Br Gegeran Baha (I Ketut Renta)	43.185.185	49.074.074
Sewa tanah terletak di Subak Jurang Dungun (Igst Ngr Wijana)	53.777.778	61.111.111
Sewa tanah Aset Pemerintah Prov Bali di desa Ayunan	36.822.333	52.603.333
Sewa Tahana Aset Pemerintah Prov Bali SHP No. 53 dan SHP No. 2	-	1.333.333
Sewa Tanah di Subak Jurang Dungun	10.433.333	15.633.333
Sewa Lahan Mata Air Sulangai I dan II Br. Dinas Abing Sulangai Petang	38.841.667	46.741.667
Jumlah	**714.839.766**	**744.066.953**

7. Uang Muka Kerja

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Uang Muka Operasi	12.150.000	8.000.000
Uang Muka Bahan Bakar Kendaraan	31.900.000	-
Uang Muka Pendidikan dan Pelatihan	11.080.000	-
Uang Muka Premi BPJS	6.640.748	6.640.748
Uang Muka Premi Inhealth	806.832	806.832
Uang Muka Materai	1.600.000	1.600.000
Jumlah Uang Muka Kerja	**64.177.580**	**17.047.580**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

8. Uang Muka Pajak

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Uang Muka Pph 21	562.239.279	-
Jumlah Uang Muka Pajak	**562.239.279**	**-**

9. Penyertaan Pada Entitas Anak

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Nilai Penyertaan Pada Entitas Anak	4.618.069.604	968.747.416
Jumlah Penyertaan Pada Entitas Anak	**4.618.069.604**	**968.747.416**

Modal Dasar PT. Badung Hebat Jaya sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sesuai dengan sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Perdir Nomor: 8/PERDIR./PERUMDA/2023 tentang Pembentukan Anak Perusahaan dan Akta No. 1 Tanggal 02 Oktober 2023 dibuat dihadapan Nouris I Wayan Sugita, SH yang akta pendirian perseroan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074711.AH.01.01 .Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Badung Hebat Jaya yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2023.

Pada Tahun 2024, terdapat perubahan modal dasar menjadi Rp 10.0000.000.000 sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Perdir Nomor: 0 I/PERDIR/PERUMDA/2024 tentang Perubahan Atas Perdir Nomor: 8/PERDIR/PERUMDA/2O23 tentang Pembentukan Anak Perusahaan. Namun modal yang disetor oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama di tahun 2024 sebesar Rp 4.653.000.000,00 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Badung Hebat Jaya Nomor: 15 Tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Deviyanti Sugitha, SH.,M.Kn.

Pada Tahun 2024 Perumda Air Minum Tirta Mangutama melakukan penambahan modal disetor sebesar 'Rp 4.653.000.000,00, sehingga modal disetor sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 4.653.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

Kepemilikan Saham PT Badung Hebat Jaya Tahun 2024			
Perumda Air Minum Tirta Mangutama :	Rp	4.653.000.000	99%
Koperasi Karyawan Tirta Mertha :	Rp	47.000.000	1%
Jumlah	**Rp**	**4.700.000.000**	100%

10. Aset Tetap

	2024			
	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Perolehan :				
Aktiva Tanah	5.684.015.390	-	-	5.684.015.390
Instalasi Sumber Air	16.732.547.341	37.920.040	-	16.770.467.381
Instalasi Pompa	51.462.635.783	1.753.576.116	-	53.216.211.899
Instalasi Pengolahan air	129.012.145.997	3.768.635.774	-	132.780.781.771
Instalasi Trans & Dis	476.259.045.627	49.662.553.307	-	525.921.598.934
Bangunan/Gedung	9.183.531.648	30.682.972.184	-	39.866.503.832
Peralatan Kantor	16.055.050.296	5.505.602	-	16.060.555.898
Kendaraan/Alat Angkut	9.667.559.752	-	-	9.667.559.752
Inventaris Kantor	17.402.561.114	2.167.404.199	-	19.569.965.313
Jumlah Perolehan	**731.459.092.948**	**88.078.567.222**	**-**	**819.537.660.170**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 412950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

10. Aset Tetap (Lanjutan)

	2024			
	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan				
Aktiva Tanah	-	-	-	-
Instalasi Sumber Air	10.288.495.968	797.895.907	-	11.086.391.875
Instalasi Pompa	38.383.775.917	3.139.155.404	-	41.522.931.321
Instalasi Pengolahan air	66.297.901.879	5.813.818.506	-	72.111.720.385
Instalasi Trans & Dis	283.198.617.076	27.672.388.641	-	310.871.005.717
Bangunan/Gedung	6.641.132.751	414.810.593	-	7.055.943.344
Peralatan Kantor	11.753.255.763	695.963.337	-	12.449.219.100
Kendaraan/Alat Angkut	8.330.341.206	808.365.171	-	9.138.706.377
Inventaris Kantor	14.795.794.183	1.719.896.997	-	16.515.691.180
Jumlah Penyusutan	**439.689.314.743**	**41.062.294.556**	-	**480.751.609.299**
Nilai Buku	**291.769.778.205**			**338.786.050.871**

	2023			
	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Perolehan :				
Aktiva Tanah	5.684.015.390	-	-	5.684.015.390
Instalasi Sumber Air	15.753.730.804	978.816.537	-	16.732.547.341
Instalasi Pompa	49.024.772.013	2.437.863.770	-	51.462.635.783
Instalasi Pengolahan air	122.322.399.116	6.689.746.881	-	129.012.145.997
Instalasi Trans & Dis	435.789.913.419	40.469.132.208	-	476.259.045.627
Bangunan/Gedung	8.294.689.010	888.842.638	-	9.183.531.648
Peralatan Kantor	15.666.541.416	388.508.880	-	16.055.050.296
Kendaraan/Alat Angkut	8.521.609.752	1.145.950.000	-	9.667.559.752
Inventaris Kantor	15.605.219.994	1.797.341.120	-	17.402.561.114
Jumlah Perolehan	**676.662.890.914**	**54.796.202.034**	-	**731.459.092.948**
Akumulasi Penyusutan				
Aktiva Tanah	-	-	-	-
Instalasi Sumber Air	9.609.888.151	678.607.817	-	10.288.495.968
Instalasi Pompa	34.744.451.270	3.639.324.647	-	38.383.775.917
Instalasi Pengolahan air	61.608.942.447	4.688.959.432	-	66.297.901.879
Instalasi Trans & Dis	258.008.199.990	25.190.417.086	-	283.198.617.076
Bangunan/Gedung	6.389.446.255	251.686.496	-	6.641.132.751
Peralatan Kantor	10.897.100.755	856.155.008	-	11.753.255.763
Kendaraan/Alat Angkut	7.845.100.347	485.240.859	-	8.330.341.206
Inventaris Kantor	13.443.772.136	1.352.022.048	-	14.795.794.183
Jumlah Penyusutan	**402.546.901.351**	**37.142.413.392**	-	**439.689.314.743**
Nilai Buku	**274.115.989.562**			**291.769.778.205**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Jl. Raya Kapal No 14, Mangupura, Mengwi Telp. (0361) 412949, (0361) 413950, (0361) 421847, (0361) 421845
Website : https://tirtamangutama.badungkab.go.id, e-mail:infotirtamangutama@badungkab.go.id
Badung

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

11. Aset Tidak Lancar Lainnya

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Aset Tetap Dalam Penyelesaian		
Instalasi Sumber Air	1.298.208.000	-
Instalasi Pompa	-	57.413.050
Instalasi Pengolahan Air	7.796.154.675	-
Instalasi Transmisi Distribusi	53.527.461.728	3.211.249.887
Instalasi Pergantian WM	59.266.254	6.959.480
Bangunan dan Gedung	12.824.000	821.491.790
Bagunan dalam penyelesaian	-	1.056.841.750
Lain Lain Dalam Penyelesaian	1.619.728.650	1.721.295.870
Jumlah Aset Tetap Dalam Penyelesaian	**64.313.643.307**	**6.875.251.827**
Bahan Instalasi		
Pipa	3.061.612.718	3.006.198.662
Meter Air	1.441.992.780	952.019.188
Fitting	6.239.213.226	5.659.174.214
Ruga Rupa Bahan Instalasi Lain	104.308.536	68.698.414
Jumlah Bahan Instalasi	**10.847.127.260**	**9.686.090.478**
Persediaan Dalam Proses		
Persediaan Dalam Proses	-	71.730.198
Jumlah Persediaan Dalam Proses	**-**	**71.730.198**
Uang Jaminan		
Uang Jaminan Tetap Daya Baru PLN	1.219.748.600	1.219.748.600
Jumlah Uang Jaminan	**1.219.748.600**	**1.219.748.600**
Aset Yang Akan Dipergunakan		
Pompa - Pompa Peralatan dan	784.439.200	687.525.100
Alat - Alat Berat / Bengkel	292.576.020	292.576.020
Jumlah Aset Yang Akan Dipergunakan	**1.077.015.220**	**980.101.120**
Aset Tak Berwujud		
Nilai Perolehan	15.990.419.326	12.625.333.557
Amortisasi Aktiva Tak Berwujud	(8.817.382.499)	(7.983.201.144)
Jumlah Aset Tak Berwujud	**7.173.036.827**	**4.642.132.413**
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	**84.630.571.214**	**23.475.054.636**

Atas nilai Bangunan Dalam Panyelesaian Pabrik AMDK pada tahun 2023 terdiri dari:

DED Pembangunan Pabrik	:	Rp	142.801.500
Evaluasi Studi Kelayakan AMDK	:	Rp	44.400.000
Sewa Tanah Pabrik di Ketogan	:	Rp	768.750.000
Pematangan Lahan Pabrik	:	Rp	98.890.250
Pembelian selang unok di Pabrik	:	Rp	2.000.000
		Rp	**1.056.841.750**

Hal tersebut disebabkan karena perubahan keputusan untuk pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan yang sebelumnya akan dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, namun akhirnya diputuskan dikelola oleh PT Badung Hebat Jaya sebagai anak perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 2 Akta Notaris Putu Deviyanti Sugitha, SH., M.Kn Nomor 24 Tanggal 18 September 2024 Perihal Pengoperan Hak Sewa Menyewa, dijelaskan bahwa atas nilai tersebut diatas untuk persiapan lahan pembangunan Air Minum Dalam Kemasan termasuk Hak Sewa Menyewa yang akan dibayarkan 'secara bertahap oleh PT ITS Badung Hebat.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

11. Aset Tidak Lancar Lainnya (Lanjutan)

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aktiva Tak Berwujud berupa DED, Studi Kelayakan, dan software atau sistem informasi untuk memperlancar operasional Perumda Tirta Mangutama Kabupaten Badung per 31 Desember 2024 dan 2023

12. Utang Usaha Yang Masih Harus Dibayar

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Utang Usaha Yang Masih Harus Dibayar	25.228.371.961	5.438.226.775
Jumlah Utang Usaha Yang Masih Harus Dibayar	**25.228.371.961**	**5.438.226.775**

13. Hutang Pajak

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Utang PPh 21	-	1.524.423.498
Utang PPh Pasal 23	26.108.469	15.056.033
Utang PPh Pasal 25/29	6.942.069.659	11.501.323.813
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2	180.298.823	176.857.308
Jumlah Hutang Pajak	**7.148.476.951**	**13.217.660.650**

		31-Des-24 Rp
Laba (Rugi) Komersial		**69.057.093.530**
Koreksi Fiskal		
Koreksi Fiskal Positif		
Rupa - Rupa Beban Operasi Produksi	20.168.000	
Rupa - Rupa Beban Operasi Pengolahan	150.880.500	
Rupa - rupa Beban Operasi Disribusi	151.587.900	
Peml. Instalasi Prodrksi lainnya	322.782.174	
Peml. Instalasi Pompa	964.367.001	
Peml. Pipa Transmisi dan Distribusi	13.143.954.606	
Peml. Meter - Meter Distribusi	382.526.095	
Peml. Reservoar dan Booster Dstribusi	1.375.158.801	
Pemeliharaan Taman Dan Halaman	854.700.000	
Beban Tunjangan Lainnya	952.500.000	
Beban Iuran /Berlangganan	1.872.451.545	
Bebar Olah Raga dan Kesenian	94.959.377	
Bantuan Dan Sumbangan (Suka-Duka)	62.675.000	
Bantuan Sosial lainnya	297.458.705	
Dana Representasi Direksi	-	
Beban Rapat	154.786.750	
Beban Tamu Pimpinan	140.127.725	
Beban Banten	926.411.750	
Rupa-rupa Beban Kantor (Rek. Air Kantor)	45.973.043	
Beban Humas dan Pembinaan	255.987.065	
Beban Urusan Langganan	301.723.700	
Rupa-Rupa Beban Umum lainnya	822.051.550	
Beban Iklan	77.300.000	
Beban Pph 4(2)	52.171.726	

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

13. Hutang Pajak (Lanjutan)

		31-Des-24 Rp
Beban Penyisihan / Penghapusan	1.001.095.314	
Koreksi Fiskal		
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	**24.423.798.327**	
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan Bunga Deposito	2.030.674.016	
Pendapatan Jasa Giro	1.176.180.272	
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	**3.206.854.288**	
Total Koreksi Fiskal		**21.216.944.039**
Laba (Rugi) Fiskal		**90.274.037.569**
Perhitungan Taksiran Pajak Badan Tahun 2024		**19.860.288.265**
Uang Muka Pajak Tahun 2024		14.092.602.300
Taksiran Pajak Badan Tahun 2024		19.860.288.265
Kurang Bayar Pajak Tahun 2024		**(5.767.685.965)**

14. Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jk. Pendek	3.805.793.472	4.053.620.088
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jk. Panjang	27.096.033.985	23.467.335.762
Jumlah Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi	**30.901.827.457**	**27.520.955.850**

15. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	92.675.361.747	34.270.087.677
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	**92.675.361.747**	**34.270.087.677**

16. Kewajiban Lain-Lain

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Rupa-Rupa Kewajiban Lainnya	70.432.964	121.564.542
Jumlah Kewajiban Lain-Lain	**70.432.964**	**121.564.542**

17. Penyertaan Pemerintah Pusat

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Penyertaan Pemerintah Pusat	-	387.452.000
Jumlah Penyertaan Pemerintah Pusat	**-**	**387.452.000**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

17. Penyertaan Pemerintah Pusat (Lanjutan)

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya terdiri dari :		
- Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Abiansemal SPK.KU.03.01/SPK/PKPAM-SK/1519 Tanggal 19 Noovember 2013	-	193.726.000
- Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Kuta Utara SPK.KU.03.01/SPK/PKPAM-SK/1520 Tanggal 19 Noovember 2013 MOU No.: 1579c/MOU PKPAM-PDAM/III/2014 Tanggal 24 Maret	-	193.726.000
Jumlah	**-**	**387.452.000**

Pada tahun 2024, Penyertaan pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp 387.452.000 telah ditetapkan statusnya oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Badung Nomor: 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama sehingga saldo tahun 2024 menjadi Rp 0,00.

18. Penyertaan Pemda Badung

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Penyertaan Pemda Badung	334.125.619.485	283.738.167.485
Jumlah Penyertaan Pemda Badung	**334.125.619.485**	**283.738.167.485**

Pada tahun 2024 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah total sebesar Rp 50.387.452.000, dangan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya berupa Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Abiansemal dan Kuta Utara dengan jumlah sebesar Rp 387.452.000,00 (sesuai dengan Berita Acara No: 1579b/BASTB-PDAM/III/2014, 1585b/BASTB-PDAM/III/2014,1579c/MOU PKPAM-PDAM/III/2014, yang telah ditetapkan statusnya sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 820/01 /HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Penrsahsan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Badung berupa uang sebesar Rp 50.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tina Mangutama untuk pengembangan SPAM.

19. Cadangan Dana

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Pemenuhan Dana Cadangan	48.468.694.846	43.894.283.319
Tanggungjawab Sosial, Lingkungan, Sosial Lainnya	30.700.911.477	26.126.499.950
Cadangan Peningkatan Layanan & Usaha Rintisan	21.988.523.361	12.839.700.308
Jumlah Cadangan Dana	**101.158.129.683**	**82.860.483.576**

Jumlah tersebut merupakan cadangan umum atas pembagian laba tahun sebelumnya. Pembagian laba tahun 2023 sesuai dengan Keputusan KPM No. 05/KPM/PDAM/2024 tentang penggunaan Laba Tahun Buku 2023 tanggal 21 Agustus 2024.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

20. Laba Ditahan

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Laba Yang Belum Dibagikan	6.398.216.404	6.398.216.405
Jumlah Laba Ditahan	**6.398.216.404**	**6.398.216.405**

21. Kewajiban Imbalan Kerja Dapenma Pamsi

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	(30.901.827.457)	(27.520.955.850)
Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja Dapenma Pamsi	**(30.901.827.457)**	**(27.520.955.850)**

22. Laba (Rugi) Periode Berjalan

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Laba / Rugi Tahun Berjalan	49.196.805.265	45.744.115.267
Jumlah Laba (Rugi) Periode Berjalan	**49.196.805.265**	**45.744.115.267**

23. Pendapatan Penjualan Air

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Pendapatan Air	270.240.732.697	241.112.919.066
Pendapatan Beban Tetap Berlangganan	12.383.657.000	12.012.611.000
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	**282.624.389.697**	**253.125.530.066**

24. Pendapatan Non Air

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Pendapatan Sambungan Baru, Pendaftaran	23.344.546.848	9.948.236.978
Pendapatan Denda	4.959.023.556	4.913.443.791
Pendapatan Jasa Perbaikan, PK	1.383.504.451	1.372.100.675
Jumlah Pendapatan Non Air	**29.687.074.855**	**16.233.781.444**

25. Pendapatan Lain Lain

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Pendapatan Bunga Deposito	2.030.674.016	1.607.093.151
Pendapatan Jasa Giro	1.176.180.272	898.505.508
Rupa2 Pendapatan / Keuntungan	748.342.938	1.726.345.798
Jumlah Pendapatan Lain Lain	**3.955.197.227**	**4.231.944.457**

Penerimaan pembayaran piutang rekening air yang telah dihapuskan Pembarian Sponsorshiap Hari Ulang Tahun Perumda Air Minum Tirta Mangutama dan Penghapusan utang tak bergerak

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

26. Beban-Beban

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Beban Pegawai	80.543.642.525	73.002.658.468
Beban Pemakaian Bahan Bakar	386.826.669	171.734.464
Beban Listrik	40.316.440.912	38.752.212.641
Beban Pemakaian Bahan Pembantu	396.596.245	592.790.800
Beban Operasi Lainnya	322.636.400	234.677.649
Beban Pemeliharaan	29.012.807.728	18.272.675.173
Beban Air Baku / Curah	18.762.614.649	8.800.927.018
Beban Pemakaian Bahan Kimia	15.860.567.007	14.761.906.687
Beban Atk & Barang Cetakan	876.871.306	793.152.385
Beban Kantor	4.353.655.660	3.828.212.720
Beban Operasional Lainnya	11.070.995.401	9.999.325.913
Beban Promosi	77.800.000	150.675.289
Beban Pajak/Retribusi	1.706.303.786	2.373.058.989
Beban Penelitian Dan	336.540.939	154.975.980
Beban Sewa	211.777.189	97.599.411
Beban Penyisihan / Penghapusan	1.001.095.314	1.182.897.640
Beban Penyusutan	41.898.140.911	37.719.490.278
Beban Bank	60.577.799	37.512.444
Beban Penurunan Nilai	13.677.812	21.252.584
Jumlah Beban-Beban	**247.209.568.248**	**210.947.736.533**

27. Taksiran Pajak Penghasilan

	31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp
Taksiran Pajak Penghasilan	19.860.288.265	16.899.404.166
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	**19.860.288.265**	**16.899.404.166**

Lihat Catatan 4.13 untuk perhitungan koreksi fiskal.

5. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan. Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan pengungkapan dan atau penyesuaian terharap laporan keuangan

6. Penyelesaian Laporan Keuangan

Tanggal penyelesaian Laporan Keuangan oleh manajemen sama dengan tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 06 Maret 2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA

Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA

Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

DAFTAR ISI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..... iii - xiii

SURAT PERNYATAAN DIREKSI..... xiv - xv

BAB I
LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan Komparatif Per 31 Desember 2024 dan 2023..... 1
2. Laporan Laba Rugi Komparatif Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 2
3. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023..... 3
4. Laporan Arus Kas Komparatif Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023..... 4

BAB II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Ketut Muliartha RM *Certified Public Accountants*
Audit, Accounting, Tax, Management Consulting
Bali - Indonesia

LSPAM
Pratama Mulia

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

Nomor : 00005/2.1238/AU.2/05/0821-1/1/VI/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth :
Direksi dan Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana
Jl. I Gusti Ngurah Rai Mengwi
Badung

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana terlampir. Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan tersebut.

Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Kami tidak memperoleh keyakinan memadai untuk beberapa akun yaitu sebagai berikut:

1. Kas Unit Pengolahan Pangan (UPP RMU)
   Pada Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana nilai Kas UPP RMU per 31 Desember 2024 minus sebesar Rp 599.451.668,50, namun pada Buku Kas UPP RMU per 31 Desember 2024 minus sebesar Rp 540.115.268,50, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 59.336.400. Selisih sebesar Rp 59.336.400 disebabkan karena terdapat beberapa transaksi yang kurang catat sebesar Rp 60.336.400 dan lebih catat sebesar Rp 1.000.000 oleh Bagian Keuangan UPP RMU (telah diuraikan pada resume hasil pemeriksaan). Saldo minus sebesar Rp 599.451.668,50 disebabkan karena ketidakpahaman Bagian Keuangan UPP RMU dalam mencatat transaksi mutasi penambahan dan mutasi pengurangan kas, sehingga berakibat pada saldo kas per 31 Desember 2024 tidak andal. Berikut adalah contoh beberapa transaksi yang dilakukan oleh Bagian Keuangan UPP RMU:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Ketut Muliartha RM *Certified Public Accountants*
Audit, Accounting, Tax, Management Consulting
Bali - Indonesia

LSPAM
Pratama Mulia

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

1) Pada bulan Juli dan Agustus 2024 saat UPP RMU menerima persediaan gabah dari Unit Bina Usaha, pencatatan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan UPP RMU adalah Kas (Debet) pada Utang Gabah Bina Usaha (Kredit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan Unit Bina Usaha ada 3 (tiga) yaitu: 1) Persediaan (Debet) pada Kas (Kredit); 2) Piutang (Debet) pada Pendapatan (Kredit); dan 3) HPP (Debet) pada Persediaan (K). Klarifikasi dari Bagian Keuangan UPP RMU bahwa atas jurnal tersebut Unit Bina Usaha menyerahkan gabah tidak uang tunai, dengan total selama bulan Juli 2024 sebesar Rp 125.461.610 dan total bulan Agustus 2024 sebesar Rp 217.750.500. Hal ini berdampak pada nilai Kas pada UPP RMU lebih saji (*overstatement*), nilai persediaan gabah pada UPP RMU kurang saji (*understatement*), dan penyusunan HPP pada Unit Bina Usaha keliru karena proses produksi tidak dilakukan di Unit Bina Usaha. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena UPP RMU dalam melakukan proses produksi tidak melakukan pencatatan atas mutasi penambahan dan mutasi pengurangan persediaan gabah secara riil, terlebih lagi pada saat gabah datang dari petani, pihak UPP RMU tidak pernah melakukan penimbangan kembali. Permasalahan ini merupakan salah saji material dalam hal Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

2) Saat UPP RMU mengirim atau menyerahkan beras kepada pelanggan dengan sistem penjualan kredit atau belum menerima kas, pencatatan yang dilakukan adalah Piutang Beras (Debet) pada Kas (Kredit). Jurnal akuntansi yang benar jika menganut sistem pencatatan akrual sesuai dengan yang disyaratkan SAK ETAP yaitu Piutang Beras (Debet) pada Pendapatan Beras (Kredit). Hal ini berakibat pada nilai Kas kurang saji *(understatement)* dan nilai pendapatan beras kurang saji *(understatement)*. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Bagian Keuangan UPP RMU tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

3) Saat UPP RMU menerima kas atas piutang beras kepada pelanggan, pencatatan yang dilakukan adalah Kas (Debet) pada Pendapatan Beras dan Kas (D) pada Piutang Beras (K), sehingga berakibat pada nilai kas lebih saji (*overstatement*), khususnya terjadi pada bulan September 2024 sebesar Rp 76.612.500, November 2024 sebesar Rp 277.290.000, dan Desember 2024 sebesar Rp 735.295.000 dengan nilai total sebesar Rp 1.089.197.500. Kas yang masuk pada rekening tabungan hanya sekali sehingga yang salah adalah pencatatan pada jurnal. Jurnal akuntansi yang benar jika menganut sistem pencatatan akrual sesuai dengan yang disyaratkan SAK ETAP yaitu Kas (Debet) pada Piutang Beras (Kredit). Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Bagian Keuangan UPP RMU tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

4) Kami tidak dapat melakukan *trace back* secara memadai atas prosedur audit cek fisik kas pada tanggal 14 April 2025, disebabkan karena nilai Kas UPP RMU per 31 Desember 2024 dan mutasi pencatatan kas sampai dengan kami cek fisik tidak andal, akibat pencatatan transaksi seperti tersebut di atas.

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

2. Bank (Bina Usaha Perdagangan)

   1) Saldo rekening giro BPD dengan nomor rekening 0090105001004-Giro 2 per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp 88.958.363,09 antara Laporan Keuangan sebesar Rp 1.485.036.009,25 dengan Rekening Koran sebesar Rp 1.573.994.372,34. Kami tidak dapat mengkoreksi disebabkan karena sampai dengan batas waktu pemeriksaan, Bagian Keuangan Unit Bina Usaha tidak dapat menunjukkan bukti audit yang cukup dan tepat.

   2) Saldo rekening tabungan BPD dengan nomor rekening 0260205105600-Perdagangan per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp 32.660.989,71 antara Laporan Keuangan sebesar Rp 240.222.314,29 dengan Rekening Koran sebesar Rp 207.561.324,58. Kami tidak dapat mengkoreksi disebabkan karena sampai dengan batas waktu pemeriksaan, Bagian Keuangan Unit Bina Usaha tidak dapat menunjukkan bukti audit yang cukup dan tepat.

3. Uang Muka Panjar (UPP RMU)

   Saldo uang muka panjar UPP RMU per 31 Desember 2024 sebesar Rp 507.086.000. Penjelasan dari tim gabah/tim operasional dan Bagian Keuangan UPP RMU, uang muka panjar digunakan untuk memberikan uang muka kepada petani pemilik lahan padi sesuai dengan rekapan atau catatan yang ada di tim operasional. Setelah uang muka panjar tersebut diberikan kepada petani, maka tim gabah kembali mengamprah kepada Bagian Keuangan agar saldo atau nilai uang muka panjar tersebut tetap senilai awal dibentuk. Bagian Keuangan dan tim operasional tidak pernah melakukan pencocokan saldo uang muka apakah selisih lebih atau selisih kurang, disebabkan karena ketidakpahaman mengenai perlakuan uang muka panjar. Saat persediaan gabah diterima dari petani, Bagian Keuangan tidak melakukan pencatatan pengurangan uang muka yang sebelumnya diberikan. Selain itu perusahaan tidak memiliki Kebijakan Akuntansi tertulis mengenai uang muka panjar. Hal ini berakibat pada saldo uang muka panjar UPP tidak andal. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Bagian Keuangan UPP RMU tidak didukung dengan Kebijakan Akuntansi tertulis yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

4. Persediaan (UPP RMU)

   Berdasarkan hasil pemeriksaan dari bulan Juli - Desember 2024 (selama proses produksi), UPP RMU tidak mencatat persediaan beras, menir, beras rijek, dedak, sekam, dan karung namun mencatat pendapatan beras, menir, beras rijek, dedak, sekam dan karung. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

5. Beban Gabah (UPP RMU)

   Berdasarkan hasil pemeriksaan selama bulan Juli - Desember 2024, pihak UPP RMU tidak menyusun Harga Pokok Produksi (HPP) atas proses produksi yang dilakukan. Penjelasan dari Kepala Unit UPP RMU hal ini terjadi disebabkan karena ketidakpahaman Bagian Operasional dan Bagian Keuangan dalam menghitung dan mencatat HPP. Bagian Keuangan hanya mencatat Beban Gabah bulan Desember 2024 sebesar Rp 2.816.205.519 dengan jurnal Beban Gabah (Debet) pada Persediaan Gabah (Kredit). Nilai tersebut didapatkan dari nilai sebesar Rp 5.123.889.429 - Rp 2.307.638.910 pada Memorial Jurnal Bagian Keuangan UPP RMU. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

6. Piutang (Bina Usaha Perdagangan) atas penjualan Beras kepada ASN

   Saldo piutang Bina Usaha Perdagangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.259.197.381 yang mana dari nilai tersebut terdapat Unit Bina Usaha memiliki piutang kepada OPD Kabupaten Badung atas penjualan beras sebesar Rp 1.659.687.805. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih sebesar Rp 6.024.000 antara Rekap Piutang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 164.792.500 dengan Bukti Serah Terima Barang Beras (BSTB) sebesar Rp 170.816.500. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

7. Piutang (Bina Usaha Perdagangan) atas pemberian kredit kepada Karyawan Internal Perusahaan

   Saldo piutang Bina Usaha Perdagangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.259.197.381 yang mana dari nilai tersebut terdapat Unit Bina Usaha memiliki piutang kepada karyawan internal perusahaan sebesar Rp 1.113.282.615. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari bulan Januari - Desember 2024 terdapat Bukti Penjualan Kredit Barang yang didukung dengan Nota Penyerahan Barang dari Unit Bina Usaha kepada pelanggan/debitur, yang mana Ka.Sub Jasa Perdagangan Unit Bina Usaha tidak dapat menunjukkan bukti rincian atas jenis barang yang dijual. Pencatatan yang dilakukan oleh Ka.Sub Jasa Perdagangan Unit Bina Usaha ada 2 (dua) pada tanggal yang sama yaitu: 1) Persediaan (Debet) pada Kas (Kredit); 2) Piutang (Debet) pada Persediaan (Kredit). Pengakuan dari Kepala Bina Unit Bina Usaha periode Mei - Desember 2024 dan Ka.Sub Jasa Perdagangan Unit Bina Usaha periode September - Desember 2024, bahwa pemberian kredit kepada karyawan internal perusahaan adalah berupa uang tunai bukan berupa barang, sehingga informasi pada Bukti Penjualan Kredit Barang dan Nota Penyerahan Barang adalah fiktif. Kami melakukan pemeriksaan atas Bukti Pembelian Persediaan atas penjualan kredit barang tersebut, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 27 lembar nota pembelian persediaan adalah fiktif (tidak ada pembelian persediaan barang) dengan nilai total sebesar Rp 229.760.000, sedangkan penambahan kredit barang dari bulan Januari-Desember 2024 sebesar Rp 235.760.000 atau sekitar 97% realisasi kredit barang selama tahun 2024 didukung dengan bukti transaksi fiktif.

   Terdapat Surat Pernyataan pada tanggal 2 Juni 2025 dari Ibu Gusti Ayu Made Astri selaku Kepala Unit Bina Usaha masa jabatan Mei-Desember 2024 dan dari Ibu Ni Made Sulastri selaku Ka.Sub Jasa Perdagangan Unit Bina Usaha masa jabatan September-Desember 2024 yang menyatakan bahwa:

   1) Memang benar kami memberikan kredit uang tunai ke karyawan tetapi sebagai bukti pencatatan kami membuat bukti dengan nota pembelian barang.

   2) Memang benar kami menulis dan membubuhkan paraf sendiri pada nota pembelian.

   3) Kami hanya melanjutkan kebijakan Ka.Unit sebelumnya dimana atas kegiatan ini digunakan sebagai pendapatan untuk mencapai target di perdagangan.

   4) Memang benar kami tau kegiatan ini tidak memiliki dasar hukum, tetapi kalau kegiatan ini kami hentikan akan mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

   Atas permasalahan tersebut, kami (auditor) tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena bukti transaksi tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar Laporan Keuangan.

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

8. Piutang Ragu-ragu

   Saldo per 31 Desember 2024 atas Piutang Ragu-ragu sebesar Rp 8.418.000, namun Bagian Keuangan tidak dapat menjelaskan atas nilai piutang tersebut karena tidak diketahui atas historisnya. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

9. Piutang UPP RMU

   Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih sebesar Rp 15.788.000 antara Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.363.426.666 dengan Daftar Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.379.214.666. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

10. Cadangan Kerugian Piutang

    Pada Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana saldo Cadangan Kerugian Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.534.176.637. Berdasarkan penjelasan dari Bagian Keuangan bahwa tidak terdapat pembentukan cadangan penyisihan piutang selama Tahun 2024. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

11. Persediaan Dagang (Unit Bina Usaha)

    Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih sebesar Rp 24.278.400 antara Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 di Bagian Keuangan Perusahaan sebesar Rp 843.645.765 dengan Laporan Keuangan di Unit Bina Usaha Jasa Perdagangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 819.367.365. Saat kami melakukan cek fisik persediaan barang pada tanggal 16 April 2025, Ka.Sub Jasa Perdagangan Unit Bina Usaha belum melakukan pencatatan mutasi penambahan dan mutasi pengurangan persediaan barang dari tanggal 1 Januari 2025 - 16 April 2025, sehingga prosedur audit cek fisik dan *traceback* tidak dapat dilakukan dengan optimal. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

12. Persediaan Agro

    Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Persediaan Agro saldo per 31 Desember 2024 minus sebesar Rp1.540.000. Klarifikasi dari Bagian Admin Unit Agro dan Bagian Keuangan saldo minus tersebut disebabkan karena salah input pada Bagian Keuangan atas transaksi bulan Juli 2024. Berdasarkan rekapan Persediaan Unit Agro bulan Juli 2024, terdapat penambahan persediaan sebesar Rp 77.350.000, namun di Bagian Keuangan dicatat sebesar Rp 75.810.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.540.000. Pengakuan dari Bagian Admin Unit Agro tidak pernah membuat bukti transaksi atas mutasi persediaan masuk dan keluar selama tahun 2024. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Ketut Muliartha RM *Certified Public Accountants*
Audit, Accounting, Tax, Management Consulting
Bali - Indonesia

LSPAM
Pratama Mulia

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

13. Aset Tetap

Berdasarkan riviu saldo awal 1 Januari 2024 atas Aset Tetap antara Laporan Keuangan sebesar Rp 27.273.730.929,00 dengan Daftar Aset Tetap sebesar Rp 30.829.418.196,28 terdapat selisih sebesar Rp 3.555.687.267,28. Penjelasan dari Bagian Keuangan selisih tersebut disebabkan karena pada Daftar Aset Tetap belum disesuaikan atas koreksi hasil audit Tahun Buku 2023. Selisih saldo awal ini berdampak pada selisih saldo akhir per 31 Desember 2024. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan riviu saldo awal 1 Januari 2024 atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap antara Laporan Keuangan sebesar Rp 17.055.948.419,00 dengan Daftar Aset Tetap sebesar Rp 13.683.069.462,13 terdapat selisih sebesar Rp 3.372.878.956,87. Penjelasan dari Bagian Keuangan selisih tersebut disebabkan karena pada Daftar Aset Tetap belum disesuaikan atas koreksi hasil audit Tahun Buku 2023. Selisih saldo awal ini berdampak pada selisih saldo akhir per 31 Desember 2024. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

15. Investasi ke CAS (Aktiva Lain-lain)

Berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 434/01/K/2019 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana, terdapat penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000 untuk Penugasan Pengelolaan Alat *Controlled Atmosphere Storage* (CAS), sehingga pencatatan oleh perusahaan adalah Modal (Ekuitas) bertambah. Penjelasan dari Bagian Keuangan, pada Tahun 2020 pencatatan yang dilakukan adalah dengan merubah akun Modal (Ekuitas) menjadi Investasi ke CAS (Aktiva Lain-lain). Selain itu terdapat pembelian kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit total sebesar Rp 390.000.000 untuk unit Agro yang sumber dananya dari Rp 2.000.000.000 tersebut, namun tidak dicatat pada Daftar Aset Tetap dan Laporan Keuangan Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penugasan Pengelolaan Alat *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, Pasal 6 ayat 1 dijabarkan bahwa "Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda" dan Pasal 7 dijabarkan bahwa "setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM". Pasal 4 huruf d dijabarkan bahwa "Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Perumda bertugas melaporkan pelaksanaan pengelolaan alat Controlled Atmosphere Storage secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati". Berdasarkan klarifikasi dari Direktur Umum Laporan Pengelolaan CAS hanya terdapat yang Tahun 2019.

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

Pada bulan Desember 2024 terdapat mutasi penambahan Investasi ke CAS dengan nilai total sebesar Rp 992.858.350,33 melalui 2 jurnal yaitu: 1) Investasi ke CAS (Debet) pada Beban Tunjangan Hari Raya (Kredit) sebesar Rp 390.455.438,5 dengan keterangan jurnal "Penyesuaian uang Cas yang dipakai membayar THR tgl 20 Pebruari 2024" dan 2) Investasi ke CAS (Debet) pada Beban gaji pegawai/capeg, honor dewas dan kontrak (Kredit) sebesar Rp 602.402.911,83 dengan keterangan jurnal "Penyesuaian uang Cas yang dipakai membayar gaji tgl 26 Pebruari 2024". Jurnal pada tanggal 20 Februari 2024 adalah Beban Tunjangan Hari Raya (Debet) pada Giro 1 (induk) (Kredit) sebesar Rp 390.455.438,5 dan jurnal pada tanggal 26 Februari 2024 adalah Beban gaji pegawai/capeg, honor dewas dan kontrak (Debet) pada Giro 1 (induk) (Kredit) sebesar Rp 602.402.911,83. Jurnal di atas berdampak pada nilai Beban Tunjangan Hari Raya dan Beban gaji pegawai/capeg, honor dewas dan kontrak menjadi 0 (nol) pada tahun 2024 atau pada Laporan Laba Rugi tidak menyajikan nilai Beban sebesar Rp 602.402.911,83, namun pada bukti kas keluar terdapat realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji pada bulan Februari 2024. Nilai Investasi ke CAS tidak andal karena jurnal pembayaran THR dan pembayaran Gaji tidak ada kaitannya dengan Investasi ke CAS.

Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

16. Bangunan Pasar Tenten (Aktiva Lain-lain)

Pada bulan Desember 2024 terdapat jurnal Beban Penyusutan Aktiva Lain-lain Bangunan Pasar Tenten (Debet) pada Bangunan Pasar Tenten (Kredit) sebesar Rp 203.736.598,15 dengan keterangan jurnal "Penyesuaian amortisasi Bangunan Unit Pasar Tenten tahun 2023". Penjelasan dari Bagian Keuangan terdapat kesalahan ketik atas tahun, seharusnya jurnal tersebut adalah untuk tahun 2024. Terdapat beberapa kekeliruan atas jurnal tersebut yaitu:

1) Bangunan Pasar Tenten dicatat pada induk akun Aktiva Lain-lain, hal ini tidak tepat disebabkan karena aset tersebut adalah kategori akun Aset Tetap tidak akun Aktiva Lain-lain.

2) Bangunan Pasar Tenten dan Tanah, sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilengkapi BAST atau bukti kepemilikan bagi perusahaan dari Penyertaan Modal yang diberikan, sehingga seharusnya perusahaan tidak dapat mencatat pada Aktiva Lain-lain maupun Aset Tetap.

3) Jurnal yang dilakukan pada bulan Desember 2024 jika yang dimaksud pada untuk mencatat penyusutan, maka jurnal tersebut salah karena dampak dari jurnal tersebut adalah nilai Bangunan Pasar Tenten berkurang sebesar Rp 203.736.598,15.

Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

17. Utang Perdagangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih sebesar Rp 58.437.500 antara Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 di Bagian Keuangan Perusahaan sebesar Rp 2.062.549.500 dengan Laporan Keuangan di Unit Bina Usaha Jasa Perdagangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.004.112.000. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

18. Utang Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Utang Pajak PPh Pasal 21 terdapat saldo minus per 31 Desember 2024 sebesar Rp 49.514.590,50. Saldo minus tersebut telah terjadi dari awal Januari 2024 sebesar Rp 18.946.526 dan sama dengan audited tahun buku 2023. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

19. Utang Pajak Badan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Utang Pajak Badan terdapat saldo minus per 31 Desember 2024 sebesar Rp 295.905. Saldo minus tersebut disebabkan karena terdapat transaksi pembayaran pajak badan tahun 2023 dengan jurnal Utang Pajak Badan (Debet) pada Kas (Kredit) sebesar Rp 295.000 bulan April 2024. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

20. Hutang Pajak Tahun 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat jurnal transaksi pengurangan utang pajak dengan mengurangi beban audit pajak sebesar Rp 82.286.362, sehingga berakibat pada beban lain-lain minus. Kami tidak memeroleh keyakinan yang memadai disebabkan karena Bagian Keuangan sampai dengan pemeriksaan kami berakhir sedang mengecek kembali data-data yang ada atas Utang Pajak tahun 2017. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

21. Hutang Pajak Tahun 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat jurnal transaksi pengurangan utang pajak dengan mengurangi beban audit pajak sebesar Rp 1.199.651.677, sehingga berakibat pada beban lain-lain minus. Kami tidak memeroleh keyakinan yang memadai disebabkan karena Bagian Keuangan sampai dengan pemeriksaan kami berakhir sedang mengecek kembali data-data yang ada atas Utang Pajak tahun 2018. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

22. Utang Asuransi Pinjaman BU

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat saldo utang asuransi pinjaman per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.457.611. Penjelasan dari Bagian Keuangan nilai tersebut telah muncul dari sebelum tahun 2024. Setelah dilakukan rekonsiliasi dengan pencatatan di Bina Usaha, saldo utang asuransi per 31 Desember 2024 hanya sebesar Rp 148.395 (110.345+38.050), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 9.309.216, yang artinya lebih besar pencatatan utang asuransi di Bagian Keuangan daripada di Bina Usaha. Penjelasan dari Bapak Made Suyatra sebagai Kasub Administrasi di Bina Usaha bahwa terdapat debitur yang belum disetorkan uang asuransi kreditnya kepada pihak Asuransi Jiwa Nasional yaitu atas nama Ni Ketut Sri Utari sebesar Rp 110.345 dan atas nama Ali Wafa sebesar Rp 38.050.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pada tahun 2020 Bagian Keuangan mencatat mutasi pembayaran utang asuransi sebesar Rp 190.250 (penjelasan dari Bapak Agung Ari Bagian Keuangan, nilai tersebut sesuai dengan laporan dari Unit Bina Usaha), tetapi pada pada Invoice yang dikirimkan oleh Perusahaan Asuransi nilainya sebesar Rp 646.850, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 456.600. Selisih tersebut disebabkan karena terdapat 3 (tiga) debitur yang belum dilaporkan oleh Unit Bina Usaha ke Bagian Keuangan yaitu atas nama Samui sebesar Rp 114.150, Ayub sebesar Rp 38.050, dan Samsul Hadi sebesar Rp 304.400.
2) Pada tahun 2022 Bagian Keuangan tidak ada mencatat mutasi pembayaran dan mutasi pembentukan atas utang asuransi pinjaman, namun di Unit Bina Usaha terdapat 8 invoice yang diterima dari perusahaan asuransi dengan nilai total sebesar Rp 6.841.390. Dari 8 invoice tersebut 2 invoice tidak ditemukan bukti pembayaran/bukti transfer yaitu invoice tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 1.073.010 dan invoice tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 509.870.
3) Pada tahun 2023 Bagian Keuangan tidak ada mencatat mutasi pembayaran dan mutasi pembentukan atas utang asuransi pinjaman, namun di Unit Bina Usaha terdapat 3 invoice yang diterima dari perusahaan asuransi dengan nilai total sebesar Rp 4.950.305. Dari 3 invoice tersebut 1 invoice tidak ditemukan bukti pembayaran/bukti transfer yaitu invoice tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp 2.522.715.
4) Simulasi jika saldo awal yang digunakan adalah hasil audit tahun 2023 yaitu sebesar Rp 9.457.611 dan mutasi yang digunakan adalah data dari Unit Bina Usaha yang belum dilaporkan ke Bagian Keuangan yaitu total sebesar Rp 12.396.690 maka saldo utang asuransi pinjaman per 31 Desember 2024 adalah minus sebesar Rp 2.939.079.

Hal ini berakibat pada nilai Utang Asuransi Pinjaman dan nilai Piutang Bina Usaha tidak andal disebabkan karena terdapat beberapa bukti invoice dan bukti pembayaran utang asuransi yang tidak dilaporkan oleh Unit Bina Usaha kepada Bagian Keuangan. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

23. Utang Imbalan Pasca Kerja

Saldo Utang Pasca Kerja sesuai dengan rekapan dari Bagian Kepegawalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.375.390.156, tetapi di Bagian Keuangan tercatat sebesar Rp 1.401.060.789,67, sehingga terdapat selisih nilai saldo sebesar Rp 25.670.633,70. Kami tidak dapat mengkoreksi atas permasalahan tersebut disebabkan karena sampai dengan pemeriksaan berakhir, kami tidak memeroleh bukti audit yang memadai. Hal ini berakibat pada Laporan Keuangan tidak andal karena Laporan Keuangan tidak mencerminkan atau mengungkapkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai penyajian wajar.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana berdasarkan pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia untuk menerbitkan laporan auditor. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan ini.

Kami independen terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Ketut Muliartha RM *Certified Public Accountants*
Audit, Accounting, Tax, Management Consulting
Bali - Indonesia

LSPAM
Pratama Mulia

Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliartha@gmail.com

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pengendalian Intern kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. 040/KAP/M-mul/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik Ketut Muliartha RM

Dr. Ketut Muliartha RM, CPA.
Izin No. AP. 0821
Izin KAP No. 686.5/KN.1/2018
Tanggal 10 Juni 2025

00005

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA
Alamat : Jl. I Gusti Ngurah Rai Mengwi Telp. (0361) 829943, 829944
Email : perumdapasar@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN

MANGU GIRI SEDANA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Wayan Suryantara, S.H
   Alamat Kantor : I Gusti Ngurah Rai, Mengwi, Badung
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Br.Petang Dalem, Kec. Petang
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I Rai Sukabagia, S.H
   Alamat Kantor : Jl. I Gusti Ngurah Rai, Mengwi, Badung
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Lingkungan Tambak Sari, Kapal, Kec. Mengwi
   Jabatan : Direktur Umum

3. Nama : I Wayan Mustika, S.Sos
   Alamat Kantor : Jl. I Gusti Ngurah Rai, Mengwi, Badung
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Br. Pengabetan, Baha, Mengwi, Badung
   Jabatan : Direktur Operasional

Untuk dan atas nama Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana menyatakan bahwa:

1. Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
2. Dengan persetujuan pemilik dan Dewan Pengawas, Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik efektif 1 Januari 2011;

3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan terlampir;
4. Laporan Keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana untuk tahun yang terakhir 31 Desember 2024 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
5. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
6. Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, serta sistem pengendalian internal dalam Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengwi, 10 Juni 2025

Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana

Direktur Umum	Direktur Utama	Direktur Operasional
I Rai Sukabagia, S.H.	I Wayan Suryantara, S.H.	I Wayan Mustika, S.Sos

METERAI TEMPEL 10000 D4AMX336787033

BAB I

LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3.1	14.379.181.539	33.883.911.890
Piutang Usaha	3.2	10.037.832.192	7.716.262.963
Penyisihan Kerugian Piutang	3.2	(1.534.176.637)	(1.534.176.637)
Piutang Lain-Lain	3.3	-	76.639.573
Pendapatan YMH Diterima	3.4	103.045.000	223.063.492
Beban Dibayar Dimuka	3.5	5.241.806.094	5.663.963.452
Deviden Hak daerah	3.6	167.380.327	167.380.327
Persediaan	3.7	3.479.071.046	606.759.112
Jumlah Aset Lancar		**31.874.139.561**	**46.803.804.172**
Aset Tidak Lancar			
Biaya Perolehan-Aset Tetap	3.8	45.127.732.628	27.273.730.929
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.8	(18.950.529.870)	(17.055.948.419)
Aset Lain-lain	3.9	6.242.171.469	4.509.004.895
Jumlah Aset Tidak Lancar		**32.419.374.227**	**14.726.787.404**
Total Aset		**64.293.513.788**	**61.530.591.577**
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	3.10	2.577.905.210	1.794.974.500
Utang Pajak	3.11	4.327.547.444	5.812.072.693
Biaya YMH Dibayar	3.12	179.613.152	458.400.191
Pendapatan Diterima Dimuka	3.13	3.102.771.707	3.616.063.857
Utang Dana Pembagian Laba	3.14	687.790.061	877.540.561
Utang Lain-lain	3.15	4.509.457.611	9.457.611
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**15.385.085.185**	**12.568.509.414**
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Imbalan Pasca Kerja	3.16	1.401.060.790	1.219.982.039
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**1.401.060.790**	**1.219.982.039**
Jumlah Kewajiban		**16.786.145.975**	**13.788.491.453**
Ekuitas			
Kekayaan Pemda Yag Dipisahkan	3.17	58.401.745.617	58.401.745.617
Modal Hibah	3.18	509.000.000	509.000.000
Saldo Laba	3.19	(11.403.377.804)	(11.168.645.493)
Jumlah Ekuitas		**47.507.367.813**	**47.742.100.124**
Total Kewajiban dan Ekuitas		**64.293.513.788**	**61.530.591.577**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan keseluruhan

Badung, 10 Juni 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA KABUPATEN BADUNG

I Wayan Suryantara, S.H.	I Rai Sukabagia, S.H.	I Wayan Mustika, S.Sos.	Gst. Ngurah Ketut Arybayu, S.E
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Operasional	Ka.Bagian Keuangan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Pendapatan Usaha	4.1		
Pendapatan Sewa dan Cukai		1.912.122.200	1.143.555.629
Pendapatan Operasional Lainnya		16.029.933.340	14.679.466.101
Total Pendapatan		**17.942.055.540**	**15.823.021.730**
Beban Usaha	4.3		
Beban Pegawai		12.604.471.655	13.037.585.963
Beban Kantor		853.379.111	685.171.561
Beban Umum		3.101.057.217	1.667.690.847
Beban Pemeliharaan		930.730.493	307.449.279
Beban Penyisihan Kerugian Piutang		-	846.343.032
Beban Penyusutan		2.098.318.049	1.071.599.425
Beban Amortisasi		68.602.750	224.739.098
Total Beban Usaha		**19.656.559.274**	**17.840.579.205**
Laba (Rugi) Usaha		**(1.714.503.735)**	**(2.017.557.474)**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan Lain-lain	4.2	441.351.325	93.098.092
Beban Lain-lain	4.3	(101.149.667)	(9.262.137)
Beban Pajak	4.4	1.139.569.765	(1.638.274.275)
Total Pendapatam (Beban) Lain-Lain		**1.479.771.423**	**(1.554.438.320)**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		**(234.732.312)**	**(3.571.995.794)**
Beban Pajak Penghasilan			
Laba (Rugi) Setelah Pajak		**(234.732.312)**	**(3.571.995.794)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan keseluruhan

Badung, 10 Juni 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

I Wayan Suryantara, S.H.	I Rai Sukabagia, S.H.	I Wayan Mustika, S.Sos.	Gst. Ngurah Kutut Arybayu, S.E
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Operasional	Ka.Bagian Keuangan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS, PER 1 JANUARI	**47.742.100.124**	**18.508.055.399**
Penambahan :		
Setoran Modal		31.087.104.000
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu		1.718.936.519
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(234.732.312)	(3.571.995.794)
Total Penambahan	**(234.732.312)**	**29.234.044.725**
Pengurangan :		
-	-	-
Total Pengurangan	-	-
EKUITAS, PER 31 DESEMBER	**47.507.367.812**	**47.742.100.124**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Badung, 10 Juni 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

I Wayan Suryantara, S.H.	I Rai Sukabagia, S.H.	I Wayan Mustika, S.Sos.	Gst. Ngurah Kesut Arybayu, S.E
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Operasional	Ka.Bagian Keuangan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Neto	**(234.732.312)**	**(3.571.995.794)**
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi:		
Beban penyusutan dan amostisasi	1.894.581.451	1.296.338.523
Perubahan arus kas dari Aset dan Kewajiban Operasi:		
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	(2.321.569.229)	(128.593.707)
(Kenaikan) Penurunan Pendapatan YMH Diterima	120.018.492	(116.336.093)
(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain-lain	76.639.573	76.639.573
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Kerugian Piutang	-	(272.121.666)
(Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	422.157.358	(5.010.285.251)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	(2.872.311.934)	(209.681.800)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	782.930.710	1.794.974.500
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(1.484.525.249)	1.064.667.617
Kenaikan (Penurunan) Biaya YMH Dibayar	(278.787.039)	222.083.766
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	(513.292.150)	3.485.839.702
Kenaikan (Penurunan) Utang Dana Pembagian Laba	(189.750.500)	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Lain-lain	4.500.000.000	(701.475.000)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**(98.640.829)**	**(2.069.945.631)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
(Kenaikan) Penurunan Aset Tetap dan Inventaris	(17.854.001.699)	(39.117.933)
(Kenaikan) Penurunan Aset Lain-lain	(1.733.166.574)	(7.844.701)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**(19.587.168.273)**	**(46.962.634)**
Aru Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Utang Imbalan Pasca Kerja	181.078.751	413.677.861
Kenaikan (Penurunan) Kekayaan Pemda Yang Dipsahkan	-	31.087.104.000
Kenaikan (Penurunan) Saldo Laba	-	1.718.936.519
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**181.078.751**	**33.219.718.380**
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	**(19.504.730.351)**	**31.102.810.115**
Kas dan Setara Kas Awal Periode	**33.883.911.890**	**2.781.101.775**
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	**14.379.181.539**	**33.883.911.890**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Badung, 10 Juni 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA KABUPATEN BADUNG

I Wayan Suryantara, S.H.	I Rai Sukabagia, S.H.	I Wayan Mustika, S.Sos.	Gst. Ngurah Ketut Arybayu, S.E
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Operasional	Ka.Bagian Keuangan

BAB II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUMDA PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

1 UMUM

Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut PD Pasar Badung berkedudukan di Mangwi, Kabupaten Badung didirikan berdasarkan peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung yang selanjutnya diubah dengan Perda Kabupaten Dati II Badung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Dati II Badung Nomor 2 Tahun 1981. Dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas perusahaan daerah dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pengelolan perusahaan daerah yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka telah ditetapkan kembali Perda tentang perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2005 dan telah diundangkan dalam Lemberan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 5 tanggal 30 Desember 2005.

Pada tahun 2018 Perusahaan telah melakukan perubahan nama dari PD Pasar Kabupaten Badung menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana tertanggal 26 Juli 2018. Perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022, Perumda Pasar Mangu Giri Sedana melakukan perubahan nama menjadi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana terdaftar sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Badung Utara dengan NPWP: 01.446.427.5.904.000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022, kegiatan usaha Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan ketahanan Pangan Daerah dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat.

Kegiatan usaha Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.
2. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Memperoleh laba atau keuntungan.

Perkembangan permodalan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana dimulai dengan surat Bupati Badung Nomor 539/4030/Ek tanggal 25 Juli 1994 yang memohon persetujuan DPRD Dati II Badung untuk mengadakan perubahan atas hak kepemilikan dan pengelolaan aset Perusahaan Daerah Kabupaten Badung dalam rangka pemisahan PD Pasar yang ada di Kabupaten Badung dengan yang ada di Kota Denpasar. Selanjutnya terhitung 1 Agustus 1994, Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung telah dipisahkan dengan Perusahaan Daerah Kota Denpasar.

Sebagai tindak lanjut dari pemisahan perusahaan daerah pasar tersebut, dilakukan audit atas laporan keuangan PD Pasar Kota Denpasar dalam rangka menyusun neraca likuidasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali sesuai LHP Nomor 4018/PW.22.5/1996 tanggal 17 Januari 1996. Atas dasar hasil audit tersebut, Bupati Badung dengan SK Nomor 1328 Tahun 1996 tanggal 13 Oktober 1996 menetapkan bahwa modal awal PD Pasar Kabupaten Badung sebesar Rp1.476.562.561,41.

Berdasarkan Pasal 9 Perda No. 5 tahun 2005 tentang PD Pasar Kabupaten Badung disebutkan bahwa modal awal perusahaan ditetapkan sebesar Rp10.854.449.682,55 yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah yang merupakan modal perusahaan pada saat pendirian ditambah penyertaan modal Pemerintah Daerah dan modal yang berasal dari kekayaan pasar inpres yang dihibahkan kepada perusahaan. Dalam rangka memenuhi modal awal yang telah ditetapkan dalam Perda tersebut dapat disediakan dari perusahaan dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2014 dengan sisa Rp5.685.358.384 dari total Rp33.000.000.000 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019.

Sedangkan posisi ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

		2024		2023
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	Rp	58.401.745.617	Rp	58.401.745.617
Modal Hibah	Rp	509.000.000	Rp	509.000.000
Saldo Laba	Rp	(11.403.377.804)	Rp	(11.168.645.493)
Jumlah	**Rp**	**47.507.367.813**	**Rp**	**47.742.100.124**

Saldo Laba per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

		2024		2023
Cadangan Umum	Rp	534.940.134	Rp	534.940.134
Saldo Rugi Tahun Lalu	Rp	(13.422.522.145)	Rp	(9.850.526.351)
Koreksi Laba (Rugi)	Rp	1.718.936.519	Rp	1.718.936.519
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp	(234.732.312)	Rp	(3.571.995.794)
Jumlah	**Rp**	**(11.403.377.804)**	**Rp**	**(11.168.645.493)**

Struktur Organisasi

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

1. KPM;
2. Dewan Pengawas; dan
3. Direksi:
   a. Direktur Utama;
   b. Direktur Umum; dan
   c. Direktur Operasional.

Organisasi dan Tata Kerja Perumda Pasar Mangu Giri Sedana yang ditetapkan berdasarkan peraturan Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana. Susunan pengurus terdiri dari: KPM, Dewan Pengawas, Direksi, SPI, Sekretaris, Bagian, Unit, dan Sub Unit.

Adapun susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba, S.E.,M.Si.
2. Anggota : Ni Made Setiari, S.Sos.

Organisasi dan Tata Kerja PD Pasar Kabupaten Badung mengalami perubahan dengan peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan pertama atas peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja PD Pasar Kabupaten Badung tanggal 26 Januari 2011 yang antara lain merubah susunan direksi PD Pasar Kabupaten Badung menjadi Direktur Utama dan Direktur.

Selanjutnya susunan Direksi ditetapkan dengan SK Bupati Badung Nomor 515/01/HK/2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang pemberhentian Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung tahun 2011 - 2015 serta pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung periode tahun 2015 - 2019 tidak berlaku lagi dan telah terjadi perubahan susunan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Nomor 02/KPM/MGS/2019 tentang Pengangkatan Direksi periode tahun 2019 - 2024.

Kemudian dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana periode tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Nomor 01/KPM/MGS/2024, Nomor 02/KPM/MGS/2024, dan Nomor 03/KPM/MGS/2024 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana periode tahun 2024 - 2025. Adapun susunan Direksi Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : I Wayan Suryantara, SH.
2. Direktur Umum : I Rai Sukabagia, SH.
3. Direktur Operasional : I Wayan Mustika, S.Sos.

Jumlah personalia sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 193 orang, terdiri dari direksi berjumlah 3 orang, pegawai tetap berjumlah 174 orang, dan tenaga kontrak berjumlah 16 orang.

Rincian Struktur Organisasi di Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana adalah sebagai berikut:

- Direksi	:	3 orang
- Sekretaris	:	1 orang
- SPI	:	- orang
- Bagian Umum	:	19 orang
- Bagian Keuangan	:	9 orang
- Bagian Usaha dan Jasa	:	4 orang
- Bagian Kepegawaian	:	4 orang
- Bagian Pengawasan dan Penagihan	:	4 orang
- Bagian Teknik	:	7 orang
- Pasar Hewan Beringkit	:	19 orang
- Pasar Kuta I	:	10 orang
- Pasar Kuta II	:	30 orang
- Pasar Nusa Dua	:	7 orang
- Pasar Petang	:	10 orang
- Pasar Sembung	:	5 orang
- Pasar Kapal	:	5 orang
- Pasar Umum Beringkit	:	16 orang
- Unit Bina Usaha	:	12 orang
- Unit Tenten	:	1 orang
- Unit Argo	:	3 orang
- Unit Pengolahan Pangan	:	24 orang
Jumlah		193 orang

2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perusahaan tidak menyusun laporan laba rugi dan saldo laba, sebagaimana yang diijinkan oleh SAK ETAP, karena terdapat transaksi yang diakui langsung dalam perubahan ekuitas yang tidak berdampak pada saldo laba.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka panjang dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

2.2 KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

2.3 PENILAIAN PIUTANG

Piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan, khususnya untuk piutang usaha ketentuan ini menghendaki agar piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih handaknya dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak

- diatas 3 bulan s.d 6 bulan : 30%
- diatas 6 bulan s.d 12 bulan : 50%
- diatas 1 tahun s.d 2 tahun : 75% dan diajukan ke Dewan Pengawas untuk dihapus
- diatas 2 tahun : 100% dan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih dicatat secara *compatable*

Penyisihan piutang tersebut diatas dikecualikan bagi tagihan seluruh instansi pemerintah. Dalam hal terjadi kejadian-kejadian khusus, misalnya pembongkaran daerah permukiman tertentu untuk tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan diatas.

Jika terdapat pembayaran atas piutang-piutang yang telah dihapus, pembayaran tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-Lain tahun berjalan. Piutang yang telah berumur diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu, sedangkan yang berumur diatas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat dikeluarkan dari pembukuannya, tetapi dicatat secara ekstra komptabel dan tetap diusahakan penagihannya.

2.4 PERSEDIAAN

Seluruh persediaan dicatat dengan menggunakan metode pencatatan secara perpetual dan dinilai atas dasar nilai perolehan dengan metode *first in first out* (FIFO)

2.5 ASET TETAP

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Aset tetap disusutkan dengan metode yang diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Metode perhitungan penyusutan aset tetap yang dipilih Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana yaitu garis lurus untuk aset tetap berupa bangunan dan saldo menurun untuk aset tetap bukan bangunan dengan tarif penyusutan untuk setiap jenis aset tetap sebagai berikut.

I. Bukan Bangunan

a.	Kelompok I	:	50,00% dari nilai buku
b.	Kelompok II	:	25,00% dari nilai buku
c.	Kelompok III	:	12,50% dari nilai buku
d.	Kelompok IV	:	10,00% dari nilai buku

II. Bangunan

a.	Permanen	:	5,00% dari harga perolehan
b.	Tidak Permanan	:	10,00% dari harga perolehan

Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari aset tetap yang beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai aset tetap tersebut dinyatakan beroperasi komersial.

2.6 BEBAN DITANGGUHKAN

Dalam perkiraan ini dibukukan pengeluaran-pengeluaran yang belum diakui dan dilaporkan sebagai beban dalam periode berjalan karena memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Beban ditangguhkan diamortisasi menurut masa manfaatnya. Jika masa manfaat tidak dapat ditaksir, maka amortisasi selama 5 tahun atau 20% dari harga perolehan.

2.7 PERPAJAKAN

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Beban Pajak Penghasilan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2.8 IMBALAN PASCA KERJA

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif

Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No.35/2021 ("PP 35/2021") tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan mencadangkan imbalan pasca kerja sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 dan PP RI No. 35 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang mengatur bahwa perusahaan wajib membayar tunjangan karyawan ketika mereka berhenti bekerja dalam bentuk pengunduran diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap.

Jumlah imbalan pasca kerja terutama didasarkan pada masa kerja dan jumlah kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya, imbalan kerja yang didasarkan pada UU RI No. 11 Tahun 2020 dan PP RI No.35 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

2.9 PENDAPATAN DAN BEBAN

Pendapatan diakui pada saat nota tagihan/karcis atau penjualan fasilitas fisik jasa pasar/kios/los diterbitkan dan diberikan. Sedangkan biaya dibebankan pada saat terjadinya transaksi atas kewajiban/beban perusahaan.

3 PENJELASAN POS - POS NERACA

3.1 KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Kas				
Kas	Rp	41.433.069	Rp	21.198
Kas Unit Bina Usaha	Rp	390.259.092	Rp	46.254.342
Kas Unit Agro	Rp	86.432.700	Rp	102.414.200
Kas antar kantor	Rp	4.500.000.000	Rp	
Kas Unit Pengolahan Pangan	Rp	(599.451.669)	Rp	
Jumlah Kas	**Rp**	**4.418.673.193**	**Rp**	**150.689.740**
Setara Kas				
Giro				
Bank BPD - Giro 1 - 026.01.00.00004-8	Rp	282.337.052	Rp	1.262.511.487
Bank BPD - Giro 2 - 009.01.05.00100-4	Rp	1.485.036.009	Rp	798.542.843
Bank BPD - Giro 3 - 026.01.05.00096-8	Rp	5.903.411.805	Rp	31.122.087.982
Tabungan				
Sibapa Induk 1 - Tab (No. Rek. 026.02.02.04215-7)	Rp	2.087.174	Rp	2.166.048
Sibapa Unit Bina Usaha - Tab (No. Rek. 026.02.02.01565-9)	Rp	137.995.080	Rp	187.057.810
Sibapa Perdagangan - Tab (No. Rek. 026.02.05.10560-0)	Rp	240.222.314	Rp	332.277.796
Sibapa Perdagangan (Gabah) - Tab (No. Rek. 026.02.02.42274-7)	Rp	241.273.324	Rp	
Sibapa Unit Bina Usaha (Komoditi Sapi) - Tab (No. Rek. 026.02.02.42369-8)	Rp	422.768.325	Rp	
Sibapa Unit Pengolahan Pangan (UPP) - Tab (No. Rek. 026.02.02.42726-6)	Rp	1.200.137.794	Rp	
Sibapa Induk 2 - Tab (No. Rek 026.02.02.39518-8)	Rp	45.239.469	Rp	28.578.183
Jumlah Setara Kas	**Rp**	**9.960.508.345**	**Rp**	**33.733.222.150**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**Rp**	**14.379.181.539**	**Rp**	**33.883.911.890**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.2 PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Tunggakan Sewa	Rp	386.765.200	Rp	388.775.107
Piutang IPP	Rp	1.567.950.155	Rp	1.210.391.558
Unit Simpan Pinjam	Rp	3.452.074.791	Rp	3.530.649.541
Unit Dagang	Rp	3.259.197.381	Rp	2.578.028.757
Piutang Ragu-Ragu	Rp	8.418.000	Rp	8.418.000
Piutang Agro	Rp	-	Rp	
Piutang Unit Pengolahan Pangan	Rp	1.363.426.666	Rp	
Jumlah Piutang Bruto	**Rp**	**10.037.832.192**	**Rp**	**7.716.262.963**
Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	Rp	(1.534.176.637)	Rp	(1.534.176.637)
Jumlah Neto	**Rp**	**8.503.655.555**	**Rp**	**6.182.086.326**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Usaha per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.3 PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Piutang Lain-lain	Rp	-	Rp	76.639.573
Jumlah	**Rp**	**-**	**Rp**	**76.639.573**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.4 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Pendapatan yang masih harus diterima	Rp	103.045.000	Rp	223.063.492
Jumlah	**Rp**	**103.045.000**	**Rp**	**223.063.492**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.5 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Sewa Tanah di Pasar Kuta II	Rp	4.571.041.892	Rp	5.503.685.250
Angsuran Pajak/PPh. Psl 25	Rp	153.478.202	Rp	153.478.202
Uang Muka/Panjar	Rp	517.286.000	Rp	6.800.000
Jumlah	**Rp**	**5.241.806.094**	**Rp**	**5.663.963.452**

Jumlah tersebut merupakan saldo Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.6 DIVIDEN HAK DAERAH

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Angsuran ke Kas Daerah	Rp	167,380,327	Rp	167,380,327
Jumlah	**Rp**	**167,380,327**	**Rp**	**167,380,327**

Jumlah tersebut merupakan saldo Dividen Hak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023. Berikut adalah rincianya:

Kelebihan Deviden Hak Daerah Tahun 2003	Rp	20,354,953
Kelebihan Deviden Hak Daerah Tahun 2004	Rp	89,975,000
Kelebihan Deviden Hak Daerah Tahun 2005	Rp	84,855,000
Kelebihan Deviden Hak Daerah Tahun 2006	Rp	3,172,530
Kelebihan Deviden Hak Daerah Tahun 2007	Rp	100,654,604
Jumlah Brutto	**Rp**	**299,012,087**
Kompensasi Setoran Dividen Tahun 2009	Rp	(131,631,760)
Jumlah Neto	**Rp**	**167,380,327**

3.7 PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Kardis	Rp	16,370,000	Rp	14,444,185
Barang Dagang	Rp	843,645,765	Rp	592,314,927
Persediaan Agro	Rp	(1,540,000)	Rp	
Persediaan Unit Pengolahan Pangan	Rp	2,620,595,281	Rp	
Jumlah	**Rp**	**3,479,071,046**	**Rp**	**606,759,112**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.8 ASET TETAP

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Tanah	Rp	410,000,000	Rp	410,000,000
Bangunan	Rp	40,004,682,799	Rp	22,727,434,216
Mesin percetakan	Rp	53,000,000	Rp	53,000,000
Mesin kantor	Rp	1,931,033,999	Rp	1,613,215,777
Peralatan kantor	Rp	760,389,256	Rp	442,736,785
Kendaraan bermotor	Rp	1,968,626,575	Rp	2,027,342,151
Mesin RMU	Rp	-	Rp	-
Harga Perolehan	**Rp**	**45,127,732,629**	**Rp**	**27,273,730,929**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(18,950,529,870)	Rp	(17,055,948,419)
Nilai Buku	**Rp**	**26,177,202,758**	**Rp**	**10,217,782,510**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.9 ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Investasi Ke Cas	Rp	1,841,959,076	Rp	870,100,726
Biaya ditangguhkan (Kajian Ekonomi dan sistem akuntansi)	Rp	114,779,250	Rp	140,751,000
Bangunan Pasar Tenten, mengwi-Badung	Rp	3,259,785,571	Rp	3,463,522,169
Apraisal Kontrak Tanah Unit Pasar Kuta II	Rp	-	Rp	34,631,000
PPN Masukan	Rp	1,025,647,572	Rp	-
Jumlah	**Rp**	**6,242,171,469**	**Rp**	**4,509,004,895**

Berikut adalah perhitungan amortisasi aset lain-lain per 31 Desember 2024:

- Pendapatan Lain-lain (pendapatan pasar tenten)				
- Investasi ke CAS			**Rp**	**1,841,959,076**
- Bangunan Pasar Tenten			**Rp**	**3,259,785,570**
Harga perolehan	Rp	4,074,731,963		
Akumulasi Penyusutan	Rp	(611,209,794)		
Saldo awal nilai buku	Rp	3,463,522,169		
Mutasi :				
- Penambahan	Rp	3,463,522,169		
- Beban amortisasi	Rp	(203,736,598)		
Saldo Akhir (nilai buku)	Rp	3,259,785,570		
- Aktiva Tak Berwujud			**Rp**	**114,779,250**
Kajian Ekonomi				
Harga perolehan	Rp	68,572,000		
Akumulasi Penyusutan	Rp	(30,000,000)		
Saldo awal nilai buku	Rp	68,572,000		
Mutasi :				
- Penambahan	Rp	68,572,000		
- Beban amortisasi	Rp	(34,286,000)		
Saldo Akhir (nilai buku)	Rp	34,286,000		

Sistem Akuntansi				
Harga perolehan	Rp	92.310.000		
Akumulasi Penyusutan	Rp	(20.131.000)		
Saldo awal nilai buku	Rp	72.179.000		
Mutasi :	Rp			
- Penambahan	Rp	72.179.000		
- Beban amortisasi	Rp	(24.059.000)		
Saldo Akhir (nilai buku)	Rp	48.120.000		
Aprisal Kontrak Tanah Unit Pasar Kuta II				
Harga perolehan	Rp	35.631.000		
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.000.000)		
Saldo awal nilai buku	Rp	34.631.000		
Mutasi :				
- Penambahan	Rp	34.631.000		
- Beban amortisasi	Rp	(8.657.750)		
Saldo Akhir (nilai buku)	Rp	25.973.250		
Video Provil proses bisnis RMU				
Harga perolehan	Rp	8.000.000		
Akumulasi Penyusutan	Rp	-		
Saldo awal nilai buku	Rp	8.000.000		
Mutasi :				
- Penambahan	Rp	8.000.000		
- Beban amortisasi	Rp	(1.600.000)		
Saldo Akhir (nilai buku)	Rp	6.400.000		
- PPN Masukan			**Rp**	**1.025.647.572**
Jumlah Aset Lain-lain			**Rp**	**6.242.171.469**

3.10 UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Utang Perdagangan	Rp	2.062.549.500	Rp	1.794.974.500
Utang Unit Pengolahan Pangan	Rp	515.355.710	Rp	
Jumlah	**Rp**	**2.577.905.210**	**Rp**	**1.794.974.500**

Saldo tersebut merupakan Utang Usaha per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.11 UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
PPh Pasal 29 /Pajak Badan	Rp	(295.905)	Rp	
PPh pasal 4 ayat 2 Final	Rp	522.158.457	Rp	512.925.000
PPh Pasal 21	Rp	(49.514.591)	Rp	(18.964.526)
PPh Pasal 23	Rp	4.211.469	Rp	
PPh Final	Rp	-	Rp	
PPN	Rp	574.587.066	Rp	565.186.794
PPN Sewa	Rp	0	Rp	95.537.750
PPN IPP	Rp	-	Rp	71.495.272
Hutang pajak tahun 2017	Rp	2.783.995.833	Rp	2.988.282.195
Hutang pajak tahun 2018	Rp	388.958.531	Rp	1.597.610.208
Hutang Pajak tahun 2022	Rp	103.446.574	Rp	
Jumlah	**Rp**	**4.327.547.444**	**Rp**	**5.812.072.693**

Jumlah tersebut merupakan saldo utang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.12 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Bagi hasil	Rp	24.349.428	Rp	23.361.439
Rupa-Rupa Beban Kantor	Rp	7.500.000	Rp	-
Rekening Air Minum (Pam)	Rp	2.169.856	Rp	3.173.057
Rekening Listrik	Rp	52.116.156	Rp	36.445.854
Rekening Telepon	Rp	1.403.712	Rp	1.358.591
Biaya Alat Tulis/koran	Rp	-	Rp	2.925.000
Biaya Servis kendaraan	Rp	-	Rp	-
Biaya Servis Bangunan	Rp	-	Rp	-
Beban Servis Mesin Kantor	Rp	-	Rp	230.000
Beban Pemeliharaan Sarana Pasar	Rp	-	Rp	7.250.000
Biaya Konsumsi	Rp	-	Rp	6.470.000
Beban Umum	Rp	-	Rp	-
PPH Pasal 21	Rp	-	Rp	36.807.075
PPh Pasal 23	Rp	-	Rp	90.000
Beban Lembur	Rp	-	Rp	2.680.000
PPh 25/29	Rp	-	Rp	-
PPh PPN Sewa	Rp	-	Rp	-
Bahan Bakar	Rp	-	Rp	2.500.000
Beban Hutang Pajak Tahun 2017	Rp	-	Rp	-
Beban Tunjangan Pajak	Rp	-	Rp	90.000
Beban Persediaan	Rp	-	Rp	1.700.000

Beban Ditangguhkan	Rp	-	Rp	35.631.000
Beban PPN	Rp	-	Rp	382.030
Beban Posangon	Rp	-	Rp	117.438.550
Beban Perekrutan Direksi	Rp	-	Rp	86.398.500
Beban Keamanan	Rp	-	Rp	975.000
Beban Banten	Rp	-	Rp	14.260.000
Beban Tenaga Ahli	Rp	-	Rp	71.936.096
Beban Pemeliharaan Gedung	Rp	2.050.000	Rp	5.891.000
Beban Kebersihan	Rp	56.275.000	Rp	406.000
Beban Honor	Rp	32.150.000	Rp	-
Beban Insentif	Rp	1.600.000	Rp	-
Jumlah	Rp	179.613.152	Rp	458.400.191

Jumlah tersebut merupakan saldo beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.13 PENDAPATAN YANG DITERIMA DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Sewa tempat Kantor PT BPD di Unit Pasar Umum Beringkit	Rp	523.648.649	Rp	651.651.651
Sewa Tanah untuk ATM PT BPD di Unit Pasar Umum Beringkit	Rp	-	Rp	-
Sewa Tempat untuk CV Duaja Wijaya di Unit Pasar Umum Beringkit	Rp	-	Rp	5.225.000
Sewa Potensi Pasar Kuta II, Tahun 2023-2028 (5 Tahun)	Rp	2.465.371.009	Rp	2.913.418.660
Sewa PT Tri Media (1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2024) Pasar Umum	Rp	30.275.000	Rp	-
Sewa PT Tri Media (1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2024) UnitUnit Pasar	Rp	6.718.250	Rp	-
Perjanjian Kerjama Pengelolaan Pasar dengan LPM Nusa Dua	Rp	46.496.800	Rp	35.506.345
Pendapatan Lain-lain	Rp	10.262.000	Rp	10.262.000
Jumlah	Rp	3.102.771.707	Rp	3.616.063.857

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.14 UTANG DANA PEMBAGIAN LABA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Cadangan jasa produksi	Rp	32.549	Rp	101.557.549
Dana Cadangan	Rp	301.072.498	Rp	301.072.498
Dana Peningkatan Pelayanan Umum	Rp	301.072.498	Rp	301.072.498
Dana Tanggung Jawab Sosial	Rp	85.612.516	Rp	173.838.016
Jumlah	Rp	687.790.061	Rp	877.540.561

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang dana pembagian laba per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.15 UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Utang RC BPD	Rp		Rp	
Utang Percetakan (PIMUPP)	Rp		Rp	
Utang Asuransi Pinjaman	Rp	9.457.611	Rp	9.457.611
Kas Antar Kantor (Pasiva/Utang)	Rp	4.500.000.000	Rp	
Jumlah	Rp	4.509.457.611	Rp	9.457.611

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.16 UTANG IMBALAN PASCA KERJA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Imbalan Pasca Kerja	Rp	1.401.060.790	Rp	1.219.982.039
Jumlah	Rp	1.401.060.790	Rp	1.219.982.039

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.17 KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Modal sesuai SK Bupati Badung No. 1382 Tanggal 13 Oktober 1992	Rp	1.476.562.562	Rp	1.476.562.562
Penggunaan Modal untuk Likuidasi.	Rp	(861.078.879)	Rp	(861.078.879)
Penyertaan Modal Pemda sesuai Berita Acara Serah Terima.	Rp	6.205.095.000	Rp	6.205.095.000
Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002.	Rp	580.000.000	Rp	580.000.000
Penyertaan Modal Pemda ditetapkan BAST Bupati Nomor 615/01/HK/05	Rp	3.453.871.000	Rp	3.453.871.000
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 22 Th 2009.	Rp	83.310.000	Rp	83.310.000
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 23 Th 2009.	Rp	1.000.000.000	Rp	1.000.000.000
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 32 Th 2011.	Rp	2.700.000.000	Rp	2.700.000.000
Penyertaan Modal Pemda sesuai Per. Bupati, Badung No. 52 Th 2012.	Rp	4.803.470.000	Rp	4.803.470.000
Penyertaan Modal Pemda Sesuai SK.Bupati No.547/01/HK/2016	Rp	4.484.731.963	Rp	4.484.731.963
Penyertaan Modal Pemda Sesuai SK Bupati No.434/01/HK/2019	Rp	2.000.000.000	Rp	2.000.000.000
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.571/01/HK/2019	Rp	1.388.679.970	Rp	1.388.679.970
Penyertaan Modal Pemda sesuai Kep Bupati Badung Nomor 756/01/HK/2023	Rp	31.087.104.000	Rp	31.087.104.000
Jumlah	Rp	58.401.745.617	Rp	58.401.745.617

Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung No. 302/01/HK/2012 Tanggal 6 September 2012.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Sesuai SK. Bupati No. 434/01/HK/2019 dengan jumlah penyertaan Rp2.000.000.000,00 berupa kas untuk operasional CAS.

Penambahan PenyertaanModal Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan adanya dampak dari covid-19 sesuai dengan SK Bupati No. 434/01/HK/2019 dengan jumlah penyertaan Rp1.366.879.970,00 berupa kas untuk operasional, Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dana Pembangunan Rice Milling Unit (RMU), Pembelian Gabah, Pengadaan Kendaraan Operasional, dan Pengadaan Sapi ditetapkan sesuai surat Keputusan Bupati Nomor 756/01/HK/2023 tanggal 06 November 2023, Serta Keputusan Bupati Badung Nomor : 705/01/HK/2023 tentang penetapan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp31.087.104.000

3.18 MODAL HIBAH

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
Modal Hibah		Rp	509.000.000	Rp	509.000.000
	Jumlah	Rp	509.000.000	Rp	509.000.000

Jumlah tersebut merupakan Modal Hibah per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.19 SALDO LABA

Akun ini terdiri dari:

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
Cadangan Umum		Rp	534.940.134	Rp	534.940.134
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu		Rp	(13.422.522.145)	Rp	(9.850.526.351)
Koreksi Laba (Rugi)		Rp	1.718.936.519	Rp	1.718.936.519
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan		Rp	(234.732.312)	Rp	(3.571.995.794)
	Jumlah	Rp	(11.403.377.804)	Rp	(11.168.645.493)

Jumlah tersebut merupakan saldo Saldo Laba per 31 Desember 2024 dan 2023.

4 PENJELASAN POS - POS LABA (RUGI)

4.1 PENDAPATAN USAHA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
Pendapatan Harian/Cukai dan Sewa		Rp	1.912.122.200	Rp	1.143.555.629
Pendapatan Usaha Lainnya					
Pendapatan Retribusi Parkir		Rp	2.045.786.800	Rp	1.979.110.100
Pendapatan Unit Buna Usaha		Rp	159.722.500	Rp	767.409.007
Pendapatan Unit Buna Usaha (Perdagangan)		Rp	1.909.312.152	Rp	
Pendapatan Iuran Pengelolaan Pasar		Rp	11.821.195.025	Rp	11.932.946.994
Pendapatan Unit Agro		Rp	17.478.500	Rp	
Pendapatan Unit Pengolahan Pangan		Rp	76.438.362	Rp	
	Jumlah	Rp	17.942.055.540	Rp	15.823.021.730

Jumlah tersebut merupakan nilai Pendapatan Usaha periode Januari s/d Desember 2024 dan 2023

4.2 PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
Pendapatan bunga bank		Rp	417.180.325	Rp	88.369.393
Pendapatan Unit Pasar Tenten		Rp	10.850.000	Rp	-
Pendapatan Oprasional Lainnya		Rp	13.321.000	Rp	4.728.700
	Jumlah	Rp	441.351.325	Rp	93.098.092

Jumlah tersebut merupakan nilai Pendapatan Lain-lain periode Januari s/d Desember 2024 dan 2023

4.3 BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
Beban Pegawai		Rp	12.604.471.655	Rp	13.037.585.963
Beban Kantor		Rp	653.379.111	Rp	685.171.561
Beban Umum		Rp	3.101.057.217	Rp	1.667.690.847
Beban Pemeliharaan		Rp	930.730.493	Rp	307.449.279
Beban Penyisihan Kerugian Piutang		Rp	-	Rp	846.343.032
Beban Penyusutan		Rp	2.098.318.049	Rp	1.071.599.425
Beban Amostisasi		Rp	68.602.750	Rp	224.739.098
	Jumlah	Rp	19.656.559.274	Rp	17.840.579.205

Jumlah tersebut merupakan nilai Beban Usaha periode Januari s/d Desember 2024 dan 2023.

4.4 BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Beban administrasi bank	Rp	4.195.165	Rp	9.262.137
Beban penghapusan aset tetap	Rp	81.111.000	Rp	-
Beban Lain-lain	Rp	15.843.501	Rp	-
Jumlah	**Rp**	**101.149.667**	**Rp**	**9.262.137**

Jumlah tersebut merupakan nilai Beban Lain-lain untuk periode Januari s/d Desember 2024 dan 2023.

4.5 BEBAN PAJAK

Akun ini terdiri dari :

		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023
Beban samsat kendaraan bermotor	Rp	29.656.900	Rp	
Beban PBB (pajak bumi dan bangunan)	Rp	9.264.800	Rp	
Beban Pajak Tahun 2017	Rp	(82.286.362)	Rp	-
Beban Pajak Tahun 2018	Rp	(1.199.651.677)	Rp	1.638.274.275
PPH badan / pajak kini	Rp	-	Rp	
Beban Pajak Tahun 2022	Rp	103.446.574	Rp	
Jumlah	**Rp**	**(1.139.569.765)**	**Rp**	**1.638.274.275**

Jumlah tersebut merupakan nilai Beban Pajak untuk periode Januari s/d Desember 2024 dan 2023.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PARIWISATA MANGU GIRI SEDANA KABUPATEN BADUNG

Badung, 10 Juni 2025

I Wayan Suyentana, S.H.	A.A. Ngr Sukabagia, S.H.	I Wayan Mustika, S.Sos.	Gst. Ngurah Ketut Arjhayu, S.E
Direktur Utama	Direktur Umum	Direktur Operasional	Ka.Bagian Keuangan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HALAMAN
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i-ii
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	1 - 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	4
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	6 - 63

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda) DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
   Alamat Kantor : Jalan Surapati No. 8 Denpasar
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., M.M.
   Alamat Kantor : Jalan Surapati No. 8 Denpasar
   Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama Direksi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak;

2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Denpasar, 14 Februari 2025

10000
BA1EEAMX174118330

I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur Utama

I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., M.M.
Direktur

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
Certified Public Accountants
License No. : 1011 / km.1 / 2010
Jl. Muding Indah I No.5 Denpasar - 80361, Bali - Indonesia
Tel./Fax : (62-361) 434-884
E-mail : jmbali@johanmalonda.com www.johanmalonda.com
With Offices in Jakarta, Surabaya and Medan

bakertilly
NETWORK MEMBER
www.bakertilly.global

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00004/3.0225/AU.1/09/1756-2/1/II/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak ("Perusahaan dan Entitas Anak")**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan dan Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
NIU-KAP: KEP-1011/KM.1/2010

I Wayan Wirawan, S.E., M.M., CPA
NRAP AP. 1756

Denpasar, 14 Februari 2025

00004

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	**Catatan**	**2024**	**2023**
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2d,4	184.754.877.134	158.195.109.122
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(189.894.700)	(189.894.700)
Deposito Berjangka	5	28.040.000.000	22.290.000.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(3.965.210.866)	(3.846.900.000)
Piutang Co-Guarantee	2e,6	75.249.928.367	59.746.526.461
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(40.982.717.008)	(19.313.757.770)
Piutang Usaha	2e,7	1.574.496.149	1.669.514.401
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(635.948.507)	(185.948.507)
Piutang Lain-Lain	8	156.940.278	182.576.045
Uang Muka	9	293.969.390	384.363.501
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Lancar	2f,10	3.751.136.811	11.921.479.104
Jumlah Aset Lancar		**248.047.577.049**	**230.853.067.657**
ASET TIDAK LANCAR			
Efek	2g,11	105.160.733.907	81.846.635.501
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(3.144.223.833)	(3.144.223.833)
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	2f,10	94.805.700.412	96.278.219.411
Aset Lain-Lain	12	23.879.682.439	25.198.954.160
Aset Tetap dan Inventaris	2h,13	28.271.127.201	6.364.920.203
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(4.039.316.058)	(3.453.945.007)
Aset Tidak Berwujud	2i,14	950.438.672	722.788.673
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(476.785.957)	(397.805.512)
Aset Pajak Tangguhan	2s,15	78.351.250	59.183.961
Jumlah Aset Tidak Lancar		**245.485.708.034**	**203.474.727.557**
JUMLAH ASET		**493.533.285.084**	**434.327.795.214**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2024	2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Klaim	2m,16	1.182.047.821	1.758.639.729
Utang Pajak	2r,17	22.143.869	131.103.396
Utang Co-Guarantee	18	1.654.397.677	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2n,19	4.647.759.985	3.948.537.958
Utang Lancar Lainnya	20	2.807.605.351	1.417.897.493
Penampungan Sementara Jasa Jaminan	2o,21	1.468.061.900	1.952.412.471
Dana Cadangan Klaim	2m,22	36.803.517.524	29.373.262.357
Corporate Social Resposibility (CSR)	23	716.630.424	502.453.588
Utang Setoran Modal Pemegang Saham	24	8.500.000.000	1.000.000.000
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Pendek	2p,25	12.814.452.866	26.577.836.411
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Pendek	27	3.441.582.666	4.967.128.946
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**74.058.200.083**	**71.629.272.349**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Panjang	2p.25	200.037.271.311	163.377.572.694
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2q,26	331.654.416	243.158.899
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Panjang	27	4.588.860.897	2.848.240.024
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**204.957.786.624**	**166.468.971.617**
JUMLAH LIABILITAS		**279.015.986.707**	**238.098.243.966**
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebanyak 184.621 dan 165.775 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar	28	184.621.200.000	165.775.000.000
Cadangan Umum	28	9.341.512.966	8.036.333.787
Cadangan Tujuan	28	3.614.388.043	2.570.244.700
Saldo Laba	28	12.899.314.327	10.028.530.177
Jumlah		**210.476.415.336**	**186.410.108.664**
Kepentingan Non-Pengendali	28	4.040.883.041	9.819.442.584
JUMLAH EKUITAS		**214.517.298.377**	**196.229.551.248**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**493.533.285.084**	**434.327.795.214**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA	2k,29	**117.012.433.887**	**90.614.773.265**
BEBAN USAHA	2k,30	**(111.132.929.307)**	**(86.909.854.322)**
LABA BRUTO		**5.879.504.580**	**3.704.918.944**
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK			
Pendapatan di Luar Usaha Pokok	31	1.572.154.528	1.604.343.173
Beban di Luar Usaha Pokok	32	(337.762.872)	(99.941.107)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK		**1.234.391.656**	**1.504.402.065**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**7.113.896.237**	**5.209.321.009**
BEBAN PAJAK			
Kini	17	(32.149.370)	-
Tangguhan	15	7.503.891	11.395.705
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**7.089.250.758**	**5.220.716.714**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja	26	(53.015.445)	(400.917.692)
Pajak Penghasilan Terkait	15	11.663.398	-
TOTAL LABA BERSIH KOMPREHENSIF		**7.047.898.712**	**4.819.799.022**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		7.088.709.569	-
Kepentingan Non-Pengendali		541.190	-
JUMLAH		**7.089.250.758**	**-**
LABA BERSIH KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		7.047.357.522	-
Kepentingan Non-Pengendali		541.190	-
JUMLAH		**7.047.898.712**	**-**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Disetor	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya			Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Lainnya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**149.025.000.000**	**6.842.716.517**	**1.615.350.884**	**-**	**9.028.306.417**	**-**	**166.511.373.818**
Penambahan Modal Disetor	16.750.000.000	-	-	-	-	-	**16.750.000.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.193.617.270	-	-	(1.193.617.270)	-	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	954.893.816	-	(954.893.816)	-	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(1.432.340.723)	-	**(1.432.340.723)**
Corporate Social Resposibility (CSR)	-	-	-	-	(238.723.454)	-	**(238.723.454)**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	4.819.799.022	-	**4.819.799.022**
Kepentingan Non-Pengendali Setelah Akuisisi Entitas Anak	-	-	-	-	-	9.819.442.584	**9.819.442.584**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**165.775.000.000**	**8.036.333.787**	**2.570.244.700**	**-**	**10.028.530.177**	**9.819.442.584**	**196.229.551.248**
Penambahan Modal Disetor	18.846.200.000	-	-	-	-	-	**18.846.200.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.305.179.179	-	-	(1.305.179.179)	-	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	1.044.143.343	-	(1.044.143.343)	-	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(1.566.215.014)	-	**(1.566.215.014)**
Corporate Social Resposibility (CSR)	-	-	-	-	(261.035.836)	-	**(261.035.836)**
Dampak Pengambilalihan Kepemilikan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	(5.779.100.733)	**(5.779.100.733)**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	7.047.357.522	541.190	**7.047.898.712**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**184.621.200.000**	**9.341.512.966**	**3.614.388.043**	**-**	**12.899.314.327**	**4.040.883.041**	**214.517.298.377**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan	110.387.628.533	76.703.296.045
Penerimaan Piutang Subrogasi	4.377.939.242	3.739.673.793
Penerimaan R/I Com atas Reasuransi Penjaminan	8.218.282.264	7.067.353.671
Penerimaan Bunga dan Adminsitrasi Provisi	3.396.211.263	-
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	2.759.342.411	2.323.387.617
Pembayaran IJP Co-guarantee/IJP/Premi Reasuransi	(41.506.817.145)	(44.633.273.715)
Pembayaran Klaim pada Terjamin	(23.645.520.999)	(20.844.893.365)
Pembayaran Biaya-biaya	(21.518.425.763)	(12.126.822.713)
Pembayaran untuk Aktivitas Lainnya	(248.448.318)	(99.941.107)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**42.220.191.488**	**12.128.780.225**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari Investasi	54.701.934.870	9.464.457.447
Pembayaran Investasi Lainnya	(41.132.515.650)	-
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(29.070.000.000)	(6.296.857.000)
Akuisisi Entitas Anak	(5.780.290.482)	(6.731.113.000)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(1.268.210.480)	(556.364.601)
Kas Diperoleh dari Akuisisi Entitas Anak	-	1.419.978.464
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(22.549.081.742)**	**(2.699.898.689)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	8.500.000.000	16.500.000.000
Penerimaan Pinjaman	6.500.000.000	-
Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	2.349.322.522	2.148.511.086
Pembayaran Pinjaman	(6.284.090.884)	-
Pembayaran Deviden dan Pembagian Laba	(4.176.573.372)	(3.819.575.263)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**6.888.658.266**	**14.828.935.823**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**26.559.768.012**	**24.257.817.358**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**158.195.109.122**	**133.937.291.764**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**184.754.877.134**	**158.195.109.122**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Ayu Granati Andayani, S.H., atas kekuatan penetapan Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung, tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor W16-38-MPDN KAB.BADUNG.07.03 Tahun 2010 sebagai pengganti dari I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-59685.AH.01.01, tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 01 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung terdapat perubahan nama Perusahaan dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024109.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 22 April 2021. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan terakhir melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 1 tanggal 19 November 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Ayu Nyoman Puspadewi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Klungkung mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor. Akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jamkrida Bali Mandra Nomor AHU-AH.01.03-0220007 tanggal 11 Desember 2024.

Dalam melaksanakan kegiatannya PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) bekerja berdasarkan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), dan asas-asas penjaminan untuk bersikap hati-hati. Sebagai lembaga yang turut menunjang program pemerintah dibidang pengembangan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan melakukan kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan atau bukan perbankan, dan badan usaha lain, disamping memberikan bantuan konsultasi manajemen dan melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 02/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, dan Anggaran Dasar PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Akta Notaris Nomor: 9 tanggal 20 Februari 2017, maksud dan tujuan perseroan adalah sebagai berikut:

1) Berusaha dalam bidang penjaminan kredit,
2) Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi,
3) Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan perubahan terakhir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara Nomor: 9 tanggal 20 Februari 2017, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah sebagai berikut:

1) Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Jasa Penjaminan Kredit, memberikan jasa penjaminan kredit, memberikan jasa penjaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha melalui pemberian jasa penjaminan kredit yaitu dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

3) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar ini, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yaitu :
   a. Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya
   b. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
   c. Penjaminan pembelian barang secara angsuran.
   d. Penjaminan atas surat utang.
   e. Penjaminan transaksi dagang.
   f. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *(surety bond).*
   g. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi).
   h. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
   i. Penjaminan *letter of credit* (L/C).
   j. Penjaminan kepabeanan *(custom bond).*
   k. Penjaminan cukai.
   l. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.
   m. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ijin-ijin yang dimiliki Perusahaan yaitu sebagai berikut:

1) Akta Pendirian PT Jamkrida Bali Mandara Nomor: 27 tanggal 21 November 2010.
2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59685.AH.01.01, tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara tanggal 30 Desember 2010.
4) Nomor Induk Berusaha (NIB) 1242000510379, yang diterbitkan tanggal 7 Mei 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia.
5) Surat Keterangan Ijin Lokasi Nomor: 2235.10.10.2010.2, tanggal 2 Desember 2010.
6) Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 31.250.559.7-901.000 tertanggal 23 November 2010.

Perusahaan berdomisili di Jl. Surapati No.8 Denpasar.

1. UMUM (Lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 19 November 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
Komisaris Independen : Ir. I Nengah Usdek Maharipa, M.M.

Direksi

Direktur Utama : I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur : I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., M.M.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 03 Maret 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
Komisaris Independen : Ir. I Nengah Usdek Maharipa, M.M.

Direksi

Direktur Utama : I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur : I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., M.M.

Jumlah sumber daya manusia per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing 47 dan 47 orang dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Dewan Komisaris	2 (dua) orang	2 (dua) orang
Direksi	2 (dua) orang	2 (dua) orang
Karyawan Tetap	42 (empat puluh dua) orang	40 (empat puluh) orang
Calon Pegawai	1 (satu) orang	3 (tiga) orang

Jumlah karyawan entitas anak, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 22 orang yang terdiri dari 17 orang pegawai tetap dan 5 orang pegawai kontrak, serta 24 orang yang terdiri 18 orang pegawai tetap dan 6 orang pegawai kontrak.

Entitas Anak

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung pada entitas anak berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset	
		2024	2023	2024	2023
PT Bali Kerthi Development Fund Ventura	Modal Ventura	80,98%	53,54%	29.517.111.455	29.476.917.855

PT Bali Kerthi Development Fund Ventura sebelumnya bernama PT Sarana Bali Ventura didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 79 tertanggal 10 Desember 1994 dihadapan Notaris I Made Puryatma, S.H., Notaris di Denpasar. Akta tersebut mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 27 Desember 2023, dibuat dihadapan I Wayan Selamet, S.H., Notaris di Kota Denpasar terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dimana PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) menjadi pemegang saham pengendali, serta terdapat perubahan Nama Perseroan yang semula PT Sarana Bali Ventura menjadi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura serta Penetapan Logo Perseroan terbaru.

1. UMUM (Lanjutan)

Entitas Anak (Lanjutan)

Perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bali Kerthi Development Fund Ventura, Akta Notaris No. 33 tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Selamet, S.H. berkedudukan Kota Denpasar menganai Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT Bali Kerthi Development Fund Ventura.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Bali Kerthi Development Fund Ventura ruang lingkup kegiatan adalah sebagai perusahaan modal ventura yang meliputi penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal *(start-up)* dan/atau pembiayaan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian di susun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian disusun berdasarkan konsep kesinambungan usaha dan harga perolehan, serta menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan Keuangan Entitas Anak disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru, amendemen, dan interprestasi yang telah diterbitkan dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik.
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan – Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (Lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

Standar baru, amandemen, dan interprestasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi.
- Amandemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran.
- Penyesuaian Tahunan 2024 atas PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas.
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.

Pada tanggal pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar, amandemen dan penyesuaian baru tersebut terhadap Laporan Keuangan Perseroan.

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Pengendalian didapat ketika Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan tidak lagi mengkonsolidasikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perusahaan memperoleh kendali sampai tanggal Perusahaan tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada entitas anak tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara Perusahaan dan entitas anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perusahaan dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo Kas dan Bank dan semua investasi yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan bukan sebagai jaminan dan penggunaannya tidak dibatasi.

e. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang kepada pihak ketiga atau mitra *re/co-guarantee*, pengakuan piutang dilakukan setiap terjadinya pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra dicatat sebagai piutang *co-guarantee*.

f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk biaya dibayar dimuka *fee* agen yang diamortisir secara sistematik sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

g. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(a) Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual.
2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(a) Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi (Lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan métode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

(b) Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut dipenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
2) Persyaratan kontraktual aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

(c) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Akan tetapi perusahaan dapat menetapkan pilihan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajar disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Pada saat pengakuan awal perusahaan dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeleminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Kategori ini meliputi utang penjaminan ulang, utang penjaminan bersama, beban akrual, cadangan klaim, liabilitas lain-lain dalam penyelesaian yang dimiliki oleh Perusahaan.

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pangakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
c) Kontrak jaminan keuangan setelah pengakuan awal, penerbitan kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   Jumlah penyisihan kerugian yang telah ditentukan dengan jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 115).
d) Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Penerbitan komitmen selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan bagian penurunan nilai dengan jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 115).
e) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika kombinasi bisnis diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yaitu, saat pengakuan awal perusahaan dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi jika sesuai dengan ketentuan, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan karena:

a) Mengeleminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang dapat timbul dari liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.
b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci.

Pengukuran Awal

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam hal ini aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada niliai wajar melalui laba rugi.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Pengukuran awal *(initial measurement)* dan pengukuran berikutnya *(subsequent measurement)* atas instrumen keuangan dan perlakuan akuntansi atas perubahan nilai wajar.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasi seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Perusahaan menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya subportofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a) Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
b) Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
c) Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan)

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perseroan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (ECL) 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (ECL *lifetime*). Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sedangkan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Perusahaan mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur kecuali untuk instrumen berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

a) Instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
b) Instrumen keuangan yang risiko kreditnya tidak mengalami peningkatan signifikan sejak pengakuan awal

Perusahaan menentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan berdasarkan peringkat risiko kredit internal dan penilaian eksternal berupa *investment grade*.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit Signifikan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:

a) Bagian dari hubungan lindung nilai.
b) Investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain.
c) Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain.
d) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kedaluwarsa.

h. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan sedangkan penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Penyusutan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Nilai penyusutan tahunan aset tetap adalah sebagai berikut:

Kelompok	Prosentase Penyusutan	Umur Ekonomis
Bangunan		
Permanen	5,00%	20 Tahun
Bukan Permanen	10,00%	10 Tahun
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	25,00%	4 Tahun
Kelompok 2	12,50%	8 Tahun
Kelompok 3	6,25%	16 Tahun
Kelompok 4	5,00%	20 Tahun

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi periode terjadinya, sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (Kapitalisasi). Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

Untuk perolehan aset tetap baru kapitalisasinya ditentukan berdasarkan daftar aset yang dapat dikapitalisasi yang ditetapkan dengan SK Direksi tersendiri. Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat transaksi pembelian aset tetap dapat dikapitalisasi dan menambah harga perolehan aset sepanjang biaya tersebut relevan dan terkait langsung dengan aset tetap yang bersangkutan.

i. Aset Tak Berwujud

Menurut PSAK 238 yang dimaksud aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Diakuinya sebuah aset tidak berwujud apabila:

a) Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut.
b) Biaya biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal.

Aset tidak berwujud perusahaan terdiri dari perangkat lunak. Perangkat lunak diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya. Dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aset tidak berwujud. Apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aset tidak berwujud sebesar uang yang dikeluarkan atau akan dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aset yang lain, maka harga perolehan aset tidak berwujudnya sebesar harga terkini dari aset yang ditukar.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan, temasuk pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), pendapatan investasi atas penempatan dana dengan pola konvensional dan pendapatan sewa dan servis gedung dicatat dan diakui atas dasar akrual *(accrual basis).*

a. Pendapatan Bunga Investasi atas Penempatan Dana dengan Pola Konvensional
Pendapatan bunga dengan pola konvensional dicatat dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan perhitungan pendapatan bunga/investasi harian pada bulan berjalan. Dasar perhitungan hari untuk pisah batas atas *accrual* bunga deposito dan obligasi menggunakan pendekatan 1 (satu) tahun 365 hari untuk deposito dan 360 hari untuk obligasi.

Hasil investasi dari deposito berjangka, obligasi dan reksadana diakui atas dasar proporsi waktu sesuai dengan jumlah pokok dan suku bunga yang berlaku.

b. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dan Pengembalian Imbal Jasa Penjaminan
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan diakui sebagai pendapatan apabila telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) serta diterima uangnya, kecuali untuk IJP yang dananya diperoleh dari subsidi atau hibah dari Pemerintah, meskipun dananya belum cair dapat diakui sebagai pendapatan lJP apabila surat jaminan dari pemerintah yang berkaitan dengan pembayaran IJP sudah keluar dan telah diterbitkan SP-nya. IJP yang telah diterima namun belum terbit SP dikredit ke akun penampungan sementara jasa jaminan.

Pengembalian IJP yang berada dalam tahun fiskal yang sama dengan saat penerimaannya didebit ke akun pendapatan IJP diterima dimuka. Pengembalian IJP yang berada dalam tahun fiskal yang berbeda dengan saat penerimaannya didebit ke akun beban pengembalian jasa penjaminan.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

a) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;

b) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

c) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

d) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

e) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Bergantung pada skema penjaminan, pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus atau berdasarkan risiko yang telah direalisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.

Seluruh beban diakui sebagai beban ketika terjadinya kewajiban *(accrual basis)*.

Perhitungan akrual pendapatan Imbalan Jasa Penjaminan (IJP), beban Re Asuransi, dan beban *Fee Agent* untuk tahun 2024 berdasarkan perhitungan manual, sehubungan dengan program yang digunakan masih dalam tahap pengembangan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Aset Lain-Lain

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset tetap, dan juga tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi/penyertaan, seperti: aset tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aset lancar lainnya disajikan dalam kelompok aset lain-lain.

m. Utang Klaim

Utang klaim adalah utang yang timbul sehubung dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh rekanan yang belum dibayar oleh perusahaan. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar.

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Pengukuran cadangan klaim mengacu pada konsep perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 109 instrumen keuangan yang dihitung dengan melakukan estimasi variabel makro yang terkorelasi dengan probabilitas klaim dan didasari total saldo penjaminan bruto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi

n. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atau jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak lain demi kepentingan perusahaan. Biaya tersebut sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya, namun belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga masih merupakan utang atau kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk melunasinya.

o. Penampungan Sementara Jasa Penjaminan

Penampungan sementara merupakan akun yang dibentuk sebagai akun pembantu untuk transaksi yang terjadi atas nilai IJP, namun belum diketahui kejelasan transaksi tersebut. Sehingga pencatatan sementara dimasukan ke dalam akun penampungan sementara. Dan ketika transaksi tersebut telah diketahui kejelasannya maka nilai pada akun penampungan akan dijurnal balik pada periode tersebut.

p. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas tetapi belum menjadi hak karena masih terdapat kewajiban.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak bagian dari joint venture.

Perusahaan dan entitas anak mencatat investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas *(equity method)*. Dalam metode ekuitas Perusahaan mengakui bagian laba atau rugi pada entitas anak sesuai dengan porsi kepemilikan dalam laporan laba rugi.

Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan pinjaman yang diberikan / suatu kegiatan pembiayaan berupa penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dan pembiayaan usaha produktif, dimana entitas anak menyediakan sejumlah dana yang akan dipergunakan bagi keperluan usaha Pasangan Usaha (PU).

Pola pembiayaan ini menentukan suatu persentase tertentu yang akan diberikan oleh PU kepada entitas anak.

r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Karyawan Jangka Pendek

Manfaat jangka pendek karyawan diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode Akrual. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Jangka Panjang dan Imbalan Pascakerja

Manfaat jangka panjang dan pascakerja, seperti pensiun, uang pesangon, uang jasa dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perusahaan" yang sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Kewajiban untuk imbalan pascakerja yang diakui dalam Laporan Posisi Keuangan dihitung dengan nilai sekarang dari estimasi manfaat bahwa karyawan telah mendapatkan imbalan untuk jasa mereka dalam tahun berjalan dan sebelumnya, dikurangi dengan aset program. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Proyeksi Kredit Unit.

Ketika manfaat dari rencana berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan dibebankan atau dikreditkan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada metode Garis Lurus selama periode rata-rata atas layanan yang tersisa sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan tersebut. Untuk segera memperpanjang hak atas manfaat yang diterima tersebut, pengakuan atas beban harus segera dibuat di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

r. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perusahaan menyediakan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti sebagai penghargaan yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Perkiraan biaya imbalan ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimal sekali setahun oleh aktuaris independen. Imbalan kerja jangka panjang lainnya yang jatuh tempo segera diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

s. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 212, “Pajak Penghasilan”. PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini”.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku dan secara substansial berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain di tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan waktu kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan waktu yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

t. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (sebagai entitas pelapor), yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

t. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 34.

u. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs rupiah yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Aset dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dalam nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal perolehan / kejadiannya.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi periode berjalan.

Tidak terdapat transaksi dalam mata uang asing untuk periode tahun 2024.

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi 24 kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan.

Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Kas dan Setara Kas		
Kas	42.490.600	49.669.500
Bank	66.424.386.534	47.247.439.621
Deposito Berjangka	118.288.000.000	110.898.000.000
Sub jumlah	**184.754.877.134**	**158.195.109.122**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(189.894.700)	(189.894.700)
Jumlah	**184.564.982.434**	**158.005.214.422**

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Rincian bank berdasarkan pihak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Bank :		
Pihak Berelasi		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Catatan 34)	31.060.618.583	16.161.207.057
Pihak Ketiga		
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	9.886.160.484	7.238.656.558
Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	9.704.569.475	9.727.202.691
PT Bank Permata, Tbk	7.065.628.883	4.773.957.935
Koperasi	5.475.648.567	6.342.530.263
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	1.585.741.719	1.574.650.192
Badan Usaha Milik Desa	535.512.532	574.092.777
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	491.699.659	65.204.156
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	401.242.419	663.223.280
PT Bank Bukopin, Tbk	134.117.338	126.714.711
PT Bank MNC Internasional, Tbk	83.446.875	-
Jumlah	**66.424.386.534**	**47.247.439.621**

Dari nilai kas dan setara kas tersebut, terdapat penempatan pada lembaga keuangan yang bermasalah dan bersifat tidak likuid. Manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas sebesar nilai penempatan bermasalah tersebut. Mutasi cadangan penurunan nilai kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	189.894.700	-
Penambahan (Catatan 30)	-	189.894.700
Jumlah	**189.894.700**	**189.894.700**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas kas dan setara kas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai kas dan setara kas.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat kas dan bank yang dibatasi penggunaannya.

5. DEPOSITO

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Deposito		
Deposito Berjangka	28.040.000.000	22.290.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Deposito	(3.965.210.866)	(3.846.900.000)
Jumlah	**24.074.789.134**	**18.443.100.000**

5. DEPOSITO (Lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	3.846.900.000	4.846.900.000
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 30)	118.310.866	(1.000.000.000)
Jumlah	**3.965.210.866**	**3.846.900.000**

Manajemen berpendapat jumlah cadangan kerugian penurunan nilai deposito berjangka cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito berjangka.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas penempatan deposito tahun 2024 dan 2023 masing-masing berkisar antara 3,00% - 6,75% dan antara 2,90% - 8,50%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat deposito yang dibatasi penggunannya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat penempatan deposito pada lembaga keuangan yang sedang dalam proses likuidasi.

6. PIUTANG CO-GUARANTEE

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Piutang Co-Guarantee		
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	63.520.813.225	47.776.204.688
PT Pertalife Insurance	9.373.123.078	9.791.589.086
PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia	1.230.033.497	1.632.474.347
Sub Jumlah	**74.123.969.800**	**59.200.268.121**
Piutang Refund		
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	591.762.580	127.541.309
PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia	532.309.136	416.830.179
PT Pertalife Insurance	1.886.852	1.886.852
Sub Jumlah	**1.125.958.568**	**546.258.340**
Jumlah Piutang Co-Guarantee	**75.249.928.367**	**59.746.526.461**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co-Guarantee	(40.982.717.008)	(19.313.757.770)
Jumlah	**34.267.211.359**	**40.432.768.691**

Penjelasan mengenai piutang *co-guarantee* adalah sebagai berikut:

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat peningkatan signifikan piutang *co-guarantee* pada PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi karena peningkatan jumlah klaim yang terjadi pada tahun 2024 namun klaim tersebut belum dibayarkan kepada Perusahaan.

Dalam rangka memitigasi risiko, sejak bulan Juni tahun 2022, Perusahaan telah memberhentikan pengajuan penjaminan ulang kepada PT Jakarta Pialang Reasuransi.

6. PIUTANG CO-GUARANTEE (Lanjutan)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (Lanjutan)

Pembayaran piutang *co-guarantee* dilakukan melalui pemotongan langsung pembayaran IJP penjaminan ulang, sehingga dari bulan Juni 2022 sampai Desember 2024 tidak terdapat IJP penjaminan ulang yang dipotong langsung untuk pembayaran klaim dari rekanan.

Perusahaan telah melakukan upaya penagihan dan komunikasi secara intensif berkaitan dengan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi dalam rangka penyelesaian piutang. PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi akan segera menyelesaikan kewajiban setelah melakukan rekonsiliasi dengan rekanan. Mutasi pembayaran dan pengajuan klaim kepada PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi pada tahun 2024 sebagai berikut:

	2024
Saldo Awal	47.776.204.688
Pengajuan Klaim	20.536.152.434
Pembayaran Klaim	(4.791.543.897)
Saldo Akhir	**63.520.813.225**

PT Pertalife Insurance

Perusahaan telah melayangkan somasi kepada PT Pertalife Insurance (sebelumnya PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri) terkait dengan penagihan piutang *co-guarantee* kepada PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri melalui Advokat dan Konsultan Hukum I Made Suwena, S.H. berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan Perusahaan Nomor: 027/JBM/SK/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 dengan surat somasi dari advokat Nomor: 011/III/MS-Somasi/2022 tanggal 01 Maret 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masih dilakukan upaya untuk penyelesaian atas piutang tersebut.

PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia

Dalam jumlah piutang *co-guarantee* kepada PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia terdapat piutang klaim tahun 2022, 2023 dan 2024 yang sudah ditolak pengajuan klaimnya oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia dan masih dilakukan negosiasi dan proses banding. Klaim ditolak untuk tahun 2024 dan diajukan banding dengan nilai piutang sebesar Rp556.894.228.

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang *co-guarantee* adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	19.313.757.770	10.487.117.063
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 30)	21.668.959.238	8.826.640.707
Saldo Akhir	**40.982.717.008**	**19.313.757.770**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *co-gurantee* cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai piutang *co-guarantee*.

7. PIUTANG USAHA

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang Usaha :		
Piutang Pendapatan Kupon Obligasi	873.400.677	653.556.432
Piutang Pendapatan Surety Bond	473.196.967	724.573.663
Piutang Pendapatan Bunga Deposito	217.856.929	185.686.744
Piutang Pendapatan Lainnya	2.465.576	96.282.561
Piutang Bunga - Entitas Anak	7.576.000	9.415.000
Jumlah Piutang Usaha	**1.574.496.149**	**1.669.514.401**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	(635.948.507)	(185.948.507)
Jumlah	**938.547.643**	**1.483.565.894**

Piutang pendapatan *surety bond* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp473.196.967,- dan Rp724.573.663-, terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Uang Muka)	303.976.969	623.963.365
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Pemeliharaan)	103.116.252	46.336.936
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Pelaksanaan)	65.439.414	54.223.362
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Penawaran)	664.332	50.000
Jumlah	**473.196.967**	**724.573.663**

Piutang pendapatan *surety bond* pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp473.196.967,- merupakan piutang atas penjaminan *surety bond* kepada PT Prima Amertha Mulia, dan telah diterima pelunasannya pada bulan Januari 2025.

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	185.984.507	250.150.737
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 30)	450.000.000	(64.166.230)
Saldo Akhir	**635.984.507**	**185.984.507**

Manajemen berpendapat jumlah cadangan kerugian nilai piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai piutang usaha.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Piutang Lain-lain :		
Piutang Karyawan	155.424.859	176.614.660
Piutang Lainnya	1.515.418	5.961.384
Jumlah	**156.940.278**	**182.576.045**

9. UANG MUKA

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Uang Muka :		
Uang Muka Penyempurnaan dan Pengadaan Sistem Informasi	105.000.000	209.885.000
Uang Muka - Entitas Anak	134.477.181	158.693.853
Uang Muka Lainnya	50.444.000	14.594.490
Uang Muka Pajak PPh Pasal 21	4.048.209	-
Uang Muka Pajak PPh Pasal 23	-	1.190.158
Jumlah	**293.969.390**	**384.363.501**

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat uang muka penyempurnaan dan pengadaan sistem informasi sebesar Rp105.000.000,- adalah uang muka atau *down payment* atas kontrak paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengupahan Berbasis Kinerja PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang bekerjasama dengan CV Sari Bhakti Meening berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 051a/Jamkrida Bali-PKS/VI/2023 / 14.10/SBM/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 dengan nilai kontrak atas pekerjaan proyek yang disepakati adalah Rp150.000.000,- sudah termasuk PPN. Uang Muka atau *Down Payment* yang telah dibayarkan yaitu sebesar Rp45.000.000,- tanggal 21 Juli 2023. Pembayaran progres 40% proyek pengerjaan sistem pengupahan yang telah dibayarkan sebesar Rp60.000.000 tanggal 3 Januari 2024. Proyek penyempurnaan dan pengadaan sistem pada tanggal 31 Desember 2024 masih dalam masa pemeliharaan.

Uang Muka Lainnya sebesar Rp50.444.000 merupakan uang muka atas lanjutan proses akuisisi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura.

Uang muka entitas anak terdiri dari uang muka penagihan dan uang muka lainnya. Uang muka penagihan pada entitas anak merupakan talangan biaya dalam proses penyelesaian pembiayaan usaha produktif untuk debitur yang bermasalah.

10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Biaya Dibayar di Muka :		
Biaya Re-Asuransi Dibayar di Muka	77.418.942.376	83.853.152.626
Biaya Fee Agent Dibayar di Muka	20.869.542.418	20.667.161.159
Biaya Dibayar Dimuka - Entitas Anak	246.309.050	148.154.209
Biaya Co-Guarantee Dibayar Dimuka	8.126.608	29.505.876
Biaya Asuransi Kendaraan Kantor Dibayar Dimuka	5.529.363	5.647.712
Biaya Asuransi Gedung Kantor Dibayar Dimuka	5.060.808	5.060.809
Biaya Sewa Gedung Dibayar di Muka (Catatan 34)	3.125.000	466.096.678
Biaya Premi Jamsostek Dibayar Dimuka	201.600	201.600
Biaya Renovasi Gedung Kantor Dibayar di Muka	-	3.024.717.845
Sub Jumlah	**98.556.837.222**	**108.199.698.514**
Dikurangi: Bagian Lancar	(3.751.136.811)	(11.921.479.104)
Jumlah	**94.805.700.412**	**96.278.219.411**

10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA (Lanjutan)

Biaya Reasuransi Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan pembayaran imbalan jasa dilakukan oleh perusahaan kepada Perusahaan reasuransi atas penjaminan ulang yang dilakukan perusahaan dan akan dibebankan berdasarkan jangka waktu penjaminan.

Biaya *Fee Agent* Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan pembayaran fee atas pemasaran yang dilakukan oleh agen Perusahaan dan akan dibebankan berdasarkan jangka waktu penjaminan

Sewa Gedung Kantor – Jalan Surapati
Perjanjian sewa menyewa Gedung Kantor baru di Jalan Surapati Denpasar tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Jamkrida Bali Mandara Nomor: 593.1/5043/PPA.Aset Tanggal 15 Desember 2016 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Perubahan I Perjanjian Sewa Menyewa atas Tanah dan Bangunan penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Jamkrida Bali Mandara Nomor: 593.1/3203/UPT.P2.BPKAD Tanggal 9 Juni 2017 dengan jangka waktu sewa selama 30 Tahun dan nilai sewa sebesar Rp158.776.000,- per tahun.

Pada tahun 2021 terdapat surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dengan Nomor: B.13.593.1/3901/UPTD.PBMD/BPKAD tertanggal 21 Desember 2021 tentang peninjauan nilai sewa. Dengan isi surat menunjuk Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Jamkrida Bali Mandara nomor 593.1/5043/PPA. Aset tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 593.1/3203/UPT.P2BPKAD tanggal 9 Juni 2017, disampaikan sebagai berikut :

a) Peninjauan sewa setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) perjanjian sewa menyewa telah jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2021.
b) Adapun nilai sewa yang disetujui adalah sebesar Rp. 158.776.000,-/tahun atau nilai sewa untuk 5 tahun sebesar Rp. 158.776.000,-/ tahun x 5 tahun = Rp. 793.880.000,-.
c) Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus untuk lima tahun dengan menyetor langsung ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada Bank BPD Bali dengan nomor rekening 010.01.00000001.
d) Apabila pembayaran uang sewa dilakukan setiap tahun maka dikenakan kenaikan sebesar 3 % sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018.

Menindaklanjuti surat peninjauan tersebut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) melakukan pembayaran uang sewa sekaligus untuk lima tahun sesuai dengan poin (3), berdasarkan keputusan Internal Memo No. 206/E-BPD/2.3/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 prihal pembayaran Sewa Gedung dan Komisi Agen PNK.

Sisa nilai sewa gedung dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp317.552.015 sudah dibebankan seluruhnya pada Beban Sewa Gedung (Catatan 30). Hal tersebut dikarenakan bangunan gedung yang disewa yaitu Tanah dan Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 36 tanggal 6 Januari 2005 seluas 967 m2, sudah dilakukan proses inbreng ke atas nama Perusahaan sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp17.846.200.000.

10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA (Lanjutan)

Kemudian berdasarkan Surat dari Sekertariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900.1.4.11/5877/PAPKD/BPKAD tanggal 9 September 2024 perihal Restitusi atas Sisa Sewa Kantor PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tidak dikabulkan untuk permohonan restitusi atas nilai sisa biaya sewa tersebut.

Pada tahun 2024 sisa Biaya Renovasi Gedung dibayar di Muka sebesar Rp2.991.636.518 sudah dilakukan reklasifikasi menjadi Aset Tetap Bangunan dan dilakukan penyusutan sesuai dengan tarif berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan inbreng atas kepemilikan tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) (Catatan 13).

11. EFEK

Rincian efek yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Obligasi Pemerintah		
Obligasi FR83	12.163.660.243	12.169.275.552
Obligasi FR75	10.375.247.161	10.391.160.076
Obligasi FR98	20.718.647.200	10.297.932.758
Obligasi FR65	9.874.263.104	9.864.061.873
Obligasi FR59	9.883.854.378	9.844.785.960
Obligasi FR76	5.112.477.572	5.114.327.502
Obligasi FR92	10.271.606.558	5.023.830.746
Obligasi FR89	5.002.415.188	5.002.444.901
Obligasi FR97	9.258.562.503	4.138.816.132
Nilai Tercatat		
Setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.660.733.907 per 31 Desember 2024 dan Rp846.635.501 per 31 Desember 2023	**92.660.733.907**	**71.846.635.501**
Obligasi Korporasi		
Obligasi PT Danareksa (Persero)	1.500.000.000	1.000.000.000
Obligasi PT Global Mediacom Tbk	-	1.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk	1.000.000.000	-
Nilai Tercatat	**2.500.000.000**	**2.000.000.000**
Jumlah Obligasi	**95.160.733.907**	**73.846.635.501**
Reksadana		
Reksadana Penyertaan Terbatas PNM Venture Capital	10.000.000.000	8.000.000.000
Nilai Tercatat	**10.000.000.000**	**8.000.000.000**
Jumlah Efek	**105.160.733.907**	**81.846.635.501**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.144.223.833)	(3.144.223.833)
Jumlah	**102.016.510.074**	**78.702.411.668**

11. EFEK (Lanjutan)

Rincian suku bunga kupon obligasi dan peringkat obligasi berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	Kupon	Pemeringkat	Peringkat	Jatuh Tempo
Obligasi Pemerintah *)				
Obligasi FR59	7,000%	-	-	15 Mei 2027
Obligasi FR65	6,625%	-	-	15 Mei 2033
Obligasi FR75	7,500%	-	-	15 Mei 2038
Obligasi FR89	6,875%	-	-	15 Agustus 2051
Obligasi FR92	7,125%	-	-	15 Juni 2042
Obligasi FR83	7,500%	-	-	15 April 2040
Obligasi FR76	7,375%	-	-	15 Mei 2048
Obligasi FR97	7,125%	-	-	15 Juni 2043
Obligasi FR98	7,125%	-	-	15 Juni 2038
Obligasi Korporasi				
Obligasi PT Danareksa (Persero)	8,000%	Pefindo	idAA	08 Februari 2028
Obligasi PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk	7,000%	Pefindo	IdAA	10 Desember 2027

*) Obligasi pemerintah tidak dirating oleh lembaga pemeringkat efek

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat obligasi yang dijadikan agunan.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang efek adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	3.144.223.833	1.550.000.000
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 30)	-	1.594.223.833
Saldo Akhir	**3.144.223.833**	**3.144.223.833**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai efek.

12. ASET LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Aset Lain-Lain		
Investasi Pembiayaan Usaha Produktif - Entitas Anak	19.859.307.183	20.428.980.164
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(269.270.449)	(658.030.623)
	19.590.036.734	**19.770.949.541**
Obligasi Konversi - Entitas Anak	2.290.000.000	3.650.000.000
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.900.000)	(18.250.000)
	2.280.100.000	**3.631.750.000**
Investasi Saham - Entitas Anak	1.271.629.039	1.721.254.619
Agunan Yang Diambil Alih - Entitas Anak	737.916.666	75.000.000
Jumlah	**23.879.682.439**	**25.198.954.160**

12. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

Investasi Pembiayaan Usaha Produktif

Investasi Pembiayaan Usaha Produktif merupakan pinjaman yang diberikan entitas anak pada Pasangan Usaha (PU) dalam rangka pengembangan usaha dan pembiayaan usaha produktif.

Penjabaran dan kualitas pembiayaan investasi pembiayaan usaha produktif per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	Jumlah Pasangan Usaha	Investasi Outstanding
Dana Sendiri Perusahaan	98	19.356.844.183
Dana Komersial/Pihak Ketiga	14	502.463.000
	112	**19.859.307.183**

	Kualitas Pembiayaan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Dana Sendiri Perusahaan	18.335.650.183	375.996.000	72.872.000	-	572.326.000	19.356.844.183
Dana Komersial/Pihak Ketiga	382.463.000	120.000.000	-	-	-	502.463.000
Jumlah	**18.718.113.183**	**495.996.000**	**72.872.000**	**-**	**572.326.000**	**19.859.307.183**

Rincian cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

	Seharusnya Dibentuk	Telah Dibentuk	Persentase Dibentuk
Lancar	151.723.043	151.723.043	100%
Dalam Perhatian Khusus	34.619.854	34.619.854	100%
Non Perform	82.927.552	82.927.552	100%
Jumlah	**269.270.449**	**269.270.449**	**100%**

Obligasi Konversi

Obligasi Konversi merupakan pinjaman yang diberikan entitas anak kepada Pasangan Usaha tahap rintisan awal (*start-up*) dalam bentuk penyertaan melalui obligasi konversi.

Rincian obligasi konversi entitas anak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
PT Mitra Bali Property	990.000.000	2.000.000.000
PT Lima Bakti Bersaudara	900.000.000	1.200.000.000
PT Wahana Fajar Utama	400.000.000	450.000.000
Sub - jumlah	**2.290.000.000**	**3.650.000.000**
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.900.000)	(18.250.000)
Jumlah	**2.280.100.000**	**3.631.750.000**

12. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

Investasi Saham

Investasi Saham merupakan pinjaman yang diberikan entitas anak kepada Pasangan Usaha tahap rintisan awal (*start-up*) dalam bentuk penyertaan saham.

Rincian investasi saham entitas anak per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	Persentase Kepemilikan	Kegiatan Usaha	2024
PT Komodo Escape Prawara	24,98%	Jasa Pariwisata	948.754.277
PT Kaya Anugerah Bali	27,27%	Perdagangan	262.073.169
PT Mitra Bali Property/ PT Sarana Bali Dwipa Jaya	49,00%	Property	60.801.593
Jumlah			**1.271.629.039**

Penyertaan saham Entitas Anak pada PT Sarana Dayuh Sini dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024 sudah dilakukan divestasi dan Entitas Anak tidak tercatat lagi sebagai pemilik saham dalam Perusahaan tersebut. Divestasi saham tersebut didasarkan pada perjanjian jual beli dibawah tangan tertanggal 29 April 2022, Berita Acara Divestasi tertanggal 11 Desember 2024, pemenuhan/pelunasan penyertaan oleh Perusahaan Pasangan Usaha sebagaimana tertuang dalam kwitansi tertanggal 11 Desember 2024 No.0803/Adm.BDF/XII/2024, Surat Pernyataan PT Sarana Dayuh Sini tanggal 11 Desember 2024, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 20 Januari 2025, dibuat oleh I Wayan Selamet, S.H.

Terdapat Perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Bali Property menjadi PT Sarana Bali Dwipa Jaya yang tertuang dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Mitra Bali Property No. 16 tanggal 29 Januari 2024 dibuat oleh dan dihadapan Notaris I Wayan Selamet, S.H. Akta Perubahan tersebut telah disetujui sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008331.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0032972 dan Nomor AHU-AH.01.09-0052424 seluruhnya tertanggal 6 Februari 2024.

Rekonsiliasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba (rugi) dan jumlah tercatat dari penyertaan saham pada Pasangan Usaha adalah sebagai berikut:

	Nilai Tercatat Awal Tahun	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Nilai Tercatat Akhir Tahun
PT Komodo Escape Prawara	817.986.856	130.767.421	948.754.277
PT Kaya Anugerah Bali	271.785.792	(9.712.623)	262.073.169
PT Mitra Bali Property / PT Sarana Bali Dwipa Jaya	73.307.459	(12.505.866)	60.801.593
Jumlah	**1.163.080.107**	**108.548.932**	**1.271.629.039**

13. ASET TETAP DAN INVENTARIS

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
Tanah	1.011.820.000	18.294.310.000	-	19.306.130.000
Bangunan	1.907.843.500	3.528.859.468	-	5.436.702.968
Kendaraaan	2.248.792.157	-	-	2.248.792.157
Inventaris Kantor	1.149.518.596	159.778.480	29.795.000	1.279.502.076
Aset Dalam Penyelesaian	46.945.950	-	46.945.950	-
Jumlah Biaya Perolehan	**6.364.920.203**	**21.982.947.948**	**76.740.950**	**28.271.127.201**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	708.150.846	187.535.872	-	895.686.718
Kendaraan	1.027.754.758	208.036.712	-	1.235.791.470
Inventaris Kantor	1.718.039.403	216.093.459	26.294.993	1.907.837.869
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**3.453.945.007**	**611.666.049**	**26.294.993**	**4.039.316.058**
Nilai Tercatat	**2.910.975.196**			**24.231.811.143**

	2023				
	Saldo Awal	Mutasi			Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	Dampak Akuisisi	
Biaya Perolehan					
Tanah	-	-	-	1.011.820.000	1.011.820.000
Kendaraaan	1.090.893.500	-	-	816.950.000	1.907.843.500
Inventaris Kantor	1.614.266.112	122.139.200	21.816.000	534.202.845	2.248.792.157
Bangunan	116.826.439	161.906.451	-	870.785.706	1.149.518.596
Aset Dalam Penyelesaian	-	46.945.950	-	-	46.945.950
Jumlah	**2.821.986.051**	**330.991.601**	**21.816.000**	**3.233.758.551**	**6.364.920.203**
Akumulasi Penyusutan					
Kendaraan	217.655.547	143.655.432	-	666.443.779	1.027.754.758
Inventaris Kantor	1.048.234.407	189.231.654	21.815.999	502.389.342	1.718.039.403
Bangunan	15.300.098	17.412.000	-	675.438.748	708.150.846
Jumlah	**1.281.190.052**	**350.299.086**	**21.815.999**	**1.844.271.869**	**3.453.945.007**
Nilai Tercatat	**1.540.795.999**				**2.910.975.196**

Beban penyusutan aset tetap inventaris untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp611.666.049,- dan Rp350.299.086,- (Catatan 30).

Pada tahun buku per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat aset tetap yang dijadikan sebagai agunan.

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan untuk aset kendaraan sebesar Rp900.500.000,-, *property all risk* (inventaris dan bangunan) dan *earthquake insurance* sebesar Rp4.500.000.000,- per 31 Desember 2024, yang menurut manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang mungkin dialami.

13. ASET TETAP DAN INVENTARIS (Lanjutan)

Penambahan nilai tanah Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp18.294.310.000,- terdiri dari penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Bali dengan pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah Provinsi Bali dalam bentuk inbreng atas tanah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 36 tanggal 6 Januari 2005 seluas 967 m2 Jalan Surapati Nomor 8 Denpasar, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan nilai tanah yang dijadikan sebagai penyertaan modal sebesar Rp17.406.000.000,-. Selanjutnya disahkan dalam Akta Notaris Nomor 53 tanggal 17 Januari 2024 tentang Perjanjian Pengikatan Pemasukan ke Dalam Perusahaan Dan Kuasa (Inbreng), Notaris I Made Pria Dharsana, S.H. Notaris di Kuta. Nilai sebesar Rp888.310.000,- merupakan merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikapitalisasi mejadi nilai perolehan atas aset tanah inbreng tersebut. Sampai diterbitkannya laporan ini, aset tanah masih dalam proses perubahan Sertifikat Hak Pakai (SHP) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Penambahan nilai bangunan tahun 2024 sebesar Rp3.478.782.468,-, merupakan penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Bali dengan pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah Provinsi Bali dalam bentuk inbreng atas bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor 8 Denpasar, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan nilai bangunan yang dijadikan sebagai penyertaan modal sebesar Rp440.200.000,-. Sisa sebesar Rp2.991.636.518,- merupakan reklasifikasi Biaya Renovasi Dibayar di Muka atas gedung kantor menjadi Aset Tetap Bangunan berkaitan dengan inbreng atas kepemilikan tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024.

Pada tahun 2024 dan 2023 terdapat penjualan aset tetap kendaraan dan inventaris kantor secara lelang. Rincian penjualan aset tetap yaitu sebagai berikut:

	2024	2023
Hasil Penjualan Aset Tetap	4.639.000	2.650.000
Nilai Tercatat	-	-
Laba Penjualan Aset Tetap	**4.639.000**	**2.650.000**

14. ASET TIDAK BERWUJUD

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Aset Tidak Berwujud		
Sistem Informasi Jamkrida	912.037.897	684.387.897
Software dan Lisensi - Entitas Anak	38.400.775	38.400.775
Akumulasi Amortisasi	(476.785.957)	(397.805.512)
Nilai Tercatat	**473.652.716**	**324.983.161**

14. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

Sistem Informasi Jamkrida

Keterangan	Biaya Perolehan	Akumulasi Amortisasi 31-Dec-23	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 31-Dec-24	Nilai Tercatat
Sistem Informasi Jamkrida (CV Rumah Media)	154.545.455	154.545.455	-	154.545.455	-
Sistem & Penambahan Fitur (CV Rumah Media)	10.909.091	10.909.091	-	10.909.091	-
Sistem & Penambahan Fitur (CV Ganesha Global)	72.000.000	72.000.000	-	72.000.000	-
Server Sistem Informasi Manajemen Jamkrida	110.040.052	62.356.030	22.008.010	84.364.040	25.676.012
Sistem E-Office Jamkrida	85.560.300	41.354.145	17.112.060	58.466.205	27.094.095
Website Company Profile	23.310.000	3.156.563	2.913.750	6.070.313	17.239.687
Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi	160.890.200	15.083.456	20.111.274	35.194.731	125.695.469
Pengembangan SIMT	67.132.800	-	8.391.600	8.391.600	58.741.200
Sistem Jamkrida Digital Information (JDI) dan Suretyship Online	127.650.000	-	5.318.750	5.318.750	122.331.250
Biaya Perencanaan dan Pengawasan Sistem JDI & SO	100.000.000	-	3.125.000	3.125.000	96.875.000
Software dan Lisensi - Entitas Anak	38.400.775	38.400.773	-	38.400.773	2
Jumlah	**950.438.672**	**397.805.513**	**78.980.444**	**476.785.957**	**473.652.716**

Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp78.980.444,- dan Rp57.117.277,- (Catatan 30).

1) Sistem Informasi Jamkrida

Pengadaan Sistem Informasi Jamkrida berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 039/Jamkrida Bali-PKS/XI/2013, antara PT Jamkrida Bali Mandara dengan CV Rumah Media di Denpasar. Harga kontrak yang disepakati adalah Rp170.000.000, sudah termasuk pajak. Tata cara pembayaran sebagai berikut:

a) Termin I / *Down Payment (DP)* sebesar 40% dari harga kontrak (Rp170.000.000), dibayar 2 (dua) minggu pada bulan I setelah jadwal pengerjaan.
b) Termin II sebesar 55% pada saat pekerjaan telah mencapai 100% atau pada bulan II serah terima akhir.
c) Sisa pembayaran Termin III yaitu sebesar 5% setelah masa pemeliharaan berakhir atau hingga *software* aplikasi dapat diterapkan dengan baik di perusahaan.

Berikut rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk pengadaan Sistem Informasi Jamkrida.

Tanggal	Keterangan		Jumlah
17/12/2013	Termin 1 (40%)	Rp	61.818.182
11/04/2014	Termin 2 (55%)	Rp	85.000.000
13/11/2014	Termin 3 (5%)	Rp	7.727.273
	Harga Perolehan	**Rp**	**154.545.455**

14. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

2) Penambahan Fitur Sistem Informasi Jamkrida

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 092/Jamkrida Bali-PKS/XI/2014/ 105/RM/XI/2014 tanggal 28 November 2014 antara PT Jamkrida Bali Mandara dengan CV Rumah Media di Denpasar, harga yang disepakati sebesar Rp10.000.000,- sudah termasuk PPN. Masa pengerjaan 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 1 Desember 2014, masa uji coba paling lambat 1 (bulan) setelah jangka waktu pengerjaan selesai, dan kemudian masa pemeliharaan 2 (dua) bulan setelah masa serah terima perbaikan akhir. Cara pembayaran ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:

a) Termin I / *Down Payment (DP)* sebesar 50% dari harga kontrak (Rp10.000.000), dibayar pada awal jadwal pengerjaan atau setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
b) Termin II sebesar 50% pada saat pekerjaan telah mencapai 100% atau pada akhir bulan II (masa uji coba).
c) Perusahaan telah membayar termin I dan II dengan total sebesar Rp10.000.000 (sudah termasuk PPN) dan biaya tambahan lainnya sebesar Rp2.000.000.

3) Penambahan Fitur Sistem Informasi Jamkrida *Surenty Bonds* dan KBG

Perusahaan telah melakukan penambahan sistem *sofware surenty bonds* dengan vendor Ganesha Global dan pembayaran termin IV tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp72.000.000.

4) Server Sistem Informasi Manajemen Jamkrida

Perusahaan melakukan pengadaan server pada CV Seulawah Information Technology yang sesuai dengan kebutuhan sistem di PT Jamkrida Bali Mandara, berdasarkan keputusan Internal Memo No.074/IM/JBM/II/2021 tanggal 3 Februari 2021. Spesifikasi produk server yang dibeli yaitu Server SYS – 1029P- WTR dengan total nilai pengadaan yaitu Rp110.040.052.

5) Sistem E-Office Jamkrida

Pekerjaan pengembangan Sistem E-Office PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 028/Jamkrida Bali-PKS/III/2021/01.015.16/SAS-PKS/III/2022 tanggal 02 Maret 2021 antara PT Jamkrida Bali Mandara dengan PT Solusi Anak Sakti, nilai kontrak pengerjaan yang disepakati sebesar Rp85.050.000,- sudah termasuk pajak. Masa pengerjaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 dengan penyerahan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan selesai yaitu pada tanggal 2 Juni 2022.

Cara pembayaran ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:

a) Pembayaran Uang Muka atau *Down Payment (DP)* sebesar 30% dari nilai kontrak, dan dibayar pada saat penandatanganan perjanjian.
b) Pelunasan pembayaran sebesar 100% pada saat serah terima pertama pekerjaan dikurang uang muka yang telah dicairkan.
c) Pembayaran dilakukan setelah Pihak Kedua menyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak selama jangka waktu pemeliharaan (5% ditahan sampai masa pemeliharaan selesai).
d) Pengajuan pembayaran oleh Pihak Kedua dilakukan dengan menyampaikan invoice tagihan kepada Pihak Pertama.

14. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

6) Website Company Profile

Perusahaan melakukan kerja sama pengembangan *Website Company Profile* PT Jamkrida Bali Mandara dengan CV Tridatu Solution berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 103/Jamkrida Bali-PKS/IX/2022 /01.TDS-PKS/X/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pekerjaan Pengembangan *Website Company Profile* PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan nilai kontrak sebesar Rp12.210.000,-. Terdapat Addendum I Perjanjian Kerjasama berdasarkan perjanjian Nomor: 066/Jamkrida Bali-ADD/X/2022 /01.19/TDS-PKS/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, mengubah ketentuan ayat (1) pasal 4 tentang nilai kontrak dalam Perjanjian Induk, dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp23.310.000,-.

7) Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi

Perusahaan melakukan proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 50.a/Jamkrida Bali-PKS/VII/2019/ 0093.2/PKS/PT.GIN/VII/2019 antara PT Jamkrida Bali Mandara dengan PT Global Intermedia Nusantara. Nilai kontrak atas pekerjaan proyek yang disepakati adalah Rp149.000.000,- belum termasuk pajak.

8) Sistem Jamkrida Digital Information (JDI) dan Suretyship Online

Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Jamkrida Digital (JDI) dan Suretyship Online PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang bekerjasama dengan CV Tridatu Solusindo berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 029/Jamkrida Bali-PKS/III/2023 / 01.03/TDS-PKS/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan nilai kontrak atas pekerjaan proyek yang disepakati adalah Rp127.650.000,- sudah termasuk PPN. Terkait dengan Biaya Perencanaan dan Pengawasan Sistem JDI & SO dilakukan oleh CV Sari Bakti Meening dengan nilai kontrak Rp100.000.000.

15. ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitis diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan. Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan waktu temporer pengakuan aset dan liabilitas antara akuntansi dengan fiskal berjumlah sebagai berikut:

	2024			
	Saldo Awal	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Pendapatan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset Pajak Tangguhan:				
Liabilitas Imbalan Pascakerja	319.710.305	61.614.812	11.663.398	392.988.515
Realisasi Pembayaran Manfaat	(266.215.346)	(53.809.195)	-	(320.024.542)
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan	**53.494.959**	**7.805.616**	**11.663.398**	**72.963.973**
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak	**5.689.002**	**(301.725)**	**-**	**5.387.277**
Jumlah	**59.183.961**	**7.503.891**	**11.663.398**	**78.351.250**

15. ASET PAJAK TANGGUHAN (Lanjutan)

	2023			
	Saldo Awal	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Pendapatan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset Pajak Tangguhan:				
Liabilitas Imbalan Pascakerja	181.025.378	50.483.035	88.201.892	319.710.305
Realisasi Pembayaran Manfaat	(138.926.124)	(127.289.223)	-	(266.215.346)
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan	**42.099.255**	**(76.806.188)**	**88.201.892**	**53.494.959**
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak - Bersih	**-**	**-**	**-**	**5.689.002**
Jumlah	**42.099.255**	**(76.806.188)**	**88.201.892**	**59.183.961**

16. UTANG KLAIM

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Utang Klaim :		
Utang Klaim Sektor Jasa dan Dagang KU	992.027.073	1.677.956.481
Utang Klaim Sektor Non Produktif	190.020.748	80.683.248
Jumlah	**1.182.047.821**	**1.758.639.729**

Utang klaim pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.182.047.821,- merupakan klaim yang telah disetujui untuk dibayar, namun belum dilakukan pendebetan oleh rekanan, yang terdiri dari 27 terjamin.

17. UTANG PAJAK

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Utang Pajak :		
Perusahaan		
PPh Pasal 23	7.351.656	10.929.116
PPh Pasal 21	-	61.026.758
PPh Pasal 4 ayat 2	-	1.877.837
Entitas Anak		
PPh Pasal 21	7.461.760	50.678.175
PPh Pasal 23	562.520	211.474
PPh Pasal 25	1.900.140	6.380.036
PPh Pasal 29	4.867.794	-
Jumlah	**22.143.869**	**131.103.396**

Utang pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp7.351.655,- merupakan utang pajak masa Desember 2024 yang mana telah dilunasi oleh Perusahaan pada bulan Januari 2025.

17. UTANG PAJAK (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba komersil sebelum taksiran pajak penghasilan dengan taksiran pajak penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
LABA KONSOLIDASIAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**7.113.896.237**	**5.209.321.009**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN ENTITAS ANAK	**(147.359.157)**	**-**
LABA PERUSAHAAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**6.966.537.080**	**5.209.321.009**
KOREKSI POSITIF		
BEDA TETAP		
- Beban untuk Memperoleh Penghasilan Bersifat Final	1.919.138.775	3.938.342.078
- Beban PPh Pasal 21	1.971.666.768	1.126.100.807
- Beban Pajak	187.343.858	248.382.367
- Beban Persembahyangan Kantor	63.432.880	75.658.390
- Lain-Lain	193.339.451	52.431.346
- Beban Suka Duka	27.731.937	23.264.458
JUMLAH BEDA TETAP	**4.362.653.669**	**5.464.179.445**
BEDA TEMPORER		
- Beban Cadangan Pasca Kerja	280.067.325	229.468.341
JUMLAH BEDA TEMPORER	**280.067.325**	**229.468.341**
JUMLAH KOREKSI POSITIF	**4.642.720.994**	**5.693.647.787**
KOREKSI NEGATIF		
BEDA TETAP		
- Pendapatan Bunga	11.622.532.462	9.479.846.071
- Keuntungan Pembelian Diskon atas Akuisisi	-	4.584.616.824
- Pendapatan Jasa Giro Tabungan	762.797.870	767.061.082
JUMLAH BEDA TETAP	**12.385.330.332**	**14.831.523.976**
BEDA TEMPORER		
- Realisasi Pembayaran Manfaat	-	169.552.000
JUMLAH BEDA TEMPORER	**-**	**169.552.000**
JUMLAH KOREKSI NEGATIF	**12.385.330.332**	**15.001.075.976**
LABA (RUGI) FISKAL	**(776.072.258)**	**(4.098.107.180)**
ENTITAS ANAK:		
Beban Pajak Kini - Entitas Anak	**32.149.370**	**-**

18. UTANG CO - GUARANTEE

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Utang Re-Asuransi :		
PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia	1.654.397.677	-
Jumlah	**1.654.397.677**	**-**

Utang Co-Guarantee pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.654.397.677,- kepada PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia merupakan utang atas penjaminan ulang yang telah dilunasi oleh Perusahaan pada bulan Januari 2025.

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Biaya Fee Agent Yang Masih Harus Dibayar	1.597.098.193	1.220.790.534
Biaya Jasa Produksi Yang Masih Harus Dibayar	1.063.306.436	783.107.507
Biaya Tantiem Yang Masih Harus Dibayar	708.870.957	522.071.672
Biaya Lainnya Yang Masih Harus Dibayar	699.091.364	892.769.458
Biaya Fee Based Kredit yg Masih Harus Dibayar	301.022.167	169.989.227
Biaya Insentif Yang Masih Harus Dibayar	278.370.868	157.509.596
Biaya Fee Based KU Jasa dan Dagang	-	95.221.635
Biaya Fee Based KU Konsumtif/Multiguna	-	60.646.917
Biaya Fee Based Kredit Program Linkage	-	45.764.750
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Entitas Anak	-	666.663
Jumlah	**4.647.759.985**	**3.948.537.958**

Biaya Fee Agent yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan biaya fee agen perusahaan atas komisi agen penjaminan yang belum dibayarkan.

20. UTANG LANCAR LAINNYA

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Utang Lancar Lainnya :		
Titipan Jaminan Non Kredit	1.326.146.459	-
Utang Lainnya - Entitas Anak	221.795.208	468.440.129
Utang Lancar Lainnya	82.992.302	127.783.413
Utang Titipan Karyawan	-	2.598.597
Cadangan Purna Jabatan		
- Direktur Utama	456.053.544	330.581.254
- Direktur	410.448.186	297.523.123
- Komisaris Utama	227.445.480	164.709.334
- Komisaris Independen	82.724.173	26.261.643
Jumlah	**2.807.605.351**	**1.417.897.493**

Titipan Jaminan Non-Kredit pada tanggal 31 Desember 2024 merupakan dana titipan dari para terjamin sebagai *cash collateral* penjaminan *surety bond*.

21. PENAMPUNGAN SEMENTARA JASA JAMINAN

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Penampungan Sementara Jasmin :		
Penampungan Sementara Jasmin Kredit Umum	1.435.598.812	1.919.658.917
Penampungan Sementara KBG	25.390.220	25.390.220
Penampungan Sementara Restruktur	7.072.868	7.072.868
Penampungan Sementara Jasmin lainnya	-	290.466
Jumlah	**1.468.061.900**	**1.952.412.471**

Penampungan Sementara Jasa Jaminan merupakan transferan uang masuk pada Perusahaan atas jasa penjaminan yang belum dapat teridentifikasi keterjadian transaksi sehingga dilakukan pencatatan ke akun tersebut.

Perusahaan telah melakukan upaya mempercepat penyelesaian dana penampungan yaitu dengan: 1) melakukan rekonsiliasi dengan Penerima Jaminan; 2) Mengefektifkan CGO unuk melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan Penerima Jaminan; 3) Melakukan pengembalian kelebihan setoran IJP, kesalahan setoran IJP dan IJP pembatalan penjaminan secara rutin setiap bulan.

22. DANA CADANGAN KLAIM

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Dana Cadangan Klaim		
Dana Cadangan Klaim	36.803.517.524	29.373.262.357
Jumlah	**36.803.517.524**	**29.373.262.357**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 2/POJK.05/2017 Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa Lembaga Penjamin wajib membentuk Cadangan Klaim paling sedikit (a) 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; atau (b) penjumlahan rata-rata klaim 3 (tiga) periode sebelumnya dengan klaim yang dibayar; mana yang lebih besar.

Berikut perhitungan dana cadangan klaim yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tahun 2024

Berdasarkan informasi keuangan per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a) Perhitungan 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri

Nilai Penjaminan yg ditanggung sendiri	Cadangan Klaim Yang Sudah Dibentuk	%	Cadangan Klaim Minimal Yang Dibentuk (0,01% Dari Nilai Penjaminan
6.728.044.474.698	36.803.517.524	0,55%	672.804.447

22. DANA CADANGAN KLAIM (Lanjutan)

b) Perhitungan penjumlah rata-rata klaim 3 (tiga) periode sebelumnya dengan klaim diproses

Periode	Nilai Klaim	Rata-Rata Klaim 3 periode terakhir	Jumlah Cadangan Minimal yang dibentuk	Cadangan Klaim yg Sudah Dibentuk
Sep-24	3.346.323.913			
Oct-24	3.312.800.990			
Nov-24	5.312.898.987	3.990.674.630		
Dec-24	-		**3.990.674.630**	**36.803.517.524**

Berdasarkan informasi tersebut di atas perusahaan sudah memenuhi kewajiban pembentukan cadangan klaim minimal.

Tahun 2023

Berdasarkan informasi keuangan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

c) Perhitungan 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri

Nilai Penjaminan yg ditanggung sendiri	Cadangan Klaim Yang Sudah Dibentuk	%	Cadangan Klaim Minimal Yang Dibentuk (0,01% Dari Nilai Penjaminan
2.688.113.633.399	29.373.262.357	1,09%	268.811.363

d) Perhitungan penjumlah rata-rata klaim 3 (tiga) periode sebelumnya dengan klaim diproses

Periode	Nilai Klaim	Rata-Rata Klaim 3 periode terakhir	Jumlah Cadangan Minimal yang dibentuk	Cadangan Klaim yg Sudah Dibentuk
Sep-23	4.681.301.912			
Okt-23	2.902.493.573			
Nov-23	4.080.181.365	3.887.992.283		
Des-23	-		**3.887.992.283**	**29.373.262.357**

Berdasarkan informasi tersebut di atas perusahaan sudah memenuhi kewajiban pembentukan cadangan klaim minimal.

23. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Corporate Social Responsibility		
Corporate Social Responsibility	716.630.424	502.453.588
Jumlah	**716.630.424**	**502.453.588**

24. UTANG SETORAN MODAL PEMEGANG SAHAM

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Utang Setoran Modal Pemegang Saham		
Utang Setoran Modal Pemegang Saham	8.500.000.000	1.000.000.000
Jumlah	**8.500.000.000**	**1.000.000.000**

Rincian utang setoran modal pemegang saham pada tahun 2024 sebagai berikut :

Penyertaan Modal 2024	Nominal Per Lembar Saham	Lembar Saham	Jumlah
Pemerintah Kota Denpasar	1.000.000	1.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem	1.000.000	500	500.000.000
Pemerintah Provinsi Bali	1.000.000	7.000	7.000.000.000
Jumlah			**8.500.000.000**

Setoran Modal dari pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar No 43 tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pencairan Dana Dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pasal 3 ayat (4) diputuskan bahwa penyertaan modal yang disetor kepada PT Jamkrida Bali Mandara pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Setoran modal berdasarkan SP2D Nomor: 51.71/04.0/000002/Pembiayaan /5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Setoran Modal dari Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 5 tahun 2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, berdasarkan pasal 3 ayat (2) diputuskan bahwa penyertaan modal yang disetor kepada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2024. Setoran modal berdasarkan SP2D Nomor: 51.71/04.0/000002/Pembiayaan /5.02.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Setoran Modal dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, berdasarkan pasal 5 ayat (3) diputuskan bahwa penyertaan modal daerah berupa uang sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Setoran modal berdasarkan SP2D Nomor:51.00/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2024 tanggal 18 Desember 2024.

25. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Pendapatan Diterima di Muka		
Pendapatan Diterima di Muka	212.851.724.178	189.955.409.105
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek	(12.814.452.866)	(26.577.836.411)
Jumlah	**200.037.271.311**	**163.377.572.694**

Pendapatan Diterima di Muka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.851.724.178,- dan Rp189.955.409.105,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Jasmin Konsumtif/Multiguna KU diterima di muka	166.411.806.257	151.222.839.927
Pendapatan Jasmin Jasa & Dagang KU diterima di muka	31.661.083.935	26.486.311.630
Pendapatan Jasa Penjaminan KUR diterima di muka	11.705.781.270	9.889.457.228
Pendapatan Jasa Penjaminan Surety Bond	1.067.630.384	686.347.416
Pendapatan Jasa Penjaminan Extra Mortalita	1.061.312.962	1.221.128.317
Pendapatan Jasmin Jasa & Dagang KP diterima di muka	196.971.458	196.971.458
Pendapatan Jasmin Jasa & Dagang Non Bank diterima di muka	147.038.826	147.309.682
Pendapatan Jasa Penjaminan Linkage diterima di muka	566.518.441	69.475.470
Pendapatan Jasa Penjaminan Kontra Bank Garansi	33.580.645	35.567.977
	212.851.724.178	**189.955.409.105**

26. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Liabilitas Imbalan Pascakerja		
Liabilitas Imbalan Pascakerja	331.654.416	243.158.899
Jumlah	**331.654.416**	**243.158.899**

Pada tahun 2024 dan 2023, Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Program BNI Simponi yang merupakan Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perikatan dalam program tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrida Bali Mandara dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 68/Jamkrida Bali-PKS/IX/2019 dan 052/DLK/PKS/2019 tanggal 13 September 2019. Seluruh kewajiban iuran pada program pensiun tersebut ditanggung/dibayar sepenuhnya oleh Perusahaan. Pada tahun 2024 dan 2023, Perusahaan membentuk liabilitas imbalan pasca kerja Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan sesuai dengan PSAK 219 (dh. PSAK 24) Revisi 2013 dengan mempertimbangkan amandemen tahun 2015, perubahan minor tahun 2016, amandemen tahun 2018 dan pengatribusian imbalan kerja periode berjalan berdasarkan IFRIC *(International Financial Reporting Interpretations Committee)*.

26. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Penyisihan imbalan pascakerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Perhitungan aktuaria per 31 Desember 2024 dan 2023 ditentukan berdasarkan Laporan Kantor Konsultan Aktuaria Herman Budi Purwanto, FSAI dengan Nomor Register PAI 201010190, Register Aktuaris Publik Act-1.18.00128 dengan Laporan Perhitungan Aktuaria Program Imbalan Pascakerja Karyawan Berdasarkan PSAK 219 (dh. PSAK 24) tahun 2024 yaitu Laporan Nomor: 212/LAP/KKA-HBP/XII/24 tanggal 24 Desember 2024 dan Laporan tahun 2023 Laporan Nomor: 004/LAP/KKA-HBP/I/24 tanggal 29 Januari 2024.

a. Pengakuan Liabilitas/(Aset) dalam Laporan Posisi Keuangan

	2024	2023
Nilai Kini Liabilitas	1.967.918.955	1.553.183.739
Nilai Wajar Aset Program	(1.636.264.539)	(1.310.024.840)
Posisi Pendanaan	**331.654.416**	**243.158.899**
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui - Non Vested	-	-
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial yang Belum Diakui	-	-
Liabilitas (Aset) yang diakui dalam Laporan Posisi Keuangan	**331.654.416**	**243.158.899**

b. Pengakuan Beban/(Penghasilan)

	2024	2023
Biaya Jasa Kini	263.143.465	227.959.210
Biaya Bunga	108.101.588	61.027.145
Harapan dari Hasil Investasi	(91.177.729)	(59.518.015)
Pengakuan Segera dari Biaya Jasa Lalu yang Vasted	-	-
Dampak Kurtailmen/Penyelesaian	-	-
Beban/Penghasilan yang diakui dalam Laporan Laba/Rugi	**280.067.325**	**229.468.341**

c. Rekonsiliasi Liabilitas/(Aset) yang di catat dalam Laporan Posisi Keuangan

	2024	2023
Liabilitas/(Aset) pada Awal Periode	**243.158.899**	**191.360.245**
Beban/(Penghasilan)	280.067.325	229.468.341
Realisasi Pembayaran Manfaat	-	(169.552.000)
Iuran Pensiunan	(244.587.253)	(409.035.379)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	53.015.445	400.917.692
Liabilitas/(Aset) pada Akhir Periode	**331.654.416**	**243.158.899**

26. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

d. Penghasilan Komprehensif Lain

	2024	2023
Penghasilan Komprehensif Lainnya Awal	**477.387.047**	**76.469.355**
(Keuntungan)/kerugian aktuaria - liabilitas	43.490.162	382.302.217
(Keuntungan)/kerugian aktuaria - aset program	9.525.283	18.615.475
Total (Keuntungan)/kerugian aktuaria	53.015.445	400.917.692
Penghasilan Komprehensif Lainnya Akhir Periode	**530.402.492**	**477.387.047**

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tingkat Bunga Aktuaria	7,11%	6,96%
Tingkat Kenaikan Gaji	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tabel Mortalita	TMI IV	TMI IV
Tingkat Cacat	10% dari TMI IV	10% dari TMI IV
Tingkat Pengunduran Diri		
Umur ≤ 29	10,00%	10,00%
Umur 17 - 29	10,00%	10,00%
Umur 30 - 39	5,00%	5,00%
Umur 40 - 44	3,00%	3,00%
Umur 45 - 49	2,00%	2,00%
Umur 50 - 56	1,00%	1,00%
Umur ≥ 57	0,00%	0,00%
Usia Pensiun Normal	58	58

Pertimbangan analisa sensitivitas 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tingkat Diskonto		
Kenaikan 1%	1.647.057.253	1.293.528.882
Penurunan 1%	2.364.496.247	1.875.701.982
Tingkat Kenaikan Gaji		
Kenaikan 1%	2.351.776.651	1.864.861.250
Penurunan 1%	1.650.381.297	1.296.526.865

27. LIABILITAS LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Liabilitas Lain-Lain		
Utang Jangka Panjang - Entitas Anak	4.588.860.897	2.848.240.024
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun - Entitas Anak	3.441.582.666	4.967.128.946
Jumlah	**8.030.443.563**	**7.815.368.970**

Liabilitas lain-lain terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun entitas anak yang berasal dari pinjaman dari pihak ketiga sehubungan dengan penyaluran dana kepada UMKM.

Rincian utang jangka panjang entitas anak yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	2.166.666.660	-
LPDB - KUMKM	791.636.000	1.250.010.000
PT Bahana Artha Ventura	483.280.006	3.633.785.601
PKBL AP II	-	83.333.345
Jumlah	**3.441.582.666**	**4.967.128.946**

Utang jangka panjang jauh tempo dalam 1 tahun entitas anak kepada PT Bahana Artha Ventura bersumber dari PKBL BUMN. Rincian utang kepada PT Bahana Artha Ventura adalah sebagai berikut:

	2024	2023
PKBL PPA	242.017.441	692.253.314
PKBL Jasa Marga	180.721.401	696.441.903
PKBL Peruri	60.541.164	703.423.733
PKBL Pertamina	-	694.444.427
PKBL AP II	-	222.222.212
PKBL Jasa Raharja	-	625.000.012
Jumlah	**483.280.006**	**3.633.785.601**

Rincian utang jangka panjang entitas anak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	3.763.888.897	-
PT Bahana Artha Ventura	824.972.000	481.626.024
LPDB - KUMKM	-	2.366.614.000
Jumlah	**4.588.860.897**	**2.848.240.024**

27. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

LPDB – KUKM

Entitas anak melakukan perjanjian pinjaman jangka panjang dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro yang berdasarkan Surat Permohonan No.182/SBV/DIR/IX/2019 pada tanggal 16 September 2019 telah menerima fasilitas Modal Kerja Pembiayaan kepada UMKM dengan bentuk pinjaman Executing dan Setting pinjaman berupa angsuran.

Fasilitas	: Modal Kerja Pembiayaan kepada UMKM
Jumlah Plafon	: Rp10.000.000.000.
Jangka Waktu	: 60 Bulan
Bunga	: 6%
Jaminan	: - Deposito dengan nilai minimal 10% dari plafond dengan penempatan pada bank umum - Fidusia atas Piutang/Tagihan dengan kategori sehat dengan nilai minimal sebesar 120% dari plafond pinjaman

PT Bahana Artha Ventura

Entitas anak memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bahana Artha Ventura dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Fasilitas Dana Program Kemitraan PT Pertamina (Persero)

PT Bahana Artha Ventura dan PT Pertamina (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 090/N00300/2020-S0 dan Nomor 002/Perja/BAV/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Atas kerjasama tersebut PT Pertamina (Persero) menyalurkan dana Program Kemitraan untuk digulirkan kepada Usaha Kecil.

PT Sarana Bali Ventura sesuai dengan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan tahun 2020 Nomor: 015/PERJ/BAV/IX/2020 dan Nomor: 120/SBV-PERTAMINA/PKS/IX/2020 tanggal 25 September 2020, merupakan pihak kedua yang berperan sebagai pelaksana dalam penyaluran Dana Program Kemitraan yang telah diperoleh dari pihak pertama yaitu PT Bahana Artha Ventura, dan berperan dalam survey, analisis kelayakan, evaluasi persyaratan serta melakukan penyaluran Dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan, monitoring, mengembalikan angsuran pinjaman, pelaporan serta pembinaan dan pendampingan Mitra Binaan. Adapun rincian fasilitas yang diperoleh dari Program Kemitraan yang disalurkan PT Bahana Artha Ventura kepada PT Sarana Bali Ventura dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Dana Program Kemitraan PT Pertamina
Jumlah Plafon	: Rp7.000.000.000
Jangka Waktu	: 40 Bulan
Bunga	: 5% dari 3% flat menurun setiap tahun yang diperoleh PT Sarana Bali Ventura dari Mitra Binaan

b) Fasilitas Dana Kemitraan PT Angkasa Pura II (Persero)

PT Bahana Artha Ventura dan PT Angkasa Pura II (Persero) telah menandatangani perjanjian kerjasama nomor PJJ.05.06//00/12/2020/0918 dan Nomor 025/PERJ/BAV/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020. Atas kerjasama tersebut PT Angkasa Pura II (Persero) menyalurkan dana Program Kemitraan untuk digulirkan kepada Usaha Kecil.

27. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

PT Bahana Artha Ventura (Lanjutan)

b) Fasilitas Dana Kemitraan PT Angkasa Pura II (Persero) (Lanjutan)
PT Sarana Bali Ventura sesuai dengan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan tahun 2020 Nomor: 003/PERJ/BAV/II/2021 dan Nomor: 004/PKS/SBV-BAV/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, merupakan pihak kedua yang berperan sebagai pelaksana dalam penyaluran Dana Program Kemitraan yang telah diperoleh dari pihak pertama yaitu PT Bahana Artha Ventura, dan berperan dalam survey, analisis kelayakan, evaluasi persyaratan serta melakukan penyaluran Dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan, monitoring, mengembalikan angsuran pinjaman, pelaporan serta pembinaan dan pendampingan Mitra Binaan. Adapun rincian fasilitas yang diperoleh dari Program Kemitraan yang disalurkan oleh PT Bahana Artha Ventura kepada PT Sarana Bali Ventura dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Dana Program Kemitraan PT Angkasa Pura II (Persero)
Jumlah Plafon	: Rp2.000.000.000,-
Jangka Waktu	: 39 Bulan
Bunga	: 5% dari 3% flat menurun setiap tahun yang diperoleh PT Sarana Bali Ventura dari Mitra Binaan

c) Fasilitas Dana Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero)
PT Bahana Artha Ventura dan PT Jasa Raharja telah menandatangani perjanjian kerjasama nomor P/33/SP/2020 dan Nomor 023/PERJ/BAV/XI/2020 tanggal 22 September 2020. Atas kerjasama tersebut PT Jasa Raharja (Persero) menyalurkan dana Program Kemitraan untuk digulirkan kepada Usaha Kecil. PT Sarana Bali Ventura sesuai dengan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan tahun 2020 Nomor: 019/PERJ/BAV/VII/2021 dan Nomor: 024/PKS/SBV-JR/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, merupakan pihak kedua yang berperan sebagai pelaksana dalam penyaluran Dana Program Kemitraan yang telah diperoleh dari pihak pertama yaitu PT Bahana Artha Ventura, dan berperan dalam survey, analisis kelayakan, evaluasi persyaratan serta melakukan penyaluran Dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan, monitoring, mengembalikan angsuran pinjaman, pelaporan serta pembinaan dan pendampingan Mitra Binaan.

Adapun rincian fasilitas yang diperoleh dari Program Kemitraan yang disalurkan oleh PT Bahana Artha Ventura kepada PT Sarana Bali Ventura dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Dana Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero)
Jumlah Plafon	: Rp2.500.000.000,-
Jangka Waktu	: 36 Bulan
Bunga	: 5% dari 3% flat menurun setiap tahun yang diperoleh PT Sarana Bali Ventura dari Mitra Binaan

27. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

PT Bahana Artha Ventura (Lanjutan)

d) Fasilitas Dana Kemitraan Perusahaan Umum Percetakan Republik Indonesia (Peruri)
PT Bahana Artha Ventura dan Peruri telah menandatangani perjanjian kerjasama nomor SP-1102/IX/2021 dan Nomor 024/PERJ/BAV/IX/2021 tanggal 28 September 2021. Atas kerjasama tersebut Peruri menyalurkan dana Program Kemitraan untuk digulirkan kepada Usaha Kecil. PT Sarana Bali Ventura sesuai dengan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan tahun 2020 Nomor: 027/PERJ/BAV/X/2021 dan Nomor: 028/PKS/SBV-Peruri/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, merupakan pihak kedua yang berperan sebagai pelaksana dalam penyaluran Dana Program Kemitraan yang telah diperoleh dari pihak pertama yaitu PT Bahana Artha Ventura, dan berperan dalam survey, analisis kelayakan, evaluasi persyaratan serta melakukan penyaluran Dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan, monitoring, mengembalikan angsuran pinjaman, pelaporan serta pembinaan dan pendampingan Mitra Binaan. Adapun rincian fasilitas yang diperoleh dari Program Kemitraan yang disalurkan oleh PT Bahana Artha Ventura kepada PT Sarana Bali Ventura dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Dana Program Kemitraan Peruri
Jumlah Plafon	: Rp2.000.000.000
Jangka Waktu	: 39 Bulan
Bunga	: 5% dari 6% efektif per tahun yang diperoleh PT Sarana Bali Ventura dari Mitra Binaan

e) Fasilitas Dana Kemitraan PT Jasa Marga Tbk
PT Bahana Artha Ventura dan PT Jasa Marga Tbk telah menandatangani perjanjian kerjasama nomor 79/KONTRAK-DIR/2021 dan Nomor 035/PERJ/BAV/XI/2021 tanggal 17 November 2021. Atas kerjasama tersebut PT Jasa Marga Tbk menyalurkan dana Program Kemitraan untuk digulirkan kepada Usaha Kecil. PT Sarana Bali Ventura sesuai dengan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan tahun 2020 Nomor: 042/PERJ/BAV/XII/2021 dan Nomor: 037/PKS/SBV/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, merupakan pihak kedua yang berperan sebagai pelaksana dalam penyaluran Dana Program Kemitraan yang telah diperoleh dari pihak pertama yaitu PT Bahana Artha Ventura, dan berperan dalam survey, analisis kelayakan, evaluasi persyaratan serta melakukan penyaluran Dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan, monitoring, mengembalikan angsuran pinjaman, pelaporan serta pembinaan dan pendampingan Mitra Binaan.

Adapun rincian fasilitas yang diperoleh dari Program Kemitraan yang disalurkan oleh PT Bahana Artha Ventura kepada PT Sarana Bali Ventura dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Dana Program Kemitraan PT Jasa Marga Tbk
Jumlah Plafon	: Rp2.000.000.000
Jangka Waktu	: 39 Bulan
Bunga	: 5% dari 6% efektif per tahun yang diperoleh PT Sarana Bali Ventura dari Mitra Binaan

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

a) Fasilitas Kredit Pertama
Entitas anak melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 Tanggal 9 Juli 2024, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

27. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Lanjutan)

Jumlah Fasilitas Kredi	:	Bank memberikan kredit kepada Entitas Anak sebesar Rp3.500.000.000 yang dapat ditarik oleh perusahaan apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.
Tujuan Penggunaan	:	Tujuan Kredit ini adalah Modal Kerja Jasa Pembiayaan (Modal Ventura)
Bentuk Kredit	:	*Aplofend* /Angsuran
Jangka Waktu Kredit	:	Jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2027
Agunan	:	Agunan yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kredit debitur yaitu sebagai berikut: a) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 234/Desa Dauh Puri Klod, atas sebidang tanah seluas 103 m2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.01.04.00774, atas nama PT Sarana Bali Ventura. b) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 235/Desa Dauh Puri Klod, atas sebidang tanah seluas 103 m2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.01.04.00773, atas nama PT Sarana Bali Ventura. Agunan tersebut diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Baru sebesar Rp4.375.000.000 c) Piutang Usaha / Pembiayaan yang diberikan diikat Fidusia Notaris sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)

b) Fasilitas Kredit Kedua

Entitas anak kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 26 November 2024, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Kredit	:	Bank memberikan kredit kepada entitas anak sebesar Rp3.000.000.000 yang dapat ditarik oleh perusahaan apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.
Tujuan Penggunaan	:	Tujuan Kredit ini adalah Modal Kerja Jasa Pembiayaan (Modal Ventura)
Bentuk Kredit	:	*Aplofend* /Angsuran
Jangka Waktu Kredit	:	Jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 26 November

27. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Lanjutan)

b) Fasilitas Kredit Kedua (Lanjutan)

Agunan : Agunan yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kredit debitur yaitu sebagai berikut:

a) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22.09.000008482.0/Desa Dauh Puri Klod, seluas 103 m2, terdaftar atas nama PT Bali Kerthi Development Fund Ventura.

b) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.09.000008483.0/Desa Dauh Puri Klod, seluas 103 m2, terdaftar atas nama PT Bali Kerthi Development Fund Ventura.

Agunan tersebut diikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Baru sebesar Rp697.000.000

c) Piutang Usaha / Pembiayaan yang diberikan diikat Fidusia Notaris sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

d) Plafon Kredit sebesar 75% dari plafond kredit atau sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus puluh juta rupiah).

28. EKUITAS

Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Ekuitas :		
Modal Disetor	184.621.200.000	165.775.000.000
Cadangan Umum	9.341.512.966	8.036.333.787
Cadangan Tujuan	3.614.388.043	2.570.244.700
Laba Ditahan	5.851.956.805	5.208.731.155
Laba Tahun Berjalan	7.047.357.522	4.819.799.022
	210.476.415.336	**186.410.108.664**
Kepentingan Non-Pengendali	4.040.883.041	9.819.442.584
Jumlah	**214.517.298.377**	**196.229.551.248**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor: 5 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp5.220.716.714,- sebagai berikut:

1) Cadangan Umum sebesar 25% atau sebesar Rp1.305.179.179,-
2) Cadangan Tujuan sebesar 20% atau sebesar Rp1.044.143.343,-
3) Deviden sebesar 30% atau sebesar Rp1.566.215.014,-
4) Laba ditahan sebesar 20% atau sebesar Rp1.044.143.343,- dan
5) *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 5% atau Rp261.035.836,-.

28. EKUITAS (Lanjutan)

Modal disetor perseroan dari pemegang saham mengalami peningkatan sebesar Rp18.846.200.000,- dari Rp165.775.000.000,- menjadi Rp184.621.200.000,- seperti tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor: 52 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung.

Modal saham (modal yang telah disetor) tersebut terinci sebagai berikut:

2024			
Pemegang Saham	**Nominal Per Lembar Saham**	**Lembar Saham**	**Jumlah Modal Disetor**
Pemerintah Daerah Provinsi Bali	1.000.000	167.846,20	167.846.200.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem	1.000.000	2.575,00	2.575.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli	1.000.000	600,00	600.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar	1.000.000	2.000,00	2.000.000.000
Pemerintah Kota Denpasar	1.000.000	2.500,00	2.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung	1.000.000	5.000,00	5.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan	1.000.000	1.300,00	1.300.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana	1.000.000	1.000,00	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung	1.000.000	1.000,00	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng	1.000.000	800,00	800.000.000
Total		**184.621**	**184.621.200.000**

2023			
Pemegang Saham	**Nominal Per Lembar Saham**	**Lembar Saham**	**Jumlah Modal Disetor**
Pemerintah Daerah Provinsi Bali	1.000.000	150.000	150.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem	1.000.000	2.575	2.575.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli	1.000.000	600	600.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar	1.000.000	2.000	2.000.000.000
Pemerintah Kota Denpasar	1.000.000	1.500	1.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung	1.000.000	5.000	5.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan	1.000.000	1.300	1.300.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana	1.000.000	1.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung	1.000.000	1.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng	1.000.000	800	800.000.000
Total		**165.775**	**165.775.000.000**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan Pasal 7 mengatur tentang permodalan sebagai berikut:

1) Ayat (1) menyatakan Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah Penjamin ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau Provinsi.
2) Ayat (2) menyatakan jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan paling sedikit:
   a. Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional;
   b. Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup wilayah provinsi; atau
   c. Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk lingkup wilayah kabupaten atau kota.
3) Ayat (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.

29. PENDAPATAN USAHA

Rincian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Pendapatan Usaha :		
Pendapatan Jasa Penjaminan		
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit Umum	59.983.082.165	54.850.996.227
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit KUR	20.752.468.957	4.157.409.270
Pendapatan Subrogasi	4.464.374.287	3.828.836.779
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit Program	425.533.429	35.069.896
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit Non Bank	270.856	975.083
Jumlah Pendapatan Usaha	**85.625.729.695**	**62.873.287.255**
Pendapatan Lainnya		
Pendapatan R/I Com	8.218.282.264	7.067.353.671
Pendapatan Surety Bond	5.834.350.587	5.529.649.815
Pendapatan Kontra Bank Quarantee	463.460.682	809.979.454
Jumlah Pendapatan Lainnya	**14.516.093.533**	**13.406.982.939**
Pendapatan Administrasi		
Pendapatan Administrasi Surety Bond	111.575.000	83.050.000
Pendapatan Administrasi Kontra Bank Garansi	12.610.000	20.540.000
Jumlah Pendapatan Administrasi	**124.185.000**	**103.590.000**
Pendapatan Penjaminan Lainnya		
Pendapatan Refund dari Reasuransi	815.839.519	-
Kelebihan Pembayaran Refund dari Reasuransi	7.254.459	12.824.090
Pendapatan Fee Co-Guarantee	10.456.620	6.698.549
Jumlah Pendapatan Penjaminan Lainnya	**833.550.598**	**19.522.639**
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga Deposito	5.410.379.024	4.741.698.990
Pendapatan Obligasi	5.504.153.438	4.493.081.744
Pendapatan Reksadana	708.000.000	245.065.337
Jumlah Pendapatan Bunga	**11.622.532.462**	**9.479.846.071**
Pendapatan Operasional - Entitas Anak		
Pendapatan Investasi	3.261.866.933	-
Pendapatan Operasional Lainnya	406.942.745	-
Pendapatan Obligasi Konversi	256.085.000	-
Pendapatan Administrasi & Provisi	218.073.500	-
Laba (Rugi) Penyertaan Modal	147.374.420	-
Jumlah Pendapatan Operasional - Entitas Anak	**4.290.342.598**	**-**
Pendapatan atas Penjualan Investasi		
Laba atas Penjualan Obligasi	-	146.927.538
Jumlah Pendapatan atas Penjualan Investasi	**-**	**146.927.538**
Keuntungan Pembelian Diskon atas Akuisisi		
Keuntungan Pembelian Diskon Akuisisi Entitas Anak	-	4.584.616.824
Jumlah Keuntungan Pembelian Diskon	**-**	**4.584.616.824**
Jumlah Pendapatan Usaha	**117.012.433.887**	**90.614.773.265**

29. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

Pendapatan jasa penjaminan kredit umum pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp59.983.082.165,- dan Rp54.850.996.227 terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Jasmin Konsumtif/Multiguna KU	41.600.370.044	39.028.312.111
Pendapatan Jasmin Jasa & Dagang KU	17.848.529.919	15.276.822.620
Pendapatan Jasmin Extra Mortalita	327.715.201	467.661.496
Pendapatan Jasmin Portofolio Credit Risk Guarantee	206.467.000	78.200.000
Jumlah	**59.983.082.165**	**54.850.996.227**

Pendapatan jasa penjaminan kredit program pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp425.533.429,- dan Rp35.069.896,- merupakan pendapatan jasa penjaminan produk *linkage*.

Pendapatan usaha penjaminan kredit KUR tahun 2024 sebesar Rp20.752.468.957,- mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2023 terdapat tagihan KUR yang tidak dapat dipastikan ketertagihannya dan baru diterima pembayaran pada tahun 2024.

30. BEBAN USAHA

Rincian per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Beban Usaha :		
Beban Re Asuransi	33.987.456.972	34.896.614.987
Beban Penyisihan Kerugian	22.240.027.238	9.610.759.240
Beban Klaim Tanggung Sendiri	18.616.897.616	14.705.644.620
Beban Sumber Daya Manusia	18.488.838.445	12.774.361.533
Beban Penjaminan	11.882.286.642	10.732.065.997
Beban Umum Lainnya	1.162.743.763	1.095.362.668
Beban Sewa	1.045.895.249	686.918.820
Beban Perjalanan Dinas	969.366.398	469.948.080
Beban Penyusutan Aset Tetap	611.666.049	350.299.086
Beban Komunikasi dan Energi Kantor	361.321.452	333.121.180
Beban Administrasi Kantor	663.833.356	335.310.480
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	160.148.790	137.986.792
Bbean Co-Guarantee	125.945.463	161.401.475
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	89.633.134	175.627.657
Beban Penagihan Subrogasi	86.435.046	89.162.986
Beban Promosi	82.824.734	38.653.000
Beban Representatif	81.192.841	59.667.265
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	78.980.444	57.117.277
Beban Pemasaran	63.997.750	143.211.800
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan	12.368.176	51.069.380
Beban Bunga - Entitas Anak	321.069.750	-
Beban atas Perolehan Investasi	-	5.550.000
Jumlah Beban Usaha	**111.132.929.307**	**86.909.854.322**

30. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Beban Klaim Tanggung Sendiri pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp18.616.897.616,- dan Rp14.705.644.620,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Klaim Tanggung Sendiri Kredit Multiguna KU	8.097.812.177	8.457.184.469
Beban Klaim Tanggung Sendiri Kredit Jasa & Dagang K	3.091.203.927	2.320.423.310
Beban Klaim Tanggung Sendiri KUR	1.675.726.517	737.080.875
Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim	5.752.154.995	3.190.955.965
Jumlah	**18.616.897.616**	**14.705.644.620**

Beban Penjaminan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.882.286.642.- dan Rp10.732.065.997,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Fee Agent Penjaminan Kredit	6.408.792.887	6.706.158.287
Beban Fee Based Income	1.700.498.410	1.157.053.881
Beban Restitusi Penjaminan	1.070.639.422	1.094.265.729
Beban Fee Agent Surety Bonds	1.142.402.418	1.010.174.272
Beban Refund	803.458.414	-
Beban Akuisisi	593.689.150	609.327.592
Beban Fee Agent KBG	84.249.811	117.529.614
Beban Fee Co-Guarantee	45.231.876	-
Beban Penjaminan Lainnya	33.324.254	37.556.621
Jumlah	**11.882.286.642**	**10.732.065.997**

Agen Perusahaan terdiri dari agen penjaminan kredit dan non kredit. Agen penjaminan kredit yaitu *Credit Guarantee Officer* (CGO) terdiri dari 30 orang yang tersebar di masing-masing wilayah kerja dengan rata-rata pencapaian target di tahun 2024 sebesar 142,36%.

Beban Restitusi penjaminan tahun 2024 sebesar Rp1.070.639.422,- merupakan pengembalian Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) dari Perusahaan yang merupakan hak terjamin atas pelunasan kredit sebelum jatuh tempo yang secara langsung mengurangi beban IJP yang dibayarkan atas fasilitas kredit yang baru.

Beban Sumber Daya Manusia pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.488.838.445,- dan Rp12.774.361.533,- terinci sebagai berikut:

30. BEBAN USAHA (Lanjutan)

	2024	2023
Beban PPh Pasal 21	1.971.666.768	1.126.100.807
Gaji Karyawan	1.654.382.729	1.486.926.413
Gaji Direksi	1.626.276.515	1.478.433.194
Tunjangan Hari Raya	1.142.903.840	1.046.186.992
Beban Jasa Produksi	1.063.306.436	783.107.508
Beban Insentif	989.263.209	522.071.673
Gaji Dewan Komisaris	813.138.253	739.216.595
Beban Tantiem	708.870.957	522.071.672
Tunjangan Konsumsi	643.208.724	586.926.381
Tunjangan Transportasi	614.139.479	560.045.767
Tunjangan Cuti	568.160.824	518.148.955
Gaji Kepala Bagian	493.565.819	476.624.615
Dana Purna Bhakti	357.596.029	332.647.467
Beban Premi Jamsostek Karyawan	323.236.905	294.711.430
Gaji Kepala Divisi	305.671.571	304.777.656
Gaji Pelaksana	284.035.749	261.839.113
Beban Pesangon Karyawan	280.067.325	229.468.341
Beban Seragam Karyawan	248.470.884	225.905.546
Beban SDM Lainnya	246.909.927	213.460.682
Beban Pendidikan dan Pelatihan	183.864.418	119.698.017
Tunjangan Jabatan	166.807.512	148.401.792
Tunjangan Perumahan	162.627.659	147.843.324
Tunjangan Kesejahteraan	142.368.336	138.464.836
Beban Reimbursment Pengobatan	139.010.858	119.879.193
Tunjangan Kesehatan (Asuransi Kesehatan)	124.808.469	116.169.017
Tunjangan Komunikasi	113.648.616	104.264.097
Beban Lembur	74.156.912	73.885.277
Beban Seragam Direksi	42.017.584	41.601.568
Tunjangan Persalinan	26.792.500	17.850.000
Tunjangan Kacamata	16.835.000	8.579.000
Beban Seragam Dewan Komisaris	12.861.214	12.733.876
Tunjangan Pernikahan	7.500.000	2.500.000
Beban Premi Jamsostek Lainnya	100.800	201.600
Gaji Karyawan Kontrak	-	13.619.130
Beban Gaji Lainnya - Entitas Anak	2.940.566.624	-
Jumlah	**18.488.838.445**	**12.774.361.533**

Beban Penagihan Subrogasi pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp86.435.046,- dan Rp89.162.986,- merupakan beban penagihan subrogasi untuk kredit umum.

30. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Beban Pemasaran pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp63.997.750,- dan Rp143.211.800,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Marketing & Promosi	41.637.750	86.236.800
Sponsorship & Sumbangan	22.360.000	55.100.000
Beban Pemasaran Lainnya	-	1.875.000
Jumlah	**63.997.750**	**143.211.800**

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp969.366.398,- dan Rp469.948.080,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Perjalanan Dinas Direksi	416.240.343	185.711.580
Beban Perjalanan Dinas Karyawan	170.968.537	130.851.160
Beban Perjalanan Dinas Kepala Bagian	147.174.082	57.123.990
Beban Perjalanan Dinas Lainnya	141.635.317	21.333.250
Beban Perjalanan Dinas Kepala Divisi	90.348.119	46.835.460
Beban Perjalanan Dinas Pelaksana	3.000.000	3.900.000
Beban Perjalanan Dinas Komisaris	-	24.192.640
Jumlah	**969.366.398**	**469.948.080**

Beban Administrasi Kantor pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp663.833.356,- dan Rp335.310.480,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Pajak	187.343.858	248.382.367
Beban Pencetakan Peralatan Kantor	39.227.001	37.365.235
Beban ATK	27.794.740	35.462.050
Beban Denda Pajak	-	14.100.828
Beban Administrasi Lain-Lain - Entitas Anak	409.467.757	-
Jumlah	**663.833.356**	**335.310.480**

Beban Sewa pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.045.895.249,- dan Rp686.918.820,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Sewa Gedung	569.376.728	202.449.066
Beban Sewa Kendaraan Kantor	421.880.000	421.560.000
Beban Sewa Sistem Kantor	27.525.901	24.642.000
Beban Sewa Peralatan Kantor	15.560.110	14.430.000
Beban Sewa Lain-Lain	11.552.510	23.837.754
Jumlah	**1.045.895.249**	**686.918.820**

30. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Beban Komunikasi dan Energi Kantor pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp361.321.452,- dan Rp333.121.180,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Internet Kantor	198.816.770	172.513.485
Beban Listrik Kantor	114.688.377	104.859.822
Beban Komunergi Lain-Lain Kantor	31.281.710	26.714.779
Beban Telepon & Faximile Kantor	11.580.845	20.130.594
Beban PDAM Kantor	4.953.750	8.902.500
Jumlah	**361.321.452**	**333.121.180**

Beban Pemeliharaan Aset Tetap pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp89.633.134,- dan Rp175.627.657,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Perbaikan & Pemeliharaan Aset Tetap	33.587.807	43.302.349
Beban Renovasi Gedung Kantor	33.081.327	132.325.308
Beban Perbaikan & Pemeliharaan Inventaris Kantor	22.964.000	-
Jumlah	**89.633.134**	**175.627.657**

Beban Umum Lainnya pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.162.743.763,- dan Rp1.095.362.668,- terinci sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Konsultan dan Tenaga Ahli	610.653.080	407.059.589
Beban Rapat Kerja	165.308.155	139.442.410
Beban Umum Lain-lain Kantor	160.295.715	17.784.022
Beban Persembahyangan Kantor	63.432.880	75.658.390
Beban Rumah Tangga Kantor	61.877.123	63.852.849
Beban Pemeriksaan	49.223.280	-
Beban Asosiasi	38.493.530	49.059.786
Beban Penyertaan Langsung	8.000.000	342.505.622
Beban Edukasi & Sosialisasi kepada Masyarakat Umum	5.460.000	-
Jumlah	**1.162.743.763**	**1.095.362.668**

31. PENDAPATAN DI LUAR USAHA POKOK

Rincian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Pendapatan di Luar Usaha Pokok		
Pendapatan Lainnya	649.800.747	834.465.861
Pendapatan Jasa Giro/Tabungan	762.797.870	767.061.082
Keuntungan Transaksi Akuisisi	80.123.904	-
Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap	4.639.000	2.650.000
Pendapatan Selisih Klaim	855.464	14
Pendapatan Atas Lebih Setor IJP	143.216	166.216
Pendapatan Non-Operasional - Entitas Anak	73.794.327	-
Jumlah	**1.572.154.528**	**1.604.343.173**

31. PENDAPATAN DI LUAR USAHA POKOK (Lanjutan)

Pendapatan jasa giro/tabungan pada tahun 2024 dan 2023 diakui secara netto setelah dikurangi pajak final.

Pendapatan Lainnya tahun 2024 sebesar Rp649.800.747,- terdiri dari pengakuan penyelesaian penampungan sementara jasa penjaminan kredit umum, penyelesaian biaya *fee based* yang masih harus dibayar, serta pengakuan pengembalian IJP dari reasuransi.

32. BEBAN DI LUAR USAHA POKOK

Rincian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
Beban di Luar Usaha Pokok		
Lain-Lain	193.339.451	52.431.346
Beban Transaksi Akuisisi	81.313.654	-
Beban Suka Duka	27.731.937	23.264.458
Beban Administrasi Bank	35.277.283	24.192.934
Beban Atas Kurang Setor IJP	100.547	52.370
Jumlah	**337.762.872**	**99.941.107**

Beban Lain-lain pada tahun 2024 sebesar Rp193.339.451,- merupakan pengeluaran-pengeluaran perusahaan, seperti parkir, *snack* kunjungan tamu, iuran sampah, dan banten upacara.

33. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan penambahan kepemilikan pada PT Bali Kerthi Development Fund Ventura sebesar 27,44%, dengan nilai kas yang dibayar sebesar Rp5.780.290.482,-, yang terdiri dari nilai aset neto yang diperoleh sebesar Rp5.779.100.733,- dan biaya terkait akuisisi sebesar Rp1.189.749. Sehingga total kepemilikan Perusahaan pada PT Bali Kerthi Development Fund Ventura pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 80,98%. Penambahan kepemilikan tersebut telah disahkan berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Selamet, S.H.

Dengan adanya penambahan kepemilikan tersebut, maka perhitungan laba yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024
Laba Komprehensif Perusahaan	7.047.357.522
Eliminasi Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	(114.366.872)
Rugi Entitas Anak 1 Januari - 31 Oktober 2024 (kepemilikan 53,54%)	(41.571.739)
Rugi Entitas Anak 1 November - 30 November 2024 (kepemilikan 80,98%)	(137.051.735)
Laba Entitas Anak 1 Desember - 31 Desember 2024 (kepemilikan 80,98%)	292.990.346
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk	**7.047.357.522**

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengendalian bersama dengan pemerintah Provinsi Bali	Giro, Deposito, Penjaminan
Pemerintah Provinsi Bali	Pemegang Saham Pengendali	Sewa

Rincian saldo dengan pihak berelasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas pada pihak berelasi

	2024	2023
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	31.060.618.583	16.124.090.000
Deposito Berjangka		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	66.930.000.000	57.980.000.000
Jumlah	**97.990.618.583**	**74.104.090.000**

b. Deposito pada pihak berelasi

	2024	2023
Deposito >3 Bulan		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5.400.000.000	5.400.000.000
Jumlah	**5.400.000.000**	**5.400.000.000**

c. Biaya dibayar di muka pada pihak berelasi

	2024	2023
Biaya Sewa Gedung Dibayar Dimuka		
Pemerintah Provinsi Bali	-	466.096.678
Jumlah	**-**	**466.096.678**

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal posisi keuangan yang memerlukan pengungkapan dalam dan atau penyesuaian terhadap Laporan Keuangan.

36. REKLASIFIKASI AKUN

Tidak terdapat reklasifikasi akun Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan yang diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2025.

PT JASAMARGA BALI TOL

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PT JASAMARGA BALI TOL

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT JASAMARGA BALI TOL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	:	I Ketut Adiputra Karang
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pelabuhan Benoa, No.88 Pedungan Denpasar Selatan, Bali
Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Jl. Cipinang Baru I No.34 A
Nomor Telpon	:	(0361) 725326
Jabatan	:	Direktur Utama
2. Nama	:	I Wayan Eka Saputra
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pelabuhan Benoa, No.88 Pedungan Denpasar Selatan, Bali
Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Jl. Selat Bali No.7, Br/Link. Pesanggaran
Nomor Telpon	:	(0361) 725326
Jabatan	:	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jasamarga Bali Tol;
2. Laporan keuangan interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 28 Februari 2025

METERAI TEMPEL

I Ketut Adiputra Karang
Direktur Utama

I Wayan Eka Saputra
Direktur Keuangan

PT JASAMARGA BALI TOL
Jln. Raya Pelabuhan Benoa No.88, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
+62 361 725326 www.jasamargabalitol.co.id
corporate@jasamargabalitol.co.id
One Call Center 14080

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00093/2.1030/AU.1/06/0181-3/1/II/2025

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jasamarga Bali Tol

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi Lain
Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan tahun 2024, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Benny Andria
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 28 Februari 2025

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	4,26	31.607	59.430
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,26	8.039	7.610
Piutang Usaha dan Lain-lain	6,26	738	1.228
Biaya Dibayar di Muka	7	77	372
JUMLAH ASET LANCAR		**40.461**	**68.640**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Neto	8	47	660
Hak Pengusahaan Jalan Tol - Neto	9	1.848.455	1.853.804
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,26	4.261	17.320
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**1.852.763**	**1.871.784**
JUMLAH ASET		**1.893.224**	**1.940.424**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	10,26	15.565	22.307
Pihak Ketiga	10	160	2.929
Utang Lain-lain	11,26	5.299	5.299
Beban Akrual	12,26	6.500	34.880
Pendapatan Diterima di Muka		189	234
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	13, 26	205.673	167.981
Utang Pemegang Saham	14	--	629.000
Utang Pajak	16	1.564	2.622
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**234.950**	**865.252**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	13,26	408.593	613.631
Utang Pemegang Saham	14	747.750	--
Beban Akrual	12,26	203.117	127.861
Provisi Pelapisan Jalan Tol	15	12.732	19.276
Liabilitas Pajak Tangguhan	16.e	142.065	171.249
Liabilitas Imbalan Pascakerja	17	5.536	4.466
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**1.519.793**	**936.483**
JUMLAH LIABILITAS		**1.754.743**	**1.801.735**
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (Rupiah Penuh) per Saham Modal Dasar - 1.440.434 Saham Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh - 945.434 Saham	18	945.434	945.434
Tambahan Modal Disetor	19	112.102	112.102
Akumulasi Rugi		(919.404)	(918.767)
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti		349	(80)
JUMLAH EKUITAS		**138.481**	**138.689**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.893.224**	**1.940.424**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Tol	20	194.479	145.784
Pendapatan Lainnya	21	1.347	1.485
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
Beban Tol	22,26	(72.684)	(64.050)
LABA BRUTO		**123.142**	**83.219**
Beban Umum dan Administrasi	23	(24.979)	(21.966)
Beban Lain-lain		(661)	(731)
LABA USAHA		**97.502**	**60.522**
Penghasilan Keuangan	25,26	863	956
Beban Keuangan	24	(128.186)	(117.964)
RUGI SEBELUM PAJAK		**(29.821)**	**(56.486)**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	16.e	29.184	(17.527)
RUGI TAHUN BERJALAN		**(637)**	**(74.013)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	17	429	226
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(208)**	**(73.787)**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Akumulasi Kerugian Rp	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Rp	Total Ekuitas Rp
Saldo 1 Januari 2023		**945.434**	**112.102**	**(844.754)**	**(306)**	**212.476**
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(74.013)	--	(74.013)
Penghasilan Komprehensif Lain	17	--	--	--	226	226
Saldo 31 Desember 2023		**945.434**	**112.102**	**(918.767)**	**(80)**	**138.689**
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(637)	--	(637)
Penghasilan Komprehensif Lain	17	--	--	--	429	429
Saldo 31 Desember 2024		**945.434**	**112.102**	**(919.404)**	**349**	**138.481**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pendapatan Tol	20	194.969	145.632
Penerimaan Kas dari Pendapatan Usaha Lainnya	21	1.347	1.485
Pembayaran kepada Pemasok		(17.356)	(50.599)
Pembayaran kepada Pegawai		(17.950)	(12.540)
Penerimaan Bunga	25	863	956
Pembayaran Bunga dan Keuangan		(127.777)	(48.648)
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi		**34.096**	**36.286**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan Hak Pengusahaan Jalan Tol		(25.666)	(2.655)
Penambahan Dana Dibatasi Penggunaannya		12.630	(15.987)
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		**(13.036)**	**(18.642)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Utang Pemegang Saham	14	118.750	149.000
Pembayaran Utang Bank	13	(167.633)	(149.008)
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan		**(48.883)**	**(8)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		**(27.823)**	**17.636**
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		**59.430**	**41.794**
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**4**	**31.607**	**59.430**

Informasi Non Kas dan Rekonsiliasi Aktivitas Pendanaan
Disajikan di Catatan 31

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Jasamarga Bali Tol ("Perusahaan") berkedudukan di Denpasar, Bali, didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU57740.AH.01.01.TH 2011 tanggal 25 November 2011.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir diaktakan dalam Akta Notaris Leonin Jayayanti, S.H., No. 47 tanggal 29 Mei 2023. Proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberitahukan dengan surat No. AHU-AH.01.09-0123542 tanggal 5 Juni 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Melakukan pekerjaan perencanaan.
b. Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas jalan tol.
c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol.
d. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang.
e. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d.

Perusahaan telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 375/KPTS/2013 tanggal 18 September 2013, di mana hak konsesi diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atas jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa selama 45 tahun, terhitung mulai bulan Oktober 2013.

Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Setelah berakhirnya hak konsesi, sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. Hal tersebut dipertegas dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Perusahaan dengan Departemen Pekerjaan Umum.

Perusahaan berkedudukan di Grha Bali Tol, Jalan Raya Pelabuhan Benoa Nomor.88, Pedungan - Denpasar Selatan.

1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Jasamarga Bali Tol yang tertuang dalam Akta No. 47 tanggal 29 Mei 2023 dari Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, susunan Dewan Komisaris dan Direksi, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2024/2023
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Lisye Octaviana
Komisaris	:	Edi Priyatno
Komisaris	:	Handy Heryudhitiawan
Komisaris	:	Anak Agung Ngurah Maha Diptha
Komisaris	:	Kompyang Raka Swandika
Direksi		
Direktur Utama	:	I Ketut Adiputra Karang
Direktur Keuangan	:	I Wayan Eka Saputra

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 82 orang dan 89 orang (tidak diaudit).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK–IAI").

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2.c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI").

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 201 tentang "Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 201 tentang "Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK 116 tentang "Sewa – Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik";
- Amendemen PSAK 207 tentang "Laporan Arus Kas" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang PSAK 207 dan PSAK 107 – "Pengaturan Pembiayaan Pemasok"

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Kas dan Bank

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan setara kas" melainkan disajikan pada akun "Dana dibatasi penggunaanya" dan sebagai bagian dari "Aset Lancar" dan "Aset Tidak Lancar".

2.e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 26 atas laporan keuangan.

2.f. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya dalam pengukuran aset tetapnya. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap termasuk: (a) harga pembelian, (b) setiap biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi masa kini. Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset, sebagai berikut:

	Tahun
Peralatan operasi dan kantor	5
Kendaraan	5
Sarana informasi jalan tol	10

Aset dalam konstruksi merupakan proyek dalam pelaksanaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan amortisasi aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

2.g. Perjanjian Konsesi Jasa

Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (“PPJT”), Perusahaan memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol (“HPJT”) yang merupakan hak untuk membebankan pengguna jasa publik berdasarkan perjanjian jasa konsesi.

Perusahaan menerapkan ISAK 112, “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 229, “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”.

ISAK 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 112 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 229 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa. Perusahaan membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengusahaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat. Perusahaan tidak dapat memindahkan/mengalihkan haknya berdasarkan PPJT, dan tidak dapat memindahkan/mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan PPJT tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah, kecuali pengalihan dilakukan sebagai bentuk jaminan untuk pembayaran pinjaman.

Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selain itu, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Perusahaan menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Perusahaan diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:
1. Aset hak pengusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas/jumlah pengguna jalan tol.
2. Aset hak pengusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan umur manfaat aset.

<u>Provisi pelapisan jalan tol</u>
Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

2.h. Perpajakan

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir tahun pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Aset Pajak Tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

2.i. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Perusahaan membukukan liabilitas program imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan PP No.35/2021. Sesuai dengan PSAK 219, liabilitas imbalan kerja karyawan diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.

Biaya jasa kini dan biaya bunga diakui sebagai beban pada periode berjalan. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, diakui segera dalam laporan posisi keuangan dengan sesuai debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode di mana terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya.

2.j. Instrumen Keuangan

i. Aset Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI), dan nilai wajar melalui laba rugi.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset keuangan Perusahaan mencakup kas dan setara kas, piutang lain - lain, dan dana yang dibatasi penggunaannya.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) (“EIR”), setelah dikurangi dengan penurunan nilai.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahan terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain - lain, dan dana yang dibatasi penggunaannya pada laporan posisi keuangan.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (”FVTOCI”)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL.

Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

(1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
(2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*pass-through*" dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Penurunan Nilai

Pada setiap tahun pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

ii. Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas keuangan Perusahaan mencakup beban akrual yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penghentian Pengakuan
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
ii. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
iii. *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.k. Pengakuan pendapatan dan beban
Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan tol
Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Perusahaan diakui pada suatu titik waktu saat pendebitan kartu tol konsumen.

Pendapatan Sewa
Pendapatan dari sewa iklan dan lahan diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diakui pada suatu periode waktu dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa. Sewa diterima di muka disajikan sebagai “Pendapatan diterima di muka”.

Beban
Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

3. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi oleh Manajemen

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang terdampak pada masa mendatang.

3.a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 2.i.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 112 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 112 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Perusahaan termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2.f).

Pada akhir masa konsesi jasa, Perusahaan harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Perusahaan berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 238, “Aset Takberwujud”.

Perusahaan diharuskan oleh ISAK 112 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 115. Perusahaan mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan marjin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

3.b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 10 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat penyusutan Aset tetap disajikan dalam catatan 8.

Estimasi Volume Lalu Lintas dalam Amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol
Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual. Rincian atas estimasi volume lalu lintas dalam amortisasi hak pengusaha jalan tol disajikan dalam catatan 9.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Provisi Pelapisan Jalan Tol
Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

Imbalan Kerja
Penentuan kewajiban Perusahaan untuk menyediakan imbalan kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai Tercatat imbalan kerja disajikan dalam Catatan 17.

4. Kas dan Bank

	2024 Rp	2023 Rp
Kas	60	60
Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	31.515	59.327
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	32	43
Jumlah	**31.607**	**59.430**

5. Dana Dibatasi Penggunaannya

	2024 Rp	2023 Rp
Dana Dibatasi Penggunaannya - Bagian Lancar		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	7.777	6.747
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	262	863
Sub Jumlah	8.039	7.610
Dana Dibatasi Penggunaannya - Bagian Tidak Lancar		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	4.227	17.286
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	34	34
Sub Jumlah	4.261	17.320
Jumlah	**12.300**	**24.930**

Sehubungan dengan perjanjian kredit sindikasi (Catatan 13), Perusahaan membuka rekening cadangan pembayaran utang seperti yang disyaratkan dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut.

6. Piutang Usaha dan Lain-lain

	2024 Rp	2023 Rp
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	108	107
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	106	88
Sub Jumlah	214	195
Piutang Lain-lain		
Pihak Ketiga:		
PT Nusantara Sarana Telekomunikasi	222	565
Lainnya	302	468
Sub Jumlah	524	1.033
Jumlah	**738**	**1.228**

7. Biaya Dibayar di Muka

	2024 Rp	2023 Rp
Asuransi	--	312
Lain-lain	77	60
Jumlah	**77**	**372**

8. Aset Tetap - Neto

	2024			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan:				
Kepemilikan Langsung				
Peralatan Operasi dan Kantor	889	--	--	889
Kendaraan	3.374	--	--	3.374
Sarana Informasi Jalan Tol	1.774	--	--	1.774
Aset Hak Guna				
Gedung Kantor	1.008	--	--	1.008
Jumlah	**7.045**	**--**	**--**	**7.045**
Akumulasi Penyusutan:				
Kepemilikan Langsung				
Peralatan Operasi dan Kantor	888	1	--	889
Kendaraan	3.374	--	--	3.374
Sarana Informasi Jalan Tol	1.619	108	--	1.727
Aset Hak Guna				
Gedung Kantor	504	504	--	1.008
Jumlah	**6.385**	**613**	**--**	**6.998**
Nilai Tercatat	**660**			**47**

	2023			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan:				
Kepemilikan Langsung				
Peralatan Operasi dan Kantor	889	--	--	889
Kendaraan	3.374	--	--	3.374
Sarana Informasi Jalan Tol	1.774	--	--	1.774
Aset Hak Guna				
Gedung Kantor	--	1.008	--	1.008
Kendaraan	802	--	802	--
Jumlah	**6.839**	**1.008**	**802**	**7.045**
Akumulasi Penyusutan:				
Kepemilikan Langsung				
Peralatan Operasi dan Kantor	840	48	--	888
Kendaraan	3.374	--	--	3.374
Sarana Informasi Jalan Tol	1.488	131	--	1.619
Aset Hak Guna				
Gedung Kantor	--	504	--	504
Kendaraan	809	--	809	--
Jumlah	**6.511**	**683**	**809**	**6.385**
Nilai Tercatat	**328**			**660**

Penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dibebankan pada Beban Umum dan Administrasi masing-masing sebesar Rp613 dan Rp683 (Catatan 23).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

9. Hak Pengusahaan Jalan Tol - Neto

Aset Hak Pengusahaan Jalan Tol merupakan hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol yang diberikan kepada Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan				
Jalan dan Jembatan	1.806.549	--	--	1.806.549
Plaza Tol	69.835	--	23.079	92.914
Penerangan Jalan Umum	127.932	--	6.647	134.579
Peralatan Jalan Tol	38.854	--	2.124	40.978
Sub Jumlah	2.043.170	--	31.850	2.075.020
Aset Dalam Konstruksi	6.684	26.865	(31.850)	1.699
Jumlah	**2.049.854**	**26.865**	**--**	**2.076.719**
Akumulasi Amortisasi				
Jalan dan Jembatan	138.801	16.077	--	154.878
Plaza Tol	10.134	2.135	--	12.269
Penerangan Jalan Umum	30.188	11.441	--	41.629
Peralatan Jalan Tol	16.927	2.561	--	19.488
Jumlah	**196.050**	**32.214**	**--**	**228.264**
Nilai Tercatat	**1.853.804**			**1.848.455**

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan				
Jalan dan Jembatan	1.806.549	--	--	1.806.549
Plaza Tol	69.835	--	--	69.835
Penerangan Jalan Umum	109.896	--	18.036	127.932
Peralatan Jalan Tol	37.155	--	1.699	38.854
Sub Jumlah	2.023.435	--	19.735	2.043.170
Aset Dalam Konstruksi	202	26.217	(19.735)	6.684
Jumlah	**2.023.637**	**26.217**	**--**	**2.049.854**
Akumulasi Amortisasi				
Jalan dan Jembatan	124.804	13.997	--	138.801
Plaza Tol	8.174	1.960	--	10.134
Penerangan Jalan Umum	20.964	9.224	--	30.188
Peralatan Jalan Tol	14.064	2.863	--	16.927
Jumlah	**168.006**	**28.044**	**--**	**196.050**
Nilai Tercatat	**1.855.631**			**1.853.804**

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp32.214 dan Rp28.044 dan dibebankan sebagai bagian dari beban tol (Catatan 22).

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mengasuransikan aset konsesi atas Hak Pengusahaan Jalan Tol terkait pengoperasian jalan tol terhadap risiko kehilangan pendapatan, tidak dapat digunakan, kerusakan dan termasuk yang diakibatkan oleh huru-hara, sabotase, terorisme dan keadaan kahar (*force majeure*) serta risiko lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Pihak Kreditur kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp1.993.895. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungannya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai Hak Pengusahaan Jalan Tol.

10. Utang Usaha

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 26)	15.565	22.307
Pihak Ketiga:		
PT Pelindo Jaya Sejahtera	81	--
PT IAPMO Group Indonesia	79	--
CV Artcore	--	1.559
CV Rama Jaya Konstruksi	--	1.370
Sub Jumlah	160	2.929
Jumlah	**15.725**	**25.236**

11. Utang Lain-lain

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 26)	5.299	5.299

Berdasarkan surat keterangan No. 44/NOT/II/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., utang lain-lain tentang pihak berelasi merupakan utang biaya pra operasi dari para pemegang saham sebesar Rp5.617 dikurangi piutang setoran modal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp318. Utang biaya pra operasi ini tidak memiliki jatuh tempo, tanpa bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan.

12. Beban Akrual

	2024 Rp	2023 Rp
Beban Akrual - Jangka Pendek		
Pihak Berelasi (Catatan 26)		
Beban Bunga Pinjaman Bank	867	14.297
Pelayanan Jalan Tol	306	3.921
Peralatan Tol	--	1.699
Sub Jumlah	1.173	19.917
Pihak Ketiga:		
Insentif Kerja	2.113	2.349
Beban Pekerjaan Bangunan Gedung Kantor	1.236	8.701
Pemeliharaan dan Keamanan	216	832
Beban Umum dan Administrasi	543	1.754
Jasa Profesional	180	125
Biaya Bunga	120	160
Beban Bunga Pinjaman Bank	60	80
Lainnya	859	962
Sub Jumlah	5.327	14.963
Jumlah	**6.500**	**34.880**
Beban Akrual - Jangka Panjang		
Pihak Berelasi (Catatan 26)		
Beban Bunga Pemegang Saham	203.117	127.861
Jumlah	**209.617**	**162.741**

Beban akrual jangka panjang terkait dengan perjanjian Pinjaman No. 006.00/PKS-JBT/X/2018 tanggal 1 Januari 2018, Pembayaran Beban Bunga Pemegang saham ditangguhkan sampai dengan Kredit Sindikasi telah dilunasi oleh Perusahaan.

Jangka waktu pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi adalah maksimum 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal penandatangan. Hal ini tercantum pada Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012.

13. Utang Bank

	2024 Rp	2023 Rp
Kredit Sindikasi Investasi		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	475.205	604.661
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	66.033	84.022
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	33.016	42.011
Sub Jumlah	574.254	730.694
Utang Bunga *Interest During Construction*		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	33.434	42.697
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	4.646	5.933
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	2.323	2.967
Sub Jumlah	40.403	51.597
Jumlah	614.657	782.291
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(391)	(679)
Total Utang Bank Kredit Investasi	614.266	781.612
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(205.673)	(167.981)
Utang Bank Bagian Jangka Panjang	**408.593**	**613.631**

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 sebesar Rp1.739.300 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk pembiayaan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Adendum V Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 3 September 2020 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Tujuan penggunaan kredit untuk membiayai pengadaan tanah dan konstruksi jalan tol serta membiayai 70% liabilitas pembayaran bunga dalam periode konstruksi. Suku bunga tetap *(fixed rate)* selama satu tahun sebesar 10% per tahun yang dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Setelah pengenaan *fixed rate* selama 1 (satu) tahun, maka Perusahaan wajib membayar Bunga dengan suku bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 5% per tahun. Maksimum kredit sebesar Rp1.622.000 termasuk *Interest During Construction* sebesar Rp117.300.

Jangka waktu kredit berdasarkan perjanjian kredit ini adalah maksimum 15 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini termasuk masa tenggang dengan jaminan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.484.780.

Angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh Perusahaan masing-masing sebesar Rp167.633 dan Rp149.008 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42.889	38.124
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	42.889	38.124
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	42.889	38.124
PT Bank Central Asia Tbk	19.276	17.134
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.052	8.935
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	9.638	8.567
Jumlah	**167.633**	**149.008**

Kredit dari fasilitas ini dikenai suku bunga per tahun sebesar *reference rate* ditambah 4.25% pada masa konstruksi dan *reference rate* ditambah 4% pada masa operasi dengan suku bunga fasilitas kredit adalah 6,81% - 7,13%.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan harus membuka rekening penampungan yang dananya dibatasi penggunaannya pada bank-bank *Joint Mandated Lead Arranger* (JMLA), yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia (Catatan 5).

Berdasarkan perjanjian, persyaratan tertentu mewajibkan Perusahaan untuk, antara lain, menyalurkan pendapatan tol dan pendapatan usaha lain ke rekening pengumpulan, menjaga *financial covenant* atau mempunyai kondisi keuangan yang baik yang tercermin di dalam laporan keuangan Perusahaan seperti: (i) maksimal *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 70:30; dan (ii) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)> 1x (lebih besar dari satu kali) selama masa pengoperasian serta tidak memperbolehkan untuk, antara lain, mengubah komposisi kepemilikan saham Perusahaan, mengubah bentuk, status hukum dan lingkup kegiatan usaha perusahaan, memperoleh kredit atau fasilitas baru dalam bentuk pinjaman dari pihak lain kecuali dari para pemegang saham Perusahaan, melakukan perubahan PPJT, mengalihkan serta menjaminkan sebagian atau semua aset, konsolidasi atau penggabungan usaha dengan perusahaan lain, membagikan dividen dan melakukan pembayaran utang kepada para pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan keuangan yang diatur dalam perjanjian kredit.

14. Utang Pemegang Saham

	2024 Rp	2023 Rp
Utang kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk:		
Jangka Pendek (Catatan 26)	--	629.000
Jangka Panjang (Catatan 26)	747.750	--
Jumlah	**747.750**	**629.000**

Pada tanggal 4 Maret 2022, Perusahaan dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menandatangani perjanjian pinjaman Adendum V No. 006.00/PKS-JBT/X/2018 untuk memenuhi kebutuhan arus kas Perusahaan dalam hal pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sindikasi serta untuk pembiayaan *capital expenditure*. Batas maksimum pinjaman adalah sebesar Rp480.000 dengan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Kredit Sindikasi Investasi dilunasi oleh Perusahaan (termasuk apabila dilunasi dengan cara *refinancing* oleh Pihak Ketiga lainnya), yang mana terlebih dahulu terjadi.

Pembayaran Bunga atas Utang Pemegang Saham ditangguhkan sampai dengan Kredit Sindikasi lunas yaitu tahun 2027. Perusahaan wajib membayar bunga kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sesuai dengan suku bunga pinjaman kredit sindikasi ditambah margin 2% per tahun yaitu 8,33% - 11,81%.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menandatangani perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 002.00/PKS/JBT-JM/I/2023 dengan maksimum pinjaman sebesar Rp949.045. Besaran suku bunga atas fasilitas pinjaman ini adalah 9% per tahun yang dikenakan secara majemuk dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2035. Masa penarikan fasilitas pinjaman Pemegang Saham sampai dengan 31 Maret 2024.

Masa penarikan tersebut telah di Addendum hingga 31 Maret 2025 melalui perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Addendum II No. 002.00/PKS/JBT-JM/I/2023 yang ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pelunasan dipercepat perjanjian kredit sindikasi belum terlaksana, namun Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp118.750 yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sindikasi periode berjalan. Perusahaan juga telah mendapatkan persetujuan untuk mengubah besaran suku bunga pinjaman menjadi sebesar kredit investasi ditambah margin 2% per tahun yang dikenakan secara majemuk.

15. Provisi Pelapisan Jalan Tol

Mutasi provisi pelapisan jalan tol sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal	19.276	33.644
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 22)	5.456	5.485
Realisasi Tahun Berjalan	(12.000)	(19.853)
Saldo Akhir	**12.732**	**19.276**

16. Perpajakan

a. Utang Pajak

	2024 Rp	2023 Rp
Pajak Bumi dan Bangunan	1.005	1.981
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 ayat 2	403	10
Pasal 23	145	102
Pasal 21	--	520
Pajak Pertambahan Nilai	11	9
Jumlah	**1.564**	**2.622**

b. Manfaat (Beban) Pajak

	2024 Rp	2023 Rp
Pajak Tangguhan	29,184	(17,527)

c. Rekonsiliasi rugi sebelum pajak menurut laporan laba-rugi dan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Rugi Sebelum Pajak	(29.821)	(56.486)
Beda Waktu		
Pelapisan Ulang Jalan Tol	5.456	5.485
Imbalan Kerja dan Lainnya	1.070	(5)
Amortisasi Aset Takberwujud		
Hak Pengusahaan Jalan Tol	(3.697)	(79.668)
Beban Penyusutan Aset Tetap	110	303
Beban Pencadangan Biaya	472	(213)
Sub Jumlah	**3.411**	**(74.098)**
Beda Tetap		
Biaya Natura	--	302
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21	1.091	1.395
Biaya Representasi dan Sumbangan	404	415
Pendapatan Jasa Giro dan Deposito		
yang Telah Dikenakan Pajak Final	(863)	(956)
Pendapatan Sewa Lahan	(1.328)	(1.485)
Sub Jumlah	**(696)**	**(329)**
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	**(27.106)**	**(130.913)**
Akumulasi Rugi Fiskal		
2023	(130.913)	--
2022	(156.059)	(156.059)
2021	(201.136)	(201.136)
2020	(197.743)	(197.743)
2019	(131.309)	(131.309)
Akumulasi Rugi Fiskal Tahun Berjalan	**(844.266)**	**(817.160)**

Perusahaan menyatakan bahwa rugi fiskal hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

d. Rekonsiliasi antara beban pajak yang tercermin di dalam laporan laba rugi berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada laba sebelum pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Rugi Sebelum Pajak	(29.821)	(56.486)
Tafsiran Pajak Penghasilan dengan Tarif Pajak		
yang Berlaku Sebesar 22%	6.561	12.427
Efek Pajak pada Beda Tetap	153	72
Perbedaan Temporer dan Rugi Pajak		
yang Tidak Diakui Sebagai		
Aset Pajak Tangguhan yang Tidak Diakui	(1.564)	(1.225)
Penyesuaian Manfaat Fiskal	29.997	--
Rugi Fiskal Tidak Dimanfaatkan	(5.963)	(28.801)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	**29.184**	**(17.527)**

e. Pajak Tangguhan

Perusahaan menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (“SPT”). Otoritas pajak dapat meninjau liabilitas pajak Perusahaan dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023 (PMK-72) tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud telah berlaku pada 13 Juli 2023. Perusahaan telah memutuskan untuk mengubah masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Perusahaan atas HPJT jalan dan jembatan pada bulan April 2024. Keputusan ini menyebabkan penurunan beda temporer akibat penurunan dasar pengenaan pajak HPJT jalan dan jembatan, sekaligus memperbesar kemungkinan penggunaan akumulasi rugi fiskal di tahun-tahun mendatang.

Sebagai akibatnya Perusahaan mencatat penghasilan pajak tangguhan neto sebesar Rp29.184. Jumlah tersebut berasal dari penyajian liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp142.065 akibat penurunan beda temporer dan dari pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari estimasi akumulasi rugi fiskal yang dapat dimanfaatkan di tahun-tahun mendatang, lebih lanjut dijelaskan pada tabel berikut ini:

	2024					
	Saldo Awal Rp	Dibebankan ke laba rugi Rp	Penyesuaian PMK tahun 2022 dan 2023 Rp	Penghasilan komprehensif lain Rp	Penyesuaian Saldo Awal Rp	Saldo Akhir Rp
Aset (liabilitas) Pajak Tangguhan						
Amortisasi Aset Takberwujud	(171,249)	(813)	33,807	--	(3,810)	(142,065)
Pelapisan Ulang Jalan Tol	1,207	(6)	--	--	--	1,200
Imbalan Kerja	286	317	--	(94)	--	509
Beban Penyusutan Aset Tetap	145	135	--	--	--	280
Beban Pencadangan Biaya	(47)	57	--	--	--	10
Aset Pajak Tangguhan Bersih	(169,658)	(310)	33,807	(94)	(3,810)	(140,065)
Aset Pajak Tangguhan Yang Tidak Diakui	(1,591)	(503)	--	--	--	(2,000)
Liabilitas Pajak Tangguhan - neto	**(171,249)**	**(813)**	**33,807**	**(94)**	**(3,810)**	**(142,065)**

	2023			
	Saldo Awal Rp	Dibebankan ke laba rugi Rp	Penghasilan komprehensif lain Rp	Saldo Akhir Rp
Aset (liabilitas) Pajak tangguhan				
Amortisasi Aset Takberwujud	(153.722)	(17.527)	--	(171.249)
Pelapisan Ulang Jalan Tol	1.087	(434)	--	654
Imbalan Kerja	531	(245)	(50)	237
Beban Penyusutan Aset Tetap	72	73	--	145
Beban Pencadangan Biaya	481	(434)	--	47
Aset Pajak Tangguhan Bersih	(151.551)	(18.566)	(50)	(170.166)
Aset Pajak Tangguhan Yang Tidak Diakui	(2.171)	1.039	50	(1.083)
Liabilitas Pajak tangguhan - neto	**(153.722)**	**(17.527)**	**--**	**(171.249)**

17. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan membukukan liabilitas program imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang No.11/2020 dan PP No. 35/2021. Sesuai dengan PSAK 24, liabilitas imbalan pasca kerja karyawan diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, dengan laporan 24048/JMBT/AP/01/2025 dan No. 23026/JMBT/AP/01/2024 masing-masing bertanggal 16 Januari 2025 dan 12 Januari 2024.

Asumsi aktuaria utama yang digunakan oleh aktuaris Perusahaan untuk menghitung imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	56 Tahun
Usia Pensiun Pengumpul Tol, Petugas Layanan Jalan dan *Rescue*	35 Tahun	35 Tahun
Tingkat Diskonto	7%	6,8%
Tingkat Kenaikan Gaji	7,5%	7,5%
Tingkat Kematian Tahunan	Tabel Mortaliti Indonesia 2019 (TMI IV)	
Tingkat Cacat	10% dari TMI IV	
Tingkat Perputaran Pekerja	6% (usia 20-29 Tahun) 3% (usia 30-34 Tahun) 1,8% (usia 35-39 Tahun) 1,2% (usia 40-50 Tahun) 0,6% (usia 51-52 Tahun) 0% (usia >52 Tahun)	

Nilai yang tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari imbalan kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Nilai Kini Liabilitas	9.200	7.896
Mutasi Nilai Wajar Aset Program	(3.664)	(3.430)
Liabilitas Yang Diakui Dalam Laporan Posisi Keuangan	**5.536**	**4.466**

Nilai wajar aset program imbalan kerja merupakan pencadangan uang pensiun karyawan yang disimpan di pihak ketiga yaitu pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (“DPLK BNI”).

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal Tahun	4.466	4.471
Pembayaran Imbalan Kerja Tahun Berjalan	(1.245)	(1.081)
Beban Imbalan Kerja (Catatan 23)	2.744	1.302
Pengukuran Kembali Dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(429)	(226)
Saldo Akhir Tahun	**5.536**	**4.466**

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:

	2024 Rp	2023 Rp
Beban Jasa Kini	1.333	1.160
Beban Pesangon	825	333
Beban Bunga	285	285
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	311	(476)
Penyesuaian Perubahan Metode Atribusi Imbalan	(10)	--
Jumlah	**2.744**	**1.302**

Mutasi keuntungan aktuaria yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Awal Tahun	80	306
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial	(479)	(27)
Imbal Hasil atas Aset Program	50	(199)
Saldo Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Akhir Tahun	**(349)**	**80**

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan. Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Asumsi tingkat diskonto		
+ 1,00%	6.413	5.832
- 1,00%	7.457	6.729
Asumsi tingkat kenaikan gaji		
+ 1,00%	7.449	6.721
- 1,00%	6.411	5.831

Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja karyawan telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

18. Modal Saham

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan %	Saldo Rp
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	609.193	64,44	609.193
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	131.048	13,86	131.048
Pemerintah Provinsi Bali	59.707	6,32	59.707
Pemerintah Kabupaten Badung	59.707	6,32	59.707
PT Angkasa Pura I (Persero)	59.635	6,31	59.635
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.454	0,79	7.454
PT Hutama Karya (Persero)	7.454	0,79	7.454
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	7.454	0,79	7.454
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.782	0,38	3.782
Total	**945.434**	**100,00**	**945.434**

19. Tambahan Modal Disetor

	2024 Rp	2023 Rp
Agio Saham	76.309	76.309
Tambahan Modal Disetor Lainnya	35.793	35.793
Jumlah	**112.102**	**112.102**

Agio Saham
Agio saham merupakan selisih setoran pemegang saham (Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung) di atas nilai nominal saham.

Tambahan Modal Disetor Lainnya
Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 11 Desember 2013 oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., terdapat kelebihan setoran modal di atas modal dasar atau modal ditempatkan oleh para pemegang saham sebesar Rp35.792. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut maka kelebihan setoran modal pemegang saham tersebut disajikan sebagai tambahan modal disetor lainnya, yang terinci sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	18.040	18.040
PT Angkasa Pura I (Persero)	14.908	14.908
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.552	2.552
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	146	146
PT Hutama Karya (Persero)	146	146
Lainnya (dibawah Rp1)	1	1
Jumlah	**35.793**	**35.793**

20. Pendapatan Tol

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, total pendapatan tol masing-masing sebesar Rp194.479 dan Rp145.784.

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 769/KPTS/M/2024 tanggal 2 April 2024 untuk ruas Jalan Tol Bali Mandara (Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa) efektif mulai tanggal 27 April 2024 mengalami penyesuaian tarif tol menjadi:

Asal dan Tujuan Perjalanan	Golongan I	Golongan II dan III	Golongan IV dan V	Golongan VI
Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa	14.000	21.000	28.000	5.500
Benoa - Ngurah Rai - Nusa Dua	14.000	21.000	28.000	5.500

21. Pendapatan Lainnya

Rincian pendapatan lainnya adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan Pemanfaatan Infrastruktur Tol	1.328	1.471
Ganti Rugi Kerusakan Aset	19	14
Jumlah	**1.347**	**1.485**

22. Beban Tol

Rincian beban tol adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Gaji, Insentif dan Tunjangan	4.683	4.495
Beban Pengumpulan Jalan Tol		
Jasa Pengoperasian JMTO (Catatan 26)	12.760	11.296
Beban Pengumpulan Tol Lainnya	--	159
Sub Jumlah	12.760	11.455
Beban Pelayanan Pemakaian Jalan Tol		
Bahan Bakar, Listrik dan Air	1.840	2.555
Beban Pemeliharaan	536	478
Beban Penyuluhan Masyarakat	326	212
Sewa Kendaraan Patroli	107	122
Sub Jumlah	2.809	3.367
Beban Pemeliharaan Jalan Tol		
Amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol (Catatan 9)	32.214	28.044
Jasa Pemeliharaan JMTM (Catatan 26)	6.595	2.884
Provisi Pelapisan Jalan Tol (Catatan 15)	5.456	5.485
Beban Pemeliharaan	2.730	1.771
Beban Konsultan Teknik	2.427	3.262
Pajak Bumi dan Bangunan	1.709	1.981
Beban Asuransi Jalan dan Jembatan Tol	1.301	1.306
Sub Jumlah	52.432	44.733
Jumlah	**72.684**	**64.050**

23. Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Gaji dan tunjangan	13.267	13.233
Imbalan Kerja (Catatan 17)	2.744	1.302
Bahan Bakar, Listrik, Air dan Telepon	2.129	1.273
Beban Rapat Kerja dan Rapat Dinas	1.625	1.400
Perjalanan Dinas dalam Negeri	1.000	802
Konsultan	918	1.026
Sewa	950	862
Beban Alat Tulis Kantor	836	583
Penyusutan (Catatan 8)	613	683
Biaya Pembelian dan Pemeliharaan	307	262
Representatif	254	272
Lainnya (Masing-masing dibawah Rp100)	336	268
Jumlah	**24.979**	**21.966**

Manajemen berpendapat bahwa saldo beban umum dan administrasi telah mendapatkan otorisasi dan digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan.

24. Beban Keuangan

Akun ini merupakan bunga pinjaman bank dan pemegang saham pada tahun dengan rincian sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Bunga Kredit Investasi		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	118.739	106.425
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	6.002	6.953
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	3.001	3.476
Sub Jumlah	127.742	116.854
Escrow		
Pihak Berelasi (Catatan 26)	444	1.110
Jumlah	**128.186**	**117.964**

25. Penghasilan (Beban) Keuangan

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 26):		
Jasa Giro	1.019	1.182
Beban Pajak atas Penghasilan Keuangan	(204)	(236)
Pihak Ketiga:		
Jasa Giro	59	13
Beban Pajak atas Penghasilan Keuangan	(11)	(3)
Jumlah	**863**	**956**

26. Saldo dan Sifat Transaksi Pihak yang Berelasi

Sifat hubungan dan rincian transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Relasi	Transaksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas Induk	Piutang lain-lain, Setoran Modal, dan utang pemegang saham
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pemegang Saham	Utang pemegang saham, dan Utang lain-lain
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pemegang Saham	Utang lain-lain
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Pemegang Saham	Utang lain-lain
PT Jasamarga Tollroad Operator	Entitas Sepengendali	Utang usaha
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	Entitas Sepengendali	Utang usaha
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan Giro, Dana Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan, Bank untuk Pengumpulan Tol
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan Giro, Dana Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan, Bank untuk Pengumpulan Tol
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan Giro, Dana Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan, Bank untuk Pengumpulan Tol
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan Giro, Biaya Keuangan, Fasilitas Kredit Sindikasi

Rincian dari akun dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan penjelasan atas hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Aset/Liabilitas	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Aset/Liabilitas
Kas dan Bank (Catatan 4)				
Bank				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.514	0,02	59.319	0,03
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	0,01	8	0,01
Jumlah Kas dan Bank	**31.515**	**0,03**	**59.327**	**0,04**
Dana Dibatasi Penggunaannya (Catatan 5)				
Bagian Lancar				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.939	0,01	3.545	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.508	0,01	2.833	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	330	0,01	369	0,01
Sub Jumlah	7.777	0,03	6.747	0,03
Bagian Tidak Lancar				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Cadangan Pembayaran Utang	4.159	0,01	17.221	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Cadangan Pembayaran Utang	31	0,01	31	0,01
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Cadangan Pembayaran Utang	37	0,01	34	0,01
Sub Jumlah	4.227	0,03	17.286	0,03
Jumlah	**12.004**	**0,06**	**24.033**	**0,06**
Piutang Usaha (Catatan 6)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34	0,01	18	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51	0,01	54	0,01
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23	0,01	35	0,01
Jumlah	**108**	**0,03**	**107**	**0,03**

	2024		2023	
	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Aset/Liabilitas	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Aset/Liabilitas
Utang Usaha (Catatan 10)				
PT Jasamarga Tollroad Operator	1.377	0,01	209	0,01
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	14.188	0,01	22.098	0,01
Jumlah	**15.565**	**0,02**	**22.307**	**0,02**
Utang Lain-lain (Catatan 11)				
Pemegang saham				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	4.871	0,01	4.871	0,01
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	189	0,01	189	0,01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	126	0,01	126	0,01
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	113	0,01	113	0,01
Jumlah	**5.299**	**0,04**	**5.299**	**0,04**

	2024		2023	
	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Aset/Liabilitas	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Aset/Liabilitas
Beban Akrual (Catatan 12)				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	203.117	0,12	127.861	0,07
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	306	0,01	3.921	0,01
PT Jasamarga Toll Road Operator	--	0,00	1.699	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	268	0,01	357	0,01
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	268	0,01	357	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	268	0,01	13.499	0,01
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	63	0,01	84	0,01
Jumlah	**204.290**	**0,17**	**147.778**	**0,13**
Utang Bank (Catatan 13)				
Kredit Sindikasi Investasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	146.923	0,08	186.948	0,10
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	146.923	0,08	186.948	0,10
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	146.923	0,08	186.948	0,10
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	34.436	0,02	43.817	0,02
Sub Jumlah	**475.205**	**0,27**	**604.661**	**0,34**
Utang Bunga IDC				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.337	0,01	13.201	0,01
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.337	0,01	13.201	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.337	0,01	13.201	0,01
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.423	0,01	3.094	0,01
Sub Jumlah	**33.434**	**0,03**	**42.697**	**0,03**
Jumlah	**508.639**	**0,30**	**647.358**	**0,37**
Utang Pemegang Saham (Catatan 14)				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	**747.750**	**0,43**	**629.000**	**0,35**

	2024		2023	
	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Beban Tol	Jumlah	Persentase (%) dari Jumlah Beban Tol
Beban Tol (Catatan 22)				
PT Jasamarga Tollroad Operator	12.760	0,18	11.296	0,18
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	6.595	0,09	2.884	0,05
Jumlah	**19.355**	**0,27**	**14.180**	**0,22**

	2024		2023	
	Jumlah	Persentase (%) dari Penghasilan/ Biaya Keuangan	Jumlah	Persentase (%) dari Penghasilan/ Biaya Keuangan
Bunga Kredit Investasi (Catatan 24)				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	75.553	0,59	56.388	0,48
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.352	0,10	15.470	0,13
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.352	0,10	15.470	0,13
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.352	0,10	15.470	0,13
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.130	0,02	3.627	0,03
Jumlah	**118.739**	**0,93**	**106.425**	**0,90**
***Escrow* (Catatan 24)**				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	--	0,00	222	0,01
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	222	0,01	666	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	222	0,01	222	0,01
Jumlah	**444**	**0,02**	**1.110**	**0,03**
Penghasilan Keuangan (Catatan 25)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500	0,58	685	0,72
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	416	0,48	415	0,43
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	103	0,12	82	0,09
Jumlah	**1.019**	**1,18**	**1.182**	**1,24**
Beban Pajak atas Penghasilan Keuangan (Catatan 25)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100	0,12	137	0,14
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	83	0,10	83	0,09
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21	0,02	16	0,02
Jumlah	**204**	**0,24**	**236**	**0,25**

Manajemen kunci merupakan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Imbalan yang diberikan masing-masing sebesar Rp3.624 dan Rp3.372 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

27. Perjanjian, Perikatan Penting Dan Kontinjensi

a. Perjanjian Konsesi Jasa

Perusahaan telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 375/KPTS/2013 tanggal 18 September 2013, dimana Hak Konsesi diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan atas Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa selama 45 Tahun, terhitung mulai oktober 2013.

Setelah berakhirnya hak konsesi, Jalan Tol akan diserahkan kepada Pemerintah/Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa adanya kewajiban Pemerintah untuk membayar senilai uang atau dalam bentuk apapun kepada Perusahaan. Hal tersebut dipertegas dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Perusahaan dengan Departemen Pekerjaan Umum.

b. Perjanjian Bagi Hasil Sewa Lahan

1. Perusahaan dan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Sewa Lahan Jalan Tol ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa. Perjanjian ini dinyatakan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 008/NST-JBT/SPK/VI/2013 pada tanggal 24 Juni 2013. PT Nusantara Sarana Telekomunikasi berkewajiban memelihara infrastruktur telekomunikasi di sepanjang ruas Jalan Tol. Perusahaan memperoleh bagian sebesar 40% sedangkan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi memperoleh bagian sebesar 60% dari keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan sewa bulanan di tiang dikurangi dengan biaya langsung, yang terdiri dari biaya pemeliharaan dan biaya penggunaan listrik. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun, yaitu hingga tanggal 24 Mei 2016, dan telah diperpanjang pada tanggal 24 Mei 2022 hingga tanggal 23 Mei 2027 dengan Perjanjian Kerjasama No. 009/DIR/NST-JBT/SPK/2022.
2. Perusahaan dan PT Telekomunikasi Indonesia telah menandatangani perjanjian Sewa Lahan di sepanjang Jalan Tol Bali Mandra. Perjanjian ini dinyatakan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.010.00/SPK-JBT/X/2013 pada tanggal 9 Juni 2014.Perusahaan sepakat untuk menyewakan lahan di Infrastruktur Tol sepanjang 12,7 km dengan PT Telekomunikasi Indonesia. Jangka waktu kerjasama adalah 5 tahun terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018 dan telah terjadi beberapa perubahan. Perubahan terakhir pada tanggal 10 April 2023 melalui Perjanjian Kerjasama No. 006.00/PKS/JBT-TELKOM/IV/2023, dengan masa kontrak hingga tanggal 23 Januari 2027.

c. Perjanjian Penerapan Sistem Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)

Pada tanggal 19 Desember 2018 Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama terkait sistem pembayaran menggunakan uang elektronik di Jalan Tol Bali Mandara No. 011.00/PKS-JBT-XII/2018 dengan PT Jasamarga Toll Road Operator (JMTO) dan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir pada tanggal 1 November 2021 tertuang pada Addendum II Kontrak system pembayaran menggunakan uang elektronik di Jalan Tol Bali Mandara No. 011.00/PKS-JBT-XII/2018, nilai kontrak sebesar Rp843 dengan jangka waktu sampai dengan Oktober 2024.

d. Penggantian Lahan

Berkaitan dengan penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT Angkasa Pura I dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian lahan untuk PT Angkasara Pura I dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan nilai sebagai berikut:

Nomor	Dimiliki	Area	NJOP (Rp)	Harga Penilaian (Rp)
1.	AP I	3.404 m^2	3.581	29.291
2.	Pelindo Darat	522 m^2	1.228	2.589
	Pelindo Perairan	41.490 m^2	--	--
Total			**4.809**	**31.880**

Pada tanggal 16 Juni 2017, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I No. TN09.02-Db/495, perihal Tanah HPL PT Angkasa Pura I, yang ditembuskan kepada PT Jasamarga Bali Tol dengan pokok surat bahwa lahan HPL milik PT Angkasa Pura I tidak dapat diberikan ganti rugi dan penyelesaian HPL milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada prinsipnya sama dengan penyelesaian lahan HPL milik PT Angkasa Pura I. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan masih menunggu keputusan *final* oleh Bina Marga Kementerian PUPR atas penggantian lahan tersebut.

Pada tanggal 13 Februari 2025 berdasarkan berita acara rapat koordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai penggunaan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik PT Angkasa Pura Indonesia, BPJT menyepakati akan menindaklanjuti surat Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dengan menyampaikan surat penugasan kepada Perusahaan selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Perusahaan akan melakukan koordinasi dengan PT Angkasa Pura Indonesia terkait kesepakatan waktu pembayaran maupun bentuk ganti kerugian.

e. Perjanjian Jasa Pengoperasian Jalan Tol

Pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan Mengadakan Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas pada Ruas Tol Bali Mandara antara Perusahaan dengan PT Jasamarga Toll Road Operator (JMTO) yang tertuang pada surat perjanjian Kontrak No. 007.00/SPP-JBT/XII/2020 dan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir pada tanggal 14 Maret 2024 tertuang pada Addendum VII atas kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol dengan nilai kontrak pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp11.859 dan Rp11.470 nilai kontrak untuk tahun-tahun berikutnya akan di sesuaikan berdasarkan nilai kesepakatan antara Perusahaan dan JMTO setiap tahunnya. Jangka waktu kontrak sampai dengan Desember 2024, perpanjangan atas Perjanjian Jasa Pengoperasian Jalan Tol masih dalam proses Addendum VIII sampai laporan ini diterbitkan.

f. Perjanjian Jasa Pemeliharaan Jalan Tol

Pada tanggal 1 April 2020 Perusahaan menandatangani Kontrak Manajemen Bidang Pemeliharaan Jalan Tol dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) dan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir adalah pada tanggal 5 Januari 2024 tercantum pada addendum VIII atas kontrak Manajemen Bidang Pemeliharaan Jalan Tol No. 003.00/SPP-JBT/IV/2020 dengan nilai kontrak 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp23.596 dan Rp28.104, nilai kontrak untuk tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan berdasarkan nilai kesepakatan antara perusahaan dan JMTM setiap tahunnya. Jangka waktu kontrak sampai dengan Desember 2024, perpanjangan atas Perjanjian Jasa Pemeliharaan Jalan Tol masih dalam proses Addendum IX sampai laporan ini diterbitkan.

g. Kontrak Tahura

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Untuk Pembangunan Strategis dan Pengelolaan Jalan Tol Bali Mandara dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali No. 003.00/PKS/JBT-DisKLH/X/2021 selama 10 tahun sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2030 yang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai seluas ± 4,24 hektar untuk kegiatan strategis transportasi Jalan Tol Bali Mandara;
b. Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai;
c. Rehabilitasi Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai.

Atas pemanfaatan lahan hutan raya tersebut di atas, maka Perusahaan berkewajiban memberikan dana kompensasi sebesar Rp1.696 selama 10 tahun dan dibayarkan setiap tahun dengan dua kali tahap pembayaran yaitu akhir semester satu dan akhir semester dua setiap tahun berjalan. Dalam kontrak ini pun, Perusahaan berkewajiban membayarkan tunggakan dana kompensasi tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp339 yang dibayarkan bertahap mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dengan jadwal pembayarannya sebagai berikut:

1. Tahun Ke-1 Tahun 2021 sebesar Rp169
2. Tahun Ke-2 Tahun 2022 sebesar Rp254 termasuk ½ tunggakan Tahun 2018
3. Tahun Ke-3 Tahun 2023 sebesar Rp254 termasuk ½ tunggakan Tahun 2018
4. Tahun Ke-4 Tahun 2024 sebesar Rp254 termasuk ½ tunggakan Tahun 2019
5. Tahun Ke-5 Tahun 2025 sebesar Rp254 termasuk ½ tunggakan Tahun 2019
6. Tahun Ke-6 Tahun 2026 sebesar Rp169
7. Tahun Ke-7 Tahun 2027 sebesar Rp169
8. Tahun Ke-8 Tahun 2028 sebesar Rp169
9. Tahun Ke-9 Tahun 2029 sebesar Rp169
10. Tahun Ke-10 Tahun 2030 sebesar Rp169

h. Pembangunan Gedung Kantor

Pada tanggal 17 November 2023 Perusahaan menandatangani Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor antara Perusahaan dengan PT. Sanur Jaya Utama yang tertuang pada surat perjanjian Kontrak No. 007/SPP-JBT/XI/2023. Nilai kontrak adalah sebesar Rp16.376 dengan periode kontrak 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Kontrak telah mengalami perubahan addendum pada tanggal 19 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp18.839 dan periode kontrak 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sudah termasuk didalamnya hari libur, hari minggu, hari raya, dan hari hujan akan berakhir setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan *(Provisional Hand Over).*

Pada tanggal 16 Juli 2024 Perusahaan sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara/ *Provisional Hand Over (PHO)* dengan No. 004.00/BA/PHO/GD.JBT/VII/2024. Pada saat laporan ini diterbitkan Perusahaan telah menempati Gedung Kantor untuk melakukan kegiatan usahanya.

28. Instrumen Keuangan Dan Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan Manajemen Risiko

Bisnis Perusahaan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola sistem manajemen risiko.

Perusahaan mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Tujuan Perusahaan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan.
Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak dari instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal.

Selain itu Perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual.

	2024				
	Saldo	Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	Jatuh Tempo antara 1-3 Tahun	Jatuh Tempo antara 3-5 Tahun	Jatuh Tempo Lebih dari 5 Tahun
Utang Usaha	15.725	15.725	--	--	--
Utang Lain-lain	5.299	5.299	--	--	--
Beban Akrual	209.617	6.500	--	--	203.117
Utang Pemegang Saham	747.750	--	--	--	747.750
Utang Bank	614.266	205.673	408.593	--	--
Jumlah Liabilitas Keuangan	**1.592.657**	**233.197**	**408.593**	**--**	**950.867**

	2023				
	Saldo	Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	Jatuh Tempo antara 1-3 Tahun	Jatuh Tempo antara 3-5 Tahun	Jatuh Tempo Lebih dari 5 Tahun
Utang Usaha	25.236	25.236	--	--	--
Utang Lain-lain	5.299	5.299	--	--	--
Beban Akrual	162.741	34.880	--	--	127.861
Utang Pemegang Saham	629.000	629.000	--	--	--
Utang Bank	781.612	167.981	445.997	167.634	--
Jumlah Liabilitas Keuangan	**1.603.888**	**862.396**	**445.997**	**167.634**	**127.861**

c. Risiko Suku Bunga

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko di mana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur terhadap suku bunga Perusahaan terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada tahun 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yaitu utang bank sindikasi investasi dan utang kepada pemegang saham masing-masing sebesar Rp614.266 dan Rp781.612 dengan suku bunga mengambang. Pada 31 Desember 2024, penurunan (kenaikan) 14 poin dasar pada tingkat bunga liabilitas keuangan bunga mengambang, variabel lain dianggap konstan khususnya nilai ekuitas dan laba atau rugi akan menurun (meningkat) sebesar Rp39.852.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Nilai tercatat mendekati nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas pada tanggal pelaporan.

	2024		2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Aset Keuangan Lancar				
Kas dan Bank	31.607	31.607	59.430	59.430
Dana Dibatasi Penggunaannya	8.039	8.039	7.610	7.610
Piutang Usaha dan Lain-lain	738	738	1.228	1.228
Sub Jumlah	40.384	40.384	68.268	68.268
Aset Keuangan Tindak Lancar				
Dana Dibatasi Penggunaannya	4.261	4.261	17.320	17.320
Jumlah Aset Keuangan	**44.645**	**44.645**	**85.588**	**85.588**
Liabilitas Keuangan				
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek				
Utang Bank	205.673	205.673	167.981	167.981
Beban Akrual	6.500	6.500	34.880	34.880
Utang Usaha	15.725	15.725	25.236	25.236
Utang Pemegang Saham	--	--	629.000	629.000
Utang Lain-lain	5.299	5.299	5.299	5.299
Sub Jumlah	233.197	233.197	862.396	862.396
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang				
Utang Bank	408.593	408.593	613.631	613.631
Utang Pemegang Saham	747.750	747.750	--	--
Beban Akrual	203.117	203.117	127.861	127.861
Sub Jumlah	1.359.460	1.359.460	741.492	741.492
Jumlah Liabilitas Keuangan	**1.592.657**	**1.592.657**	**1.603.888**	**1.603.888**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar. Nilai tercatat piutang usaha dan utang usaha dianggap mendekati nilai wajarnya.

Manajemen Permodalan

Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham.

Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: Liabilitas neto dibagi modal yang disesuaikan. Liabilitas neto merupakan total liabilitas (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (meliputi modal saham dan saldo laba).

Rasio liabilitas terhadap total ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Jumlah Liabilitas	1.740.070	1.801.735
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	(31.607)	(59.430)
Liabilitas Bersih	1.708.463	1.742.305
Jumlah Ekuitas	153.077	138.689
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	**1100%**	**1256%**

29. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan, yang mengasumsikan bahwa aset akan terealisasi dan liabilitas akan terselesaikan dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan telah melaporkan akumulasi rugi sebesar Rp919.404 pada tanggal 31 Desember 2024 dan liabilitas jangka pendek melebihi aset lancarnya sebesar Rp194.489 pada tanggal tersebut.

Manajemen menegaskan komitmennya bahwa Perusahaan dalam memastikan kelangsungan usahanya akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendanaan yang dilakukan sampai dengan kewajiban utang bank lunas di tahun 2027 adalah setoran modal dan pinjaman pemegang saham;
2. Melakukan efisiensi biaya operasional dalam dan mengoptimalkan penggunaan aset yang ada untuk memperoleh pendapatan lainnya;
3. Komitmen dari pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan operasional Perusahaan.

Berdasarkan hal diatas Manajemen berkeyakinan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan ini telah tepat.

30. Standar Baru dan Amendemen Atas Standar Yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221 tentang “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran”.
- PSAK 117 tentang “Kontrak Asuransi”; dan Amendemen PSAK 117 tentang “Kontrak Asuransi – Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Instrumen Keuangan”.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

31. Transaksi Non Kas dan Perubahan Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Berikut adalah tabel Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi non kas dan pendanaan yang belum dibayar dan non kas adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp	Rp
Penambahan Hak Pengusahaan Jalan Tol	1.199	23.562

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

	2024			
	Saldo Awal	**Arus Kas**	**Non Kas**	**Saldo Akhir**
Utang Bank	781.612	(167.633)	287	614.266
Utang Pemegang Saham	629.000	118.750	--	747.750
Total Liabilitas Keuangan	**1.410.612**	**(48.883)**	**287**	**1.362.016**

	2023			
	Saldo Awal	**Arus Kas**	**Non Kas**	**Saldo Akhir**
Utang Bank	930.273	(149.008)	347	781.612
Utang Pemegang Saham	480.000	149.000	--	629.000
Total Liabilitas Keuangan	**1.410.273**	**(8)**	**347**	**1.410.612**

32. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2025.